

BUKU I



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**RKPD
2025**

**BAPELITBANGDA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322)
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun ke-4 (empat) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai berikut:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2025; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2025 yakni untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2025.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2025 kepada Kepala Badan; dan
- b. Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2025, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025.

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2025 oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Kepala Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;
- g. Kepala Badan menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025, serta RKPD Tahun 2025; dan
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD, periode pelaksanaan pada tahun ke-5 (lima).

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEMATIKA RKPD

Pasal 8

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran umum kondisi daerah;
- c. bab III : kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- d. bab IV : prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. bab VII : penutup; dan
- h. lampiran.

Pasal 9

Dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Juli 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BAHRI SULTAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 13

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xx
BAB. I. PENDAHULUAN.	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.	5
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	12
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	15
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.	15
BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.	17
2.1 Kondisi Umum Daerah.	17
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.	17
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.	42
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.	68
2.1.4. Aspek Daya Saing	269
2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah.	299
2.2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.	304
2.2.2 Capaian Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.	318
2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	367
2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	374
2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	377
2.3 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah	396
2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	396
2.3.2 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	396
2.3.3 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	407
2.3.4 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2023	408
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.	424

2.4.1	Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	425
2.4.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	434
2.5	ISU STRATEGIS	451
2.5.1	Isu Nasional.....	457
2.5.2	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan	462
2.5.3	Isu Strategis Kabupaten Luwu Timur	463
BAB. III.	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.	474
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.	474
3.1.1	Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah	475
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	493
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	494
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	498
3.3.3	Arah Kebijakan Pembiayaan	499
BAB. IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.	500
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	501
4.1.1.	Tujuan Pembangunan.....	501
4.1.2.	Sasaran Pembangunan.....	502
4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.	506
4.2.1.	Tema pembangunan RKPD Tahun 2025	506
4.2.2.	Prioritas pembangunan Tahun 2025	506
BAB. V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	571
5.1.	Kerangka Pendanaan.	571
5.1.1	Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah	571
5.1.2.	Kerangka Pendanaan Tahun 2025	573
5.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	578
BAB. VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.	580
6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	586
6.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	587
6.3.	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	607
6.4	Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)	611
BAB. VII.	PENUTUP.	632

7.1 Kaidah Pelaksanaan.	-----632
7.2 Kesimpulan.	-----634

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan -----	18
Tabel 2.2	Curah Hujan, Hari hujan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ----	26
Tabel 2.3	Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur-----	28
Tabel 2.4	Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur-----	29
Tabel 2.5	Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur -----	30
Tabel 2.6	Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur -----	31
Tabel 2.7	Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur -----	33
Tabel 2.8	Data Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Timur -----	36
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	38
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 – 2023 -----	39
Tabel 2.11	Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2023 -----	39
Tabel 2.12	Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 -----	40
Tabel 2.13	Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	41
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur 2023-----	42
Tabel 2.15	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 - 2023-----	43
Tabel 2.16	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Capaian Wilayah Regional Luwu Raya Tahun 2019 - 2023 -----	43
Tabel 2.17	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019 s.d 2023 -	44
Tabel 2.18	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) -----	46
Tabel 2.19	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah) -----	47
Tabel 2.20	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) -----	50
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (Persen)-----	50
Tabel 2.22	PDRB Perkapita dan PDRB Perkapita (ADHB) Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional -----	51

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.23	Perbandingan PDRB Perkapita Kab. Luwu Timur dengan Kab. Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo -----	52
Tabel 2.24	Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Luwu Raya 2019-2023 -----	54
Tabel 2.25	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),-----	54
Tabel 2.26	Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	58
Tabel 2.27	Perbandingan Indeks Gini Luwu Timur dengan Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023 -----	59
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Capaian Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023 -----	60
Tabel 2.29	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional -----	61
Tabel 2.30	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Capaian Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023 -----	62
Tabel 2.31	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2019-2023-----	63
Tabel 2.32	Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023	64
Tabel 2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	64
Tabel 2.34	Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 -----	65
Tabel 2.35	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	66
Tabel 2.36	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023	66
Tabel 2.37	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 21 Unit Kerja Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 --	67
Tabel 2.38	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini -----	69
Tabel 2.39	Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Kecamatan --	69
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Kasar Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	70
Tabel 2.41	Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023 -	71
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A -----	72
Tabel 2.43	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B-----	72
Tabel 2.44	Angka Partisipasi Murni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	74
Tabel 2.45	Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A-----	74
Tabel 2.46	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B -----	75

Tabel 2.47	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	76
Tabel 2.48	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2023-----	77
Tabel 2.49	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs -----	77
Tabel 2.50	Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	78
Tabel 2. 51	Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur -----	78
Tabel 2.52	Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	79
Tabel 2. 53	Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kecamatan -----	79
Tabel 2.54	Angka Kelulusan SMP/MTs Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -	80
Tabel 2. 55	Angka Kelulusan SMP/MTs Menurut Kecamatan -----	80
Tabel 2.56	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs -----	81
Tabel 2. 57	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs -----	82
Tabel 2.58	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	83
Tabel 2. 59	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023-----	83
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	84
Tabel 2. 61	Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023----	84
Tabel 2.62	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar -----	85
Tabel 2.63	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023-	86
Tabel 2.64	Rasio Guru/Murid Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023 --	86
Tabel 2.65	Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 -----	87
Tabel 2.66	Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 -----	88
Tabel 2.67	Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	89
Tabel 2.68	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun-----	89
Tabel 2. 69	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun -----	90
Tabel 2.70	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD) -----	91
Tabel 2.71	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	91
Tabel 2.72	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup-----	92
Tabel 2.73	Angka Kematian Bayi Kabupaten Luwu Timur dalam -----	93
Tabel 2.74	Angka Kelangsungan Hidup Bayi-----	94

Tabel 2.75	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup -----	95
Tabel 2.76	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup -----	95
Tabel 2.77	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup-----	96
Tabel 2.78	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup-----	97
Tabel 2.79	Rasio Posyandu dan Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -	98
Tabel 2.80	Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan -----	98
Tabel 2.81	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Luwu Timur-----	99
Tabel 2.82	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	100
Tabel 2.83	Rasio Rumah Sakit menurut kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023-----	101
Tabel 2.84	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	102
Tabel 2.85	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk-----	102
Tabel 2.86	Cakupan komplikasi Kebidanan Yang di Tangani -----	103
Tabel 2.87	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	104
Tabel 2.88	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) -	105
Tabel 2.89	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan -----	105
Tabel 2.90	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak -----	106
Tabel 2.91	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	107
Tabel 2.92	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	107
Tabel 2.93	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTAKab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	108
Tabel 2.94	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	108
Tabel 2.95	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	109
Tabel 2.96	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	110
Tabel 2.97	Proporsi Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	111
Tabel 2.98	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	111
Tabel 2.99	Penderita diare yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	112
Tabel 2.100	Angka kejadian malaria Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023----	113
Tabel 2.101	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi -----	114

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.102	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin-----	115
Tabel 2.103	Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -	116
Tabel 2.104	Cakupan Puskesmas Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	116
Tabel 2.105	Cakupan Puskesmas Pembantu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	117
Tabel 2.106	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	118
Tabel 2.107	Cakupan pelayanan Nifas Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023--	119
Tabel 2.108	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani-----	119
Tabel 2.109	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	120
Tabel 2.110	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat-----	120
Tabel 2.111	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin-----	121
Tabel 2.112	Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	121
Tabel 2.113	Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	122
Tabel 2.114	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik-----	123
Tabel 2.115	Kondisi Jalan Kab. Luwu Timur 2019-2023-----	123
Tabel 2.116	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk-----	124
Tabel 2.117	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	124
Tabel 2.118	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan (Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	125
Tabel 2.119	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi-----	125
Tabel 2.120	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik-----	126
Tabel 2.121	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik-----	126
Tabel 2.122	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023	127
Tabel 2.123	Persentase Penduduk Berakses Air Minum-----	127
Tabel 2.124	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	127
Tabel 2. 125	Ketaatan Terhadap RTRW Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023	128
Tabel 2.126	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan-----	128
Tabel 2.127	Rasio Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023--	129
Tabel 2.128	Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	129
Tabel 2.129	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni-----	130

Tabel 2.130	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau-----	131
Tabel 2.131	Persentase Permukiman Yang Tertata Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	131
Tabel 2.132	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	132
Tabel 2.133	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	132
Tabel 2.134	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan-----	133
Tabel 2.135	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	133
Tabel 2.136	Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	135
Tabel 2.137	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	135
Tabel 2.138	Data Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 -----	136
Tabel 2.139	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota -----	138
Tabel 2.140	Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK kabupaten -----	139
Tabel 2.141	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota -----	140
Tabel 2.142	Data Tabel tingkat penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 -----	141
Tabel 2.143	Data Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Daerah yang Dilanggar-----	141
Tabel 2.144	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 -----	142
Tabel 2.145	Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 -----	143
Tabel 2.146	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 -----	144
Tabel 2.147	Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	144
Tabel 2.148	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	145
Tabel 2.149	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 ----	146
Tabel 2.150	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi -----	147
Tabel 2.151	Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023-----	148
Tabel 2.152	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun -----	150

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.153	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)-----	152
Tabel 2.154	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek -----	153
Tabel 2.155	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	155
Tabel 2.156	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	156
Tabel 2.157	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	156
Tabel 2.158	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah ----	157
Tabel 2.159	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD -----	157
Tabel 2.160	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah-----	158
Tabel 2.161	Rasio KDRT Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	158
Tabel 2.162	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	158
Tabel 2.163	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	159
Tabel 2.164	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	160
Tabel 2.165	cakupan kupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	161
Tabel 2.166	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 -----	161
Tabel 2.167	Ketersediaan Pangan Utama Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023	162
Tabel 2.168	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita -----	163
Tabel 2.169	Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan -----	164
Tabel 2.170	Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani	164
Tabel 2.171	Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2019-2023-----	165
Tabel 2.172	Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2019-2023-----	166
Tabel 2.173	Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 ----	166
Tabel 2.174	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten	167
Tabel 2.175	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kab. Luwu timur tahun 2019-2023 -----	168

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.176	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara -----	169
Tabel 2.177	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan -----	170
Tabel 2.178	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha Kab. Luwu timur tahun 2019-2023-----	170
Tabel 2.179	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup ----	171
Tabel 2.180	Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Luwu Timur ---	172
Tabel 2.181	Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R -----	173
Tabel 2.182	Persentase Cakupan Area Pelayanan -----	174
Tabel 2.183	persentase Jumlah Sampah yang Ditangani -----	175
Tabel 2.184	Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk-----	176
Tabel 2.185	Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2019-2023-----	177
Tabel 2.186	Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2019-2023-----	178
Tabel 2.187	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2018-2022-----	179
Tabel 2.188	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023-----	179
Tabel 2.189	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	180
Tabel 2.190	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	181
Tabel 2.191	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK -----	182
Tabel 2.192	Persentase PKK Aktif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023	183
Tabel 2.193	Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	184
Tabel 2.194	Total Fertility Rate (TFR) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -	185
Tabel 2.195	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB-----	185
Tabel 2.196	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk-----	186
Tabel 2.197	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk -----	186
Tabel 2.198	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	187
Tabel 2.199	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan -----	187
Tabel 2.200	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga-----	188
Tabel 2.201	Rasio Akseptor KB Tahun 2019-2023 Kabupaten Luwu Timur--	188
Tabel 2.202	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 –49 Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	189

Tabel 2.203	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun -----	190
Tabel 2.204	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) -	190
Tabel 2.205	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ----	191
Tabel 2.206	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi --	191
Tabel 2.207	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB -----	192
Tabel 2.208	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB -----	193
Tabel 2.209	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB-----	193
Tabel 2.210	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	194
Tabel 2.211	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	194
Tabel 2.212	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	195
Tabel 2.213	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	196
Tabel 2.214	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	197
Tabel 2.215	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019- 2023-----	197
Tabel 2.216	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan -----	198
Tabel 2.217	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa-----	198
Tabel 2.218	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023--	199
Tabel 2.219	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2019-2023----	199
Tabel 2.220	Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2019- 2023-----	200
Tabel 2.221	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023---	200
Tabel 2.206	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi --	201
Tabel 2.207	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB -----	202
Tabel 2.208	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB -----	202
Tabel 2.209	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB-----	203
Tabel 2.210	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	203
Tabel 2.211	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	204

Tabel 2.212	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	204
Tabel 2.213	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	205
Tabel 2.214	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	206
Tabel 2.215	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	207
Tabel 2.216	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan -----	207
Tabel 2.217	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa-----	208
Tabel 2.218	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023--	208
Tabel 2.219	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2019-2023----	209
Tabel 2.220	Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023 -----	209
Tabel 2.221	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023---	210
Tabel 2.222	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun 2019-2023 -----	210
Tabel 2.223	Rasio Ijin Trayek Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	211
Tabel 2.224	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	212
Tabel 2.225	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis-----	213
Tabel 2.226	Persentase Layanan Angkutan Darat -----	213
Tabel 2.227	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum -----	214
Tabel 2.228	Presentase Pemasangan Rambu-rambu -----	214
Tabel 2.229	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan -----	215
Tabel 2.230	Data Perkembangan Kendaraan Bermotor-----	215
Tabel 2.231	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum -----	216
Tabel 2.232	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	216
Tabel 2.233	Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas-----	216
Tabel 2.234	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan -	217
Tabel 2.235	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	218

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.236	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	218
Tabel 2.237	Persentase Koperasi Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-	219
Tabel 2.238	Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kab Luwu Timur Tahun 2023 -----	220
Tabel 2.239	UKM Non BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -	221
Tabel 2.240	Persentase BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022	222
Tabel 2.241	Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	222
Tabel 2.242	Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	223
Tabel 2.243	Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022----	224
Tabel 2.244	Jumlah Investasi PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	224
Tabel 2.245	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	224
Tabel 2.246	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	225
Tabel 2.247	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	225
Tabel 2.248	Persentase Wirausaha Muda Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022	226
Tabel 2.249	Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	226
Tabel 2.250	Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	227
Tabel 2.251	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	227
Tabel 2.252	Jumlah Atlet Berprestasi Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022 ---	227
Tabel 2.253	Jumlah Prestasi Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022--	227
Tabel 2.254	Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	228
Tabel 2.255	Buku Kabupaten Dalam Angka-----	228
Tabel 2.256	Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	229
Tabel 2.257	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	230
Tabel 2.258	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya-----	230
Tabel 2.259	Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarkan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	231
Tabel 2.260	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi ----	231
Tabel 2.261	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu -----	232
Tabel 2.262	Jumlah Pengunjung Perpustakaan -----	233

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.263	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	234
Tabel 2.264	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk-----	234
Tabel 2.265	Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun-----	235
Tabel 2.266	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan -----	236
Tabel 2.267	Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis,dan Penilai yang Memiliki Sertifikat-----	236
Tabel 2.268	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	237
Tabel 2.269	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur	238
Tabel 2.270	Kunjungan Pariwisata Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	238
Tabel 2.271	Lama Kunjungan Wisata Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022---	239
Tabel 2.272	Cakupan Bina kelompok Tani Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	239
Tabel 2.273	Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani	240
Tabel 2.274	Data Populasi Ternak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	240
Tabel 2.275	Situasi Umum Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	242
Tabel 2.276	Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023	243
Tabel 2.277	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	243
Tabel 2.278	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	245
Tabel 2.279	Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	246
Tabel 2.280	Produksi perikanan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	247
Tabel 2.281	Konsumsi ikan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	248
Tabel 2.282	Cakupan bina kelompok nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	249
Tabel 2.283	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	249
Tabel 2.284	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman Kab Luwu Timur Tahun 2019-2029 -----	250
Tabel 2.285	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	251
Tabel 2.286	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023	252
Tabel 2.287	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2018 – 2022 -----	252
Tabel 2.288	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	253

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.289	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	253
Tabel 2.290	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA -----	254
Tabel 2.291	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	254
Tabel 2.292	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	255
Tabel 2.293	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	255
Tabel 2.294	Persentase SILPA Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	256
Tabel 2.295	Persentase Belanja Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	256
Tabel 2.296	Persentase Belanja Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	257
Tabel 2.297	Penetapan APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	258
Tabel 2.298	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	259
Tabel 2.299	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	260
Tabel 2.300	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	261
Tabel 2.301	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah -----	262
Tabel 2.302	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	262
Tabel 2.303	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	263
Tabel 2.304	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022 -----	264
Tabel 2.305	Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022-----	264
Tabel 2.306	Persentase Tindak Lanjut Temuan-----	265
Tabel 2.307	Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Prov. Sul-Sel & Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	265
Tabel 2.308	Persentase Pelanggaran Pegawai -----	266
Tabel 2.309	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023	266
Tabel 2.310	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023 -----	267
Tabel 2.311	Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD)	

	Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	268
Tabel 2.312	Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	268
Tabel 2.313	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2023	269
Tabel 2.314	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023-----	270
Tabel 2.315	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	270
Tabel 2.316	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum -----	271
Tabel 2.317	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/terminal per tahun-----	272
Tabel 2.318	Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kabupaten Luwu Timur	272
Tabel 2.335	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	273
Tabel 2.336	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Kabupaten Luwu Timur 2019-2023 -----	274
Tabel 2.337	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Luwu Timur 2019-2023	276
Tabel 2.338	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023-----	276
Tabel 2.339	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 -----	277
Tabel 2.340	hasil evaluasi capaian IKU daerah tahun 2023 -----	301
Tabel 2.341	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023 -----	304
Tabel 2.342	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 -----	320
Tabel 2.343	Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 -----	367
Tabel 2.344	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) -----	379
Tabel 2.345	Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan Kab.Luwu Timur Tahun 2023 -----	408
Tabel 2.346	Tabel Keselarasan Program,Kegiatan,Sub Kegiatan RKPD & APBD 2024 -----	412
Tabel 2.347	Hasil Pelaksanaan RKPD TW I Tahun Anggaran 2024 -----	419
Tabel 3. 1	Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha	481
Tabel 3. 2	Statistik Kunci Kabupaten Luwu Timur 2021-2023 -----	487

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 3. 3	Target makro ekonomi daerah Daerah Tahun 2025 -----	492
Tabel 3. 4	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 -----	497
Tabel 3. 5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 -----	501
Tabel 4. 1	Pengeluaran Perkapita Sebulan (rupiah), 2022 -----	486
Tabel 4. 2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target/Proyeksi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2025 -----	503
Tabel 4. 3	Tema Pembangunan Tahun 2025 -----	506
Tabel 4. 4	Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional -----	508
Tabel 4. 5	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 -----	512
Tabel 4. 6	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025 -----	512
Tabel 4. 7	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025. -----	514
Tabel 4. 8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 -----	517
Tabel 4. 9	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025 -----	521
Tabel 4. 10	Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas Pembangunan, dan Prioritas Nasional -----	524
Tabel 4. 11	Sasaran, Prioritas Pembangunan Dan Program Yang Mendukung	551
Tabel 4. 12	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 -----	558
Tabel 4. 13	Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung SPM di	562
Tabel 4. 14	Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2024 -----	566
Tabel 5. 1	Asumsi Target Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2025 -----	572
Tabel 5. 2	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun 2025 -----	574
Tabel 5. 3	Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 -----	576
Tabel 5. 4	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 -----	577
Tabel 6 1.	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 -----	587

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Tabel 6 2.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.....	588
Tabel 6 3.	Penetapan Target Indikator SPM	608
Tabel 6 4.	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	613

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan	25
Grafik 2. 2	Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan	25
Grafik 2.3	Variasi evaporasi rata-rata bulanan	26
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)	44
Grafik 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	44
Grafik 2. 6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.....	46
Grafik 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan.....	49
Grafik 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah).....	49
Grafik 2.9	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	52
Grafik 2.10	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah setara Tahun 2018 - 2022	52
Grafik 2.11	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2019 – 2023 (Persen)	53
Grafik 2.12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	55
Grafik 2. 13	Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	56
Grafik 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)	57
Grafik 2. 15	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur,.....	58
Grafik 2. 16	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur Tahun 2018 - 2022.....	59
Grafik 2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2018-2022	61
Grafik 2.18	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian dengan wilayah setara Luwu Raya Tahun 2018 – 2022	62
Grafik 2.19	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2022.....	66
Grafik 3. 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (miliar rupiah), ...	480
Grafik 3. 2	PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran diKabupaten Luwu Timur (miliar rupiah), Tahun 2020– 2023	482
Grafik 3. 3	Sektor PDRB Menurut Pengeluaran ADHB terhadap PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020– 2022 (%).....	484
Grafik 3. 4	Persentase pengeluaran Perkapita sebulan tahun 2021-2022	486

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

Grafik 3. 5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Luwu Timur.....	488
Grafik 3. 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penduduk Miskin.....	489
Grafik 3. 7	Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..<	491

BAB. I. PENDAHULUAN.



1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang disusun dengan berpedoman pada

RKPD Provinsi Sulawesi selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target akhir RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2025 akan fokus pada pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang Dalam RPJMD. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 9,66%, Tingkat Kemiskinan 6,93%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,42, Gini Rasio 0,393, Indeks Pembangunan Manusia 74,35 . Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2025 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKP 2025 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dan SPM, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan dari RKPD ini, diantaranya adalah:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- c. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

- d. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah;
- e. Sebagai acuan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- f. RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam RKPD dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Periode 2021-2026, yang mana RKPD sebagai disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja Pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Aparat Pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Selain itu Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota. Adapun berdasarkan permendagri 86 tahun 2017 RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan
Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. Penyusunan Rancangan Awal

Pada tahap penyusunan rancangan awal aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal hal sebagai berikut :

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis Nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dibutuhkan penelaahan terhadap pokok pokok pikiran DPRD dalam rancangan awal dikarenakan pokok pokok pikiran DPRD yang harus diparipurnakan diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pada RKP, program strategis nasional dan Rancangan awal RKPD Provinsi.

Sistematika Rancangan Awal adalah sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
- 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 3) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- 4) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- 6) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 7) Penutup

Setelah Rancangan Awal disusun, selanjutnya, dilakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tersebut. Rancangan Awal RKPD yang telah disempurnakan digunakan sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan Awal.

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pemerintah maupun Provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang.

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

5. Perumusan Rancangan Akhir.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2020 Nomor 581);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
45. Peraturan Gubernur Sulawesi selatan No.13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2024 – 2026.
46. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Perencanaan Pembangunan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan nasional sebagaimana yang di amanahkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada tingkat nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dokumen umum yang mengatur seluruh sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Dokumen ini kemudian diturunkan dan

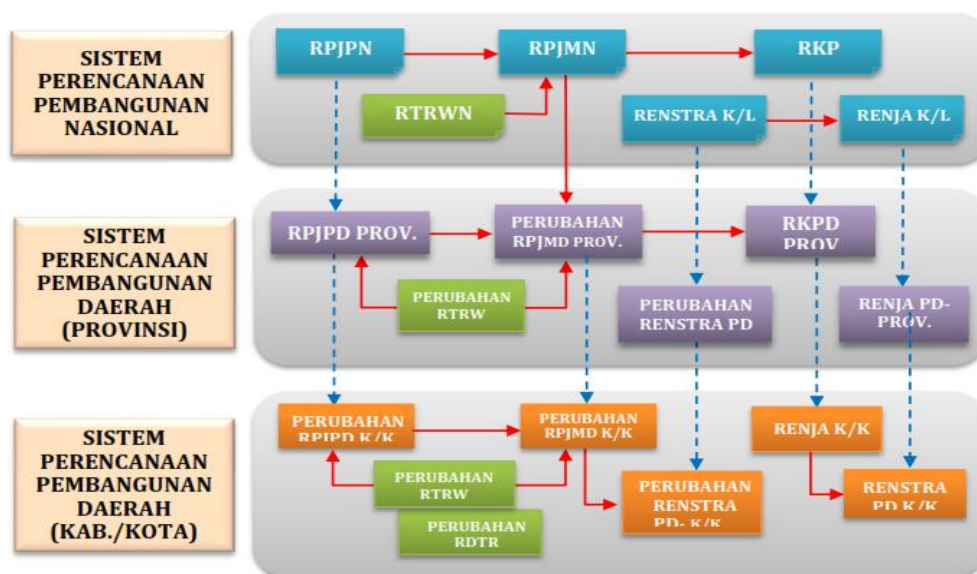
diadaptasi ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Di tingkat provinsi, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi) berfungsi untuk menerjemahkan arahan-arahan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ke dalam rencana pembangunan yang lebih spesifik untuk wilayah provinsi. Dokumen ini terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, yang menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi.

Sementara itu, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Kabupaten/Kota) berperan untuk mengadaptasi arahan dari tingkat nasional dan provinsi ke dalam konteks pembangunan di wilayah kabupaten/kota. Dokumen ini terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di tingkat lokal. Adapun keterkaitan dalam satu kesatuan system perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Melalui keterkaitan antara dokumen-dokumen tersebut, diharapkan dapat tercipta sinergi dan keselarasan dalam proses perencanaan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara efektif.

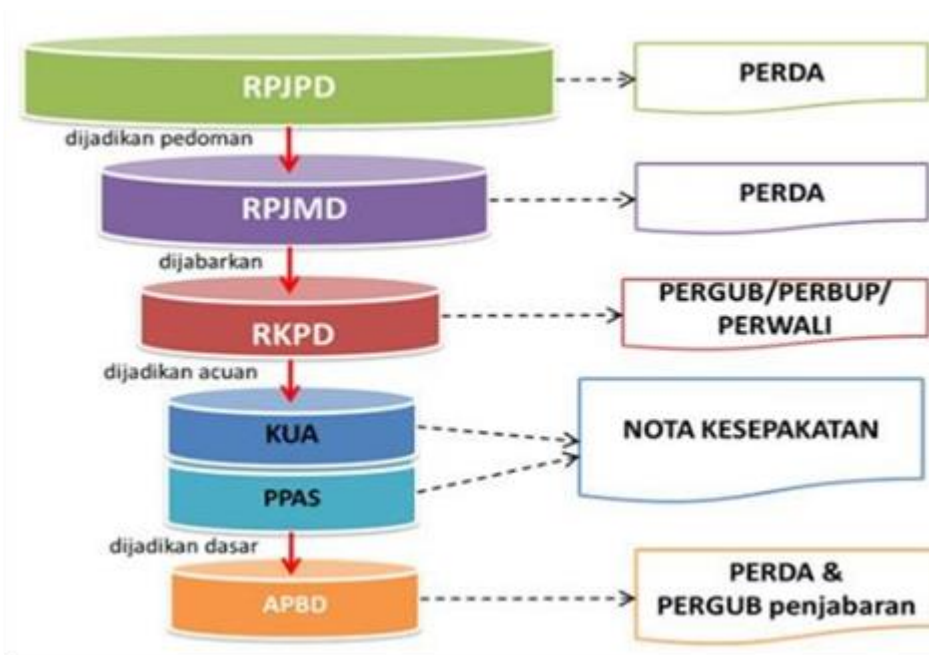
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) sampai kepada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati digunakan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUA, Rancangan PPAS yang akan dibahas dengan DPRD untuk mendapat kesepakatan. Adapun KUA-PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD dan Bupati sebagai dasar penyusunan RAPBD sampai pada penetapan APBD TA. 2025

Gambaran tentang hubungan antara Dokumen Perencanaan RKPD dan penganggaran Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah..

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2025 adalah selain merupakan dokumen Operasional dari pelaksanaan tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pemerintah kabupaten Luwu timur, tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan dan sasaran perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
8. Menjadi pedoman bagi seluruh Stakeholders Pembangunan daerah dalam mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.

Sesuai Amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

2.1 Kondisi Umum Daerah.

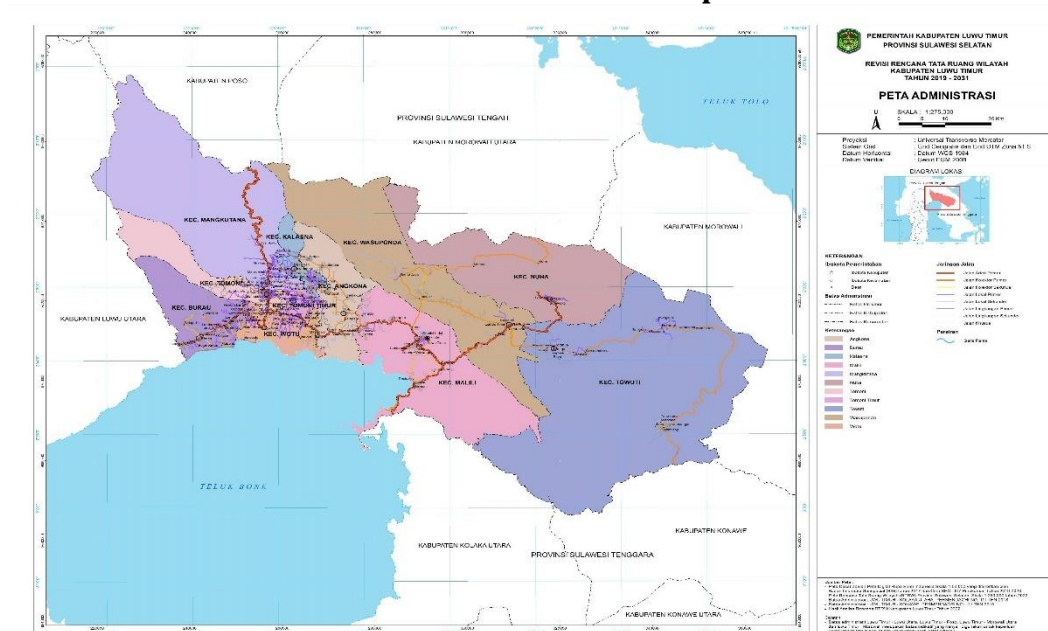
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 15,19 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. dan berada ditinggikan 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu,

Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1,926,13 km² atau sekitar 28,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Malili merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar). Adapun luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Burau	275,40	4,08
2	Wotu	147,64	2,19
3	Tomoni	274,69	4,07
4	Tomoni Timur	44,86	0,66
5	Angkona	294,93	4,37
6	Malili	883,62	13,09
7	Towuti	1,926,13	28,54
8	Nuha	859,71	12,74
9	Wasuponda	834,85	12,37
10	Mangkutana	1.147,02	17,00
11	Kalaena	59,08	0,88
Kabupaten Luwu Timur		6.747,93	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Luwu Timur

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) danau diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapparang Masapi (luasnya 2,43 Km²), dan Lontoa (luasnya 1,71 Km²).

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2°03'00"-3°03'25" LS dan 119°28'56"-121°47'27" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur, Kabupaten Konawe dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah selatan dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa Provinsi, sejumlah Kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeek merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah dataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (422.306,86 Ha), hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari permukaan laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah dataran. Sesuai dengan kondisi topografi, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

2.1.1.4 Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi.

a. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni : Daerah pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran.

- a. Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta, Ballawai, Ledu-Ledu dan Tapparang Masapi. Pada bagian tenggara lembar peta terdapat Pegunungan Verbeck dengan ketinggian 800-1.346 mdpl, dibentuk oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tapparang Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G. Tambake (1.838 m), Bulu Nowinokel (1.700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu Taipa (1.346 m), Bulu ladu (1.274 m), Bulu Burangga (1.032 m) dan Bulu Lingke (1.209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu S. Kalaena, S. Larona dan S. Malili merupakan sungai utama. Pola aliran sungai umumnya dendritik.
- b. Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone, Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana (477 m) dan Bulu Bukila (645 m).
- c. Daerah karst menempati bagian timur laut pada peta lembar Matano dengan ketinggian antara 800-1.700 mdpl dan dibentuk oleh batugamping. Daerah ini dicirikan oleh adanya *dolina*, "*sinkhole*" dan sungai bawah permukaan. Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1.185 m).
- d. Daerah pedataran menempati daerah selatan semua lembar peta, menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili, menunjukkan proses berkelok.

- e. Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone. Pola alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendritit dengan air terjun di beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan morfologi dewasa.

b. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur hampir utara – selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi dua jalur (*belt*) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri dari batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparan Sunda).

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batuannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

- a. *Batuan Ofiolit*; Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafik termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrilit dan serpentinit, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur – Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).
- b. *Lajur metamorfik, kompleks pompangeo*; Terdiri dari berbagai jenis sekis hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukupan, filit, batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi. Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilitit, rijang radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah terdiri dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilitit yang semakin banyak ke bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur Kapur.
- c. *Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda)*; Terdiri dari bongkahan asing batuan mafik, serpentinit, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan,

sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).

- d. Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesis Neogen (kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat. Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

c. Struktur Geologi

Struktur utama yang berkembang di daerah ini berupa lipatan, sesar dan kekar. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser dan sesar naik. Daerah ini memiliki tektonik yang cukup kompleks dengan pengaruh dua sesar besar yaitu Sesar Palu-Koro dan Sesar Matano. Sesar Palu-Koro berarah relatif utara-selatan, sedangkan sesar Matano berarah barat laut – tenggara.

Ditinjau dari arah sumbunya pelipatan di wilayah ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perlipatan yang berarah barat daya-timur laut dan perlipatan yang berarah barat laut –tenggara. Jenis perlipatan yang teridentifikasi melalui kedudukan batuan adalah jenis antiklin.

Kekar terdapat dalam hampir semua satuan batuan. Terjadinya mungkin dalam beberapa periode, sejalan dengan perkembangan tektonik di daerah ini. Tegasan utama berarah N330°E, hasil pengukuran pada satuan sekis di Sungai Laimbo dan satuan metagamping di Sungai Kalaena kemungkinan merupakan arah sesar Regional Palu-Koro. Arah tegasan relatif timur barat N270°E dihasilkan dari pengukuran pada satuan peridotit di daerah Bonepute. Arah tegasan tersebut ditafsirkan sebagai arah Sesar Matano, kemungkinan arah ini adalah arah Sesar matano Bawah. Tegasan utama berarah N20°E, hasil pengukuran pada satuan peridotit di daerah Karebbe diperkirakan sebagai arah tegasan utama yang mengontrol Sesar Geser Lampea dan Sesar Naik Tabarano. Tegasan utama berarah N345°E, hasil pengukuran pada satuan batupasir sedang di Sungai Bungadidi ditafsirkan sebagai arah tegasan yang mempengaruhi pembentukan Perlipatan dan Sesar Naik Balease. Di tempat ini pula dilakukan pengukuran kekar tarik yang menghasilkan arah N45°E, arah tersebut akan memberikan dukungan terhadap keberadaan struktur sesar turun di wilayah ini.

2.1.1.5 Hidrologi

Dari data historis yang tersedia diperoleh bentuk pola curah hujan secara umum untuk seluruh daerah pengamatan terjadi pola dengan 2 puncak musim hujan yaitu pada sekitar bulan April dan Oktober. Pengaruh monsun barat yang kaya uap air dan bertiup dari benua Asia dan Samudera Pasifik selama periode Desember, Januari, dan Februari tidak menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam bulan-bulan ini. Jumlah curah hujan yang lebih tinggi justru terjadi pada bulan April, hingga Mei yang mana di beberapa tempat di Indonesia merupakan bulan transisi I yang juga dikenal sebagai bulan-bulan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau.

Peningkatan jumlah curah hujan juga terjadi pada bulan Oktober, yaitu setelah periode JJA, di mana merupakan transisi kedua atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Pada bulan Oktober menuju bulan Desember perlahan jumlah curah hujan untuk seluruh stasiun mengalami kenaikan hingga mencapai 100-200 mm/bulan. Walaupun demikian jumlah curah hujan ini jauh lebih rendah dibanding jumlah curah hujan yang terjadi pada periode Maret, April, dan Mei yang mencapai nilai 300 mm/bulan hingga 400 mm/bulan.

Adanya 2 puncak hujan yang terjadi di Sorowako dan wilayah sekitarnya menandakan daerah ini merupakan daerah dengan pola hujan ekuatorial. Pola hujan ekuatorial adalah suatu pola hujan dengan dua puncak musim hujan. Puncak-puncak ini terjadi setelah ekuinoks (waktu ketika matahari berada di atas khatulistiwa). Ekuinoks terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23 September, puncak-puncak hujan untuk daerah Sorowako terjadi di bulan April dan Oktober yakni ketika matahari berada dekat dengan khatulistiwa. Pada saat matahari berada pada posisi yang demikian, maka daerah-daerah yang dekat dengan ekuator akan mendapatkan suplai radiasi yang besar yang akan membantu terjadinya evaporasi yang pada akhirnya menyebabkan kondensasi awan dan melahirkan endapan hujan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, yaitu hasil perhitungan rata-rata curah hujan bulanan dan maksimum rata-rata curah hujan bulanan menunjukkan jika Maret, April dan Mei merupakan bulan-bulan dengan curah hujan tinggi dan secara tidak langsung menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan basah. Sementara Agustus dan September dengan curah hujan yang lebih rendah dianggap sebagai bulan-bulan kering. Dari nilai curah hujan yang turun ke permukaan dapat dilihat jika secara umum distribusi curah hujan mengikuti pola pergerakan angin. Pola distribusi curah hujan bulan Januari, Februari, Maret memiliki tendensi yang besar ke arah timur. Ini disebabkan karena proses penguapan lebih banyak terjadi pada daerah tubuh air seperti danau, dan sungai yang terletak di sekitar stasiun 3, dan 4. Sedangkan pada bulan April endapan hujan yang terjadi cukup seimbang antara

dataran tinggi di sebelah barat dan dataran rendah di sebelah timur. Ini disebabkan karena pada bulan ini kecepatan angin dari arah barat melemah dan arah angin pada bulan ini tidak stabil mengingat bulan ini adalah bulan peralihan dari muson barat ke muson timur. Disamping itu pada bulan ini matahari masih berada dekat dengan khatulistiwa, sehingga daerah rendah di sebelah timur dengan bentangan tubuh air akan mengalami penguapan yang besar.

Pada bulan Juni, Juli, Agustus distribusi lebih dominan ke arah barat laut, utara, dan timur laut, sebab pada bulan ini matahari berada di Belahan Bumi Utara (BBU), akibatnya daerah pada sebelah barat laut, utara dan timur laut mendapat radiasi matahari yang besar dan menyebabkan suhu tinggi serta tekanan yang rendah dibanding di sebelah selatan. Sehingga angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi disebelah selatan menuju ke arah daerah yang bertekanan rendah.

Pada bulan September pola sebaran hujan membesar ke arah tenggara dan endapan hujan lebih besar pada dataran rendah daripada dataran tinggi. Hal ini terjadi sebab pada bulan ini matahari kembali berada di khatulistiwa sehingga daerah danau yang berada di sebelah tenggara mengalami penguapan dan akumulasi awan hujan yang besar dibanding daerah pegunungan di sebelah timur.

Di bulan Oktober, November, dan Desember endapan justru lebih kecil di sebelah tenggara. Pada bulan ini angin muson timur yang bertiup melemah dan berangsur digantikan oleh muson barat yang lembab, mengakibatkan daerah dataran tinggi di bagian barat memperoleh curah hujan yang besar.

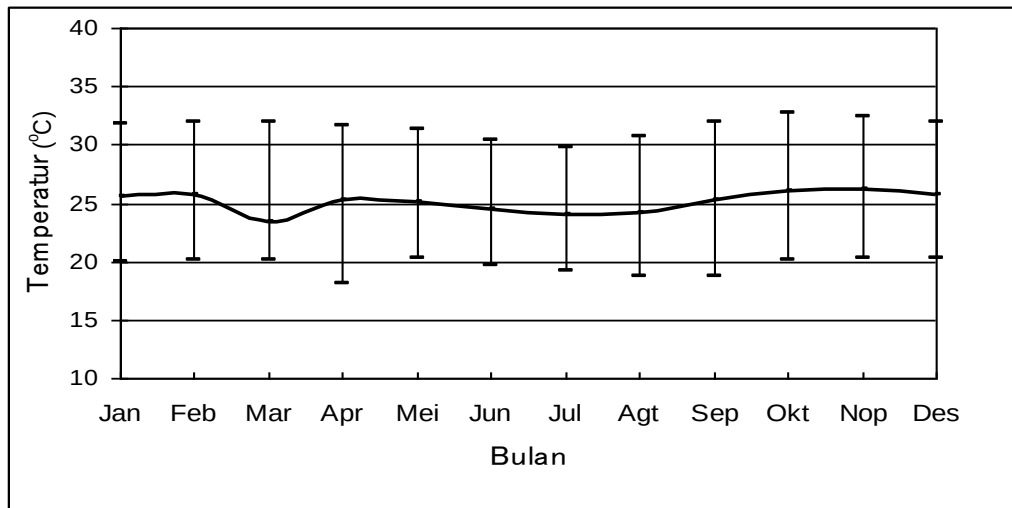
Secara umum pola distribusi curah hujan tahunan menunjukkan arah yang semakin besar ke arah dataran tinggi disebelah barat laut. Ini disebabkan karena daerah di sebelah barat adalah daerah dengan bentangan pegunungan. Pada daerah dataran tinggi suhu udara lebih rendah dibandingkan dataran rendah. Daerah sebelah barat merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut. Sedangkan daerah sebelah timur merupakan dataran rendah yang < 500 m dari permukaan laut. Sepanjang tahun pola pergerakan angin bergerak dari dataran tinggi yang memiliki gradien tekanan yang tinggi menuju ke arah dataran rendah dengan gradien tekanan yang lebih rendah

2.1.1.6 Klimatologi

1. Temperatur Udara.

Temperatur rata-rata bulanan berkisar pada 24,0-26,1°C. Temperatur tertinggi tercatat pada bulan November, sedangkan temperatur terendah pada bulan Juli. Temperatur rata-rata bulanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Variasi tempertur rata-rata bulanan diperlihatkan pada Grafik berikut:

Grafik 2. 1 Variasi Temperatur Rata-rata Bulanan

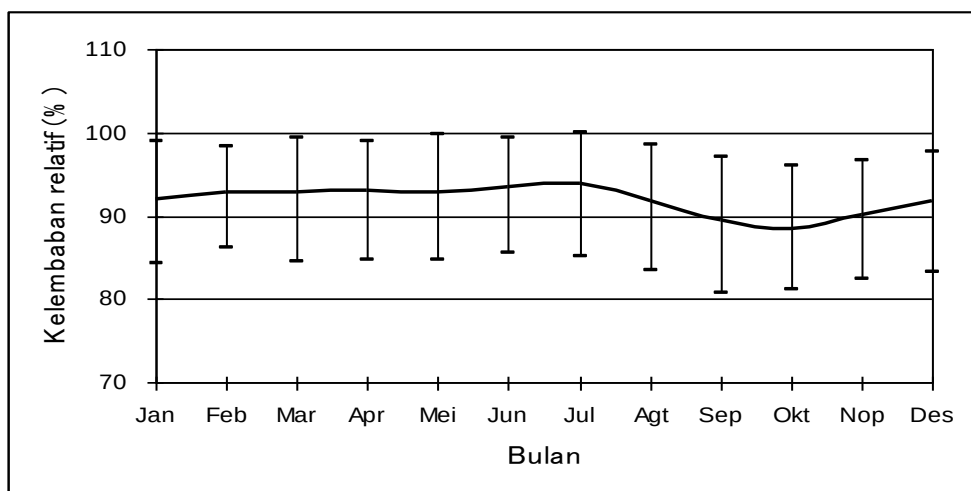


Sumber : Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kab Luwu Timur 2022-2042, update data Tahun 2022

2. Kelembaban Udara.

Kelembaban (relatif) bulanan rata-rata berkisar pada 88,4-93,8%. Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada hampir semua bulan (100%) terutama pada bulan Juli, dan terendah pada bulan September (80,8%). Variasi kelembaban relatif rata-rata bulanan diperlihatkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 2 Variasi Kelembaban Relatif Rata-rata Bulanan



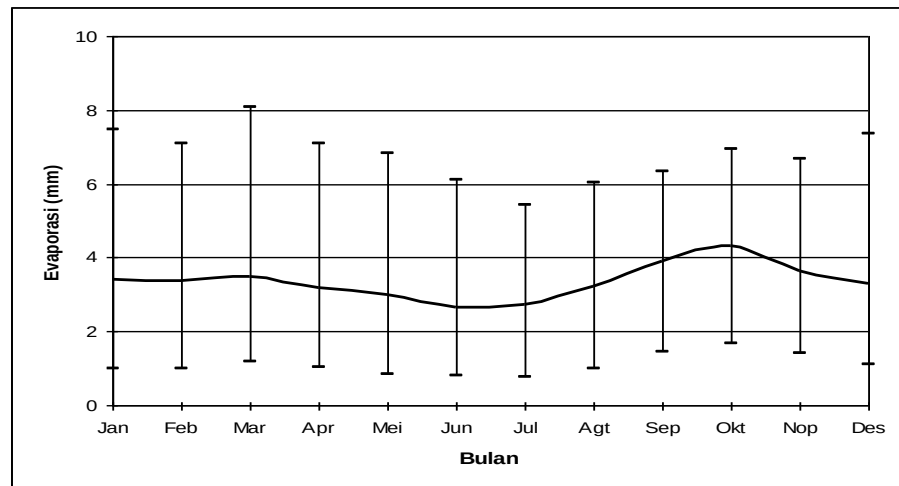
Sumber : Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kab Luwu Timur 2022-2042, update data tahun 2022

3. Penguapan.

Penguapan yang terjadi cukup tinggi dengan nilai rata-rata bulanan sekitar 2,7-4,3 mm, walaupun demikian diimbangi oleh curah hujan harian yang tinggi pula. Penguapan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (4,3 mm/hari), sedangkan

penguapan terendah teramati pada Bulan Juni (2,7 mm/hari). Periode dengan tingkat penguapan tinggi terjadi mulai bulan Agustus sampai April (>3 mm/hari), sedangkan periode dengan penguapan rendah mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli (≤ 3 mm/hari). Profil penguapan di daerah studi diperlihatkan pada Grafik berikut:

Grafik 2.3 Variasi evaporasi rata-rata bulanan



Sumber : Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kab Luwu Timur 2022-2042, 2022

4. Curah Hujan.

Selama tahun 2020, rata-rata hari hujan per bulan sebanyak 19 hari. Bulan Maret dan Juni memiliki jumlah hari hujan tertinggi hingga 24 hari dalam sebulan dan bulan Februari memiliki jumlah hari paling sedikit yaitu hanya 14 hari saja. Suhu udara maksimum berkisar antara $33,00^{\circ}$ dan $36,20^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,50^{\circ}$ dan $23,20^{\circ}\text{C}$ dengan rata-rata antara $26,30^{\circ}$ dan $28,50^{\circ}\text{C}$. Jumlah curah hujan terendah 168 mm^3 (Agustus) dan tertinggi 474 mm^3 (Mei) dengan hari hujan antara 3 dan 26 hari. Variasi curah hujan bulanan diperlihatkan pada gambar berikut.

Tabel 2.2 Curah Hujan, Hari hujan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
1	Januari/ <i>January</i>	207	17
2	Februari/ <i>February</i>	266	14
3	Maret/ <i>March</i>	321	24
4	April/ <i>April</i>	266	22

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan (hari)
5	Mei/ <i>May</i>	474	22
6	Juni/ <i>June</i>	403	24
7	Juli/ <i>July</i>	276	21
8	Agustus/ <i>August</i>	168	19
9	September/ <i>september</i>	206	17
10	Oktober/ <i>October</i>	294	16
11	November/ <i>November</i>	316	19
12	Desember/ <i>December</i>	274	21
Jumlah		3.471	236

Sumber : Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kab Luwu Timur 2022-2042, 2022

5. Angin.

Dalam penelitian ini data kecepatan dan arah angin setiap jam selama 7 tahun terakhir diperoleh dari Stasiun Meteorologi PT. Vale, Tbk. Data angin selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa antara pukul 07.00 sampai 18.00 (siang) arah angin dominan dari arah tenggara (24,8 %) dan dari utara (24,13 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 (malam) arah angin dominan dari arah utara (36,8 %) dan dari arah tenggara (19,1 %). Kecepatan angin selama 7 tahun terakhir antara pukul 07.00 sampai 18.00 sebagian besar berkisar 0 sampai 2 m/s (69,1 %), sedangkan antara pukul 19.00 sampai 06.00 besar berkisar 0 sampai 2 m/s (73,16 %).

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah adalah kapasitas atau kemungkinan suatu wilayah untuk berkembang dalam berbagai aspek yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Kabupaten Luwu Timur mengarahkan pengembangan wilayahnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran dan berbukit. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan pengembangan di masa yang akan datang, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi pengembangan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi dan jagung.

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dikembangkan seluas 28.865,26 Ha, meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan pembagian luasan untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3.908,93	13,54
2	Kecamatan Burau	3.436,17	11,90
3	Kecamatan Kalaena	3.074,15	10,65
4	Kecamatan Malili	1.045,20	3,62
5	Kecamatan Mangkutana	2.365,74	8,20
6	Kecamatan Nuha	79,96	0,28
7	Kecamatan Tomoni	1.654,46	5,73
8	Kecamatan Tomoni Timur	2.837,53	9,83
9	Kecamatan Towuti	4.842,63	16,78
10	Kecamatan Wasuponda	1.318,72	4,57
11	Kecamatan Wotu	4.301,76	14,90
Jumlah		28.865,26	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Adapun rencana pengembangan KP2B di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan sawah baru. Luas lahan yang akan dikembangkan untuk KP2B di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih seluas 25.233,88 hektar. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kurang lebih seluas 3.454,22 hektar.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan

potensi dan kesesuaian lahan, serta mengembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Secara khusus pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk:

1. Mendorong pengembangan perekonomian masyarakat;
2. Merehabilitasi ruang pasca tambang; dan
3. Menyediakan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, dan perkebunan lada.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur meliputi areal seluas kurang lebih 51.269,07 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	5.833,86	11,38
2	Kecamatan Burau	9.632,44	18,79
3	Kecamatan Kalaena	2.329,28	4,54
4	Kecamatan Malili	2.982,77	5,82
5	Kecamatan Mangkutana	4.249,79	8,29
6	Kecamatan Nuha	1.968,39	3,84
7	Kecamatan Tomoni	4.574,23	8,92
8	Kecamatan Tomoni Timur	953,34	1,86
9	Kecamatan Towuti	8.942,00	17,44
10	Kecamatan Wasuponda	7.727,25	15,07
11	Kecamatan Wotu	2.075,72	4,05
Jumlah		51.269,07	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas dan kacang-kacangan. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta di lapangan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 14.346,07 Ha dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Holtikultura	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	1,423.99	9.93
2	Kecamatan Burau	132.85	0.93
3	Kecamatan Kalaena	316.46	2.21
4	Kecamatan Malili	1,745.06	12.16
5	Kecamatan Mangkutana	4,927.19	34.35
6	Kecamatan Nuha	3.01	0.02
7	Kecamatan Tomoni	615.61	4.29
8	Kecamatan Tomoni Timur	48.35	0.34
9	Kecamatan Towuti	2,901.10	20.22
10	Kecamatan Wasuponda	413.38	2.88
11	Kecamatan Wotu	1,819.07	12.68
Jumlah		14,346.07	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

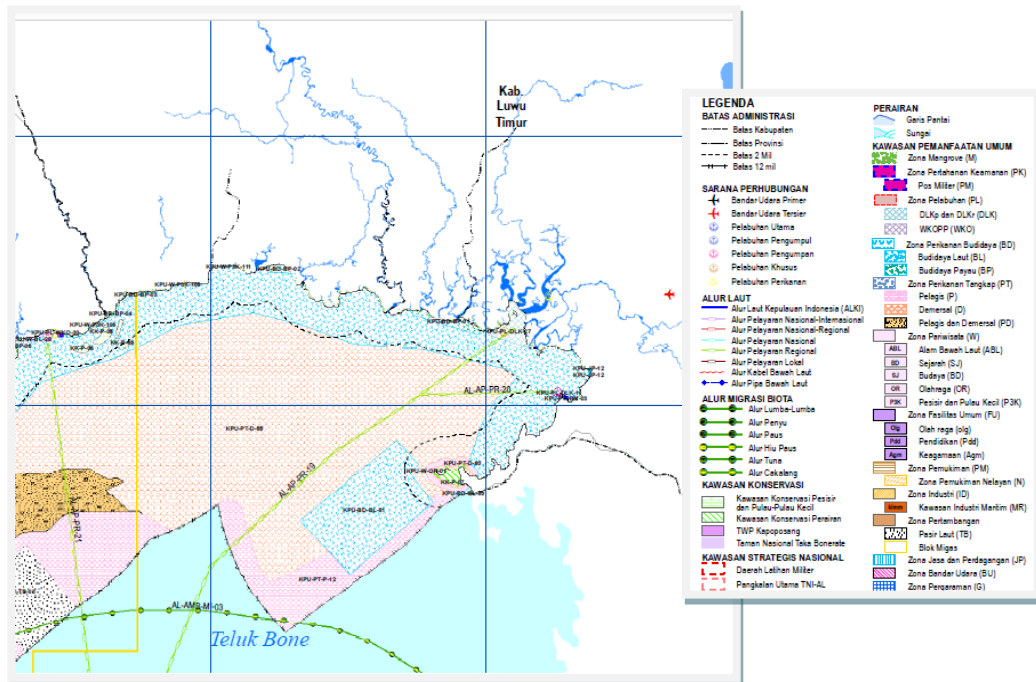
2. Kawasan perikanan;

Kawasan perikanan di Kabupaten Luwu Timur berupa kawasan perikanan budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Pengolahan ikan atau industri perikanan terhadap hasil tangkapan ikan masih belum berkembang di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat potensi perikanan tangkap yang sangat besar (terutama laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat terutama di kawasan pesisir Kabupaten Luwu Timur. Kawasan perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada wilayah pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili sedangkan untuk perairan Danau meliputi Kecamatan Towuti dan Nuha.

Gambar 2.2 Peta Alokasi Ruang RZWP-3K Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042,

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya darat di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 13.384,77 Ha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2.6 Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perikanan Budidaya	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3,258.39	24.34
2	Kecamatan Burau	465.40	3.48
3	Kecamatan Malili	6,244.15	46.65
4	Kecamatan Wotu	3,416.83	25.53
Jumlah		13,384.77	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

c. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan

Arah jangka panjang pengembangan PPI/TPI Malili akan didorong sebagai embrio untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap dan budidaya. Dengan demikian, untuk mengembangkan Kecamatan Malili, Wotu, Angkona, dan Burau sebagai kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap, maka akan dikembangkan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar,

permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha, serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Untuk maksimalkan hasil pemasaran hasil perikanan tangkapan, Arahan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) di Kecamatan Malili dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Wotu perlu untuk diperhatikan.

3. Kawasan pertambangan

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi kandungan mineral logam dan bukan logam (batuan). Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pertambangan mineral yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten. Kegiatan pertambangan dilakukan pada lahan yang diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai:

- kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.
- kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.
- kawasan cagar budaya.
- kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.

A. Potensi Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 325.717,83 Ha atau 46,67 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

B. Kawasan Pertambangan Batuan

Adapun wilayah pertambangan mineral dengan potensi mineral bukan logam logam/batuan dengan luas 4.609,57 hektare atau 0,66 % dari luas Kabupaten Luwu Timur.

4. Kawasan industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah.

Rencana kawasan industri Lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan mencapai 509,53 hektare. Kawasan Industri Lampia merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur. Kawasan

industri di Kecamatan Nuha mencapai 108,96 hektare dan Kawasan Industri Tomoni di Kecamatan Tomoni mencapai 212,57 hektare dengan fungsi ruang sebagai industri pengolahan hasil pertanian skala menengah dan besar.

5. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Keindahan alam dan keindahan panorama.
2. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
3. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
4. Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 2 (dua) Pengembangan Kawasan Wisata, yaitu:

- a. Kawasan Wisata Danau, memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam, wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori *Global Ecoregions*. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-kupu dan Pantai Salonsa.
- b. Kawasan Wisata Alam dan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran potensi wisata alam dan wisata bahari di Kecamatan Malili Pulau Bulupoloe, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Tomoni.

Tabel 2.7 Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Objek	Lokasi
<i>Objek Wisata Alam</i>		
1	Danau Matano	Desa Matano Kec. Nuha
2	Cagar Alam Perburuan	Desa Matano Kec. Nuha
3	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Desa Matano Kec. Nuha
4	Pantai Ide	Desa Magani Kec. Nuha
5	Pantai Pomua Dahu-Solonsa	Desa Magani Kec. Nuha
6	Bumi Perkemahan Sawerigading	Desa Magani Kec. Nuha
7	Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole	Desa Magani Kec. Nuha
8	Pantai Molino Topundau	Desa Magani Kec. Nuha
9	Pantai Impian-Old Camp	Desa Sorowako Kec. Nuha
10	Danau Towuti	Desa Timampu Kec. Towuti

No	Nama Objek	Lokasi
11	Danau Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
12	Danau Tapparang Masapi	Desa Mahalona Kec. Towuti
13	Air Terjun Mata Buntu	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
14	Kali Dingin (Wasuponda)	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
15	Air Terjun Atue	Desa Atue Kec. Malili
16	Sungai Malili	Desa Malili Kec. Malili
17	Hutan Mangrove	Kec. Malili/Wotu/Burau
18	Sumur Sawerigading	Desa Baruga Kec. Malili
19	Permandian Alam Mantadulu	Desa Mantadulu Kec. Angkona
20	Air Terjun Tokio	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
21	Sungai Uelanti	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
22	Permandian Lopi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana
23	Air Terjun Saloanu	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
24	Banua Pangka	Desa Bawalipu Kec. Wotu
25	Gua Batu Putih	Desa Batu Putih Kec. Burau
26	Permandian Air Panas	Desa Cendana Kec. Burau
27	Air Terjun Bonepute	Desa Bonepute, Kec. Burau
28	Batu Papan	Desa Rantemario, Kec. Tomoni
29	Air Terjun Tompotikka	Desa Ussu, Kec. Malili
<i>Objek Wisata Sejarah</i>		
1	Makam Mokole Lakamandiu	Desa Matano Kec. Nuha
2	Makam Puang Sanro	Desa Lampenai Kec. Wotu
3	Kuburan Tua	Desa Mabonta Kec. Burau
<i>Objek Wisata Bahari</i>		
1	Pantai Balo-Balo	Desa Lera Kec. Wotu
2	Pantai Lemo	Desa Mabonta Kec. Burau
3	Pantai Ujung Suso	Desa Mabonta Kec. Burau
<i>Objek Wisata Buatan</i>		
1	Bukit Agro (Tabarano)	Desa Tabarano Kec. Wasupona
2	Semoga Lestari Water Park	Desa Lestari, Kec. Tomoni

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Lutim Tahun 2019

6. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana.
- Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan.
- Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Tujuan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan pengembangan perumahan dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah penduduk yang akan di tempung sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- b. Mendistribusikan perkembangan wilayah melalui pengembangan kawasan kawasan permukiman yang didukung oleh infra struktur yang memadai.
- c. Menciptakan generator pertumbuhan yang baru pada kawasan-kawasan yang akan di dorong sebagai kawasan permukiman.

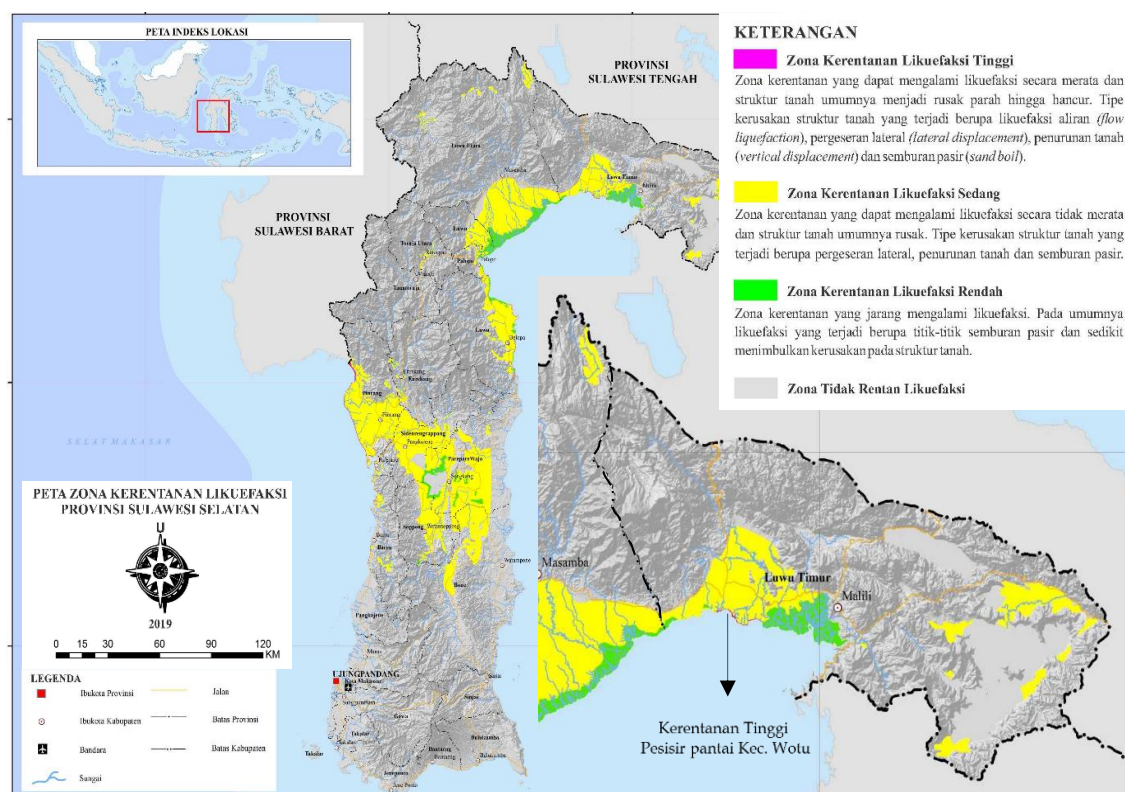
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Luwu timur memiliki aktivitas sesar yang aktif berupa sesar Palukoro, sesar Matano, dan sesar lainnya yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana gempa bumi, juga tanah longsor pada wilayah dengan lereng terjal. Karakteristik wilayah perbukitan dan sungai-sungai besar menyimpan potensi bencana yang tinggi khususnya bencana banjir, banjir bandang, angin kencang, gempa bumi, tanah longsor. Gempa bumi, tanah longsor dan banjir merupakan bencana yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi di wilayah luwu timur. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau memiliki dampak paling tinggi, adalah kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor dan sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.

1. Potensi kawasan rawan bencana banjir meliputi.
 - Kecamatan Malili di Desa Ussu, Puncak Indah, Pongkeru dan Laskap.
 - Kecamatan Wasuponda di Desa Balambano dan Kawata.
 - Kecamatan Kalaena di Desa Sumber Agung, Sumber Makmur dan Argomulyo.
 - Kecamatan Mangkutana di Desa Manggala.
 - Kecamatan Wotu di Desa Kalaena, Tabaroge dan Karambua.
 - Kecamatan Tomoni Timur di Desa Manunggal, Alam Buana dan Cendana Hitam Timur.
 - Kecamatan Angkona di Desa Solo dan Balirejo.
2. Kawasan rawan bencana patahan aktif/ sempadan patahan aktif (*active fault*).

Kawasan rawan bencana patahan aktif di Kabupaten Luwu Timur meliputi Kecamatan Angkona, Kalaena, Mangkutana, Nuha, Towuti dan Wasuponda dengan luas kawasan patahan aktif seluas 377,88 Ha.

Gambar 2.3 Peta Zona Kerentanan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur



(Sumber: Atlas Zona Kerentanan Likuifaksi Indonesia, Edisi Pertama, Kementerian ESDM, Badan Geologi, Tahun 2019)

Dalam peta zona kerentanan likuifaksi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur, ada zona dari wilayah yang memiliki kerentanan likuifaksi, terdiri dari;

1. Zona likuifaksi kerentanan tinggi lokasinya pada zona wilayah pesisir pantai Kecamatan Wotu.
2. Zona likuifaksi kerentanan sedang sebagian wilayah Kecamatan Burau, Wotu, Angkona, Towuti dan kerentanan rendah sebagian wilayah Kecamatan Malili.

Tabel 2.8 Data Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jenis Bencana

	Banjir	Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan dan Lahan	Orang Hilang/Tenggelam	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Cuaca Ekstrem
2019	29	14	15	9	5	45	13
2020	7	4	1	8	6	102	14
2021	2	10	0	5	2	153	6
2022	6	12	18	6	6	246	21
2023	8	19	30	7	3	267	7
Total	52	59	64	35	22	813	61

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur, Tahun 2024

3. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Daerah.

Kerangka kerja penanggulangan bencana kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan UU penanggulangan bencana no. 27 tahun 2007 dan Peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terdapat 3 (tiga) tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi *Tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana* yang menjadi dasar acuan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Luwu Timur oleh stakeholder terkait, masyarakat dan dunia usaha. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Kerangka kerja pra bencana.

dengan melakukan peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana pada daerah prioritas. Pencegahan dan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah Partisipasi Multipihak, Keadilan, Kesetaraan, Profesionalisme, Kemandirian, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Tepat sasaran/efektif, dan Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

b. Kerangka kerja pada saat kejadian bencana.

Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan.

c. Kerangka kerja pasca bencana.

Kerangka kerja pada fase pascabencana dapat dilakukan dengan melibatkan semua sektor terkait untuk melaksanakan aksi rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana. Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dapat meliputi perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan bidang ekonomi, social dan budaya, dan perbaikan kondisi lingkungan. Pemulihan dampak bencana dapat pula dilakukan dengan membentuk budaya mandiri pada masyarakat agar secara mandiri memiliki kesadaran untuk membangun kembali wilayahnya.

2.1.1.9 Demografi.

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

1. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2019	154.978	145.396	300.374	87.534
2	2020	155.726	146.313	302.039	89.380
3	2021	157.367	147.571	304.938	91.006
4	2022	159.043	149.487	308.530	95.620
5	2023	161.542	151.682	313.404	98.614

Sumber data : Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur 2024

** : Data Kependudukan Kabupaten Luwu Timur Semester II Tahun 2023*

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan .Tabel di atas menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur menurut jenis kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga tahun 2019 sampai dengan 2023

Perkembangan jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Berdasarkan Data Kependudukan Semester II Tahun 2023 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 313.404 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar

161.542 jiwa dan perempuan sebesar 151.862 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 98.614 jiwa.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mangkutana	22.523	22.437	22.363	22.351	22.551
2	Nuha	23.769	23.755	23.962	24.356	24.486
3	Towuti	42.391	43.597	44.899	46.120	48.076
4	Malili	42.882	43.421	44.096	45.178	45.833
5	Angkona	25.377	25.303	25.432	25.556	25.814
6	Wotu	33.569	33.732	33.925	34.171	24.723
7	Burau	35.197	35.100	35.292	35.303	35.655
8	Tomoni	26.578	26.773	26.930	27.346	27.727
9	Tomoni Timur	13.699	13.649	13.679	13.748	13.900
10	Kalaena	12.337	12.297	12.345	12.259	12.262
11	Wasuponda	22.052	21.975	22.015	22.142	22.357
	Jumlah	300.374	302.039	304.938	308.530	313.404

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024

* : Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2023

Tabel diatas menyajikan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 tercatat sebesar 313.404 jiwa . Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 4.874 jiwa jika dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya.

Jika di lihat pertambahan jumlah penduduk dalam kurun 5 tahun sejak 2019 sd 2023 jumlah pertambahan penduduk terbanyak terjadi di tahun 2023 .

Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)*	Jumlah Penduduk (jiwa)**	Kepadatan
1	Mangkutana	1.119,59	22.551	20.14
2	Nuha	756,71	24.486	32.36
3	Towuti	2.078,89	48.076	23.13
4	Malili	746,93	45.853	61.39
5	Angkona	293,96	25.814	87.81
6	Wotu	146,81	34.723	236.52
7	Burau	298,13	35.655	119.60
8	Tomoni	251,52	27.727	110.24
9	Tomoni Timur	49,43	13.900	281.21
10	Kalaena	84,93	12.262	144.38

11	Wasuponda	920,67	22.357	24.28
LUWU TIMUR		6.748,62	313.404	46.44

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

* : Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

** : Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 Tahun 2023

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Angka Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah **46.44** artinya setiap km², di huni oleh **46** jiwa. Terdapat perubahan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, dikarenakan data dimutakhirkan melalui Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi **6.748,62** km².

Dan jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, Kecamatan **Tomoni Timur** merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan kepadatan mencapai **281.21** jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan **Mangkutana** yaitu 20.14 jiwa/km². Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.12 Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mangkutana	11.409	11.142	22.551
2	Nuha	13.221	11.265	24.486
3	Towuti	25.460	22.616	48.076
4	Malili	23.712	22.141	45.853
5	Angkona	13.185	12.629	25.814
6	Wotu	17.346	17.377	34.723
7	Burau	18.018	17.637	35.655
8	Tomoni	14.058	13.669	27.727
9	Tomoni Timur	7.097	6.803	13.900
10	Kalaena	6.157	6.105	12.262
11	Wasuponda	11.879	10.478	22.357
Luwu Timur		161.542	151.862	313.404

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024

Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 tercatat sebesar 313.404 jiwa terdiri dari 161.542 jiwa laki-laki dan 151.862 jiwa perempuan. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Towuti dengan jumlah penduduk yaitu 48.076 jiwa yang terdiri dari 25.460 jiwa laki-laki dan 22.616 jiwa perempuan, di susul kecamatan Malili dengan jumlah penduduk sebesar 45.853 jiwa yang terdiri dari 23.712 jiwa laki-laki dan 22.141 jiwa perempuan .

Adapun Jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Luwu Timur berada di Kecamatan Kalaena dengan jumlah penduduk 12.262 jiwa yang terdiri dari 6.157 jiwa laki-laki dan 6.105 jiwa perempuan.

Tabel 2.13 Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2019	154.978	145.396	300.372	106,59
2020	155.726	146.313	302.039	106,43
2021	157.367	147.571	304.938	106,63
2022	159.043	149.487	308.530	106,39
2023	161.542	151.862	313.404	106,37

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024

** : Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2023*

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Jika dilihat dari tabel di atas jumlah Sex Ratio di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan angka di atas 100. Kondisi ini menunjukkan di Kabupaten Luwu Timur jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Untuk Tahun 2023 Angka Sex ratio sebesar 106,37 persen yang berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106-107 jiwa penduduk laki-laki.

3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

**Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Luwu Timur
2023**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 4	13.673	12.548	26.211
2	5 – 9	15.609	14.401	30.010
3	10 – 14	15.683	14.475	30.158
4	15 – 19	12.222	11.841	24.063
5	20 – 24	15.493	14.557	30.050
6	25 – 29	13.581	12.761	26.342
7	30 – 34	11.673	11.030	22.703
8	35 – 39	11.880	11.524	23.404
9	40 – 44	12.655	11.900	24.555
10	45 – 49	10.893	10.094	20.987
11	50 – 54	9.478	8.291	17.769
12	55 – 59	6.176	5.716	11.892
13	60 – 64	4.321	4.372	8.693
14	65 – 69	3.147	3.237	6.384
15	70 – 74	2.462	2.278	4.470
16	>=75	2.596	2.837	5.433
TOTAL		161.542	151.862	313.404

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024

* : Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2023

Pembagian penduduk pada kategori ini akan membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau yang lainnya.

Pada Tabel diatas tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk kelompok umur Balita (0-4) sebesar 26.211 jiwa. Hal ini menuntut pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan penduduk balita terutama dalam segi gizi dan kesehatan. Kompisisi penduduk usia anak-anak dan remaja yang berumur 5-19 tahun sebanyak 84.231 jiwa, di harapkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memberikan perhatian besar berkaitan dengan pendidikan terhadap anak usia sekolah ini.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RKPD 2025 Kabupaten Luwu Timur terlebih dahulu perlu menggambarkan capaian indikator setiap variabel. Indikator

variabel aspek kesejahteraan yang dimaksud dikategorikan ke dalam, 1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dan 2) Kesejahteraan Sosial.

2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 30,7 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,29 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 28,41 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari 16,35 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 17,93 triliun rupiah pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Luwu Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 9,66 persen, lebih tinggi 7,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha, serta tidak dipengaruhi inflasi.

Tabel 2.15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	%	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66
Sulawesi Selatan	%	6,91	-0,71	4,65	5,09	4,51
Nasional	%	5,02	2,07	3,69	5,31	5,05

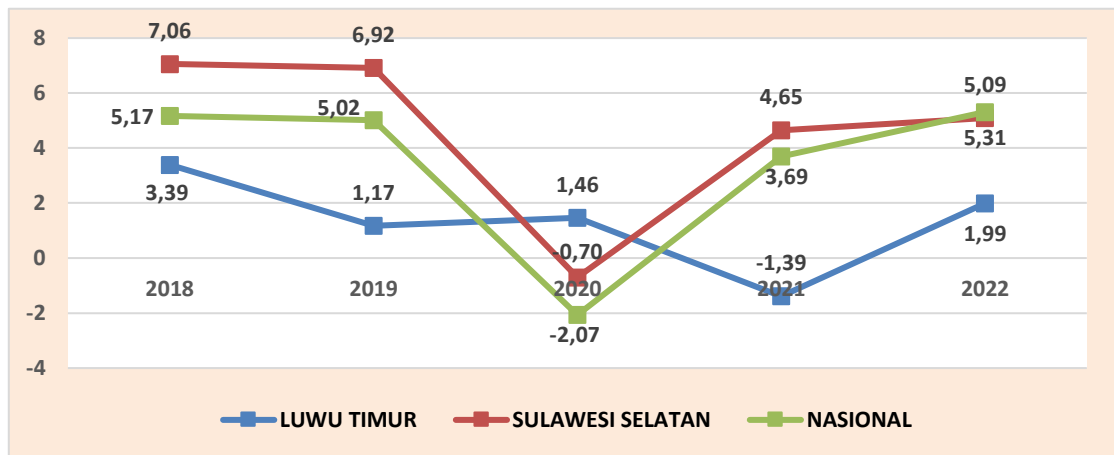
Sumber : Kab. Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.16 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Capaian Wilayah Regional Luwu Raya Tahun 2019 - 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66
LUWU UTARA	7,11	-0,59	3,90	4,54	5,12
LUWU	6,26	1,30	6,03	5,69	5,64
PALOPO	6,75	0,45	5,41	5,83	4,34

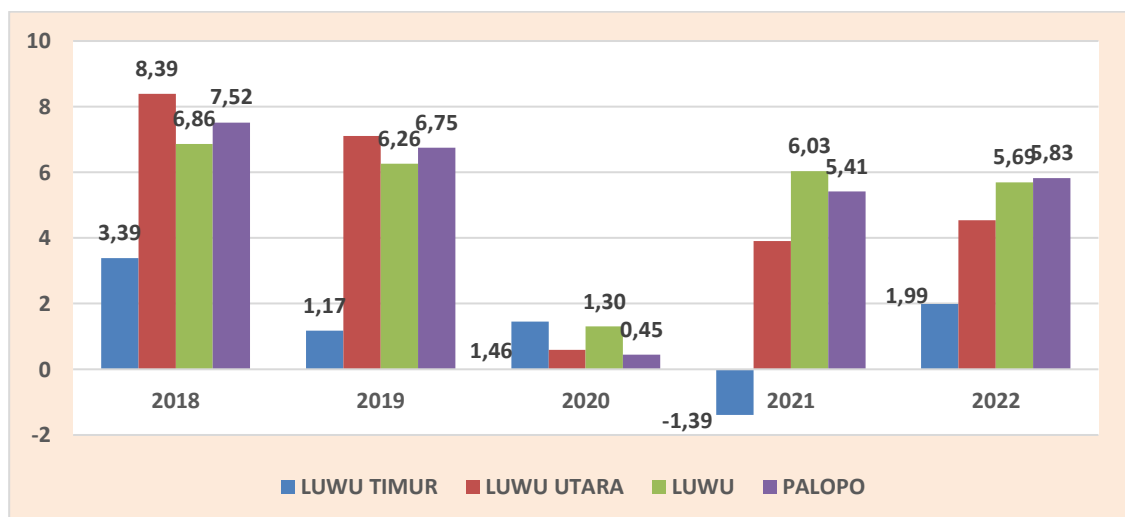
Sumber : Kab. Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024

Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

Grafik 2.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2023 (Data diolah)

Tabel 2.17 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019 s.d 2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55

D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F	Konstruksi	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
L	Real Estate	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
M	Jasa Perusahaan	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
O	Jasa Pendidikan	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
Q	Jasa lainnya	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu : (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

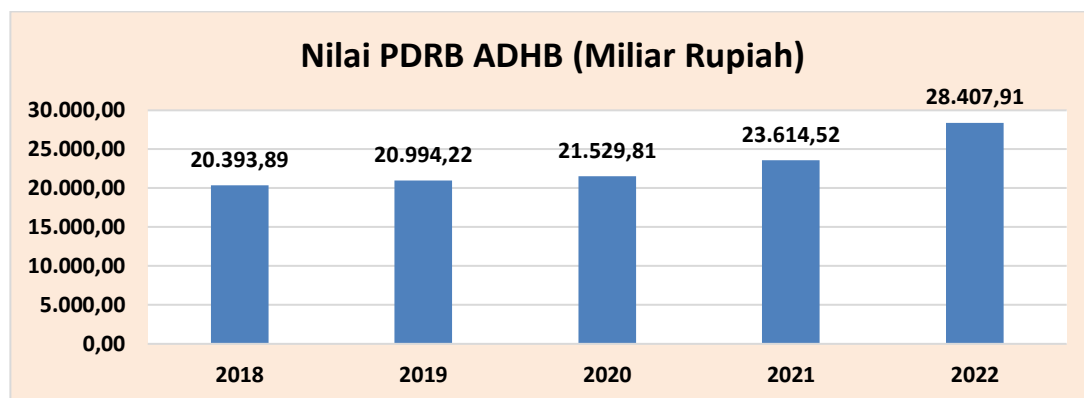
Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Luwu Timur. Apabila dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.18).

**Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar
Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.005,81	5.157,68	5.906,03	6.229,88	6.799,93
B	Pertambangan dan Penggalian	9.502,35	9.677,50	10.387,74	14.212,80	15,441,18
C	Industri Pengolahan	801,19	790,88	862,98	958,55	952,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,22	10,60	11,35	12,09	13,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,47	1,62	1,85	2,05	2,12
F	Konstruksi	2.192,08	2.269,46	2.544,55	2.752,09	3.017,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	882,67	883,23	961,72	1.077,26	1.162,10
H	Transportasi dan Pergudangan	164,43	147,15	167,57	200,23	221,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,13	41,37	42,48	48,38	50,15
J	Informasi dan Komunikasi	325,47	362,77	390,48	420,65	405,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	210,78	221,04	255,26	255,26	274,71
L	Real Estate	509,27	542,98	574,09	629,84	611,98
M,N	Jasa Perusahaan	12,10	11,27	11,94	13,20	14,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	566,44	573,81	613,94	636,87	696,14
P	Jasa Pendidikan	454,55	486,91	515,92	540,25	588,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,44	325,95	359,29	391,02	414,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	28,84	25,57	27,28	29,98	31,35
Produk Domestik Regional Bruto		20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.410,41	30.695,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

**Grafik 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kab. Luwu Timur**



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023

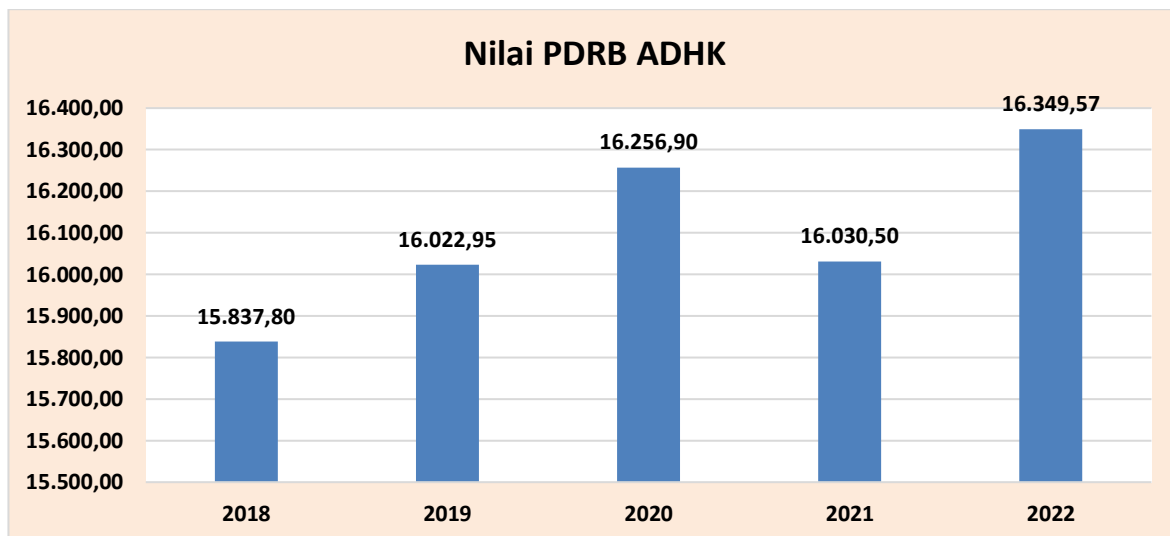
Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.183,97	3.175,95	3.308,98	3.254,37	3.293,12
B	Pertambangan dan Penggalan	8.447,71	8.587,77	7.916,77	8.048,03	9.395,08
C	Industri Pengolahan	521,87	507,75	541,15	581,75	566,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,03	10,52	11,17	11,79	12,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,21	1,32	1,47	1,61	1,65
F	Konstruksi	1.403,98	1.448,20	1.559,00	1.598,88	1.697,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	669,82	662,57	707,10	762,50	793,34
H	Transportasi dan Pergudangan	111,86	97,39	103,94	116,07	119,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,79	24,23	24,80	27,26	28,39
J	Informasi dan Komunikasi	294,89	328,12	353,19	376,91	364,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	141,69	147,33	154,80	158,81	164,95
L	Real Estate	295,87	313,48	331,40	351,83	354,14
M,N	Jasa Perusahaan	7,82	7,15	7,42	7,89	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348,46	345,81	366,50	377,25	406,18
P	Jasa Pendidikan	317,69	337,64	356,56	367,14	396,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,43	245,15	268,62	288,51	306,21

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
R,S,T,U	Jasa lainnya	18,86	16,54	17,62	18,91	19,63
Produk Domestik Regional Bruto		16.022,95	16.256,90	16.030,50	16.349,21	17.928,43

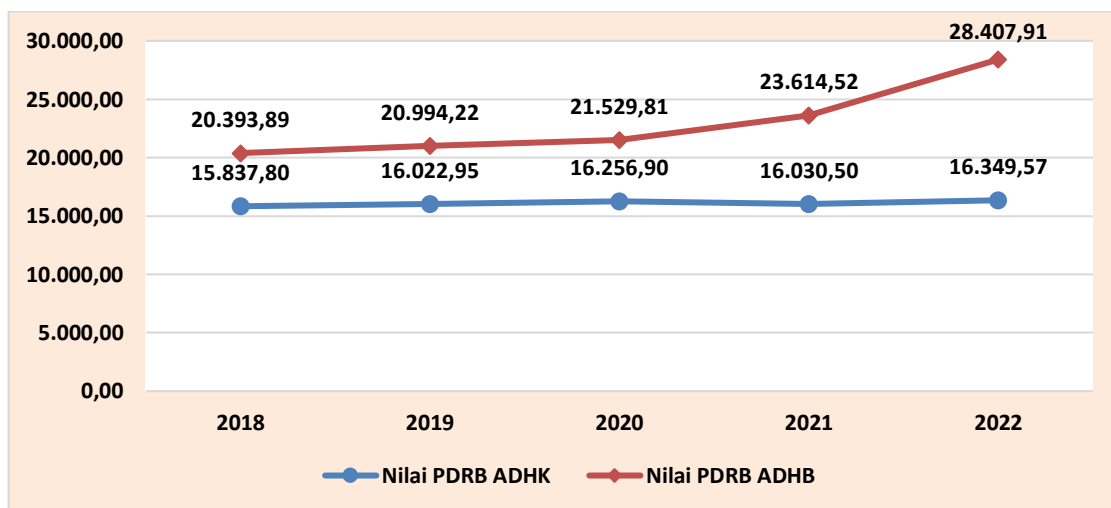
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

**Grafik 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2023 (Data diolah)

**Grafik 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2023

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Luwu Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi;

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan DRB Luwu Timur.

Tabel 2.20 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,84	23,96	25,01	21,93	22,15
B	Pertambangan dan Penggalian	45,26	44,95	43,99	50,03	50,30
C	Industri Pengolahan	3,82	3,67	3,65	3,37	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,44	10,54	10,78	9,69	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20	4,10	4,07	3,79	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,68	0,71	0,70	0,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16
J	Informasi dan Komunikasi	1,55	1,68	1,65	1,48	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	1,03	1,00	0,90	0,89
L	Real Estate	2,43	2,52	2,43	2,22	1,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,67	2,60	2,24	2,27
P	Jasa Pendidikan	2,17	2,26	2,18	1,90	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,51	1,52	1,38	1,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
F	Konstruksi	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
L	Real Estate	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
M,N	Jasa Perusahaan	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
P	Jasa Pendidikan	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

2. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun terdapat keterbatasan, Indikator PDRB perkapita ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 2.22 PDRB Perkapita dan PDRB Perkapita (ADHB) Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur						
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	71,34	72,85	78,71	93,36	99,49
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	54,45	55,01	53,43	53,73	58,11
Sulawesi Selatan						
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	57,18	55,68	59,50	65,35	69,70

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	37,47	36,25	33,23	31,98	
Nasional						
PDRB Perkapita (ADHB)	Juta	59,3	57,3	62,2		
PDRB Perkapita (ADHK)	Juta	41,02	39,78	40,78		

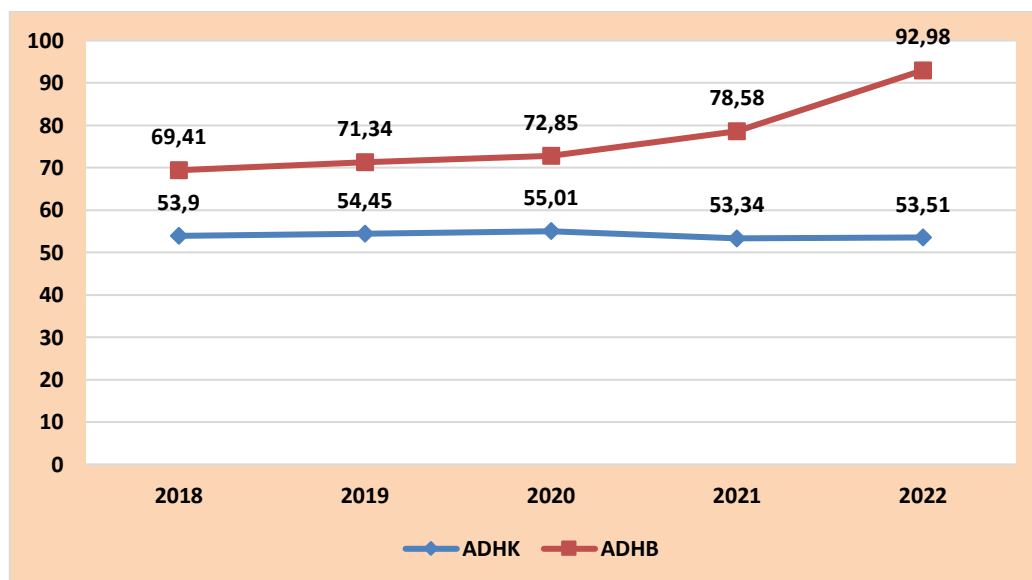
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, BPS Prov Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 2.23 Perbandingan PDRB Perkapita Kab. Luwu Timur dengan Kab. Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo

No	Uraian	PDRB Perkapita	
		2022	2023
1	Luwu Timur	93,36	99,49
2	Luwu Utara	48,66	53,45
3	Luwu	53,38	57,36
4	Palopo	51,45	54,47

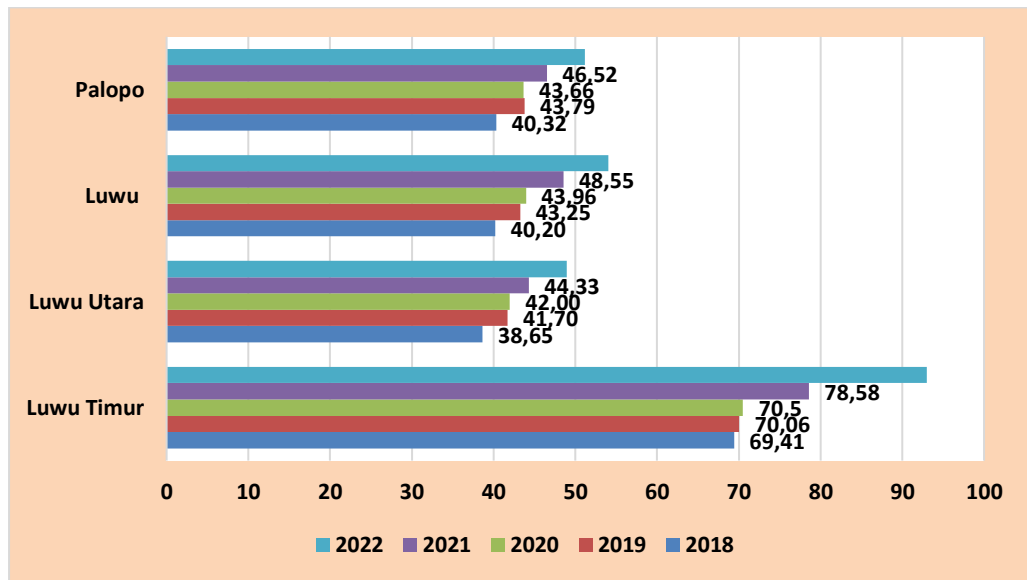
Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka, 2024

Grafik 2.9 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Luwu Timur Tahun (Dalam Juta Rupiah)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2022

Grafik 2.10 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur dengan wilayah setara Tahun 2018 - 2022

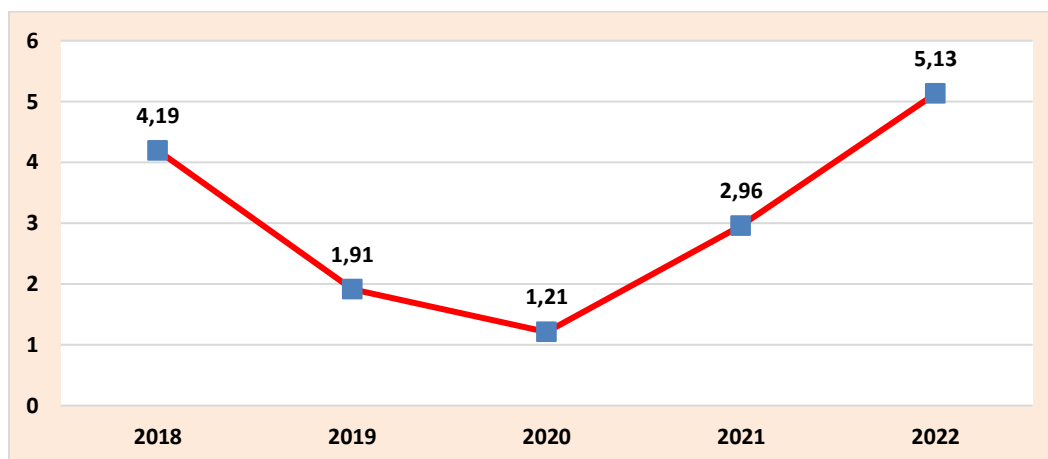


Sumber : BPS, 2023

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang di konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), meningkatnya biaya produksi secara terus menerus (*cost push inflation*) atau karena perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang. Naik turunnya harga ini dipantau secara mingguan, dua mingguan dan bulanan berdasarkan paket komoditas hasil pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2010. Survei Biaya Hidup juga menghasilkan Nilai Konsumsi Dasar (PoQo), yaitu nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi yang dikonsumsi pada tahun dasar (tahun dilakukannya SBH). Dalam harga yang dikumpulkan dan Nilai konsumsi hasil SBH diolah dalam bentuk indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tidak seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melaksanakan SBH, sehingga Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Palopo yang dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar.

Grafik 2.11 Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2019 - 2023 (Persen)



Sumber Data : Berita Resmi Statistik BPS Kota Palopo, 2023 (Data diolah)

4. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, *Poverty Gap Index* (P1)/Indeks Kedalaman Kemiskinan (Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan), dan *Poverty Severity* (P2)/Indeks Keparahan Kemiskinan (Ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin).

Tabel 2.24 Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan Kab. Luwu Timur dengan Wilayah Luwu Raya 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	6,98	6,85	6,94	6,81	6,93
LUWU UTARA	13,6	13,41	13,59	13,22	12,66
LUWU	12,76	12,65	12,59	12,49	12,71
PALOPO	7,82	7,85	8,14	7,78	7,69

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2024

Tabel 2.25 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2),

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

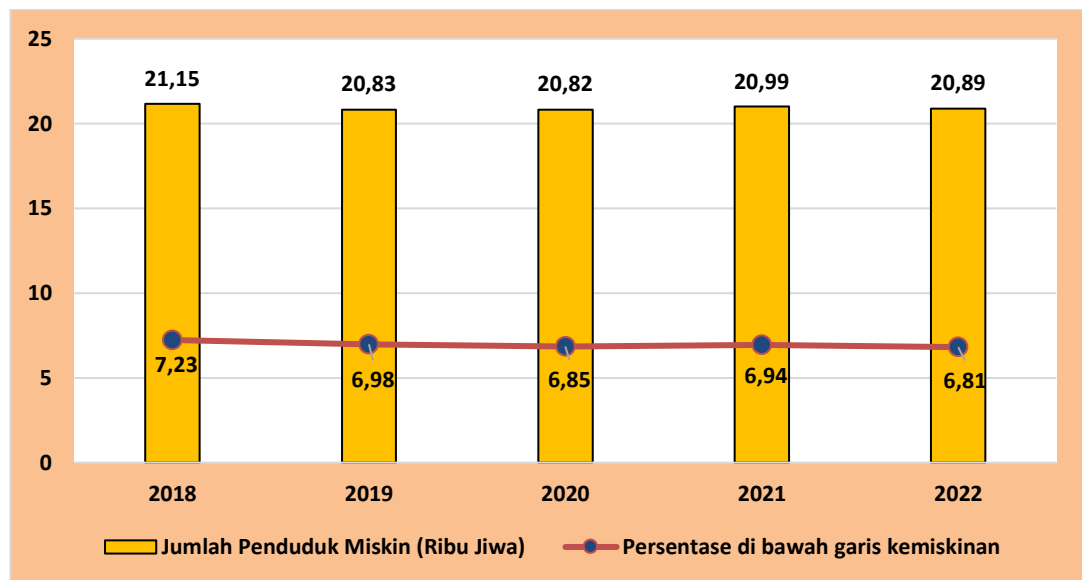
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persen		
2019	333.739	20,83	6,98	1,11	0,25
2020	350.576	20,82	6,85	1,05	0,24
2021	371.947	20,99	6,94	1,09	0,26
2022	394.158	20,89	6,81	0,80	0,16
2023	438.178	21,57	6,93	1,46	0,25

Sumber Data : Luwu Timur dalam Angka Tahun 2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2023 sebesar 21,57 ribu jiwa atau 6,93 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami kenaikan sebesar -0,68 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,93 persen juga naik sebesar 0,12 persen poin dari maret 2022. Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2019-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 20,83 ribu jiwa, lalu pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 20,82 ribu jiwa dan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,17 ribu jiwa menjadi 20,99 ribu jiwa dan Kembali turun pada tahun 2022 menjadi 20,89 ribu jiwa, dan kembali mengalami kenaikan 0,69 ribu jiwa menjadi 21,57ribu jiwa. Hal ini terjadi karena...

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sebesar 6,98 persen terhadap total penduduk, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020 mencapai 6,85 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, persentase kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,94 persen lalu di tahun 2022 kembali turun menjadi 6,81 persen dan Kembali mengalami kenaikan menjadi 6,93 persen ini Perubahan garis kemiskinan.

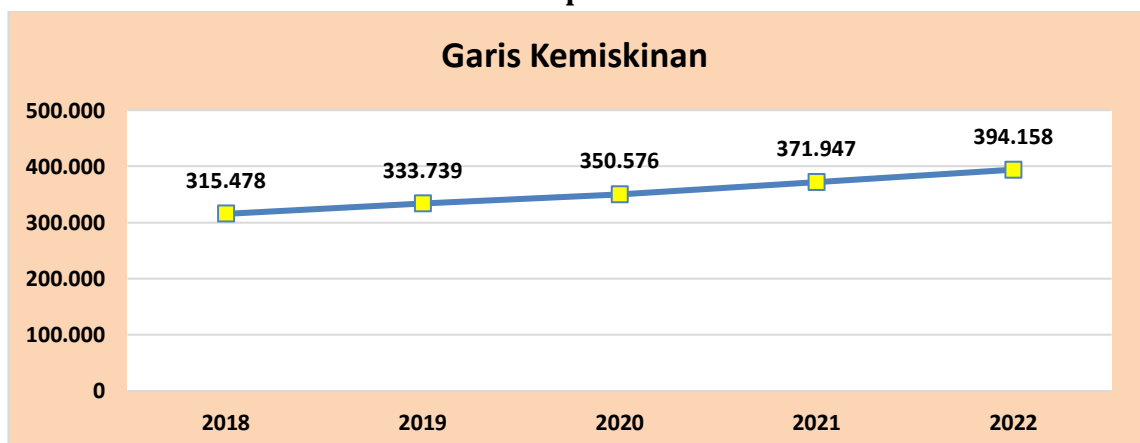
Grafik 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2022 (Data diolah)

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2018 Garis Kemiskinan sebesar 7,23 persen atau sebesar Rp 315.478,- perkapita/bulan. Selanjutnya di tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 5,79 persen. Pada tahun 2020, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan atau meningkat 5,04 persen. Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan. Terakhir pada tahun 2022 mencapai Rp394.158,- perkapita/bulan.

Grafik 2. 13 Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

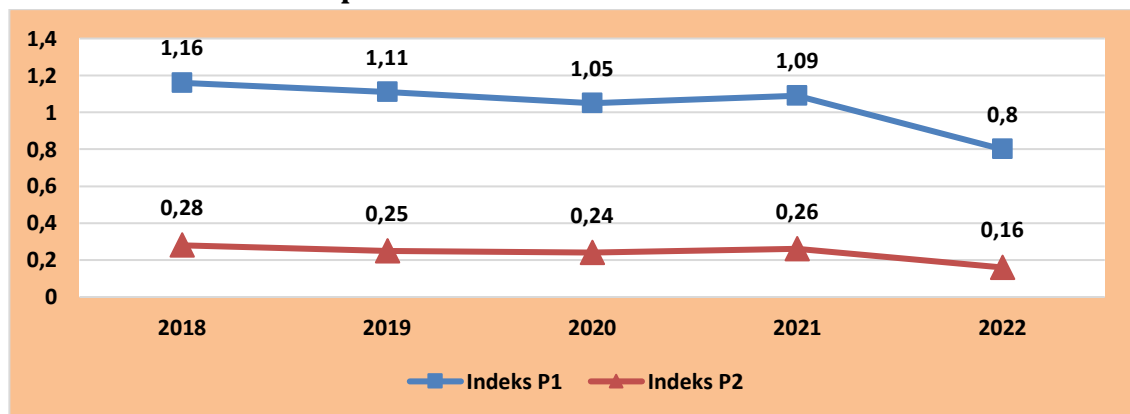


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2022 (Data diolah)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Keparahan Kemiskinan (P_2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Grafik 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Keparahan Kemiskinan (P_2)

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Selama 3 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2019, indeks P_1 mengalami penurunan menjadi 1,11 dan kembali menurun menjadi 1,05 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, Indeks P_1 mengalami kenaikan menjadi 1,09. Terakhir Kembali turun pada tahun 2022 menjadi 0,80. Dari perubahan Indeks P_1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2018 hingga 2020 semakin berkurang, meskipun di tahun 2021 kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan sempat bertambah namun kesenjangan pengeluaran tersebut Kembali berkurang pada tahun 2022.

Sejalan dengan Indeks P_1 , Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Luwu Timur pada periode lima tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks P_2 berangsur-angsur mengalami penurunan hingga tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun, seperti halnya indeks P_1 , Indeks Keparahan paling kecil terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 0,16.

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Indeks Gini memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Indeks Gini, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36. Untuk mendapatkan Indeks Gini, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut Bank Dunia.

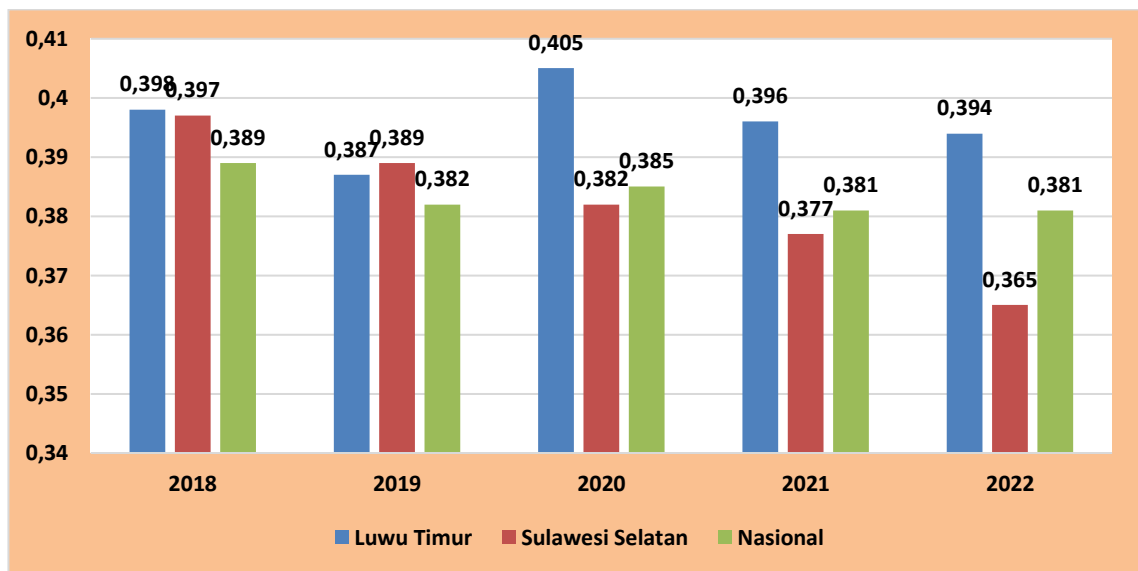
Tabel 2.26 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

WILAYAH	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	0,387	0,405	0,396	0,394	0,393
Sulawesi Selatan	0,389	0,382	0,377	0,365	0,377
Nasional	0,382	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 2024, BPS Tahun 2024

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 mencapai 0,387 dan mengalami kenaikan menjadi 0,393 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur masih berada diatas keduanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kondisi ketimpangan antar penduduk pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih baik dibandingkan dengan di Kabupaten Luwu Timur, seperti terlihat dalam Tabel 2.26 dan Grafik 2.15.

Grafik 2. 15 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



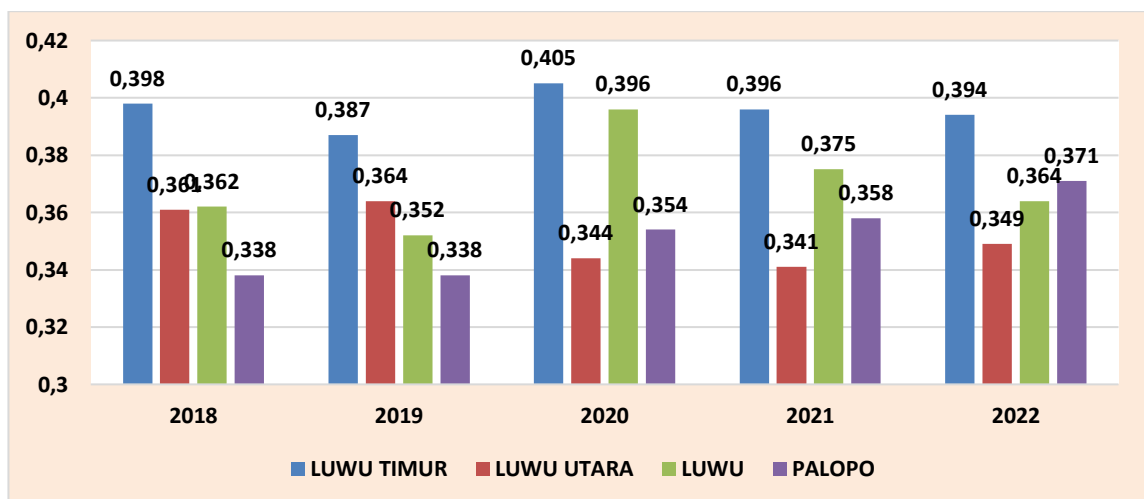
Sumber : BPS Tahun 2024

Tabel 2.27 Perbandingan Indeks Gini Luwu Timur dengan Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	0,387	0,405	0,396	0,394	0,393
LUWU UTARA	0,364	0,344	0,341	0,349	0,342
LUWU	0,352	0,396	0,375	0,364	0,341
PALOPO	0,338	0,354	0,358	0,371	0,367

Sumber : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Grafik 2. 16 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2023 (Data diolah)

Dari data Indeks Gini pada periode tahun 2018-2022, diketahui bahwa kabupaten Luwu Timur tidak pernah berada pada tingkat koefisien Indeks Gini yang rendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat, Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi terendah dalam pencapaian Indeks Gini nya kemudian Kabupaten Luwu yaitu sebesar 0,341 dan kemudian Kabupaten Luwu Utara sebesar 0,341.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas kesejahteraan sosial Kabupaten Luwu Timur dilakukan terhadap indikator-indikator bidang pendidikan dan kesehatan dengan uraian sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Capaian Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	72,80	73,22	73,34	73,92	75,84
LUWU UTARA	69,46	69,5	70,02	70,51	73,31
LUWU	70,39	70,51	70,85	71,36	73,23
PALOLO	77,98	78,06	78,38	78,91	80,77

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur mengalami kemajuan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. IPM Kabupaten Luwu

Timur meningkat dari 72,80 pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 73,22 di tahun 2020. Selama 2019-2023 IPM Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dan berada pada level “Tinggi” yaitu pencapaian IPM 70 ke atas sampai kurang dari 80.

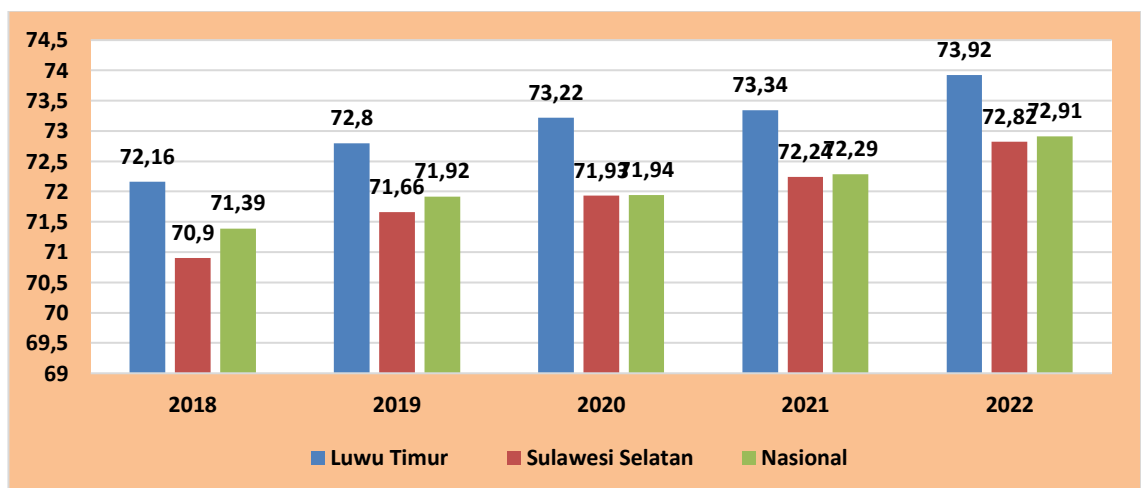
Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar Luwu Raya, capaian IPM Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi kedua setelah Kota Palopo dengan nilai 75,84 dan berada pada posisi pertama jika dibandingkan dengan wilayah setara kabupaten.

Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	72,80	74,71	74,83	75,41	75,84
Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	72,82	74,60
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Grafik 2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2022 (Data diolah)

Selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 73,92 diatas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 72,82 dan IPM Nasional yang sebesar 72,91. Tingginya pencapaian IPM

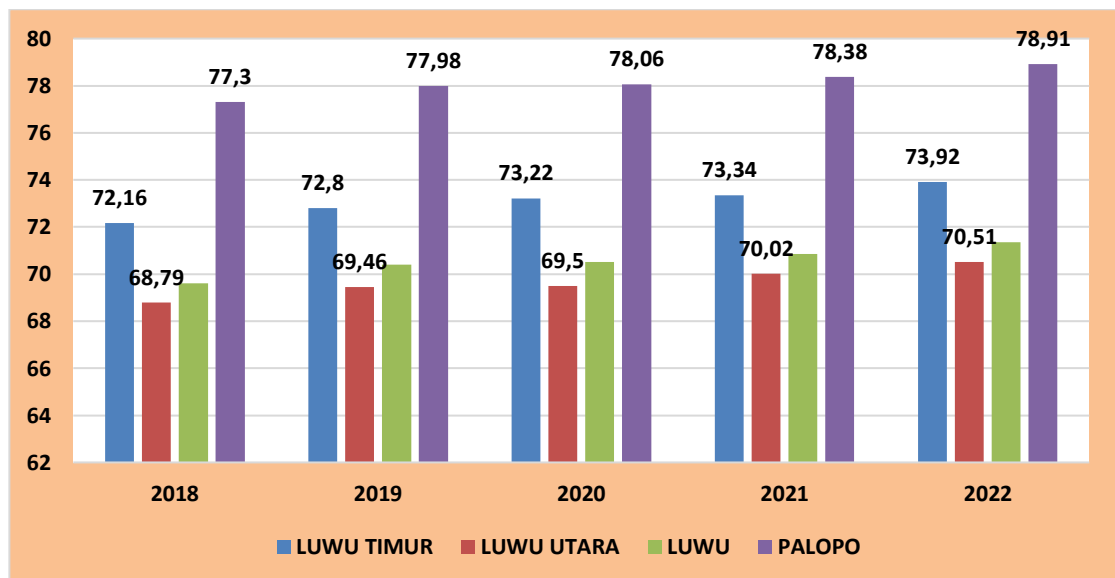
Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM, diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran per kapita per tahun.

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Capaian Wilayah Luwu Raya Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	72,80	74,71	74,83	75,41	75,84
LUWU UTARA	69,46	71,53	71,99	72,48	73,31
LUWU	70,39	71,58	71,92	72,42	73,23
PALOLO	77,98	79,39	79,72	80,24	80,77

Sumber Data : Luwu Timur dalam Angka 2024

Grafik 2.18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur dengan capaian dengan wilayah setara Luwu Raya Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mencapai 73,34. Pandemi covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 di banding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 tumbuh 0,12 point dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) di beberapa Kabupaten juga bervariasi. Hal ini berkaitan erat dengan iklim perekonomian dan social masing-masing daerah. IPM Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat

tertinggi, jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu dengan nilai 70,85 (tahun 2021) dan kemudian Kabupaten Luwu Utara dengan nilai 70,02 (tahun 2021).

Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2019-2023

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,38	70,53	70,63	70,94	74,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,82	12,83	12,84	13,00	13,01
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,54	8,80	8,81	8,92	8,93
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	12.886	13.058	13.451	8,92	8,93
IPM		72,80	74,71	74,83	75,41	75,84

Sumber data : Luwu Timur dalam Angka, Tahun 2024.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selama periode 2018-2022, peningkatan IPM didorong oleh kenaikan setiap komponen pembentuk IPM.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Luwu Timur telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,56 tahun. Selama periode tersebut, Umur Harapan Hidup secara rata-rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Luwu Timur hanya sebesar 72,16 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,94 tahun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur telah meningkat sebesar 0,05 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah bertambah 0,61 tahun.

Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh setiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur telah mencapai 13,00 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara dengan Diploma I. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Luwu Timur juga meningkat setiap tahun selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhannya yang positif ini merupakan modal

penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Luwu Timur yang lebih baik. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,92 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Luwu Timur mencapai 13,058 juta rupiah per tahun.

2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur meningkat Tahun 2021 sebesar 93,59 persen menurun jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,50. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32 Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka melek huruf (%)	95,72	95,50	93,59	96,30	94,96

Sumber data: luwu Timur dalam Angka, Tahun 2024

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke Angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 221.749 orang pada Agustus 2021 menjadi 225.805 orang pada Agustus 2022. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Luwu Timur. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 71,51 persen atau 161.470 orang merupakan Angkatan kerja, terdiri dari 154.240 orang penduduk bekerja dan 7.230 orang pengangguran.

Tabel 2.33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia kerja	212,9(Ribu)	217.684	221.749	225.805	227.135
Angkatan Kerja	143,7 (Ribu)	157.509	162.182	161.470	157.300
Bekerja	138,2 (Ribu)	150.480	154.130	154.240	148.779
Pengangguran	5,5 (Ribu)	7.029	8.052	7.230	8.521
Bukan Angkatan Kerja	69,3 (Ribu)	60.175	59.567	64.335	69,835
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,48	72,36	73,14	71,51	67,48

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2024

Jumlah Angkatan kerja pada Agustus 2022 mengalami penurunan sebesar 712 orang dibandingkan Agustus 2021. Pada Agustus 2022 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurun menjadi 71,51 persen dibandingkan Agustus 2021 (73,14). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Penurunan ini berbanding terbalik jika melihat perubahan yang terjadi antara tahun 2020 sampai 2021, dimana terjadi peningkatan TPAK sebesar 0,78 poin.

Tabel 2.34 Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luwu Timur	71,99	67,48	72,36	73,14	71,51
2	Sulawesi Selatan	63,93	63,8	63,4	64,73	66,18
3	Nasional	67,31	67,53	67,77	67,8	68,63

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2022

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator yang juga cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam setahun terakhir, pengangguran menurun sebanyak 822 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun sebesar 0,52 persen poin menjadi 4,48 persen atau 7.320 orang pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 yang mengalami penurunan menjadi sebesar 161.470 Orang, atau berkurang sebanyak 712 orang dibanding tahun 2021. Sementara penduduk yang bekerja di tahun 2022 mencapai 154.240 orang, atau meningkat sebanyak 110 orang dari tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada setiap tahunnya, belum dapat diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis untuk memberi peluang lebih besar

kepada masyarakat memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan lapangan kerjanya sendiri.

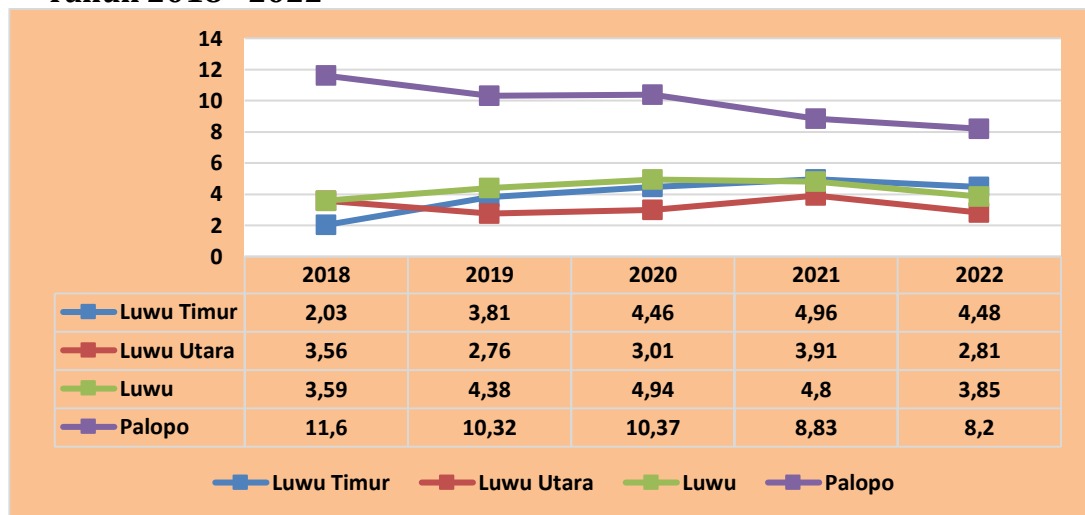
Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2024

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu Timur pada beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 pengangguran terbuka adalah sebesar 4,48%, turun sebesar 0,52% dari tahun sebelumnya (2021). Setiap daerah memiliki persoalan yang sama terkait dengan pengangguran terbuka. Seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, pengangguran terbuka tidak bisa dihilangkan.

Grafik 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Tabel 2.36 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luwu Timur	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42
2	Sulawesi Selatan	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
3	Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2024 BPS Provinsi Sulawesi

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.37 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 21 Unit Kerja Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,43	84,31	85,03	85,17	85,24

Sumber : Setdakab Luwu Timur Bagian Organisasi Tahun 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah 85,24 yang diperoleh dari 21 Unit Kerja Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Capil : 89,24
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 89,83
3. RSUD I Laga Ligo : 88,94
4. Puskesmas Burau : 85,58
5. Puskesmas Wotu : 87,02
6. Puskesmas Mangkutana : 89,83
7. Puskesmas Tomoni : 83,47
8. Puskesmas Tomoni Timur : 83,21
9. Puskesmas Kalaena : 85,17
10. Puskesmas Angkona : 84,61
11. Puskesmas Lakawali : 83,17
12. Puskesmas Parumpanai : 83,06
13. Puskesmas Malili : 85,10
14. Puskesmas Lampia : 84,91
15. Puskesmas Wasuponda : 84,13
16. Puskesmas Wawondula : 85,84
17. Puskesmas Timampu : 84,24
18. Puskesmas Mahalona : 83,32
19. Puskesmas Bantilang : 83,10
20. Puskesmas Nuha : 86,09
21. Puskesmas Bone Pute : 80,25

Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.3.1.1 Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bentuk pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak dalam rentang usia 3-6 tahun. PAUD memiliki tujuan untuk memberikan rangsangan dan pengalaman yang positif kepada anak-anak pada tahap perkembangan awal mereka. Program PAUD bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, sosial, emosional, dan moral.

Pentingnya PAUD dikaitkan dengan periode awal kehidupan anak yang dianggap sebagai masa kritis dalam pembentukan fondasi perkembangan anak. Melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada anak, PAUD berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan menyeluruh anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkembang secara optimal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.38 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sekolah	165	175	178	190	191
2	Jumlah Murid	7.562	7.961	8.125	6.606	7.139
3	Jumlah Guru	583	589	585	714	670

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Bila melihat tabel diatas, perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Luwu Timur meningkat setiap tahunnya yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah Sekolah PAUD dalam hal ini sekolah TK Negeri dan Swasta di

Kabupaten Luwu Timur begitupun dengan jumlah siswa PAUD pada Tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya anak bersekolah di usia dini dan PAUD yang menyenangkan ke orang tua siswa tentunya bekerjasama dengan stakeholder terkait.

Pada tabel Jumlah guru mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada beberapa guru yang telah lolos PPPK namun di tempatkan pada Jenjang SD sesuai kualifikasi Pendidikan yang mereka miliki sementara ada beberapa guru juga yang memilih untuk bekerja pada tempat lain sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Meningkatnya jumlah sekolah PAUD (TK) akan meningkatkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia PAUD yaitu 5 - 6 tahun memudahkan akses dan layanan penduduk untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD dan akan berdampak pada peningkatan APK PAUD di Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 2. 39 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

No	KECAMATAN	Jumlah Sekolah PAUD (TK)	Jumlah Siswa PAUD (TK)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (TK)
1	BURAU	26	899	75
2	WOTU	17	756	64
3	TOMONI	22	605	63
4	TOMONI TIMUR	11	247	33
5	ANGKONA	16	527	47
6	MALILI	26	1090	103
7	TOWUTI	27	1036	104

No	KECAMATAN	Jumlah Sekolah PAUD (TK)	Jumlah Siswa PAUD (TK)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD (TK)
8	NUHA	12	774	53
9	WASUPONDA	11	460	53
10	MANGKUTANA	15	477	51
11	KALAENA	8	268	24
	LUWU TIMUR	191	7139	670

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PAUD di Kab. Luwu Timur adalah 191 TK, yang terdiri atas 11 TK Negeri Pembina disetiap Kecamatan dan 180 TK Swasta di yang tersebar di setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur. Begitupun jumlah guru yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah PAUD. Bila dilihat perkembangan jumlah siswa PAUD (TK) mengalami peningkatan dari tahun 2022. Pada Tahun 2023 ini jumlah siswa PAUD sebanyak 7.139 siswa.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 yaitu APK Murid PAUD/TK 60.45%, APK Murid SD/Sederajat 98.87% dan APK Jenjang SMP/Sederajat adalah 92,78 %.

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	APK PAUD	%	45,71	46,11	49,31	56,62	60,45
2	APK SD/MI/Paket A	%	102,94	103,13	99,41	103,04	98,87
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	103,50	103,56	97,37	90,23	92,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Bila dilihat perkembangan APK PAUD dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun nilai APK PAUD ini masih belum maksimal dimana pada tahun 2023 ini baru mencapai 60.45 persen. Hal ini

dikarenakan belum adanya regulasi terkait keharusan siswa usia dini untuk bersekolah pada jenjang PAUD, namun peningkatan yang terjadi saat ini tentunya karena adanya beberapa sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dan juga atas kesadaran orang tua siswa untuk memberikan pendidikan pada anak mereka sejak usia dini.

Perkembangan APK SD/MI/Paket A mengalami penurunan di tahun 2023 yakni hanya mencapai 98.87 persen. Jika di hitung masih ada sekitar 1.13 persen warga Luwu Timur yang belum bersekolah pada usia Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dimana beberapa orang tua lebih memilih anaknya ikut bekerja bersama orang tuanya dari pada ikut bersekolah. Hal lain yang berpengaruh terhadap menurunnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu Timur adalah pada jenjang Kesetaraan jumlah siswa yang mengikuti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga sudah berkurang dari tahun sebelumnya.

Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B sampai di tahun 2023 sudah mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 mencapai 92.78 persen. Hal ini disebabkan karena adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik kepada masyarakat yaitu dengan memperbaiki aksesibilitas Pendidikan dengan memastikan ketersediaan sekolah yang layak bagi siswa diantaranya melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah yang rusak dan juga meningkatkan infrastruktur Pendidikan terutama transportasi menuju sekolah. Namun jika dilihat dari jumlah tersebut masih terdapat 7.22 persen warga Luwu Timur yang belum bersekolah di Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.41 Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH SISWA TK/RA/Sederajat	JUMLAH ANAK USIA 4-6 TAHUN	APK PAUD
1	BURAU	899	1256	71,58
2	WOTU	756	1363	55,47
3	TOMONI	605	1000	60,50
4	TOMONI TIMUR	247	461	53,58
5	ANGKONA	527	951	55,42
6	MALILI	1090	1.847	59,01
7	TOWUTI	1036	2.011	51,52
8	NUHA	774	896	86,38
9	WASUPONDA	460	854	53,86
10	MANGKUTANA	477	744	64,11
11	KALAENA	268	426	62,91
LUWU TIMUR		7.139	11.809	60,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa Partisipasi tertinggi untuk jenjang PAUD terdapat pada kecamatan Nuha dengan APK 86.38 persen dan yang APK PAUD yang terendah terdapat pada Kecamatan Towuti dengan APK 51.52 persen. Nilai APK PAUD ini masih belum maksimal yakni di tahun 2023 mencapai 60.45%.

Tabel 2.42 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	KECAMATAN	Jumlah Siswa SD/MI/PAKET A	Jumlah Anak Usia 7 - 12 Tahun	(APK) SD/MI/PAKET A
1	BURAU	3.819	4.045	94,41
2	WOTU	3.789	3.921	96,63
3	TOMONI	3.458	3.124	110,69
4	TOMONI TIMUR	1.348	1.423	94,73
5	ANGKONA	2.458	2.899	84,79
6	MALILI	5.702	5.787	98,53
7	TOWUTI	6.680	6.047	110,47
8	NUHA	2.771	2.736	101,28
9	WASUPONDA	2.385	2.579	92,48
10	MANGKUTANA	2.126	2.332	91,17
11	KALAENA	1.167	1.218	95,81
	LUWU TIMUR	35.703	36.111	98,87

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tertinggi adalah Kecamatan Tomoni dengan APK 110.69 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Angkona dengan APK 84,79 persen. Perkembangan APK SD/MI/Paket A sampai di tahun 2023 mengalami penurunan yakni di tahun 2023 sebesar 98.87 persen.

Tabel 2.43 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2.259	2.099	107,62
2	WOTU	1.646	1.916	85,91
3	TOMONI	1.558	1.623	96,00
4	TOMONI TIMUR	792	734	107,90
5	ANGKONA	1.211	1.469	82,44
6	MALILI	2.608	2.747	94,94

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	(APK) SMP/MTs/PAKET B
7	TOWUTI	2.495	2.830	88,16
8	NUHA	1.098	1.343	81,76
9	WASUPONDA	1.258	1.426	88,22
10	MANGKUTANA	1.212	1.218	99,51
11	KALAENA	559	590	94,75
Luwu Timur		16.696	17.995	92,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tertinggi adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan APK 107.90 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Nuha dengan APK 81.76 persen. Perkembangan APK SMP/MTs/Paket B sampai di tahun 2023 mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 ini mencapai 92.78 persen.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam suatu tingkat pendidikan tertentu. APM menggambarkan persentase populasi siswa pada kelompok usia yang seharusnya berada pada tingkat pendidikan tertentu.

APM mengukur seberapa banyak siswa pada kelompok usia yang seharusnya berada pada tingkat pendidikan tertentu benar-benar berada di situ. Angka ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan dan dapat memberikan informasi tentang sejauh mana masyarakat dapat memberikan akses pendidikan pada kelompok usia yang seharusnya mengikuti tingkat pendidikan tersebut. Semakin tinggi APM, semakin baik tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan pada tingkat tertentu.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 2.44 Angka Partisipasi Murni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	APM SD/MI/Paket A	%	92,39	92,54	93,07	99,65	97,08
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	95,97	95,99	85,13	89,64	91,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Paket A pada tahun 2023 adalah 97.08 persen, Realisasi tersebut diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak **35.056** siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak **36.111** jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.97 persen sehingga terealisasi sebesar 97.08 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 89.64 persen meningkat sebesar 2.17 persen pada tahun 2023 menjadi 91.81 persen. Realisasi tersebut diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 16.521 siswa dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 17.995 jiwa sehingga terealisasi sebesar 91.81 persen.

Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Paket B pada Tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jarak sekolah yang mungkin cukup jauh dari rumah penduduk, selain itu masalah kemiskinan yang masih terdapat di sebagian masyarakat kita sehingga mereka masih sulit memenuhi kebutuhan dasar termasuk biaya pendidikan sehingga keluarga miskin lebih memilih untuk bekerja.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap rendahnya Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan SMP Sederajat adalah karena masih banyak orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke Luar Kabupaten Luwu Timur dengan alasan memilih sekolah Agama atau Pesantren yang lebih berkualitas sehingga sangat berdampak terhadap nilai APM di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH SISWA SD/MI/PAKET A USIA 7-12 TAHUN	JUMLAH ANAK USIA 7 - 12 TAHUN	APM SD/MI/PAKET A
1	BURAU	3.762	4.045	93,00
2	WOTU	3.595	3.921	91,69
3	TOMONI	3.397	3.124	108,74

No	KECAMATAN	JUMLAH SISWA SD/MI/PAKET A USIA 7-12 TAHUN	JUMLAH ANAK USIA 7 - 12 TAHUN	APM SD/MI/PAKET A
4	TOMONI TIMUR	1.302	1.423	91,50
5	ANGKONA	2.397	2.899	82,68
6	MALILI	5.699	5.787	98,48
7	TOWUTI	6.650	6.047	109,97
8	NUHA	2.689	2.736	98,28
9	WASUPONDA	2.369	2.579	91,86
10	MANGKUTANA	2.086	2.332	89,45
11	KALAENA	1.110	1.218	91,13
LUWU TIMUR		35.056	36.111	97,08

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tertinggi adalah Kecamatan Towuti dengan APM 109,97 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Angkona dengan APM 82,68 persen. Salah satu penyebab tingginya nilai APM SD di kabupaten luwu Timur yaitu karena adanya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di kabupaten Luwu Timur dengan ditunjang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

**Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Menurut Kecamatan Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa SMP/MTs/PAKET B USIA 13-15 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN	APM SMP/MTs/PAKET B
1	BURAU	2.329	2.099	110,96
2	WOTU	1.611	1.916	84,08
3	TOMONI	1.521	1.623	93,72
4	TOMONI TIMUR	792	734	107,90
5	ANGKONA	1.210	1.469	82,37
6	MALILI	2.594	2.747	94,43
7	TOWUTI	2.525	2.830	89,22
8	NUHA	1.001	1.343	74,53
9	WASUPONDA	1.194	1.426	83,73
10	MANGKUTANA	1.185	1.218	97,29
11	KALAENA	559	590	94,75
LUWU TIMUR		16.521	17.995	91,81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B tertinggi adalah Kecamatan Burau

dengan APM 110,96 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda dengan APM 74,53 persen.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah suatu indikator yang mengukur proporsi atau persentase penduduk dalam kelompok usia tertentu yang terdaftar atau mengikuti pendidikan formal pada tingkat pendidikan tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat dalam kelompok usia tertentu terlibat dalam sistem pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah dapat dihitung untuk berbagai tingkat pendidikan, seperti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Indikator ini membantu pemerintah, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk memantau tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dalam berbagai kelompok usia. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah sering dianggap sebagai indikator positif karena menunjukkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Indikator ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0 -100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	APS SD/MI	%	95,93	95,95	90,87	97,09	94,54
2	APS SMP/MTs	%	98,37	98,49	71,00	82,67	84,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Bila dilihat pada tabel diatas perkembangan APS 7-12 tahun sampai di tahun 2023 untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan yakni di tahun 2023 ini turun menjadi 94,54%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun digunakan untuk menghitung partisipasi anak usia 7-12 tahun di Kab. Luwu Timur yang bersekolah. Sementara itu perkembangan APS 13-15 tahun pada tahun 2023 mengalami peningkatan yakni di tahun 2023 naik dari 82.67% menjadi 84.73 persen di tahun 2023.

Rendahnya Tingkat partisipasi sekolah baik di jenjang SD Sederajat maupun di Jenjang SMP Sederajat masih banyak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan yang terjadi di Sebagian kecil warga Luwu Timur utamanya bagi warga pendatang yang sudah berdomisili atau menetap di Kabupaten Luwu Timur.

Selain itu faktor tingginya kesadaran orang tua dengan Pendidikan Agama sehingga banyak orang tua siswa yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah Pendidikan Agama atau Pesantren yang berkualitas di Luar Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.48 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA USIA 7-12 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK USIA 7 - 12 TAHUN	APS SD/MI
1	BURAU	3.760	4.045	92,95
2	WOTU	3.595	3.921	91,69
3	TOMONI	3.397	3.124	108,74
4	TOMONI TIMUR	1.302	1.423	91,50
5	ANGKONA	2.397	2.899	82,68
6	MALILI	5.642	5.787	97,49
7	TOWUTI	5.816	6.047	96,18
8	NUHA	2.689	2.736	98,28
9	WASUPONDA	2.369	2.579	91,86
10	MANGKUTANA	2.063	2.332	88,46
11	KALAENA	1.110	1.218	91,13
LUWU TIMUR		34.140	36.111	94,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tertinggi adalah Kecamatan Tomoni yaitu 108,74 persen dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang terendah adalah Kecamatan Wotu dengan APS 88,46%.

Tabel 2.49 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Menurut Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA USIA 13-15 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15TAHUN	APS SMP/MTs
1	BURAU	2.305	2.099	109,81
2	WOTU	1.526	1.916	79,65
3	TOMONI	1.293	1.623	79,67
4	TOMONI TIMUR	792	734	107,90
5	ANGKONA	1.210	1.469	82,37
6	MALILI	2.253	2.747	82,02
7	TOWUTI	2.087	2.830	73,75
8	NUHA	1.001	1.343	74,53
9	WASUPONDA	1.194	1.426	83,73
10	MANGKUTANA	1.061	1.218	87,11

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA USIA 13-15 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK USIA 13-15TAHUN	APS SMP/MTs
11	KALAENA	525	590	88,98
	LUWU TIMUR	15.247	17.995	84,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tertinggi adalah Kecamatan Burau dengan APS 109,81% dan yang terendah adalah Kecamatan Towuti dengan APS 73,75%.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merujuk pada jumlah individu yang tidak menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat tertentu, biasanya tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Orang yang mengalami putus sekolah dianggap keluar dari sistem pendidikan sebelum menyelesaikan program yang seharusnya.

Angka putus sekolah sering diukur sebagai persentase dari jumlah siswa yang diharapkan menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu pada usia tertentu, tetapi yang sebenarnya keluar sebelum menyelesaikannya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk alasan ekonomi, sosial, atau pribadi.

Angka putus sekolah yang tinggi dapat menjadi indikator masalah dalam sistem pendidikan atau masyarakat. Pendidikan yang tidak diselesaikan dapat berdampak negatif pada perkembangan individu dan membatasi peluang ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menjadi tujuan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka Putus Sekolah di suatu daerah diharapkan menurun setiap tahunnya. Adapun capaian Angka Putus sekolah di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.50 Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Angka Putus Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	0,1	0,07	0,40	0,32	0
2	SMP/MTs	0,21	0,20	1,42	1,12	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan angka putus sekolah di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun 2023 capaian Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD dan SMP Sederajat menunjukkan angka yang sangat baik yaitu 0.

**Tabel 2. 51 Angka Putus Sekolah Kab. Luwu Timur
Menurut Kecamatan Tahun 2023**

NO.	KECAMATAN	ANGKA PUTUS SEKOLAH SD/MI	ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS
1	Burau	0	0
2	Wotu	0	0
3	Tomoni	0	0
4	Tomoni Timur	0	0
5	Mangkutana	0	0
6	Kalaena	0	0
7	Angkona	0	0
8	Malili	0	0
9	Wasuponda	0	0
10	Nuha	0	0
11	Towuti	0	0
Angka Putus Sekolah		0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

6. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun capaian angka kelulusan SD/MI dan SMP /MTs dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.52 Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lulus	5.476	5.522	5.371	5.232	5.577
2	Tidak Lulus	26	14	1	8	0
Angka Kelulusan (%)		99,62	99,62	99,55	99,98	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka kelulusan SD/MI adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SD/MI. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SD/MI yakni di tahun 2023 ini mencapai 100 persen dari 5.577 siswa yang terdaftar sebagai peserta ujian, seluruh peserta dinyatakan Lulus.

Tabel 2. 53 Angka Kelulusan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Peserta Ujian Tingkat SD / MI	Jumlah Siswa Lulus Tingkat SD / MI	Persentase Kelulusan SD / MI %
1	BURAU	628	628	100
2	WOTU	601	601	100
3	TOMONI	537	537	100
4	TOMONI TIMUR	233	233	100
5	ANGKONA	413	413	100
6	MALILI	877	877	100
7	TOWUTI	872	872	100
8	NUHA	404	404	100
9	WASUPONDA	409	409	100
10	MANGKUTANA	388	388	100
11	KALAENA	215	215	100
LUWU TIMUR		5.577	5.577	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian angka kelulusan di Kabupaten Luwu Timur untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 yang mencapai 100 persen dihitung dari jumlah seluruh peserta ujian pada jenjang SD/MI dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian dikalikan 100% sehingga dari 5.577 peserta ujian seluruhnya dinyatakan lulus.

Tabel 2.54 Angka Kelulusan SMP/MTs Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lulus	5.171	5.194	5.189	5.671	4.883
2	Tidak Lulus	62	26	10	0	63
Angka Kelulusan (%)		98,82	99,5	99,81	100	99,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka kelulusan SMP/MTs adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan yakni SMP/MTs. Bila dilihat pada tabel diatas Angka kelulusan untuk SMP/MTs tahun 2023 mencapai 99,00 persen. Dari jumlah peserta ujian 4.883 siswa, ada 63 siswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian.

**Tabel 2. 55 Angka Kelulusan SMP/MTs Menurut Kecamatan
Kab. Luwu Timur Tahun 2023**

NO	KECAMATAN	Jumlah Peserta Ujian Tingkat SMP / MTs	Jumlah Siswa Lulus Tingkat SMP / MTs	Persentase Kelulusan SMP / MTs
1	BURAU	678	678	100
2	WOTU	522	522	100
3	TOMONI	497	497	100
4	TOMONI TIMUR	229	226	99
5	ANGKONA	480	446	93
6	MALILI	659	652	99
7	TOWUTI	657	638	97
8	NUHA	405	405	100
9	WASUPONDA	348	348	100
10	MANGKUTANA	323	323	100
11	KALAENA	148	148	100
JUMLAH		4.946	4.883	99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian angka kelulusan di Kabupaten Luwu Timur untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2023 mencapai 99 persen dihitung dari jumlah seluruh peserta ujian pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian dikalikan 100 persen. Dari 4.946 peserta ujian 4.883 yang dinyatakan lulus dan 63 siswa yang dinyatakan tidak lulus, hal ini disebabkan karena siswa tersebut tidak hadir pada saat Ujian berlangsung.

7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan didefinisikan sebagai Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu. Dengan kata lain, AM SD/MI ke SMP/MTs dihitung dengan menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang akhir tingkat SD yaitu kelas 6 dengan jumlah siswa tingkat awal jenjang sekolah selanjutnya yaitu siswa kelas 7 tingkat SMP/MTs. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini.

**Tabel 2.56 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	95,75	95,76	92,76	94,53	95,68

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa AM dari SD ke Jenjang SMP pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yakni 94.53 persen naik menjadi 95.68 persen di Tahun 2023. Tabel ini menggambarkan bahwa masih ada sekitar 4,31 pesen siswa Luwu Timur yang tidak melanjutkan sekolah.

Hal ini bukan berarti bahwa siswa tersebut tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun sebagian siswa memilih bersekolah di Luar Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 2. 57 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
Kab. Luwu Timur Tahun 2023 Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Siswa baru Tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Jumlah kelulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Angka Melanjutkan (%)
1	Burau	864	628	137,58%
2	Wotu	546	601	90,85%
3	Tomoni	488	537	90,88%
4	Tomoni Timur	264	233	113,30%
5	Mangkutana	420	413	101,69%
6	Kalaena	749	877	85,40%
7	Angkona	751	872	86,12%
8	Malili	342	404	84,65%
9	Wasuponda	330	409	80,68%
10	Nuha	388	388	100,00%
11	Towuti	194	215	90,23%
TOTAL		5.336	5.577	95,68%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Bila dilihat pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat beberapa Kecamatan dengan Angka Melanjutkan diatas 100%. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya sekolah-sekolah favorit di Kecamatan tertentu yang membuat banyak lulusan siswa yang melanjutkan sekolahnya di Kecamatan lain.

8. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik, digambarkan dengan melihat kondisi ruang kelas belajar (RKB) di setiap sekolah. Kondisi ruang kelas belajar berpengaruh pada proses belajar mengajar disekolah. Sehingga RKB dengan kondisi rusak ringan/berat memerlukan rehabilitasi untuk kelancaran proses belajar mengajar. Disamping itu Pembangunan atau rehabilitasi yang dilakukan secara terus-menerus setiap tahun untuk memberikan fasilitas terhadap layanan bidang

Pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan Angka partisipasi Sekolah di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.58 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Sekolah	Kondisi Ruang Kelas	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	Baik (%)	71,78	72,27	73,35	74,45	77,32
		Rusak Ringan/Sedang (%)	19,92	19,61	19,28	18,65	17,31
		Rusak Berat/Total (%)	8,30	8,12	7,37	6,90	5,37
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	1.531	1.540	1.546	1.550	1.583

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan kondisi Ruang Kelas Belajar (RKB) pada jenjang SD/MI di Kab. Luwu Timur. Dimana setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi RKB setiap tahun, selain itu adanya pembangunan maupun rehabilitasi RKB yang dilakukan setiap tahun yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Tabel 2. 59 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SD/MI Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	KECAMATAN	Kondisi RKB			Total Bangunan Gedung	Persentasi Capaian		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	BURAU	164	29	19	212	77,36%	13,68%	8,96%
2	WOTU	142	35	3	180	78,89%	19,44%	1,67%
3	MANGKUTANA	75	29	11	115	65,22%	25,22%	9,57%
4	TOMONI	136	11	3	150	90,67%	7,33%	2,00%
5	TOMONI TIMUR	56	15	0	71	78,87%	21,13%	0,00%
6	KALAENA	51	9	5	65	78,46%	13,85%	7,69%
7	ANGKONA	124	18	2	144	86,11%	12,50%	1,39%
8	MALILI	157	60	12	229	68,56%	26,20%	5,24%
9	WASUPONDA	59	19	18	96	61,46%	19,79%	18,75%
10	NUHA	106	11	2	119	89,08%	9,24%	1,68%
11	TOWUTI	154	38	10	202	76,24%	18,81%	4,95%
LUWU TIMUR		1224	274	85	1583	77,32%	17,31%	5,37%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kondisi RKB SD/MI disetiap Kecamatan berbeda-beda hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah sekolah pada Kecamatan tersebut. Untuk Kecamatan dengan persentase kondisi RKB dalam kondisi baik tertinggi adalah di Kecamatan Tomoni (90,67%) dan yang terendah adalah Kecamatan Wasuponda (61,46%).

Tabel 2.60 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Sekolah	Kondisi Ruang Kelas	2019	2020	2021	2022	2023
1	SMP/MTS	Baik (%)	77	78,51	80,36	81,40	81,89
		Rusak Ringan/Sedang (%)	17,26	15,91	14,83	14,04	13,68
		Rusak Berat/Total (%)	6,24	5,58	4,81	4,55	4,44
		Jumlah Bangunan Gedung (Unit)	481	484	499	527	541

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan perkembangan kondisi Ruang Kelas Belajar (RKB) pada jenjang SMP/MTs di Kab. Luwu Timur. Dimana setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi RKB setiap tahun, selain itu adanya penambahan maupun rehabilitasi RKB yang dilakukan setiap tahun yang memengaruhi kondisi tersebut.

Tabel 2. 61 Perkembangan Jumlah dan kondisi Ruang Kelas Sekolah Pendidikan SMP/MTS Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Kondisi RKB			Total Bangunan Gedung	Persentase Capaian		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	BURAU	18	31	12	61	29,51	50,82	19,67
2	WOTU	59	4	0	63	93,65	6,35	0,00
3	TOMONI	46	0	0	46	100,00	0,00	0,00
4	TOMONI TIMUR	25	3	0	28	89,29	10,71	0,00
5	ANGKONA	39	1	9	49	79,59	2,04	18,37
6	MALILI	30	3	0	33	90,91	9,09	0,00
7	TOWUTI	47	5	0	52	90,38	9,62	0,00
8	NUHA	71	8	0	79	89,87	10,13	0,00
9	WASUPONDA	36	3	0	39	92,31	7,69	0,00
10	MANGKUTANA	27	0	0	27	100,00	0,00	0,00

NO	KECAMATAN	Kondisi RKB			Total Bangunan Gedung	Persentase Capaian		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
11	KALAENA	45	16	3	64	70,31	25,00	4,69
JUMLAH		443	74	24	541	81,89	13,68	4,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa kondisi RKB SMP/MTs disetiap Kecamatan berbeda-beda hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah sekolah pada Kecamatan tersebut. Untuk Kecamatan dengan persentase kondisi RKB dalam kondisi baik tertinggi adalah di Kecamatan Tomoni dan Mangkutana (100%) dan yang terendah adalah Kecamatan Burau (29,51%).

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin banyak sekolah disuatu daerah maka semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah di suatu daerah sehingga akan memudahkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Di Tahun 2023 menunjukkan angka 50,27 persen, dengan kata lain terdapat 50,27 persen sekolah per 10.000 penduduk. Untuk melihat perkembangan rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.62 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	251	251	259	269	272
1.2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	51.749	52.042	53.477	54.391	54.106
1.3	Rasio	48,50	48,23	48,46	49,46	50,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel tersebut merupakan perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar yang menunjukkan ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk dimana setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif. hal ini dipengaruhi oleh Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya, namun penambahan Unit Sekolah Baru (USB) masih kurang.

Tabel 2.63 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah SD / MI dan SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar	Rasio
1	BURAU	32	6.144	52,08
2	WOTU	30	5.837	51,40
3	TOMONI	22	4.747	46,35
4	TOMONI TIMUR	16	2.157	74,18
5	ANGKONA	27	4.368	61,81
6	MALILI	39	8.534	45,70
7	TOWUTI	34	8.877	38,30
8	NUHA	17	4.079	41,68
9	WASUPONDA	20	4.005	49,94
10	MANGKUTANA	21	3.550	59,15
11	KALAENA	14	1.808	77,43
JUMLAH		272	54.106	50,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar menunjukkan jumlah ketersediaan sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar yaitu 7-12 tahun. Adapun capaian di tahun 2023 yaitu terdapat 50,27 sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar yaitu 7-12 tahun.

10. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan dasar. Dimana rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar terhadap murid dan bisa juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Adapun tabel rasio guru/murid Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut.

Tabel 2.64 Rasio Guru/Murid Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.326	1.465	1.925	2.065	2.445
1.2	Jumlah Murid	36.517	36.745	33.356	34.855	34.140

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.3	Rasio	363	399	577	592	716
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	792	818	945	1.094	1309
2.2	Jumlah Murid	16.276	16.411	15.678	15.288	15.247
	Rasio	487	498	603	715	859

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas, diketahui bahwa rasio guru/murid setiap tahunnya semakin bertambah dengan capaian di tahun 2023 untuk jenjang SD/MI mencapai 2.445 guru per 10.000 murid atau dengan kata lain perbandingan guru dan muridnya adalah 1 : 15. Sementara untuk jenjang SMP/MTS terdapat 1.309 guru per 10.000 murid atau 1 : 14 Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru dan murid di Kab. Luwu Timur sudah cukup baik bila dilihat kondisi ideal untuk rasio SD/MI adalah 1 : 22 dan untuk jenjang SMP/MTs adalah 1 : 27. Hanya saja masih diperlukan pemerataan guru disetiap jenjang pendidikan, serta untuk jenjang SMP perlu diperhatikan juga ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kualifikasi Pendidikan.

11. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar

a. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar tahun 2023

Tabel 2.65 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio
1	BURAU	203	3.760	53,99
2	WOTU	168	3.595	46,73
3	TOMONI	150	3.397	44,16
4	TOMONI TIMUR	73	1.302	56,07
5	ANGKONA	131	2.397	54,65
6	MALILI	66	5.642	11,70
7	TOWUTI	136	5.816	23,38
8	NUHA	248	2.689	92,23
9	WASUPONDA	115	2.369	48,54

No	Kecamatan	Jumlah Rombel SD/MI	Jumlah Murid SD/MI	Rasio
10	MANGKUTANA	125	2.063	60,59
11	KALAENA	250	1.110	225,23
LUWU TIMUR		1.665	34.140	48,77

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan perbandingan jumlah rombongan belajar per 1.000 jumlah murid pada jenjang SD/MI. Pada tahun 2023 rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan angka 48.77 yang berarti terdapat 48.77 rombongan belajar per 1.000 jumlah siswa SD/MI.

- b. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah pertama Tahun 2023

Tabel 2.66 Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah Rombel SMP/MTs	Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio
1	BURAU	80	2.305	34,71
2	WOTU	58	1.526	38,01
3	TOMONI	48	1.293	37,12
4	TOMONI TIMUR	26	792	32,83
5	ANGKONA	46	1.210	38,02
6	MALILI	26	2.253	11,54
7	TOWUTI	52	2.087	24,92
8	NUHA	62	1.001	61,94
9	WASUPONDA	35	1.194	29,31
10	MANGKUTANA	46	1.061	43,36
11	KALAENA	60	525	114,29
LUWU TIMUR		539	15.247	35,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar menunjukkan perbandingan jumlah rombongan belajar per 1.000 jumlah murid pada jenjang SMP/MTs. Pada tahun 2023 rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah menengah

pertama menunjukkan angka 35.35 yang berarti terdapat 35.35 rombongan belajar per 1.000 jumlah siswa SMP/MTs.

12. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Indikator ini merupakan persentase perbandingan antara banyaknya lulusan SD sederajat dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun.

Tabel 2.67 Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya Lulusan SD	5.746	5.522	5.371	5.232	5.577
2	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	5.911	5.938	6.079	5.955	6.017
3	Proporsi	97,21	92,99	88,35	87,86	92,69

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel diatas merupakan persentase perbandingan antara banyaknya lulusan SD dengan banyaknya penduduk usia 12 tahun yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah proporsi murid kelas 1 yang berhasil meamatkan sekolah dasar dimana pada tahun 2022 sebesar 87.85 persen meningkat menjadi 92.69 persen di tahun 2023.

13. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk disuatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Angka Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca dan menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Indikator ini dapat dijadikan gambaran peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu daerah. Angka melek huruf Kab Luwu Timur 2018-2022, selengkapnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyaknya Penduduk Usia 15-	57.591	57.591	55.564	55.474	54.438

No.	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
	24 Tahun Yang Melek Huruf					
2	Banyaknya Penduduk Usia 15-24 Tahun	57.686	57.956	55.896	55.639	54.597
3	Angka Melek Huruf (%)	99,84	99,37	99,41	99,70	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Bila dilihat pada tabel diatas, perkembangan persentase AMH 15-24 Tahun di Kab. Luwu Timur mengalami perubahan pada tahun ini. Pada tahun 2022 Angka Melek Huruf 15 – 24 tahun 99,70 persen, tahun 2023 meningkat 1 persen meningkat pada menjadi 99, 71 persen.

Tabel 2. 69 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk usia 15-24 Tahun yang melek huruf
1	BURAU	5.468
2	WOTU	4.592
3	TOMONI	4.997
4	TOMONI TIMUR	4.582
5	ANGKONA	4.310
6	MALILI	4.031
7	TOWUTI	4.482
8	NUHA	6.168
9	WASUPONDA	4.887
10	MANGKUTANA	4.723
11	KALAENA	6.198
JUMLAH		54.438

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka melek huruf usia 15-24 tahun merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf dengan total jumlah penduduk usia 15-24 tahun. Untuk capaian tahun 2023, jumlah penduduk melek huruf usia 15-24 tahun adalah 55.438 orang yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun di Kab. Luwu Timur sebanyak 55.597 orang sehingga diperoleh Persentasi AMH 15-24 tahun adalah 99.71%.

14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
a. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SD

**Tabel 2.70 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Dasar (SD)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah guru S1/DIV	1.025	1.020	1.637	1.713	2.095
2	Jumlah guru SD	1.108	1.135	1.915	1.827	2.195
Persentase		92,51	89,87	85,48	93,76	95,44

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang SD yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan keadaan guru (PNS) di Kab. Luwu Timur yang berubah-ubah setiap tahunnya. Sementara untuk Tahun 2023 terjadi penambahan jumlah total guru SD yang berpengaruh pada persentase capaian indikator ini. Pada Tahun 2023 terdapat 95,44 persen guru sekolah dasar yang telah berkualifikasi S1/DIV.

b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SMP

Tabel 2.71 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi SI/D-IV tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah guru S1/DIV	527	528	768	785	984
2	Jumlah guru SMP	550	553	945	801	1001
Persentase		95,82	95,48	81,27	98,00	98,30

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan keadaan guru (PNS) di Kab. Luwu Timur yang berubah-ubah setiap tahunnya yang berpengaruh pada persentase capaian indikator ini. Pada Tahun 2023 terdapat 98.30 persen guru sekolah menengah pertama yang telah berkualifikasi S1/DIV.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang Pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya

saing output Pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelolapotensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 – 11 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.72 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	45	45	52	54	66
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.607	5.518	5.439	5251	4909
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	8,03	8,16	9,56	10,24	13,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka Kematian Bayi di Lima Tahun terakhir cenderung naik, Tahun 2019 Angka kematian bayi 8,03 Per 1000 KH (45 Kasus), terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 13,44 (66 kasus) Dengan meningkatnya jumlah tersebut maka target Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan yaitu 7,93 Per 1000 KH, tidak capai target, tetapi jika dibandingkan dengan target Nasional yaitu 17,6 Per 1000 KH sudah capai target. Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023 yaitu 66 terbagi dalam 2 kelompok yaitu Neonatal 56 kasus dan Post Neonatal 10 Kasus. Penyebab Kematian Neonatal terbanyak adalah BBLR sebanyak 20 Kasus, Asfiksia 10 Kasus, Sepsis 11, Kelainan Bawaan 6 kasus, dan penyebab lain-lain 9 kasus. Sedangkan untuk kematian post neonatal penyebab kematian yaitu sepsis 4 kasus, BBLR 2 kasus, Kelainan bawaan 1 kasus, kelainan jantung bawaan 1 kasus, Diare 1 kasus. Kematian Neonatal berdasarkan tempat kematian paling banyak terjadi di Rumah

Sakit yaitu 54 Kasus (93%) di Rumah 2 kasus (6 %) dan di Puskesmas 1 kasus (2 %).

Jumlah kematian berdasarkan wilayah kerja puskesmas dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.73 Angka Kematian Bayi Kabupaten Luwu Timur dalam Kecamatan Tahun 2023

No	Puskesmas	Jumlah Kematian bayi		
		Jumlah Kematian Neonatal	Kematian post neonatal (29 hr - 11 bln)	Jumlah
1	Burau	4		4
2	Wotu	9		9
3	Tomoni	8		8
4	Tomoni Timur	1	1	2
5	Mangkutana	4	2	6
6	Kalaena Kiri	3	0	3
7	Angkona	5	1	6
8	Malili	6	2	8
9	Lampia	2	0	2
10	Wasuponda	4	0	4
11	Nuha	0	1	1
12	Wawondula	4		3
13	Timampu	3		2
14	Mahalona	1	1	2
15	Bantilang	0	1	1
16	Lakawali	1	1	2
17	Parumpanai	0		0
18	Bonepute	1		1
Luwu Timur		56	10	66

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah kematian bayi berdasarkan wilayah ker puskesmas paling tinggi di wilayah kerja Puskesmas Wotu yaitu 9 kasus kemudian puskesmas Tomoni 8 kasus dn Puskesmas Malili 7 kasus. Tingginya kasus kematian diwilayah kerja puskesmas tersebut sejalan dengan jumlah kelahiran bayi yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut yang cukup tinggi. Meningkaanya jumlah kematian bayi ini disebabkan beberapa factor yaitu kondisi ibu waktu hamil mengalami

komplikasi, kurang gizi, Kondisi saat lahir dengan berat badan rendah serta adanya kelaianan bawaan yang menyebabkan kematian bayi. Selain itu system pencatatan pelaporan yang semakin baik yaitu dengan menggunakan aplikasi MPDN dimana semua fasilitas kesehatan wajib melaporkan semua kematian yang terjadi di faskes masing-masing sehingga semua kematian bayi berstatus warga Luwu Timur akan terlapor meskipun terjadi di fasilitas kesehatan luar wilayah.

2. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) menggambarkan banyaknya bayi yang hidup dalam setiap 1000 kelahiran. AKB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah $1 - (13,44/1000) = 0,987$ atau $987 / 1000$ artinya 1000 kelahiran hidup terdapat 987 bayi yang bertahan hidup.

**Tabel 2.74 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Luwu Timur 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,992	0,992	0,990	0,990	0,987

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka kelangsungan hidup bayi di lima tahun terakhir cenderung menurun hal ini disebabkan karena jumlah kematian bayi yang cenderung meningkat. Kelangsungan hidup bayi sangat ditentukan oleh kondisi pertumbuhan janin didalam uterus, kualitas pemeriksaan antenatal, penyakit ibu waktu hamil, penanganan persalinan dan perawatan sesudah bayi lahir. Upaya Dinas kesehatan dalam menurunkan Angka kematian bayi yaitu :

- Pelayanan Persalinan di fasilitas kesehatan
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.
- Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan Bayi baru lahir
- Penguatan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMP-SR)
- Penyediaan Sarana dan Prasarana PONE
- Pendampingan Tim Ahli (Dokter Sp.A) dalam pelayanan Kesehatan Bayi, kegawat daruratan dan system rujukan neonatal ke Puskesmas.

3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.75 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kematian Balita	Kasus	50	49	54	62	76
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.607	5.518	5.439	5.251	4909
3	Angka Kematian Balita	Angka	8,91	8,83	9,93	11,81	15,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka kematian Balita Di Kabupaten Luwu Timur Tahun di lima tahun terakhir meningkat, tahun 2019 yaitu 8,91 Per 1000 KH (50 Kasus) meningkat di Tahun 2023 menjadi 15,07 per 1000 KH (76) . Kematian balita paling banyak terjadi pada periode neonatal (0-28 Hari) yaitu sebanyak 56 kasus. usia 29 hari s/d 1 Tahun sebanyak 10 dan usia 1 tahun sampai 5 tahun sebanyak 8 kasus. Faktor Penyebab kematian balita yaitu karena kondisi bayi lahir rendah dimana jumlah bayi lahir rendah tahun 2023 cukup tinggi yaitu 337 (6,8%), adanya penyakit bawaan serta penyakit karna lingkungan yang kurang sehat.

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian neonatal (kematian bayi baru lahir/ neonatal death rate) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

**Tabel 2.76 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	34	32	40	36	56
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.607	5.518	5.439	5251	4909

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,06	4,61	7,35	6,86	11,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka Kematian Neonatal di Lima Tahun terakhir cenderung naik, Tahun 2019 Angka ematian neonatal yaitu 6,06 Per 1000 KH (34 kasus), Tahun 2020 menurun menjadi 4,61 Per 1000 KH (34 kasus) kemudian Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Angka kematian neonatal meningkat menjadi 11,01 Per 1000 KH (54 Kasus). Angka tersebut belum capai target nasional yaitu 11 Per 1000 KH , Penyebab Kematian Neonatal terbanyak adalah BBLR sebanyak 19 Kasus, Asfiksia 10 Kasus, Sepsis 11, Kelainanan Bawaan 5 kasus, dan penyebab lain-lain 9 kasus. kematian Neonatal berdasarkan tempat kematian paling banyak terjadi di Rumah Sakit yaitu 50 Kasus (93%) di Rumah 2 kasus (6 %) dan di Puskesmas 1 kasus (2 %). Faktor penyebab kematian neonatal yaitu kondisi ibu hamil yang beresiko, komplikasi kehamilan, Kondisi bayi baru lahir yang mengalami komplikasi tetapi tidak mendapat pelayanan yang adekuat karena sarana dan prasarana serat kompetensi petugas yang tidak mendukung, serta adanya kelainan bawaan yang memperburuk keadaan sehingga berujung pada kematian.

5. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.77 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	8	6	8	7	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.607	5.518	5.439	5.251	5.909
3	Angka Kematian Ibu	Angka	142,67	108,74	147,09	133,3	122,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Angka Kematian Ibu di lima Tahun terakhir berfluktuatif, tetapi cenderung menurun, yaitu dari Tahun 2019 142,67 Per 100.000 KH (8 Kasus) menjadi 122,2 Per 100.000 KH (6 kasus) pada Tahun 2023. Meskipun Angka tersebut menurun belum capai target Kabupaten Luwu Timur yaitu 105 Per 100.000 KH. Namun demikian jika dibandingkan dengan target Nasional yaitu 194. Per 100.000 KH sudah mencapai target nasional. Penyebab kematian ibu yaitu perdarahan post partum 2 kasus, 1 kasus karena abortus, dan 3 kasus karena komplikasi penyakit yaitu herpes 1 kasus, gagal ginjal 1 kasus dan TB Paru 1 Kasus. Kematian ibu tersebut semua meninggal di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka kematian Ibu yaitu :

- Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu minimal 6 kali pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan oleh dokter dengan menggunakan USG (Trimester pertama dan trimester ketiga).
- Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan Maternal
- Penguatan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR)
- Penyediaan Sarana dan Prasarana
- Pendampingan Tim Ahli (Dokter Sp.OG) dalam pelayanan Kesehatan ibu , kegawat daruratan dan system rujukan maternal ke Puskesmas.

Tabel 2.78 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup per Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Puskesmas	Jumlah Kematian Ibu
1	Burau	
2	Wotu	1
3	Tomoni	
4	Tomoni Timur	
5	Mangkutana	1
6	Kalaena Kiri	
7	Angkona	
8	Malili	
9	Lampia	
10	Wasuponda	
11	Nuha	1
12	Wawondula	
13	Timampu	2
14	Mahalona	
15	Bantilang	
16	Lakawali	
17	Parumpanai	
18	Bonepute	1

No	Puskesmas	Jumlah Kematian Ibu
	Luwu Timur	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data Kematian Ibu yang tersebut diatas berdasarkan Laporan kematian yang di Tarik dari MPDN (Maternal Perinatal Death Notification), dari 6 kasus tersebut 1 kasus ibu yang sudah berdomisili di makassar tapi KTP masih warga luwu Timur sehingga data kematiannya masih terlapor di Kabupaten Luwu Timur.

6. Rasio posyandu per satuan Balita

Posyandu (Pos Pelayanann Terpadu) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita. Rasio Posyandu adalah jumlah posyandu per 1000 balita. Rasio Posyandu digunakan untuk mengukur ketersediaann Posyandu berdasarkan jumlah balita yang ada. Semakin besar nilai rasio posyandu makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan.

Tabel 2.79 Rasio Posyandu dan Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	Unit	273	274	280	281	282
2	Jumlah Balita	Unit	24,641	24,557	24.712	24.230	22491
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Angka	11,08	11,16	11,33	11,59	12,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Di Kabupaten Luwu Timur di Lima tahun terakhir rasio posyandu semakin meningkat , tahun 2019 Rasio Posyandu 11,08 / 1000 Balita meningkat menjadi 12, 54 / 1000 Balita Pada Tahun 2023. Rasio Posyandu 12, 54 menggambarkan bahwa setiap 1000 balita dilayani sekitar 12 Posyandu.

Rasio Posyandu berdasarkan wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.80 Rasio Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio (4/5*1000)
1	BURAU	BURAU	28	1492	18,77
2		BONEPUTE	14	1194	11,73
3	WOTU	WOTU	30	1973	15,21
4	TOMONI	TOMONI	18	1873	9,61

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Posyandu	JumlahBalita	Rasio (4/5*1000)
5	TOMONI TIMUR	TOMONI TIMUR	16	1035	15,46
6	MANGKUTANA	MANGKUTANA	26	14,42	18,03
7	KALAENA	KALAENA	13	917	14,18
8	ANGKONA	ANGKONA	29	2163	13,41
9	MALILI	MALILI	14	1830	7,65
10		LAMPIA	9	620	14,52
11		LAKAWALI	8	999	8,01
12	WASUPONDA	WASUPONDA	10	1313	7,62
13		PARUMPANAI	7	401	17,46
14	NUHA	NUHA	17	1528	11,13
15	TOWUTI	WAWONDULA	12	1728	6,94
16		TIMAMPU	7	835	8,38
17		MAHALONA	13	597	21,78
18		BANTILANG	11	551	19,96
TOTAL			282	22491	12,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio posyandu berdasarkan wilayah kerja puskesmas paling tinggi di puskesmas Mahalona 21,79/ 1000 atau jika dirata-ratakan jumlah balita yang dilayani setiap Posyandu di mahalona kurang lebih 49 balita. Rasio Posyandu paling rendah di Puskesmas Wawondula 6,94 / 1000 Balita atau jika dirata-ratakan 1 posyandu di Wilayah Puskesmas wawondula melayani kurang lebih 144 Balita.

7. Rasio/Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Rasio/jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas Kab. Luwu Timur terhadap jumlah penduduk untuk kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2.81 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas	Unit	17	17	18	18	18

2	Jumlah Poliklinik	Unit	4	8	16	19	17
3	Jumlah Pustu	Unit	64	73	73	73	133
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
5	Rasio puskesmas, poli klinik, pustu per satuan penduduk	%	0,28	0,32	0,35	0,36	0,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah sarana pelayanan, khususnya sarana klinik, ini berarti adanya perkembangan pelayanan dan fasilitas kesehatan, dengan demikian diharapkan masalah kesehatan dapat teratasi dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari meningkatnya taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

8. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Jumlah rumah sakit yang milik pemerintah yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebanyak satu unit yang merupakan rumah sakit umum milik daerah, dan terdapat pula satu unit rumah sakit swasta Vale yang juga menerima pasien umum.

Tabel 2.82 Rasio Rumah sakit per satuan penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Unit	0	0	0	0	0

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	Unit	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit swasta	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	Unit	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	300.374	302.039	304.938	306.082	311.082
7	Rasio Rumah Sakit	%	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Indonesia idealnya adalah setiap rumah sakit memiliki 1 tempat tidur untuk setiap 1000 penduduk. Kabupaten Luwu Timur di tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 311.062 dan memiliki 1 rumah sakit pemerintah yakni RSUD I Lagaligo dengan jumlah tempat tidur 200 TT dan 1 Rumah Sakit Swasta yakni RS Inco Sorowako dengan jumlah tempat tidur 86 TT. Sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu jumlah rumah sakit di Kabupaten Luwu Timur per jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur dikali 1000 sehingga didapat nilai rasio rumah sakit 0,006

Tabel 2.83 Rasio Rumah Sakit menurut kecamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Burau	35.531												
2	Wotu	34.466	1	0.029									1	0.029
3	Tomoni	27.507												
4	Tomoni Timur	13.896												
5	Mangkutana	22.430												
6	Kalaena	12.271												
7	Angkona	25.750												
8	Malili	45.474												
9	Nuha	24.488									1	0,040	1	0,040
10	Wasuponda	22.256												
11	Towuti	46.993												
	Jumlah	311.062	1	0.003							1	0.003	2	0,006

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel, Rasio Rumah Sakit menurut Kecamatan Tahun 2022 dari semua Kecamatan yang ada di Luwu Timur, Rumah Sakit hanya terdapat di 2 (Dua) Kecamatan yakni di Kecamatan Wotu terdapat 1 (satu) Rumah Sakit dengan Rasio 0,029 dan di Kecamatan Nuha terdapat 1 (Satu) Rumah Sakit dengan rasion 0,040 sedangkan kecamatan lain rasio nihil dikarenakan di Kecamatan tersebut tidak terdapat Rumah Sakit.

9. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter kepada jumlah penduduk. Rasio dokter dan jumlah penduduk masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, yakni 1:6.809. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.84 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	Orang	42	43	47	50	89
2	Jumlah Penduduk	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Rasio Dokter Per satuan Penduduk		0,139	0,142	0,154	0,163	0,286

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah dokter di tahun 2023 meningkat sebanyak 89 orang dengan rasio per penduduk 0.286 di banding dengan tahun lalu sebanyak 50 orang dengan rasio 0.163

10. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio jumlah tenaga medis pada tabel dibawah ini hanya menampilkan jumlah untuk dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dengan perbandingan 1 per 3.247 penduduk menunjukkan perbandingan yang cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu Timur meningkat dalam 5 tahun terakhir dan dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.85 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	94	89	93	79	122
2	Jumlah Penduduk	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Rasio Tenaga Medis		0,312	0,294	0,304	0,258	0,392

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga medis di tahun 2023 meningkat sebanyak 122 orang dengan rasio per penduduk 0.392 di banding tahun sebelumnya jumlah tenaga medis tahun 2022 sebanyak 79 orang dengan rasio per penduduk 0.258.

11. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi kebidanan atau komplikasi kehamilan adalah kondisi kegawat daruratan obstetrik yang bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Komplikasi kebidanan yang sering terjadi diantaranya pendarahan, eklamsia/ preeklamsia dan infeksi.

**Tabel 2.86 Cakupan komplikasi Kebidanan Yang di Tangani
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	1.063	1.008	1.064	841	704
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	1.266	1.242	1.286	1.029	1.164
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	83,97	81,15	82,7	69,5	60,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2022 mengalami penurunan arena hal ini terjadi kasus komplikasi yang terjadi pada ibu hamil/ ibu bersalin menurun dibandingkan tahun lalu, hal lini juga yang menyebabkan cakupan rendah adalah sasaran yang digunakan adalah proyeksi 20% dari sasaran Ibu hamil.

12. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes (Pn) yang memiliki kompetensi kebidanan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini menjadi ukuran proporsi persalinan yang dapat ditangani oleh nakes dan sejauh mana kemampuan manajemen KIA dalam melakukan pertolongan persalinan sesuai standar.

Tabel 2.87 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan	Orang	5.613	5.497	5.447	5.255	4.910
2	Jumlah seluruh sasaran ibu yang bersalin di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	6.042	5.926	5.825	5.754	5.540
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki kompetensi Kebidanan	%	92,9	92,76	93,51	91,33	88,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan karena jumlah ibu bersalin 2023 mengalami penurunan dibanding jumlah ibu bersalin tahun lalu. Namun semua ibu bersalin sudah ditolong oleh tenaga kesehatan, walaupun cakupan masih rendah hal ini terjadi karena sasaran yang digunakan adalah sasaran proyeksi.

13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Untuk cakupan Desa/Keluaran UCI di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dari 128 Desa/Kelurahan jumlah Desa/Keluaran UCI sebanyak 126 Desa/Kelurahan dengan cakupan 98%, dimana ada 2 desa yang tidak UCI atau tidak mencapai minimal 80% dari jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Desa Maramba Kecamatan Wotu dan Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda. Untuk cakupan Desa/Keluaran UCI Tahun 2023 sudah melampaui target dimana target Kementerian Kesehatan RI untuk Cakupan Desa/Keluaran UCI adalah 97%.

**Tabel 2.88 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	Desa/Kel	126	113	120	123	126
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Desa/Kel	127	127	127	127	128
3	Cakupan Desa/kelurahan UCI	%	99,21	88,98	94,49	96,85	98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.89 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Orang	3	3	5	6	11
2	Jumlah seluruh balita gizi Buruk yang ditemukan disuatu wilayah	Orang	3	3	5	6	11
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak

Imunisasi campak rubella adalah upaya membangun kekebalan dan perlindungan tubuh dari penyakit campak dan rubella. Pemberian imunisasi campak rubella dilakukan tiga kali atau tiga dosis, yaitu dosis 1 diberikan pada saat

bayi berusia 9 bulan, dosis kedua saat usia 18 bulan, sedangkan dosis ketiga saat anak berusia 7 tahun. Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi Campak Rubella dosis 1 tahun 2023 sebanyak 5.290 anak(91.3%), dimana cakupan imunisasi Campak Rubella tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya cakupan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perhitungan denominataor yang masih belum seragam antara angka proyeksi dengan angka yang ditemukan di lapangan.
2. Akurasi, kelengkapan dan ketepatan laporan masih rendah/tidak akurat.
3. Adanya anak yang Drop out untuk imunisasi Campak Rubella disebabkan anak yang tidak lanjut imunisasinya setelah mendapat imunisasi DPT-HB-Hib 1 karena efek vaksin dan anak yang pindah atau keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebelum mendapatkan imunisasi Campak Rubella dosis 1.
4. Masih ada orang tua yang menolak anaknya diimunisasi

Untuk mengatasi faktor-faktor diatas diperlukan kerjasama lintas sektor dan melakukan imunisasi kejar terhadap anak-anak yang tidak lengkap imunisasinya.

Tabel 2.90 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak usia satu tahun yang mendapatkan imunisasi campak	Orang	6.079	5.466	5.348	5.561	5.290
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	5.741	5.644	5.830	5.878	5.797
3	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak	%	105,89	96,85	91,73	94,60	91,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

16. Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk.

AFP atau yg dikenal dengan *Acute Flaccid Paralysis* dikenal dengan kelumpuhan pada anak berusia kurang dari 15 tahun yang bersifat layuh (flaccid) terjadi secara akut/ mendadak. Kelompok yang rentan terhadap penyakit poliomyelitis yaitu anak berusia kurang dari 15 tahun. Indikator AFP yang diharapkan adalah 1 – 2/ 100.000 penduduk.

**Tabel 2.91 Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kab. Luwu Timur
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Orang	3	2	2	2	3
2	Jumlah penduduk < 15 Tahun	Orang	90.659	44.943	86.518	86.160	90.659
3	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	3,31	4,45	1,73	1,2	3,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

17. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Penemuan penderita Pneumonia balita adalah balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Pneumonia pada balita ditangani adalah penemuan dan tatalaksana penderita pneumonia yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat dirujuk ke RS di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dua definisi operasional diatas merupakan formula dalam mendapatkan jumlah penderita pneumonia balita.

**Tabel 2.92 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Kab. Luwu Timur
Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita pneumonia balita	Orang	359	393	82	223	454
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia	Orang	1.089	1.091	1.073	1.073	1.156
3	Cakupan Balita Pneumonia yang di tangani	%	32,96	36,02	7,64	20,78	39,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2022

18. Cakupan Penemuan Dan penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 rata-rata sudah mencapai target. Kecuali pada tahun

2019 cakupan 93,97%, ini dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang drop out berobat.

Tabel 2.93 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTAKab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA	Orang	431	445	310	409	426
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA Dalam kurun waktu yang sama	Orang	431	445	310	409	426
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	93,97	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 100% artinya semua kasus TB BTA (426 kasus) yang ditemukan mendapat pengobatan. ada beberapa alasan yang menyebabkan tercapainya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Indonesia, antara lain: Masyarakat semakin menyadari pentingnya pemeriksaan TB untuk mendeteksi penyakit TB secara dini. Hal ini didukung oleh berbagai upaya promosi kesehatan dan edukasi tentang TB, Akses ke fasilitas kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat meningkatkan kemungkinan penderita TB untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan dan Petugas kesehatan dilatih untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan TB dan pengobatan TB. Hal ini didukung oleh pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas kesehatan yang dilakukan secara berkesinambungan.

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tabel 2.94 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Banyak kasus penderita TBC	Orang	445	310	277	409	426
2	Jumlah penduduk pada	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	kurun waktu yang sama						
3	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis		148,14	102,63	74,44	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan prevalensi kasus TB sebesar 138/100.000 penduduk hal ini menunjukkan berdasarkan jumlah penduduk 308.530 maka tahun 2023 terdapat 138 kasus TB pada 100.000 penduduk, dengan demikian terdapat sekitar 2.235 orang berisiko TB berdasarkan jumlah penduduk tahun 2023. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus TB antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB dapat menyebabkan penderita TB tidak menyadari bahwa dirinya menderita TB dan kepatuhan penderita TB dalam mengikuti pengobatan dapat menyebabkan pengobatan tidak berhasil dan meningkatkan risiko penularan TB.

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

**Tabel 2.95 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien TB Yang meninggal	Orang	5	2	2	15	0
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Tingkat kematian Tuberkulosis	%	1,66	0,66	0,65	0,6	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan prevalensi kasus TB sebesar 138/100.000 penduduk hal ini menunjukkan berdasarkan jumlah penduduk 308.530 maka tahun 2023 terdapat 138 kasus TB pada 100.000 penduduk, dengan demikian terdapat sekitar 2.235 orang berisiko TB berdasarkan jumlah penduduk

tahun 2023. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus TB antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TB dapat menyebabkan penderita TB tidak menyadari bahwa dirinya menderita TB dan kepatuhan penderita TB dalam mengikuti pengobatan dapat menyebabkan pengobatan tidak berhasil dan meningkatkan risiko penularan TB.

21. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang dimaksud adalah pengobatan TB dengan pengawasan ketat dari petugas kesehatan, atau keluarga si penderita. Karena tidak hanya mencakup pengawasan minum obat, tetapi juga pelayanan laboratorium, penyediaan obat-obatan serta pemantauan langsung, untuk itu diperlukan pula Pengawasan Minum Obat (PMO) oleh nakes.

Tabel 2.96 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis Yang terdeteksi dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis terdeteksi	Orang	445	310	277	409	426
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diperkirakan	Orang	452	462	364	462	450
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	96,30	67,09	76,10	88,52	94,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Jumlah pasien TB yang terdeteksi sebanyak 426, dengan proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi sebesar 94%, artinya program ini melakukan pendekatan yang cukup kuat dalam menemukan kasus suspec dan melakukan pemeriksaan lebih akurat sampai terdiagnosa TB. DOTS TB adalah pendekatan yang kuat dan terbukti efektif untuk mengendalikan TBC. Dengan fokus pada deteksi dini, pengobatan langsung dan dukungan pasien, DOTS TB memainkan peran penting dalam upaya global untuk mengakhiri TBC.

22. Proporsi Kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Tabel 2.97 Proporsi Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Orang	432	303	270	394	400
2	Jumlah-jumlah pasien TB PARU BTA Yang diobati	Orang	445	310	277	409	409
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh	%	97,07	97,74	97,47	96,33	98,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh sebesar 98%, dengan demikian masih ada 9 pasien yang sembuh dan masih dalam proses pengobatan. Alasan yang mendorong kesembuhan ialah Kepatuhan pasien dalam mengikuti pengobatan sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengobatan, Pasien TB harus mengonsumsi obat-obatan TB secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Pengobatan TB harus diselesaikan secara tuntas, yaitu selama enam bulan dan Dukungan dari keluarga dan masyarakat dapat membantu pasien TB untuk tetap termotivasi dalam menjalani pengobatan. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan dukungan moral, dukungan finansial, dan dukungan praktis kepada pasien TB.

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Tabel 2.98 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penderita DBD Yang ditangani	Orang	107	37	145	286	206
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah	Orang	100	37	145	286	206
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terjadi penurunan kasus DBD dibanding tahun 2022 dari 286 menjadi 206 kasus. Dan semua kasus yang ditemukan dilakukan pengobatan hingga sembuh (100%). Beberapa hal yang dilakukan secara berkesinambungan dalam menekan peningkatan kasus DBD di Kabupaten Luwu Timur diantaranya terjalannya kerjasama dengan PTVI dalam P2P DBD pada wilayah yang sitemp tahunnya penyumbang kasus terbesar yakni PKM Malili, Wasuponda, Wawondula dan Nuha. Dalam mengaktifkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3 M Plus melalui G1R1J (Gerakan 1 rumah 1 jumentik) dan pelibatan anak sekolah. semua PKM rutin melakukan pengendalian vektor dengan PSN, Larvasidasi dan Fogging.

24. Penderita Diare Yang ditangani

Tabel 2.99 Penderita diare yang ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2019
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan	Orang	12.436	7.741	3.977	9.344	11.602
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama	Orang	7.814	7.757	7.896	8.157	8.330
3	Penderita diare yang ditangani	%	159,15	99,79	50,37	114,55	139.27

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan capaian penderita Diare yang ditangani 139,27%, capaian ini melebihi 100% karna jumlah penderita diare yang ditemukan lebih besar dari target yang ditetapkan. da beberapa alasan yang menyebabkan tingginya penemuan kasus diare, antara lain: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang diare. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pemeriksaan diare untuk mendeteksi penyakit diare secara dini. Akses ke fasilitas kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat meningkatkan kemungkinan penderita diare untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Petugas kesehatan dilatih untuk

memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan diare dan pengobatan diare.

25. Angka Kejadian Malaria

Pengendalian penyakit malaria telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Angka Kejadian Malaria yang diukur dengan *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan memiliki nilai signifikan dalam pengendalian malaria.

Pencapaian kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sumber daya manusia baik dalam diagnosis dan tata laksana, serta manajemen program, dan peningkatan kapasitas tenaga laboran dalam pemeriksaan sediaan darah malaria. Selain itu dilakukan juga surveilans migrasi dan penyelidikan epidemiologi kasus positif malaria, penemuan suspek malaria baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 terhadap semua kasus positif malaria, serta pemberian pengobatan sesuai standar kepada penderita malaria.

Tabel 2.100 Angka kejadian malaria Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	22	13	13	56	68
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (diisi dengan data capil semester I)	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Angka kejadian malaria	%	<1	<1	<1	<1	<1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Malaria adalah Penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Metode Perhitungan Jumlah Kasus Malaria Positif dibagi jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama dikali 1.000 penduduk.

Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Pemantauan ini bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien. Angka

API untuk Luwu Timur dibawah atau lebih kecil dari 1, jumlah kasus kesakitan di tahun 2023 sebanyak 68 kasus, ini mengalami peningkatan dari tahun 2022. Kasus kesakitan yang ada di Luwu Timur adalah kasus Import.

26. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total populasi

Prevalensi HIV masih dibawah target indikator 0,5 persen, sesuai dengan tingkat epidemiologi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah epidemiologi terkonsentrasi artinya kasus HIV yang ada tinggi tapi berada di populasi-populasi tertentu, belum sampai ke masyarakat umum. Kendala yang dihadapi diantaranya belum semua Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan penemuan kasus HIV dan sistem pencatatan dan pelaporan dengan Aplikasi sistem Informasi HIV AIDS belum digunakan maksimal karena terkendala sarana komputer dan jaringan wifi. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.101 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien HIV/AIDS disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	4	4	21	14	117
2	Jumlah penduduk disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	%	0,0013	0,0013	0,0068	0,001	0,038

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data cakupan perkembangan kasus HIV/AIDS pada tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 136 kasus, yang aktif On ARV sebanyak 120 kasus sampai 2023. Perkembangan kasus tiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS diukur sebagai persentase dari jumlah masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang terkena HIV/AIDS selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kasus HIV/AIDS setiap tahunnya meningkat dan mencapai jumlah kasus tertinggi ditahun 2023 dengan jumlah penambahan 26 orang.

27. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

**Tabel 2.102 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rujukan miskin di strata 1	Orang	7.028	5.332	5.110	4.989	5.000
2	Jumlah seluruh miskin	Orang	81.326	79.37	105.449	101.389	95.868
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		8,64	6,71	4,8	4,92	5,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data Masyarakat miskin yang dipakai di Kabupaten Luwu Timur adalah data Masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pengelolaanya diserahkan kepada Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) Kementerian Sosial. DTKS merupakan informasi tentang status social ekonomi dan demografi dari 40 % penduduk di Indonesia mulai dari yang paling rendah status kesejahteraanya. Jumlah seluruh Masyarakat miskin yang sesuai dengan DTKS di Kabupaten Luwu Timur di 3 tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 sebanyak 105.449, tahun 2022 101.389 dan di tahun 2023 turun menjadi 95.868. Meski jumlah Masyarakat miskin mengalami penurunan tetapi cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien Masyarakat miskin di tahun 2023 meningkat karena jumlah rujukan miskin di strata 1 meningkat yakni sebanyak 5000 di tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan rujukan termasuk rujukan Masyarakat miskin seperti sarana prasarana penunjang di FKTP masih kurang memadai kompetensi petugas di FKTP masih kurang, kemampuan pelayanan akan komplikasi suatu penyakit yang membutuhkan faskes Tingkat lanjut dan kebutuhan obat yang lebih spesialistik yang hanya bisa didapatkan di faskes Tingkat lanjut.

28. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan(dokter, bidan, perawat) yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (satu kali pada umur 1-3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bln). 1. Cakupan kunjungan bayi tahun 2023 yaitu 98,03 %, ini berarti masih ada bayi yang tidak mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, rendahnya Cakupan kunjungan disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang menolak imunisasi sehingga anaknya tidk dibawa ke Posyandu, migrasi masyarakat

dimana ada beberapa masyarakat keluar masuk kabuapetn luwu timur, serta adanya kematian bayi sebelum berumur satu tahun. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan kunjungan bayi adalah dengan melakukan kunjungan rumah orang tua bayi tidak datang ke fasilitas kesehatan atau posyandu. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh kunjungan kesehatan sesuai standarisasi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	5.622	4.885	5.435	5.488	5.172
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	5.754	5.518	5.548	5.480	5.276
3	Cakupan kunjungan bayi	%	97,71	88,52	97,96	100,15	98,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

29. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas dari tahun ke tahun meningkat hal ini disebabkan jumlah ketersediaan puskesmas setiap tahunnya bertambah, terdapat 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dan setiap Ibu Kota Kecamatan memiliki 1 puskesmas, bahkan ada kecamatan memiliki lebih dari satu Puskesmas yaitu Kecamatan Wasuponda terdapat 2 Puskesmas (Puskesmas Wasuponda dan Parumpanai, Kecamatan Malili terdapat 3 Puskesmas (Puskesmas Malili, Lampia dan Lakawali) dan Kecamatan Towuti terdapat 4 Puskesmas (Puskesmas Wawondula, Mahalona, Bantilang) Kecamatan Burau terdapat 2 Puskesmas (Puskesmas Burau dan Puskesmas Bonepute) Berdasarkan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014, puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Selain itu juga harus didukung pula oleh adanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas. Untuk tahun 2023 tidak ada penambahan puskesmas.

Tabel 2.104 Cakupan Puskesmas Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas	Unit	17	17	18	18	18
2	Jumlah Kecamatan	Unit	11	11	11	11	11
3	Cakupan Puskesmas	%	154,6	154,6	163,6	163,6	163,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Cakupan Puskesmas dari tahun ke tahun meningkat hal ini disebabkan jumlah ketersediaan puskesmas setiap tahunnya bertambah, terdapat 11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dan setiap Ibu Kota Kecamatan memiliki 1 puskesmas, bahkan ada kecamatan memiliki lebih dari satu Puskesmas yaitu Kecamatan Wasuponda terdapat 2 Puskesmas (Puskesmas Wasuponda dan Parumpanai, Kecamatan Malili terdapat 3 Puskesmas (Puskesmas Malili, Lampia dan Lakawali) dan Kecamatan Towuti terdapat 4 Puskesmas (Puskesmas Wawondula, Mahalona, Bantilang) Kecamatan Burau terdapat 2 Puskesmas (Puskesmas Burau dan Puskesmas Bonepute) Berdasarkan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014, puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Selain itu juga harus didukung pula oleh adanya aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas. Untuk tahun 2023 tidak ada penambahan puskesmas.

30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Data cakupan puskesmas pembantu (Pustu) di Kabupaten Luwu Timur meningkat karena adanya penambahan. Adanya Pustu di Desa/Kelurahan diharapkan dapat meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Cakupan Puskesmas Pembantu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	73	73	73	73	133
2	Jumlah Desa/Kelurahan	Unit	127	127	127	127	128
3	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	57,48	57,48	57,48	57,48	103,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahw di tahun 2023 ada peningkatan jumlah puskesmas pembantu, hal ini terjadi karena adanya perubahan nama dari poskesdes menjadi puskesmas pembantu.

31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun, disebabkan adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima

pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (*missed opportunity*). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.106 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal	Orang	6.143	5.484	5.591	5.217	4.911
2	Jumlah sasaran ibu hamil disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Orang	6.330	6.208	6.103	6.028	5.803
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	97,05	88,34	91,61	86,55	84,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 rendah karena adanya ibu hamil yang mengalami abortus sehingga pelayanan Antenatal carenya tidak lengkap dan ada juga beberapa kasus kehamilan yang tidak diinginkan selain itu penyebab cakupan rendah adalah sasaran lebih banyak dibanding dengan jumlah real ibu hamil dimana Sasaran yang dipakai adalah Sasaran Proyeksi. Tahun 2023 Jumlah ibu hamil turun dibanding dengan jumlah ibu hamil tahun 2022 yang menyebabkan cakupan kunjungan Ibu hamil menurun.

32. Cakupan pelayanan Nifas

Pelayanan Nifas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu yang telah melahirkan dengan pelayanan mulai dari Kunjungan Nifas (Kf) 1 sampai dengan Kf 4 dalam rentang waktu 40 hari.

Tabel 2.107 Cakupan pelayanan Nifas Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah	Orang	5.581	5.494	5.425	5.251	4.862
2	Seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kerja pada waktu yang sama	Orang	6.042	5.926	5.825	5.754	5540
3	Cakupan pelayanan Nifas	%	92,37	92,71	93,13	91,26	88,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 202

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas sejalan dengan pelayanan ibu bersalin, cakupan menurun karena jumlah Ibu bersalin Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan jumlah ibu bersalin tahun 2023.

33.Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tabel 2.108 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang	461	412	465	461	351
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang	841	847	832	822	791
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	54,81	48,67	55,89	69,55	44,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.109 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja ada waktu tertentu	Orang	27.638	14.875	22.342	22.114	22.137
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Orang	31.315	22.405	23.729	24.090	24.374
3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	88,26	66,39	94,15	91,80	90,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Cakupan pelayanan anak balita masih rendah karena balita yang imunisasinya sudah lengkap tidak berkunjung lagi ke posyandu untuk melakukan penimbangan rutin.

35. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada anak SD dan setingkat sebagai pencegahan dan deteksi dini anak usia sekolah yang dilakukan kepada siswa setiap tahun.

Tabel 2.110 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu	Orang	5.808	9.601	11.501	17.167	11.616
2	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	5.808	16.116	14.690	17.930	11.616
3	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	59,57	78,29	95,74	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

36. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Gratis yang keduanya sekarang telah berintegrasi menjadi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menghadapi permasalahan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan penjaminan/pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin didukung dengan penganggaran kegiatan-kegiatan operasional untuk meningkatkan penyediaan serta efektivitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, keamanan dan kesehatan makanan, pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pemukiman dan realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah miskin dan masyarakat tidak mampu. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.111 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan pasien miskin disarkes Strata 1	Orang	106.370	106.763	106.007	84.242	76.753
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Orang	81.326	79.370	105.449	101.398	95.868
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	130,79	134,51	99,292	83,08	80,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

37. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.112 Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Gawat Darurat	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah RS	Unit	2	2	2	2	2
3	Cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pelayanan gawat darurat level 1 adalah pelayanan yang diberikan oleh tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum onsite 24 jam dengan

kualifikasi General Emergency Life Support (GELS) dan atau ATLS (Advance Trauma Life Support + ACLS (Advance Cardiac Life Support). Pelayanan gawat darurat level 1 harus diberikan di sarana kesehatan Rumah Sakit. Sehingga pelayanan gawat darurat level 1 di Kabupaten Luwu Timur terdapat 1 unit di masing – masing rumah sakit dan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Luwu Timur terdapat 2 unit, sehingga cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan adalah pelayanan gawat darurat per jumlah rumah sakit dikali 100 sehingga didapatkan nilai cukup pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan adalah 100.

38.Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Penyelidikan dan penanggulangan KLB sangat bergantung dari kemampuan petugas pelaksana yaitu Tim Gerak Cepat maupun petugas surveilans. Salah satu tantangan dan sekaligus keunggulan seorang ahli epidemiologi adalah pada kemampuannya melakukan penyelidikan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB).

KLB seringkali diikuti dengan kejadian yang sangat cepat, banyak orang terserang dan luas wilayah yang terserang bisa sangat luas, serta dapat menimbulkan kecemasan berbagai pihak. Satu petugas dengan petugas lain seringkali saling menyalahkan, bahkan masyarakat pun disalahkan. Pada situasi seperti ini diperlukan seorang ahli epidemiologi, yang dituntut selalu bertindak tenang, professional, berpegang pada dasar-dasar ilmiah, pendekatan sistematis, dan berorientasi pada upaya penyelamatan dan pencegahan pada populasi yang mengalami KLB.

Referensi dalam penanggulangan KLB, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan PP No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta menjadi penjabaran pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menteri/per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menteri/per/X/2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Tabel 2.113 Cukup Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KLB di desa / kelurahan yang di tangani >24 jam dalam priode tertentu	Kasus	0	\0	0	0	0
2	Jumlah KLB didesa/ kelurahan yang terjadi pada priode yang sama	Kasus	7	7	3	3	5
3	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi< 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 2.114 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	748,00	755,80	740,17	644,59	665,01
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	39,59	40,00	39,18	34,12	29,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 2.115 Kondisi Jalan Kab. Luwu Timur 2019-2023

No	Kondisi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	748,00	755,80	740,17	644,59	659,21
2	Sedang	749,29	594,08	593,11	688,78	151,06
3	Rusak Ringan	71,21	227,58	349,12	440,03	1.104,18
4	Rusak Berat	320,77	311,82	206,88	115,87	315,42
5	Jumlah	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

**Tabel 2.116 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panjang jalan	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87
2	Jumlah penduduk	Jiwa	300.374	302.039	304.727	306.082	311.062
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/Jiwa	0,0063	0,0063	0,0062	0,0062	0,0072

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

Jalan kabupaten di Luwu Timur memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang menopang pergerakan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.117 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	748,00	755,80	740,17	644,59	665,01
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	39,59	40,00	39,18	34,12	29,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

4. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Drainase jalan merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi persyaratan salah satu teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.

Tabel 2.118 Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan (Minimal 1,5 m) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)	%	0,134	0,134	0,134	0,134	0,113

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel 2.119 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Rumah	58.533	58.818	69.104	76.291	94.162
2	Jumlah rumah tinggal	Rumah	60.075	60.075	70.579	77.803	95.620
3	Perpersentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,43	97,91	97,91	98,06	98,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Akses sanitasi yang dimaksud adalah sanitasi dasar sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah.

6. Persentase drainase dalam kondisi baik

Drainase di Kabupaten Luwu Timur tersebar di wilayah permukiman dan yang berada pada jalan penghubung antar desa. Pembangunan drainase di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setiap tahunnya sebagai respon atas perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pemanfaatan anggaran belanja daerah sebaik-baiknya. Panjang drainase dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya panjang drainase secara keseluruhan kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.120 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	Km	10,81	13,77	15,77	17,07	21,55
2	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (km)	Km	13,06	16,47	18,77	20,27	24,62
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	82,77	83,61	84,02	84,21	87,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

7. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan kondisi saluran irigasi primer, sekunder ataupun tersier yang sesuai kewenangan kabupaten.

**Tabel 2.121 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	3.412,70	3.438,20	3.660,20	3.793,90	3.815,40
2	Luas irigasi kabupaten	Ha	6.778	6.778	6.778	6.778	6.788
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,35	50,73	54,00	55,97	56,21

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

8. Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.122 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan Primer	m	16.207,00	16.557,00	17.185,00	18.105,00	18.105,00
2	Jaringan Sekunder	m	29.986,70	32.246,70	35.920,70	37.689,70	37.889,70
3	Jaringan Tersier	m	7.831,00	8.461,00	8.461,00	8.461,00	8.461,00
4	Total Panjang jaringan	m	54.024,70	57.264,70	61.566,70	64.255,70	64.455,70
5	Luas Lahan Budidaya	Ha	5078	5078	5078	5078	5078
6	Rasio	angka	10,639	11,277	12,124	12,654	12,693

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

9. Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 2.123 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk berakses air minum	Jiwa	148.955	172.665	178.870	185.701	190.475
2	Jumlah penduduk	Jiwa	300.374	302.039	304.727	306.082	311.062
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	49,59	57,17	58,70	60,67	61,20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

10. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan

Tabel 2.124 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023

1	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	Jiwa	148.955	172.665	178.870	185.701	190.475
2	Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	300.374	302.039	304.727	306.082	311.062
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	%	49,59	57,17	58,70	60,67	61,20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

11. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel 2. 125 Ketaatan Terhadap RTRW Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas ruang sesuai peruntukannya	Ha	241.556,08	262.048,00	276.393,00	277.343,95	277.478,31
2	Luas ruang yang tersedia	Ha	694.488,00	694.488,00	694.488,00	694.488,00	694.488,00
3	Persentase kesesuaian penataan ruang	%	34,78	37,73	39,80	39,94	39,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

12. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

Tabel 2.126 Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bangunan ber IMB	Unit	4.018	4.941	4.968	5.048	5.108
2	Jumlah bangunan	Unit	28.004	35.458	35.485	35.565	35.625
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	angka	0,143	0,139	0,140	0,142	0,143

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yakni ketahanan bangunan (bangunan

atap, dinding, dan lantai yang memenuhi syarat bangunan), kecukupan luas tempat tinggal (luas dinding dan lantai memenuhi syarat bangunan), kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m Laporan Akhir 2), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan, dimana di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan penambahan jumlah unit rumah sebanyak 1.411 unit. Tetapi untuk pencapaian pada tahun 2023 terhadap rasio rumah layak huni hanya 0,19 karena perbandingan antara jumlah rumah dan jumlah penduduk berbanding lurus.

Tabel 2.127 Rasio Rumah Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	52.361	53.581	55.789	58.019	59.430
2	Jumlah penduduk	Jiwa	300.374	302.039	304.727	306.082	311.062
3	Rasio rumah layak huni		0,174	0,177	0,183	0,19	0,19

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Rasio permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun jumlah luasan permukiman layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan, tetapi tdk ada peningkatan yang signifikan dari rasio karena nilai antara luas permukiman dan luas wilayah permukiman berbanding lurus, sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.128 Rasio Permukiman Layak Huni Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas permukiman layak huni	Km2	27,61	27,89	38,18	48,85	55,87
2	Luas wilayah permukiman	Km2	36,82	36,82	40,89	51,54	58,54
3	Rasio permukiman layak huni		0,74	0,75	0,93	0,95	0,954

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023, jumlah seluruh rumah layak huni di satu wilayah kerja pada kurun tertentu sebanyak 95.902 unit, data ini berbeda jauh dengan data tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ada penyesuaian data setelah melakukan pendataan di lapangan, sehingga ada penurunan yang signifikan terhadap cakupan ketersediaan rumah layak huni 61,97 persen cakupan ketersediaan rumah layak huni. Lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.129 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	52.361	53.581	55.789	58.019	59.430
2	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	61.922	61.834	63.760	65.135	95.902
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	84.56	86.65	87,50	89,05	61,97

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

4. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023, jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu mengalami penurunan, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kab. Luwu Timur, dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus, yang salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah bedah rumah,

sehingga berpengaruh pada ketersediaan rumah layak huni untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah. Akan tetapi data terbaru dari rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merilis data jumlah keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebanyak 51.328 keluarga. Sehingga ada penurunan yang signifikan terhadap cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yaitu hanya 13,79.

Tabel 2.130 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	10.182	10.782	11.382	12.501	7.078
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	18.540	18.550	18.560	18.560	51328
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	54,92	58,12	61,33	67,35	13,79

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

5. Persentase permukiman yang tertata

Persentase permukiman yang tertata mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 hal ini karena, penganggaran pada tahun 2019 s.d 2023 untuk prasarana permukiman ada penambahan. sehingga ada peningkatan terkait penataan kawasan permukiman.

Tabel 2.131 Persentase Permukiman Yang Tertata Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas area permukiman tertata	Km2	27,61	27,89	38,18	48,85	55,87
2	Luas area permukiman keseluruhan	Km2	36,82	36,82	40,89	51,54	58,54
3	Persentase permukiman yang tertata	%	74,98	75,74	93,37	94,78	95,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

6. Persentase lingkungan permukiman kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan belum maksimalnya dalam penanganan pada kawasan kumuh, diperlukan komitmen yang lebih besar bagi para pengambil kebijakan untuk menuntaskan lingkungan kumuh yang ada pada Kabupaten Luwu timur, untuk mencapai target Nasional zero kumuh.

Tabel 2.132 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah luas permukiman kumuh	Km2	2,68	2,72	2,71	2,69	2,67
2	Jumlah luas permukiman luas wilayah	Km2	6.945	6.945	6.944,8	6.944,8	6.944,88
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

7. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Penanganan yang tidak terfokus pada kawasan kumuh menyebabkan persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan tidak maksimal. Dari luas 95 Ha permukiman kumuh, yang ditangani hanya 2,20 Ha.

Tabel 2.133 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	0,06	0,06	0,002	2,57	2,20
2	Jumlah permukiman kumuh	Ha	2,68	2,72	2,71	95,00	95

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	2,2059	2,2059	0,0737	2,71	2,32

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

8. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.134 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	RT	9.321	8.253	7.971	7.836	8.740
2	Jumlah seluruh rumah	Rumah	61.922	61.834	63.760	65.153	66.564
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	15,05	13,35	12,50	12,03	13,13

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

9. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

Indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.135 Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Unit	75	86	89	90	90

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Unit	127	127	127	127	127
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	59,06	67,72	70,08	70,87	70,87

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat

Satuan Perlindungan Masyarakat(Satlinmas) adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Beranggotakan warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, diantara persyaratannya adalah usia dan jenjang pendidikan.

Sebagai akibat dari penerapan Permendagri tersebut yang baru efektif dilaksanakan Kab. Luwu Timur pada tahun 2018, jumlah Anggota Satlinmas mengalami penurunan hingga Tahun 2021 yang sangat jauh dari target sebanyak 1.500 orang hal tersebut disebabkan petugas perlindungan masyarakat yang telah ada tidak memenuhi syarat Usia dan Pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri.

Pada Tahun 2023 ini peningkatan cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat belum dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan,yaitu sekitar **12 % dan terealisasi sekitar 7,31 %** dari formula yang telah ditentukan yaitu : **Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun (n) Dibagi Jumlah Kelurahan/Desa Tahun (n) dikali 100 %**. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas menjadi penyebab cakupan perlindungan masyarakat sulit untuk ditingkatkan. Kurangnya minat itu disebabkan karena image Anggota Satlinmas sering menjadi bahan lelucon dan rendahnya anggaran kesejahteraan Satlinmas yang disebabkan regulasi terkait biaya Operasional belum ada kejelasan sehingga Pemerintah Desa/kelurahan kesulitan dalam menentukan anggaran untuk kesejahteraan Satlinmas.

Tabel 2.136 Cakupan petugas perlindungan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat	1.184	1.16	909	940	936
2	Jumlah Desa/Kelurahan	127	127	127	128	128
3	Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat	9.32	9.12	7,16	7,34	7,31

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2024

Untuk memenuhi target capaian Petugas Perlindungan masyarakat maka upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi petugas Satlinmas antara lain memperhatikan Kesejahteraan Anggota Satlinmas melalui penganggaran biaya Operasional pada APBDes, Pemberian penghargaan, peningkatan kompetensi, Pelatihan Keterampilan secara rutin dan fasilitasi perlengkapan Operasional.

2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Salah Satu indicator kunci Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 yang merupakan Perbandingan antara **Jumlah Pelanggaran/ Gangguan K3 yang Tertangani dibagi jumlah Pelanggaran/Gangguan K3 yang dilaporkan dikali 100 Persen**. Untuk Tahun 2023 ini sebagaimana target dalam Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 Pelanggaran K3 ditargetkan terjadi Penurunan sekitar **10 %** dari Tahun 2022 realisasi di Tahun 2023 penurunan pelanggaran K3 sekitar 9,56 %

Upaya Pencegahan dan penyelesaian Pelanggaran K3 dilakukan melalui Deteksi dini dan cegah dini, Patroli wilayah, Pembinaan dan Penyuluhan serta sosialisasi sehingga tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) dapat tercapai 100 %. Berikut tabel capaian Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3.

Tabel 2.137 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

1	Jumlah gangguan K3 yang ditangani	450	448	459	418	378
2	Jumlah gangguan K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	450	448	459	418	378
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, 2024

Upaya Pencegahan dan penyelesaian pelanggaran K3 yang mencapai 100 % persen ini disebabkan karena pelaksanaannya dilakukan secara konsisten. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum di Kab. Luwu Timur telah diatur dengan Peraturan daerah Kab. Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 dimana terdapat 16 (enam Belas) tertib Trantibum yang dikawal oleh Satpol PP. setiap pelanggaran/Gangguan K3 harus ditindak sesuai dengan Peraturan daerah ini. secara teknis penempatan personil Polisi Pamong Praja di setiap Kecamatan menjadi factor utama keberhasilan capaian indicator ini. Dengan Patroli wilayah yang dilakukan secara rutin diseluruh kecamatan, maka potensi-potensi Gangguan dapat dicegah secara cepat dan meminimalisir tindak Kejahatan. Berikut Data Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.138 Data Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan / Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuklem dan obat-obatan	106	106	Para pelajar membuat surat pernyataan bermaterai tidak mengulangi perbuatannya, orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan / Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	95	95	Menurunkan/mencabut APK, baliho dan spanduk serta bentuk iklan/media informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Pedagang pasar tumpah dan musiman yang Berjualan hingga dibahu jalan	77	77	Memberikan pemahaman(persuasive) agar tidak menjual pada bahu jalan, bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat sesuai dengan aturan
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan; Kandang yang dekat dengan pemukiman	4	4	Memberikan teguran kepada pemilik ternak agar menggembalakan ternaknya sesuai aturan peternakan;memberikan pemahaman kepada pemilik kandang ternak agar dipindahkan ketempat yang jauh dari pemukiman. Membantu bersama-sama memindahkan
5	Tertib Lingkungan	Penambangan galian Gol.C.; buang sampah yang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan	56	56	Menghentikan operasional tambang galian gol C karena tidak memiliki izin lingkungan, memberikan peringatan kepada warga yang ditemukan mencemarkan lingkungan
6	Tertib Bangunan	mendirikan bangunan tanpa IMB	3	3	Memberikan teguran kepada pemilik bangunan
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	-	-	-

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan / Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	ASN bolos kerja kedapatan dipasar tanpa izin	1	1	Membuat Surat Pernyataan dan melaporkan kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan untuk mendapatkan Pembinaan lebih lanjut.
9	Tertib Sosial	Meminta sumbangan dengan surat legalitas palsu	-	-	-
10	Tertib Kesehatan	Merokok pada KTR; menjual mamin kadaluarsa	-	-	-
11	Tertib Jalan	Material bahan bangunan yang berada diatas badan jalan/trotoar, mobil yang terparkir lama di bahu jalan	25	25	Memindahkan material atau kendaraan yang berada diatas trotoar/bahu jalan
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Kendaraan bak terbuka yang memuat pasir	6	6	Memberikan teguran kepada pemilik truk untuk menggunakan terpal sebagai penutup bak saat memuat material pasir
14	Tertib sungai, drainase dan pesisir pantai	Mendirikan bangunan tempat usaha diatas drainase	5	5	Memberikan teguran kepada pemilik usaha yang ditemukan mendirikan bangunan atau tempat usaha diatas drainase
Jumlah			418	418	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, 2024

3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Tabel 2.139 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1.413	1.589,62	1.589,62	1.589,62	1.766,2

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	20,34	22,89	22,89	22,89	25,43

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, 2024

Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami perubahan tahun 2023 karena bertambahnya 1 WMK (posko damkar Baruga Kec. Malili). Jumlah WMK Kab. Luwu Timur sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 10 WMK (Posko Damkar).

4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) merupakan perbandingan jumlah kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah seluruh kejadian kebakaran dalam area WMK, sehingga tingkat waktu tanggap adalah fleksibel, bisa naik atau bisa turun, ditentukan oleh jumlah kejadian yang tertangani dalam waktu tanggap. Adanya kejadian yang tertangani diluar waktu tanggap disebabkan beberapa faktor, antara lain : Jarak yang jauh antara lokasi kejadian kebakaran dengan posko damkar, atau juga akses jalan yang sulit sehingga untuk menjangkau lokasi kejadian kebakaran butuh waktu yang lebih lama meskipun lokasi kejadian kebakaran secara kalkulasi adalah dekat untuk dijangkau.

Tabel 2.140 Tingkat Waktu Tanggap daerah layanan WMK kabupaten Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	133	62	58	62	104
2	Jumlah kejadian kebakaran di WMK	177	68	72	76	138
3	Tingkat waktu tanggap (respon timerate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	75,15	91,18	80,56	81,57	75,36

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, 2024

Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap disebabkan jumlah kebakaran yang meningkat signifikan pada tahun 2023 pada seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kab. Luwu Timur sedangkan jumlah WMK beserta sarana prasarana nya masih sangat minim , salah satu penyebab meningkatnya jumlah kebakaran karena adanya fenomena elnino tahun 2023.

5. Persentase penegakan perda

Penegakan Perda adalah Penyelesaian atas Pelanggaran Perda. Sesuai dengan Standar Operasional Penegakan Perda yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Perda dilakukan dengan 2 (dua) Tahap yaitu Non-Yustisial dan Yustisial.

Upaya Yustisial adalah upaya pertama yang harus dilakukan untuk menghentikan suatu pelanggaran. Jika dengan upaya non yustisial pelanggaran tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian pelanggaran akan dilanjutkan ke tahap penindakan yustisial. Penindakan yustisial ini akan berlaku criminal justice system sesuai dengan KUHAP. Salah satu indicator pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum adalah kinerja Penegakan Perda.

Persentase Penegakan Perda diperoleh dengan membagi jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan/ditangani dibagi dengan jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi dikali 100 Persen. Tingkat pelanggaran perda cenderung meningkat secara signifikan pada tahun 2021 disebabkan adanya lonjakan pelanggaran protokol kesehatan kasus Covid-19 yang mencapai puncaknya ditahun 2021.Sementara itu Tahun 2023 ini mengalami penurunan pelanggaran Perda sekitar 9,22 Persen dari Tahun 2022. Berikut tabel data tingkat penyelesaian Pelanggaran perda dan Perkada Kab. Luwu Tahun 2023 yang mencapai 100% :

Tabel 2.141 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	40	22	1036		
2	Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	51	26	1037		
3	Persentase Penegakan Perda	78.43	84.61	99,90		

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur, 2024

Tingkat pelanggaran perda cenderung meningkat secara signifikan pada tahun 2021 disebabkan personil Satpol PP Kecamatan melakukan pencegahan dan penyelesaian Pelanggaran K3 dan adanya lonjakan pelanggaran protokol kesehatan kasus Covid-19 yang mencapai puncaknya ditahun 2021. Sementara itu Tahun 2022 ini mengalami penurunan pelanggaran Perda sekitar 9,06 Persen dari Tahun 2021. Berikut tabel data tingkat penyelesaian Pelanggaran perda dan Perkada Kab. Luwu Tahun 2022 yang mencapai 100%.

Tabel 2.142 Data Tabel tingkat penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah Tahun 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggaran Perda/perkada yang ditangani	40	22	1036	943	856
2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh satpol PP	21	26	1037	943	856
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	78,43	84,61	85,91	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, 2024

Dukungan Personil Satpol PP Kecamatan yang secara aktif melakukan melakukan pengawasan dan sosialisasi peraturan Daerah dan Kepala Daerah di masyarakat yang menjadi salah satu penyebab capaian penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada ini meningkat. Selain itu, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga tidak kalah pentingnya dalam melakukan penanganan kasus Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah secara yustisial. Berikut ini data penyelesaian pelanggaran Peraturan daerah tahun 2023 berdasarkan Perda yang dilanggar.

Tabel 2.143 Data Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Daerah yang Dilanggar

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	Laporan	Tindak Lanjut/Penyelesaian					
				Non-Yustisi				Yustisi	
				Surat Teguran/Peringatan	Pencabutan Izin	Penutupan/Pembongkaran	Yang Lain	Denda	Yang Lain
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	1	1					
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	9	8				1	

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	Laporan	Tindak Lanjut/Penyelesaian					
				Non-Yustisi				Yustisi	
				Surat Teguran/ Peringatan	Penca Butan Izin	Penutupan/ Pembongkaran	Yang Lain	Denda	Yang Lain
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011							
4	Gangguan Ketenteraman, Ketertiban dan keindahan (K3)	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	378				378		
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014							
6	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	10				10		
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017							
8	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	122				122		
9	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	336				336		
10	Obat dan makanan Kadaluarsa	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014							
JUMLAH			856				855	1	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, 2024

Dari Data diatas Kasus Pelanggaran Perda yang paling banyak adalah Pelanggaran Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi Pelayanan tera-Tera ulang. Terdapat 7 (Tujuh) Kasus yang ditangani secara Yustisi yaitu Pelanggaran Perda Nomor 3 tahun 2017 tentang pengendalian, pengawasan dan Penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

2.1.3.1.5 Sosial

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tabel 2.144 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun

			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang Diberikan Bantuan	Jiwa	1.126	12.71	15.756	18.958	16.333
2	Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jiwa	31.58	41.14	28.860	28.860	28,860
3	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	3,57	30,9	54,59	65,69	56,59

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Jumlah pada indikator pertama merupakan PMKS yang telah diberikan bantuan (realisasi dari jumlah PMKS pada indikator kedua) yaitu sejumlah 16.333 jiwa. Indikator kedua merupakan jumlah PMKS yang terdiri atas data BPNT dan PKH yang tercatat yang seharusnya menerima bantuan yaitu 28.860 jiwa. Persentase PMKS adalah hasil pembagian dari indikator pertama dan kedua lalu di kalikan 100 untuk mendapatkan jumlah persen

Persentase PMKS yang memperoleh bansos (%) = (Jumlah PMKS yang diberikan/Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) * 100

Persentase PMKS yang memperoleh bansos (%) = (16.333/28.860) * 100

Persentase PMKS yang memperoleh bansos (%) = 56,59%

Persentase PMKS yang memperoleh bansos yaitu sebesar 56,69%

2. Persentase PMKS yang tertangani

Tabel 2.145 Persentase PMKS yang Tertangani Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	13.180	12.559	15.542	19.630	16.333
2	Jumlah PMKS	Jiwa	36.023	47.590	29.490	29.490	28.860
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	36.59	26.39	52.70	66,56	56,59

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada kolom indikator pertama merupakan jumlah PMKS yang tertangani sesuai dengan data BPNT dan PKH yaitu 16.333 jiwa dan pada indikator kedua yaitu jumlah keseluruhan PMKS yang sesuai pada BPNT dan PKH di Luwu Timur pada tahun 2023 sebanyak 28.860 jiwa. Persentase PMKS yang tertangani merupakan hasil pembagian jumlah PMKS yang tertangani dan jumlah PMKS secara keseluruhan tahun 2023 dan di kalikan 100.

Persentase PMKS yang tertangani (%) = (Jumlah PMKS yang tertangani/Jumlah PMKS) * 100

Persentase PMKS yang tertangani (%) = (16.333/28.860) * 100

Persentase PMKS yang tertangani (%) = 56,59%

3. Persentase PMKS skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2.146 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	11.205	12.587	15.507	18.958	16.333
2	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bansos dalam 1 tahun	Jiwa	34.794	44.442	27.288	28.860	28.860
3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	32,2	28,32	56,83	65,69	56,59

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah PMKS yang memperoleh bansos pada tahun 2023 yaitu 16.333 jiwa dan indikator merupakan jumlah keseluruhan PMKS yang seharusnya menerima bansos pada tahun 2023 yang sesuai pada BPNT dan PKH di Luwu Timur sebanyak 28.860 jiwa. Persentase PMKS yang skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah hasil pembagian jumlah PMKS yang memperoleh bansos dan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bansos tahun 2023 dan di kalikan 100.

Persentase (%) = (jumlah PMKS yang memperoleh bansos/jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bansos tahun 2023) * 100

Persentase (%) = (16.333/28.860) * 100

Persentase (%) = 56,59%

4. Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.147 Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	7	10	10	10	10
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	9	10	10	10	10
3	Persentase Panti Sosial dengan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	77.78	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tahun 2023 jumlah panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesos Kab. Luwu Timur yaitu 10 unit. Indikator kedua merupakan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos tahun 2023 yaitu 10 unit. Perhitungan persentase panti sosial dengan sarana dan prasarana adalah pembagian antara jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana Kab. Luwu Timur dan Jumlah panti sosial yang seharusnya di sediakan untuk pelayanan dalam 1 tahun, lalu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase

Persentase panti sosial sarana dan prasarana (%) = $\left(\frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana}}{\text{jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana}} \right) \times 100$

Persentase panti sosial sarana dan prasarana (%) = $(10/10) \times 100$

Persentase panti sosial sarana dan prasarana (%) = 100%

5. Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.148 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun

			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	4	7	7	8	10
2	Jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	9	10	10	10	12
3	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	44.44	70	70	80	83.33

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah WKBSM di Kab. Luwu Timur tahun 2023 dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana yaitu sebanyak 10 unit. Indikator kedua yaitu jumlah WKBSM yang seharusnya yaitu sebanyak 12 unit. Menghitung persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yaitu pembagian jumlah WKBSM yang tersedia tahun 2023 dan jumlah WKBSM yang seharusnya tersedia tahun 2023 dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase

Persentase (%) = (jumlah WKBSM yang tersedia tahun 2023/ jumlah WKBSM yang seharusnya tersedia tahun 2023) * 100

Persentase (%) = (10/12) * 100

Persentase (%) = 83.33%

6. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.149 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	76	151	249	299	327
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	Jiwa	76	151	249	299	327

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

jumlah korban bencana di Kab. Luwu Timur tahun 2023 yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yaitu sebanyak 327 jiwa. Indikator kedua yaitu jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap yaitu sebanyak 327 jiwa. Indikator selanjutnya, yaitu menghitung persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan membagi jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap dan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase

$$\text{Persentase (\%)} = (\text{jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial} / \text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial}) * 100$$

Persentase (%) = (327/327) * 100

Persentase (%) = 100%

7. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.150 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	76	151	249	299	327
2	Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	76	151	249	299	327
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap yaitu sebanyak 327 jiwa. Sebanyak 327 jiwa merupakan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap. Indikator selanjutnya, yaitu menghitung persentase korban bencana yang dievakuasi dengan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dengan menghitung pembagian jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase

$$\text{Persentase (\%)} = \left(\frac{\text{jumlah korban bencana yang dievakuasi}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi}} \right) * 100$$

$$\text{Persentase (\%)} = (327/327) * 100$$

$$\text{Persentase (\%)} = 100\%$$

8. Persentase Penyandang Cacat Dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.151 Persentase Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Menerima Jaminan Sosial Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	301	298	311	368	402
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	Jiwa	3.906	4.030	4.030	4.030	4.030
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	7,71	7,39	7,72	9,13	9,97

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun sebanyak 402 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Berasal dari APBD pokok dan perubahan	Jaminan hidup lanjut usia	:	30 Jiwa
	Jaminan hidup penyandang disabilitas	:	20 Jiwa
Fasilitasi orang dalam gangguan jiwa di RS. Batara Guru Belopa		:	50 Jiwa
Bantuan atensi lanjut usia Setra Wirajaya		:	109 Jiwa
Pemberian alat bantu aksebilitas disabilitas dari Sentra Wirajaya		:	96 Jiwa
Pemberian bantuan atensi rehabilitas sosial penyandang disabilitas berbasis keluarga (modal usaha)		:	97 Jiwa
JUMLAH		:	402 Jiwa

Indikator kedua yaitu jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun yaitu sebanyak 4.030 jiwa. Indikator selanjutnya, yaitu menghitung persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan membagi jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang telah menerima jaminan sosial dan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang seharusnya menerima jaminan sosial di kalikan dengan 100.

Persentase (%) = $\frac{\text{jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang telah menerima jaminan sosial}}{\text{jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100$

Persentase (%) = $(402/4030) \times 100$

Persentase panti sosial sarana dan prasarana (%) = 9,97%

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

1. Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun

Didalam Ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis kategori Perselisihan Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

**Tabel 2.152 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun
Kab. Luwu timur tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	14	34	25	46	30
2	Jumlah perusahaan	Perusahaan	123	151	147	153	150
3	Angka tenaga sengketa pekerja pertahun	%	11,38	22,82	17,01	30,06	20

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari gambaran tabel 2.152 dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja/ buruh dari Tahun 2019 - 2023 mengalami fluktuasi, kadang mengalami peningkatan dan kadang mengalami penurunan. Dari jumlah kasus sengketa pada tahun 2019 ke tahun 2020, telah terjadi peningkatan kasus sebesar 143%, sedangkan pada tahun 2020 ke 2021 telah mengalami penurunan sebanyak 26% dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 84%. Namun, pada Tahun 2023, terjadi penurunan angka sengketa Pengusaha dan Pekerja sebesar 50,3 %. Tahun 2023 sebanyak 30 Kasus yang dilaporkan dan terdaftar pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari total 150 Perusahaan yang terdaftar.

Di dalam ketentuan perundang-undangan, sengketa pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan perselisihan hubungan industrial yang terdiri dari 4 jenis perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan perselisihan PHK.

Terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan dinamika yang sering terjadi di perusahaan. Timbulnya perselisihan hubungan industrial dapat disebabkan karena: 1) adanya perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 2) pelanggaran terhadap kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 3) adanya tuntutan kepentingan di luar kontrak kerja yang disepakati khususnya terkait dengan kesejahteraan pekerja/buruh.

Untuk penanganan perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial. Di dalam ketentuan tersebut penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditangani oleh Konsiliator, Arbiter, atau Mediator. Cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang familiar dan sering dilaksanakan adalah penanganan kasus perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial. Namun demikian, sebelum penanganan dilakukan oleh Mediator, maka para pihak yang berselisih wajib melakukan bipartite, di mana dengan pertemuan bipartit tersebut diharapkan dapat tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Bila proses bipartit tersebut mengalami kebuntuan atau kegagalan, barulah diupayakan untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kepada Mediator Hubungan Industrial.

Pada faktanya, yang sering terjadi adalah pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh lebih suka menyampaikan langsung gugatan kepada pemerintah melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan daripada melalui proses bipartit, sehingga untuk penyelesaian seperti ini dilakukan melalui fasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini meskipun dibantu oleh Distransnaker, tetapi masih dianggap sebagai penyelesaian perselisihan di luar ketentuan undang-undang atau non lititgasi. Pada prinsipnya, baik bipartit maupun fasilitasi, semuanya adalah upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Demikian pula bila proses fasilitasi gagal maka para pihak tetap diarahkan untuk melakukan bipartit yang menjadi syarat untuk dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial.

Dari beberapa pengalaman melakukan fasilitasi maupun mediasi, maka ada kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat tercapai Perjanjian Bersama, tetapi ada pula yang tidak dapat tercapai kesepakatan. Pada kasus perselisihan yang tidak bisa mencapai kesepakatan maka Mediator Hubungan Industrial akan mengeluarkan anjuran yang selanjutnya akan ditanggapi para pihak yang berselisih. Bila pihak pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menerima isi anjuran, maka para pihak dapat melaksanakan isi anjuran, sehingga bisa dinilai bahwa kasus perselisihan telah selesai. Namun, bila salah satu pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan pencatatan untuk dilanjutkan proses penyelesaiannya pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perselisihan hubungan industrial, maka ada beberapa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh perusahaan untuk memantau adanya potensi perselisihan hubungan industrial;
- 2) Mendorong agar perusahaan memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian

- kerja bersama;
- 3) Mendorong terbentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan seperti LKS Bipartit;
 - 4) Mewajibkan penerapan Upah Minimum Kabupaten;
 - 5) Mendorong penerapan struktur skala upah;
 - 6) Mewajibkan adanya perlindungan jaminan sosial baik JKN maupun BPJS Ketenagakerjaan.

2. Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

**Tabel 2.153 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	-	8,82	12,00	80,43	36,67

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Terhadap jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, dapat dijelaskan bahwa kondisi dari tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 tidak ada kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dari total 14 kasus yang difasilitasi dan dimediasi, lalu pada tahun 2020 jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 8,82%. Selanjutnya, dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 36%, lalu berikutnya tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan yang sangat drastis menjadi 80,43%. Sementara itu, pada Tahun 2023 sebanyak 36,67% Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama dengan rincian sebanyak 11 Kasus yang diselesaikan dengan PB dari total 30 kasus yang difasilitasi dan dimediasi.

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan fasilitasi maupun mediasi kasus perselisihan hubungan industrial adalah untuk mencapai Perjanjian Bersama (PB). Tercapainya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama menunjukkan bahwa para pihak yang berselisih baik pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat berlandaskan asas kekeluargaan. Dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan saling memahami bahwa lebih penting untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial di perusahaan dan kepentingan orang banyak, ketimbang memaksakan

agar tuntutan harus dipenuhi seluruhnya. Kesepakatan atau Perjanjian Bersama menunjukkan adanya kedewasaan untuk menyelesaikan permasalahan secara kompromi serta tidak memaksakan kehendak karena baik pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha adalah satu kesatuan sistem yang harus bekerja sama untuk berpikir dan bekerja memajukan perusahaan, sehingga eksistensi perusahaan bisa terjaga.

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama selalu menjadi harapan bersama agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur terus berupaya agar setiap penyelesaian kasus baik melalui fasilitasi atau mediasi sedapat mungkin bisa mencapai Perjanjian Bersama melalui edukasi kepada pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha bahwa kesepakatan atau Perjanjian Bersama jauh lebih baik dibandingkan sama-sama mempertahankan ego masing-masing yang akhirnya mengakibatkan kerugian baik bagi kedua belah pihak. Dengan adanya sifat ego untuk mencari menang atau kalah akan berdampak buruk pada hubungan kedua pihak, sehingga siapapun yang menang dalam perselisihan pasti tidak akan bisa lagi bekerja sama dengan baik dalam satu *team work* untuk mencapai tujuan bersama.

3. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumahsakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Tabel 2.154 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pekerja buruh jamsostek	Orang	9.761	16.124	19.123	20.688	13.339
2	Jumlah pekerja/buruh	Orang	9.761	16.124	19.123	20.668	13.339

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data jumlah pekerja/buruh dan yang menjadi peserta jamsostek pada tahun 2020-2022 adalah data yang bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan, di mana pada data tersebut jumlah pekerja/buruh yang dimaksud juga termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum atau selain perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Selanjutnya, data jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek pada tahun 2023 terlihat ada penurunan yang disebabkan karena data yang disajikan tidak lagi memasukkan data badan usaha yang tidak berbadan hukum, tetapi secara umum, yaitu hanya data pekerja/buruh pada badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, Koperasi, dan Yayasan. Serta telah mencatatkan Perjanjian Kerja pada Distransnaker Luwu Timur.

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi pekerja/buruh, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadikan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme yang diberlakukan adalah setiap pengusaha yang akan mencatatkan PKWT atau PKWTT berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Perusahaan mendapatkan rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut, maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program jaminan sosial ini adalah di harapkan agar pekerja/buruh dan keluarganya akan merasa tenang bekerja

karena adanya perlindungan yang diberikan baik pada saat bekerja, setelah pensiun bekerja maupun pada saat kehilangan pekerjaan.

4. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2.155 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	110	50	65	146	186
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	149	66	90	171	227
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73,82	75,75	72,22	85,38	81,94

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tahun 2023 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan Pendidikan Pelatihan berbasis Kompetensi bagi calon tenaga kerja sebanyak 186 orang. Pendaftar Pelatihan dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur tercatat sebanyak 227 orang dan 186 orang yang dinyatakan lulus dan mengikuti Pelatihan berbasis kompetensi. Peserta pelatihan kompetensi pada tahun 2023 meningkat bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini untuk menunjang program KP1 Kepala Daerah terkait ketenagakerjaan yaitu Kerja sama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (Pemerintah Daerah Dan Swasta).

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari 3 (tiga) jenis pelatihan yaitu Pendidikan dan pelatihan kerjasama ATS Soroako sebanyak 60 orang. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan jurusan pelatihan keterampilan: pengelasan pabrikan logam, pelatihan keterampilan otomotif kendaraan ringan, pelatihan keterampilan komputer gambar dan desain dan pelatihan keterampilan teknik listrik mekanik, mereka yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikasi standar PT. Vale Indonesia Tbk. Pelatihan yang kedua yaitu Pelatihan berbasis Kompetensi K3. Pelatihan ini berupa sertifikasi operator alat berat (SIO) dan Pesawat angkat angkut *dump truck* sebanyak 110 orang. Pelatihan yang ketiga yaitu Pendidikan dan pelatihan Kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang. Pelatihan ini dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari dengan jurusan surveyor/juru ukur.

Dari Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan, diharapkan agar para calon tenaga kerja memiliki keterampilan dan kompetensi khusus sehingga dapat bersaing dalam bursa kerja.

5. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat yang berbentuk Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan kepada Para Pencari Kerja. Sasaran dari kegiatan ini adalah sekolah kejuruan dan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan swasta yang menjadi mitra atau binaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Peserta diberikan penyuluhan informasi lowongan kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun ke luar negeri.

Tabel 2.156 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	330	330	330	80	80
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	330	330	330	80	80
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tahun 2023 peserta pelatihan berbasis masyarakat dilaksanakan sebanyak 80 orang dari pendaftar 80 orang. Narasumber yang didatangkan adalah perusahaan pengguna langsung. Tujuannya agar calon pencari kerja dapat memperoleh informasi dan para Pengusaha dapat menawarkan peluang-peluang kerja keluar negeri. Apabila peserta atau para pencari kerja berminat dapat berhubungan langsung dengan perusahaan pengguna sesuai syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan

6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Tabel 2.157 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang di latih	Orang	110	10	40	40	40
2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	110	10	40	40	40
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diberikan pelatihan Kewirausahaan dan pendampingan Pada Tahun 2023 sebanyak 40 orang. Total Pelatihan Kewirausahaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 240 orang. Selain Pelatihan kewirausahaan, Kelompok Usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) juga diberikan bantuan peralatan yang bersumber dari Dana APBN pada periode tahun 2016-2018.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.158 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	4.130	4.287	5.489	6.592	6.335
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	5.454	5.639	7.011	8.005	10.674
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	75,72	76,02	78,29	82,35	59.35

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Tabel 2.159 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	Orang	1	2	2	3	3
2	Jumlah total kursi keanggotaan DPRD	Orang	30	30	30	30	30
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	3,33	6,67	6,67	10	10

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.160 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	Orang	1.324	1.352	1.522	1.413	2.494
2	Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	5.454	5.639	7.011	8.005	8.829
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	24,28	23,98	21,71	17,65	28.24

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

4. Rasio KDRT

Tabel 2.161 Rasio KDRT Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KDRT	Kasus	33	21	26	22	7
2	Jumlah Rumah Tangga	RT	87.534	69.073	70.198	78.851	96.74
3	Rasio KDRT	Rasio	0.04	0.03	0.037	0,027	0,007

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.162 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	5.454	5.639	10.887	18.246	31,312

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	46.113	45.341	51.034	60.793	58,256
3	partisipasi angkatan kerja perempuan	%	11,83	12,44	21,33	30,01	53,75

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

6. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.163 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	27	33	26	18	40
2	Jumlah Laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	27	33	26	18	40
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah kasus yang ditangani di UPTD PPA sebanyak 40 laporan. Sebanyak 40 laporan ditangani di UPTD PPA sesuai dengan jenis kasus nya. Indikator selanjutnya, yaitu menghitung persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan di UPTD PPA. Persentase dihitung dengan membagi jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh UPTD PPA dan jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke UPTD PPA dan dikalikan dengan 100.

Persentase (%) = (jumlah laporan yang ditindaklanjuti oleh UPTD PPA / jumlah pengaduan yang masuk ke UPTD PPA) * 100

Persentase (%) = (40/40) * 100

Persentase (%) = 100%

Persentase 100% yang berarti jumlah korban yang membutuhkan rehabsos telah memperoleh layanan rehabsos

7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.164 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Korban Kekerasan yang memperoleh layanan rehabsos	Orang	27	33	26	91	40
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Orang	27	33	26	91	40
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan rehabsos sebanyak 40 orang. Sedangkan, jumlah kekerasan yang membutuhkan rehabsos yaitu 40 orang. Indikator selanjutnya, yaitu menghitung persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas. Persentase dihitung dengan membagi jumlah korban kekerasan yang memperoleh layanan dan jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dan dikalikan dengan 100.

Persentase (%) = (jumlah korban kekerasan yang ditindaklanjuti oleh UPTD PPA / jumlah korban yang membutuhkan rehabsos) * 100

Persentase (%) = (40/40) * 100

Persentase (%) = 100%

Persentase 100% yang berarti jumlah korban yang membutuhkan rehabsos telah memperoleh layanan rehabsos

8. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Tabel 2.165 cakupan kupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	24	31	13	22	8
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang	Perkara	27	33	17	22	8
3	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	89	94	76	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 8 perkara. Sedangkan, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang sebanyak 8 perkara. selanjutnya, yaitu menghitung persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membagi jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang dan dikalikan dengan 100.

Persentase (%) = jumlah perkara yang diputuskan pengadilan/jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidang * 100

Persentase (%) = (8/8) * 100

Persentase (%) = 100%

Persentase 100% yang berarti jumlah korban yang membutuhkan rehabsos telah memperoleh layanan rehabsos

9. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2.166 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum	Orang	24	31	17	22	40
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	27	33	17	22	40
3	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	89	94	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah korban mendapatkan layanan hukum tahun 2023 dalam 1 tahun yaitu sebanyak 40 orang. Indikator kedua yaitu jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum yaitu sebanyak 40 orang. Menghitung persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yaitu pembagian Jumlah korban mendapatkan layanan hukum tahun 2023 dan jumlah jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum tahun 2023 dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase

Persentase (%) = (Jumlah korban mendapatkan layanan hukum tahun 2023/ jumlah jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum tahun 2023) * 100

Persentase (%) = (40/40) * 100

Persentase (%) = 100%

2.1.3.2.3 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Ketersediaan Pangan Utama adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Tabel 2.167 Ketersediaan Pangan Utama Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rata rata ketersediaan pangan utama pertahun	Ton	245.40 1	252.72 8	265.29 2	243.78 7	185.28 4

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah penduduk	Orang	300.078	302.039	304.727	304.938	305.521
3	Ketersediaan pangan utama	%	81,77	83,67	87,06	79,95	60.65

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan jumlah ketersediaan pangan utama (beras) disebabkan produksi padi yang mengalami penurunan. Meskipun demikian, ketersediaan beras masih surplus. Kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sebanyak 31.621,42 ton (kebutuhan konsumsi 103,5 kkal/kapita/tahun dengan jumlah penduduk 305.521 jiwa), sedangkan yang tersedia 185.284 ton, sehingga surplus ketersediaan pangan utama/beras sebanyak 153.662,83 ton.

2. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

Ketersediaan Energi Kabupaten Luwu Timur yang diperoleh berdasarkan neraca bahan makanan (NBM) tahun 2019-2023 adalah menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi Kabupaten Luwu Timur sudah memenuhi angka kecukupan energi yang dianjurkan pada tingkat ketersediaan Nasional yaitu sebesar 2.400 Kkalori/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012). Hal ini disebabkan karena sebagian besar komoditi pangan mengalami surplus. Penyediaan energi tertinggi terjadi pada jenis padi-padian sebesar 2.051 kalori/hari (45,76%), ikan 1.161 kalori/hari (22%), Telur 201 kalori/hari (26%) dan komoditi yang lainnya relatif kecil.

Ketersediaan Protein Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2019-2023 diketahui bahwa tingkat ketersediaan protein telah memenuhi angka kecukupan protein yang disarankan secara nasional yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012), Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari ketersediaan jenis bahan makanan yang dari padi-padian sebesar 127,69 gram/kap/hari dan selanjutnya ikan sebesar 63,09 gram/kap/hari dan telur 15,37 gram/kapita/hari, sedangkan bahan pangan yang lain relatif kecil.

**Tabel 2.168 Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan Energi Perkapita	kcal/kap/hari	3.521,00	3.061,00	3.770,50	3.781	3.513
2	Ketersediaan Protein Perkapita	Gram/kap/hari	210,26	197,86	212,69	212,77	208,39

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Ketersediaan protein Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2018-2022 diketahui bahwa tingkat ketersediaan protein telah memenuhi angka kecukupan protein yang disarankan secara nasional yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012), Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari ketersediaan jenis bahan makanan yang dari padi-padian sebesar 149,62 gram/kap/hari dan selanjutnya ikan sebesar 37,17 gram/kap/hari sedangkan bahan pangan yang lain relatif kecil.

3. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan

**Tabel 2.169 Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Sampel	5	-	-	8	10
2	Jumlah total sampel pangan yang di uji	Sampel	9	-	-	12	15
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	55,5	-	-	66,66	66,66

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada table diatas terlihat bahwa dari indikator jumlah sampel pangan yang aman di konsumsi itu terlihat di tahun 2022 ada kenaikan dari tahun 2023, yang mana dalam pengawasan pangan itu bertambah dari jenis pangan yang di akan dikonsumsi dengan jumlah sampel pangan yg telah diuji.

Tabel 2.170 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Tani	2.162	2.306	2.598	2.700	2.700
a	Kelas Pemula	1.541	1.647	2.009	1.857	1.875

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
b	Kelas Lanjut	582	605	538	788	788
c	Kelas Madya	45	49	46	50	50
d	Kelas Utama	4	5	5	5	5
2. a.	Jumlah Petani/Buruh Tani	53.294	56.844	60.755	61.471	61.471
b	Jumlah Keanggotaan dalam Kelompok Tani	25	25	25	23	23
c	Rasio jumlah anggota kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada table diatas dimana jumlah kelompok tani, petani dan keanggotaan kelompok tani pad atahun 2022 dan 2023 relatif sama karena diberlakukannya validasi data secara berkala di sesuaikan di simluhtan sehingga data kelompok yang ganda di revitalisasi.

Dengan adanya kelompok tani yang di dampingi maka dapat dievaluasi secara signifikan sehingga dapat menaikkan kelas kemampuan kelompok tani secara berkala setiap tahun, untuk kenaikan kelas dibutuhkan akumulasi nilai dengan range yang telah terukur sehingga kenaikan kelas kelompok tani bisa saja terjadi dalam kurun waktu yang lebih dari tiga atau empat tahun bahkan kadang terjadi turun kelas, olehnya itu perlu dukungan pembiayaan untuk pembinaan secara langsung ditingkat kelompok.

2.1.3.2.4 Pertanahan

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sasaran meningkatnya tertib administrasi tanah Pemkab Luwu Timur dengan indikator Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah didukung pendaftaran tanah. Capaian tersebut agar memiliki kepastian hukum. Pendaftaran Tanah atau Pensertifikatan sifatnya berkelanjutan. Ada peningkatan setiap tahun untuk persertifikatan hal ini karena didukung oleh penganggaran yang maksimal.

Tabel 2.171 Persentase luas lahan bersertifikat Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah luas lahan bersertifikat	M2	8.538.186	8.842.736	9.267.085	13.367.681	13.541.471
2	Jumlah luas wilayah	M2	22.299.930	22.299.930	22.299.930	22.299.930	22.299.930
3	Persentase luas lahan bersertifikat	%	38,29	39,65	41,56	59,94	60,72

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.172 Penyelesaian kasus tanah negara Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang di selesaikan	Kasus	7	5	5	4	2
2	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	7	5	5	4	2
3	Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

Jumlah kasus tanah bervariasi, berdasarkan aduan atau keberatan dari pihak lain, dengan ikut dalam fasilitasi penyelesaian kasus tanah Pemkab. Luwu Timur yang dilakukan dengan tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan saja, melainkan juga melalui jalur non litigasi, seperti mediasi dan perundingan.

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Pemberian Izin lokasi berdasarkan kebutuhan OPD yang merencanakan pembangunan pada suatu lokasi. Dengan memfasilitasi penerbitan SK tentang Penetapan Lokasi suatu objek berdasarkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kabupaten.

Tabel 2.173 Penyelesaian izin lokasi Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ijin lokasi	Ijin	2	1	1	2	1
2	Jumlah permohonan ijin lokasi	Ijin	2	1	1	2	1
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100.00	100.00	100.00	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

1. Tersedianya RPPLH Kabupaten/Kota

Penyusunan dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen RPPLH Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 hingga saat ini belum dilakukan penyusunan dikarenakan belum adanya Dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tolak ukur dalam Penerapan RPPLH tingkat Kabupaten.

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Dokumen RPPLH Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 belum ada, sehingga belum terintegrasi dengan rencana pembangunan Kab. Luwu Timur.

3. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Tabel 2.174 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023

1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah Kabupaten	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tahun 2023 dilaksanakan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045.

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.175 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kab. Luwu timur tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air		36,40	89,19	80,69	25,02	24,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,92 sedangkan target IKA pada tahun 2023 sebesar 28.00. Nilai IKA yang diperoleh belum memenuhi target yang sudah ditentukan dan apabila disandingkan dengan nilai capaian IKA tahun 2022, maka nilai IKA mengalami penurunan dari 25,01 pada tahun 2022 menjadi 24,92 di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan nilai capaian tetapi statusnya sama dengan tahun 2022 yaitu status sedang. Sedikit banyak yang mempengaruhi perubahan nilai IKA Kabupaten Luwu Timur dikarenakan adanya perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan. Perhitungan IKA pada tahun 2021, 2022 dan 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27.

Tabel bobot Indeks Pencemar

No	Mutu Air	Bobot Nilai Indeks Pencemar
1	Memenuhi (Baik)	70
2	Cemar Ringan	50

No	Kategori IKA	Angka Rentang
1	Baik	70
2	Sedang	$50 \leq X \leq 70$

3	Cemar Sedang	30
4	Cemar Berat	10

3	Kurang	$25 \leq X \leq 50$
4	Sangat Kurang	$0 \leq X \leq 25$

5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

**Tabel 2.176 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
kab. Luwu timur tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		96,79	98,40	97,62	38,18	38,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara di 4 (empat) titik pengamatan yang mewakili wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Terdapat peningkatan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai IKU pada tahun 2023 adalah 38,87 yang mengindikasikan kenaikan nilai indeks sekitar 0,69 dari tahun 2022 yang berkisar 38,18. Nilai tersebut juga melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yakni sekitar 29,60

Indeks Kualitas Udara (IKU)				
Sangat baik	X	>	90	
Baik	70	< X ≤	90	
Cukup	50	≤ X ≤	70	
Kurang	30	≤ X <	50	
Sangat Kurang	X	<	30	

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

**Tabel 2.177 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas tutupan lahan		76,48	76,48	76,48	16,52	16,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.

7. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.178 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha Kab. Luwu timur tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang terbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Usaha/ Kegiatan	26	26	26	26	22
2	Total Penanggung jawab usaha dan kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha/ Kegiatan	50	50	50	50	55
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha	%	52	52	52	52	40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan peraturan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat.

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.179Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terlaksananya Pemberian penghargaan lingkungan Hidup	Ada/Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur mendapatkan 3 (tiga) Penghargaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Penghargaan Adipura
2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam), dimana terdapat 8 desa di Kab. Luwu Timur yang mendapatkan penghargaan Proklam diantaranya:
 1. Desa Manurung kategori Utama
 2. Desa Sumber Makmur kategori Madya
 3. Desa Bangun Jaya kategori Madya
 4. Desa Nuha kategori Pratama
 5. Desa Bone Pute kategori Pratama
 6. Desa Asuli kategori Pratama
 7. Desa Manunggal kategori Pratama
 8. Desa Puncak Indah kategori Pratama
3. Penghargaan Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS). Adapun sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata diantaranya:
 2. Penghargaan Adiwiyata Mandiri UPT SP SMPN 1 Tomoni
 3. Penghargaan Adiwiyata Mandiri UPT SP SDN 221 Malili
 4. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 22 Patande
 5. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 228 Lagaroang
 6. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 229 Waru
 7. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 104 Jalajja
 8. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 108 Bone Pute
 9. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 109 Majalejje
 10. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 175 Kawarasan
 11. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 185 Harapan Makmur
 12. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 232 Wulasi

13. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 237 Atue
14. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 220 Cerekang
15. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 239 Saluminanga
16. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 227 Puncak
17. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 234 Kore-Korea
18. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 236 Laoli
19. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 225 Karebbe
20. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 235 Pongkeru
21. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 253 Amasi
22. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 240 Podomoro
23. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 252 Nikkel
24. Penghargaan Adiwiyata Nasional MIS YPRI Wawondula
25. Penghargaan Adiwiyata Nasional SD YPS Lawewu
26. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SP SDN 224 Lampia
27. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 1 Mangkutana
28. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 3 Malili
29. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 3 Angkona
30. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 1 Malili
31. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 4 Malili
32. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMP YPS Singkole
33. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 1 Nuha
34. Penghargaan Adiwiyata Nasional UPT SMPN 1 Kalaena

9. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Tabel 2.180 Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Volume Timbulan Sampah yang ditangani	M3	30,657.69	27,034.99	27,343.70	31,380,23	31,473,69
2	Total Timbulan Sampah	Ton	42,898	43,752	44.520	43,874,61	44,606,07
3	Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton	30,657.69	27,034.99	27,343.70	31,380,23	31,473,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Timbulan sampah Kabupaten Luwu Timur sebesar 122,2 ton per hari pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebesar 305.521 (Luwu Timur dalam Angka Tahun 2023). Setara dengan 44,6 ribu ton per tahun, dengan koefisien 0,4 kilogram per orang per hari.

Jumlah timbulan sampah yang ditangani meningkat setiap tahunnya dikarenakan semakin besar jumlah populasi di Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan estimasi pertambahan jumlah penduduk sekitar 2% per tahun. Untuk peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2022 ke 2023 yaitu 1,67%. Penambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan jumlah timbulan sampah. Dimana peningkatan jumlah sampah dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 731,46 ton.

Jumlah timbulan sampah yang ditangani selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 sebesar 31,352 ton, tahun 2022 sebesar 31.380,23 ton dan tahun 2023 sebesar 31.473,69 ton. Hal ini dikarenakan peningkatan pengelolaan baik dari sisi penanganan ataupun pengurangan sampah yang meningkat setiap tahunnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan lainnya.

10. Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

**Tabel 2.181 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sampah yang berkurang melalui 3R Adalah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak di angkut ke TPA	Ton	4.742,69	2.579,99	5.926,37	5,640,72	5,690,38

	atau dibuang dilingkungan.						
2	Persentase Jumlah Sampah Yang dikurangi Melalui 3R	%	11,06	5,09	13,5	12,85	12,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Beberapa aktifitas yang berjalan di Kabupaten Luwu Timur mencakup bank sampah, daur ulang, pengomposan dan pengelolaan maggot BSF.

Bank sampah dilaksanakan secara terkoordinir dengan hirarki Bank Sampah Induk pada tingkat kabupaten, bank sampah cabang di tingkat kecamatan dan bank sampah unit di tingkat desa/instansi. Hingga tahun 2023 telah tercatat 4500 nasabah yang menabung di bank sampah.

Untuk pengelolaan sampah organik dilakukan dengan metode pengomposan dan pemanfaatan maggot BSF. Pengomposan dilakukan di area perkantoran, pemukiman, sekolah-sekolah, dunia usaha, KSM dan TPA Ussu. Sedangkan pemanfaatan maggot BSF saat ini masih berjalan pada Segregasi PT. Vale Indonesia, Tbk.

Persentase pengurangan berkisar 15,62% (2022) mengalami sedikit penurunan menjadi hanya berkisar 15,47% (2023). Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan aktivitas bank sampah karena adanya penurunan harga sampah, persaingan harga dengan pengepul dan tidak adanya sarana pengangkutan bank sampah.

11. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.182 Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Area Pelayanan pengelolaan sampah	Km2/Ha	2.127,78	2.127,78	2.127,78	2.127,78	2.127,78
2	Luas Area Kab/Kota	Km2/Ha	6.944,88	6.944,88	6.944,88	6.944,88	6.944,88
3	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Luas wilayah penanganan 3 tahun terakhir dari tahun 2021 – 2023 tidak mengalami pertambahan karena armada pengangkutan sampah juga tidak mengalami penambahan. Pada awalnya penanganan baru mencakup wilayah perkotaan Malili, Tomoni, Wasuponda, Wawondula dan Sorowako. Pada tahun 2018 penanganan bertambah dengan adanya pengadaan truk pengangkut sampah melalui Dana Alokasi Khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 8 unit sehingga wilayah penanganan bertambah di wilayah Kecamatan Burau, Wotu, Mangkutana, Kalaena serta penambahan unit truk di wilayah Kecamatan Nuha, Malili, Wasuponda dan Towuti. Tahun ini ada pengadaan dari Dinas PU-PR sebanyak 1 unit armroll tetapi digunakan untuk wilayah Malili untuk menggantikan armroll yang sudah tidak dapat beroperasi

12. Persentase Jumlah Sampah Yang Ditangani

Tabel 2.183 persentase Jumlah Sampah yang Ditangani di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah sampah yang ditangani	Ton/tahun	34.910,27	28.287,45	24.455	31,380,23	31,473,69
2	Total Timbunan sampah per tahun	Ton	43.632	43.734	43.854,6	43,874,61	44,606,07
3	Persentase Sampah Yang Ditangani	%	80,01	64,68	71,46	71,52	70,56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Persentase pengelolaan sampah diperoleh dari kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Berdasarkan tabel di atas, persentase pengelolaan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah oleh instansi terkait.

13. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Kota

TPA Ussu di Kecamatan Malili telah dikelola dengan prinsip control landfill dan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dengan nilai 72,35 pada periode penilaian Adipura terakhir (2021-2022). Penilaian Tahun 2023 sampai saat ini belum dilakukan oleh KLHK, tetapi telah dijadwalkan pada Februari 2024.

Tabel. 2.184 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai TPA (Program Adipura)	Nilai	-	-	-	73,25	-

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP persatuan penduduk

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk merupakan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Capaian rasio kepemilikan KTP- el dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel di atas di ketahui penduduk di tahun 2023 yang terdaftar sebagai Wajib KTP sebanyak 221,011 jiwa dan memiliki KTP-el sebanyak 217,049 jiwa. Dari jumlah tersebut rasio kepemilikan KTP –el di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,98 .

Tabel 2.184 Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber KTP	Jiwa	195.707	202.728	204.311	209,663	217.049
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah	Jiwa	202.055	203.326	206.647	215,778	221.011
3	Rasio Penduduk Ber-KTP Persatuan Penduduk	%	0,97	0,99	0,99	0,97	0,98

-Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024 Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

2. Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi berakte kelahiran dibanding dengan jumlah bayi. Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Akta kelahiran juga merupakan bukti legal dan pengakuan negara terkait hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Akte kelahiran sangat penting peranannya untuk memperoleh akses pelayanan publik lainnya seperti pendidikan dan paspor.

Untuk tahun 2023, Rasio bayi yang berakte kelahiran sebesar 0.99, yang artinya dari 3.694 jiwa jumlah kelahiran terlapor yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 3.962 jiwa.

Tabel 2.185 Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jiwa	3.772	4.066	3.968	3.962	3.658
2	Jumlah bayi	Jiwa	4.035	4.256	4.091	3.962	3.694
3	Rasio Bayi Yang Memiliki Akte Kelahiran	%	0,93	0,96	0,97	1	0,99

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024
Data Kependudukan Semester II Tahun 2023*

3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang memiliki akte perkawinan terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang sudah menikah.

Jumlah pasangan Nikah berakte nikah pada semester II tahun 2023 sebesar 42,023 dan jumlah keseluruhan pasangan nikah pada semester II tahun 2023 sebesar 75,238 dengan capaian atau rasio pasangan berakte Nikah untuk semester II tahun 2023 mencapai 0,56.

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kepada penduduk non muslim, sedangkan yang muslim menggunakan buku nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti legal perkawinannya. Dari data diatas rasio pasangan berakte nikah setiap tahun mengalami peningkatan, disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat melaporkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.186 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	23.674	29.402	31.694	67.541	42.023
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	71.056	71.847	72.502	136.987	75.238
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	0,33	0,41	0,44	0,49	0,56

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024
Data Kependudukan Semester II Tahun 2023*

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Diawali proses penginputan hasil pemutakhiran data kependudukan melalui aplikasi SIAK yang dilakukan pada tahun 2009 sehingga terbentuk database kependudukan. Sehingga sejak saat itu Database kependudukan skala kabupaten juga sudah tersedia.

Pengelolaan Database kependudukan ini meliputi perekaman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, verifikasi dan validasi data, pengiriman data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta penyajian dan pendistribusian data berskala kabupaten.

5. Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

Sejak Tahun 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menerbitkan NIK sebagai dasar untuk melakukan perekaman data untuk kepemilikan KTP-el dalam rangka mendukung program nasional Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional berbasis database SIAK.

6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Terlihat pada tabel diatas Capaian Cakupan kepemilikan KTP- el dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel di atas diketahui penduduk di tahun 2023 yang terdaftar sebagai Wajib KTP sebanyak 221.011 jiwa dan memiliki KTP-el sebanyak 217.049 jiwa. Dari jumlah tersebut cakupan kepemilikan KTP -el di Kabupaten Luwu Timur sebesar 98,21 % .

Melalui strategi layanan jemput bola ke sekolah (SLTA/Sederajat) untuk perekaman KTP el pemula merupakan salah satu faktor pendukung dalam peningkatan capaian penerbitan KTP el di tahun 2023.

Tabel 2.187 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jiwa	193.773	202.728	204.311	209.663	217.049
2	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	200.780	203.326	206.947	215.778	221.011
3	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96,51	99,71	98,73	97,17	98,21

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2024
Data Kependudukan Semester II Tahun 2023*

7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran merupakan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibanding Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan, selanjutnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.188 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	3.772	4.066	3.968	3.962	3.694
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	4.035	4.256	4.091	3.962	3.658
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	93,48	95,54	96,99	100	99,03

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2023
Data Kependudukan Semester II Tahun 2023*

Terlihat pada tabel di atas untuk tahun 2023 terjadi penurunan cakupan akta kelahiran , di mana Jumlah bayi yang terdaftar dan teregistrasi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Salah satu kendala yang di hadapi adanya beberapa Puskesmas yang tidak melaporkan secara rutin peristiwa kelahiran dengan alasan penduduk yang melahirkan belum menyiapkan nama bayinya, dimana nama bayi adalah persyaratan utama untuk mendapatkan pelayanan penerbitan akta kelahiran. Tahun 2023 , Cakupan Penerbitan Akta kelahiran sebesar 99,03% .

Program inovasi Balada Capil (Bayi Lahir dapat Akta Kelahiran ,KIA dan KK dari Dukcapil) yang bekeja sama dengan Puskesmas se kabupaten Luwu Timur,RS.Inco Sorowako dan Bidan Praktek Mandiri. Dimana Program ini bertujuan memberi kemudahan masyarakat untuk pengurusan Dokumen kependudukan khususnya Akta kelahiran ,Kartu Identitas Anak (KIA) dan perubahan Kartu Keluarga bagi anak **usia 0-60 hari**. Melalui Program Inovasi ini di harapkan dapat meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran khususnya bagi anak usia 0-60 hari.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik

Tabel 2.189 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang baik	Unit	124	124	124	124	125
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	Unit	124	124	124	124	125
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2023 telah bertambah 1 (satu) desa dari 124 menjadi 125 desa yaitu Desa Arolipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.

2. Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas Prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM di Kabupaten Luwu Timur seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.190 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	127	127	127	127	127
2	Jumlah LPM	Klp	127	127	127	127	127
3	Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

LPM sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dengan sistem partisipasi dalam pembangunan mempunyai peran membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan aset desa/kelurahan.

Selain menyelenggarakan swadaya gotong royong serta melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, LPM juga memiliki fungsi yaitu :

1. Penunjang dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pembangunan dalam masyarakat
3. Menggali dan mendayagunakan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
4. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat NKRI

Kegiatan LPM ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

3. Pengembangan kemitraan
4. Pembangunan masyarakat
5. Pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

3. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui Desa/Kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten.

Ruang lingkup pembinaan TP-PKK Kabupaten Luwu Timur baik di Desa/Kelurahan ataupun kecamatan adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat.

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, seperti salah satu kelompok binaan PKK adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok (UP2K) yaitu kelompok usaha yang dibentuk bagi keluarga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 365 kelompok, dan tahun 2023 meningkat menjadi 367 kelompok. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.191 Rata- Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok Binaan PKK	KLp	365	365	365	365	367
2	Jumlah PKK	KLp	127	127	127	127	128
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		2,87	2,87	2,87	2,87	2,87

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

4. Persentasi PKK Aktif

Di semua tingkat pemerintahan telah dibentuk Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yaitu TP-PKK Kabupaten Luwu Timur, 11 TP-PKK Kecamatan, 124 TP-PKK Desa dan 3 TP-PKK Kelurahan. Presentase PKK yang aktif di Kabupaten Luwu Timur sejumlah 100%, baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

Presentasi PKK Aktif di Kabupaten Luwu Timur cukup baik karena adanya dukungan peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa dalam melakukan fungsinya dan pelaksanaan agenda kerja. Persentasi PKK Aktif di Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.192 Persentase PKK Aktif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKK Aktif	Klp	139	139	139	139	140
2	Jumlah PKK	Klp	139	139	139	139	140
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk (LPP/Growth Rate of Population) adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Manfaat Laju pertumbuhan penduduk untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu, $LPP > 0$ berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, $LPP = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya, $LPP < 0$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, migrasi. Kelahiran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain menikah di usia muda dan tidak melaksanakan program keluarga berencana yang menyebabkan meningkatnya angka kelahiran. Adapun kesertaan KB pada pasangan usia subur menjadi penghambat jumlah kelahiran.

Kematian juga dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang menyebabkan angka kematian antara lain, tidak menjaga kesehatan, kurang sarana kesehatan di wilayah tersebut seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotik, kemiskinan yang berlebihan yang menyebabkan kurangnya asupan gizi, wilayah berperangan, bencana alam, pola makan tidak teratur dan wabah penyakit. Adapun faktor yang menghambat kematian antara lain menjaga kesehatan, pola makan yang teratus, makan yang bergizi, sedikitnya angka kemiskinan, sarana kesehatan yang lengkap.

Migrasi penduduk yang datang bisa saja orang yang dari luar wilayah datang ke wilayah kita yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, hal ini bias menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Sebaliknya penduduk yang pergi ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap, belajar, atau bekerja, dalam jumlah yang banyak, seperti menjadi TKI, bisa menyebabkan menurunnya jumlah penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kab. Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.193 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,99	1,99	2,27	1,16	

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data tabel diatas merupakan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020 dan masih dijadikan dasar realisasi tahun 2021 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tanggal 20 Januari 2021 belum tersedia. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Luwu Timur

dari tahun ke tahun mengalami perubahan, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu Kelahiran, Kematian dan Migrasi.

2. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap perempuan, dan merupakan ukuran untuk seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, serta tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi, karena orangtua menginginkan kualitas yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga jika pendidikan dan kesehatan seseorang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap penurunan fertilitas, terlebih jika didukung dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran demi kualitas generasi. Total fertility rate (TFR) di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.194 Total Fertility Rate (TFR) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertility Rate (TFR) Total Angka Kelahiran	%	2,21	2,21	2,79	2,79	2,31

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data tabel diatas merupakan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020 dan masih dijadikan dasar realisasi tahun 2021 data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tanggal 20 Januari 2021 belum tersedia. Total Fertility Rate ini di pengaruhi oleh faktor yaitu kelahiran. Kedepan ini merupakan tantangan bagi OPD KB dalam menurunkan angka ini, dimana TFR ini merupakan indikator sasaran utama yang merupakan indikator kunci dalam mengukur keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA).

3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.195 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	OPD	9	9	16	16	16
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	28	28	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	32,14	32,14	57	57	57

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

**Tabel 2.196 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	OPD	9	9	0	0	28
2	Jumlah semua perangkat daerah	OPD	28	28	28	28	28
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	32,14	32,14	0	0	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

5. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk

**Tabel 2.197 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas Dan Kualitas Penduduk
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1	1	1	1	0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

6. Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Tabel 2.198 Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Sektor Yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter Dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

7. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

Tabel 2.199 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	1	1	1	2	6

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

8. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.200 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anak	Jiwa	134.468	154.638	120.774	120.774	124.295
2	Jumlah keluarga	KK	70.058	75.510	71.044	71.044	71.924
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	2	1,7	1,77	1,72

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

9. Rasio Akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kab Luwu Timur, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.201 Rasio Akseptor KB Tahun 2019-2023 Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Akseptor KB	Pasangan	33.227	32.381	31.634	31.634	34.622
2	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	44.971	44.679	45.225	45.225	48.500
3	Rasio Akseptor KB	%	73.89	72.47	69,95	69,94	71,38

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk perempuan kawin atau perempuan yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 di Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.202 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 –49 Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	33.227	32.381	31.634	31.354	34.508
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	44.971	44.679	45.225	47.240	48.496
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	%	73,89	72,47	69,95	66,37	71,15

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun

**Tabel 2.203 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 Tahun	Jiwa	1343	-	539	480	480
2	Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	44.971	-	44.529	48.496	48,496
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2.98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)	1,21	0,98	0,98

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

12. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) adalah semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, atau tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya.

**Tabel 2.204 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	6.377	6.976	7.564	9.665	5.517
Jumlah pasangan usia subur	Jiwa	44.971	44.679	45.225	45.225	48.476
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,18	15,61	16,73	20,45	11,37

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

13. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan jenis kontrasepsi yang efektif dari segi biaya dan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. MKJP Kabupaten Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.205 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	10.752	11.150	11.160	11.728	10.738
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	32.224	33.227	32.381	31.634	31.354
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	33,36	33,55	34,46	37,07	34,24

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

14. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Capaian kinerja, selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.206 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jiwa	11.734	12.300	13.591	15.886	13.988
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	33.237	32.381	31.634	31.354	34.508
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	26,66	37,98	42,96	50,66	40,53

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

15. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Capain kinerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.207 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	Jiwa	3.449	3.160	3.874	3.980	7.787
2	Jumlah Anggota kelompok BKB	Jiwa	4.104	3.955	4.707	4.786	11.666
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	84,04	79,90	82,30	83,15	66,87

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

16. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian berKB bagi anggota kelompok.

**Tabel 2.208 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jiwa	2.611	2.577	2.614	2.995	6.869
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Jiwa	3.180	3.020	3.048	3.467	14.507
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	82,11	85,33	85,76	86,38	47,34

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

17. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB.

**Tabel 2.209 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jiwa	1.427	1.420	1.394	1.386	493
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Jiwa	1.759	1.749	1.710	1.687	7.793

3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,13	81,19	81,52	82,15	6,32

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

18. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan diKab. Luwu Timur. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel 2.210 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS	Klp	1	1	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	Kec	11	11	11	11	11
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah PPKS tetap dari tahun ke tahun tetap berjumlah 1 PPKS, tetapnya jumlah PPKS dikarenakan adanya kendala sehingga sulit untuk membentuk PPKS di setiap kecamatan. Syarat utama pembentukan PPKS adalah memiliki sarana prasarana untuk menunjang program. Selama beberapa tahun ini hanya satu PPKS yang memiliki sarana prasarana yang dianggap memadai yaitu di PPKS Batara Guru di Kecamatan Malili.

19. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.211 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PIK R/M	49	48	49	49	49
2	Jumlah kecamatan	11	11	11	11	11
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	445,55	436,36	445,45	445,45	445,45

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

20. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Tabel 2.212 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Jiwa	114	112	107	100	96
2	Jumlah PKB/PLKB	Jiwa	114	112	107	100	96
3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

21. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya *reward* pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi : pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelompok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami

yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.213 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jiwa	385	385	385	373	350
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Jiwa	44.971	44.679	45.075	42.541	35.108
3	Cakupan PUS peserta KB dan (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0,86	0,86	0,85	0,88	0,99

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

22.Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Beberapa faktor pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam

berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.214 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	Jiwa	127	127	127	127	128
2	Jumlah desa/kelurahan	Jiwa	127	127	127	127	128
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

23.Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Tabel 2.215 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	Jiwa	33.227	32.381	31.634	41.478	81.981
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	Jiwa	24.036	28.464	28.792	31.354	35.948
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	%	138,24	113,76	109,87	132,28	228,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

24.Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang

Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan, akan berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Untuk kedepannya diharapkan seluruh faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.216 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	21	22	22	22
2	Jumlah Faskes dan jejaring	21	21	22	22	22
3	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

25. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2.217 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Data	18	-	18	18	18
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Data	18	-	18	18	18

3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	Tidak Melaksanakan Pendaftaran (COVID 19)	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

26. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.218 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	KLP	218	239	291	299	315
2	Jumlah kelompok kegiatan	KLP	347	336	378	382	385
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62,82	71,13	76,98	78,27	81,81

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

27. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.219 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan	Jiwa	2.730	2.368	2.594	4.310	4.605

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak						
2	Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Jiwa	10.791	10.874	11.575	11.599	18.905
3	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	25,29	21,77	22,41	37,15	24,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

28. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel 2.220 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	19	19	20	20,8	22,5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

29. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.221 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0061	0,0058	0,043	0,041	0,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2023

30. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Dalam hal mencapai kelangsungan pemakaian kontrasepsi ini dibutuhkan pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas. Melalui konseling kontrasepsi, peserta KB dapat mengetahui secara jelas dan benar tentang maksud dan tujuan pemakaian alat kontrasepsi, cara-cara KB yang tersedia, kemungkinan efek samping dan dapat mencegah timbulnya kecemasan dan ketakutan terhadap pemakaian. Konseling kontrasepsi yang baik akan membantu klien dalam menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan KB. Capaian kinerja, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.222 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jiwa	11.734	12.300	13.591	15.886	13.988
2	Jumlah akseptor KB	Jiwa	33.237	32.381	31.634	31.354	34.508
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	26.66	37.98	42,96	50,66	40.53

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

31. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang secara menyeluruh dan terpadu guna mencapai tumbuh kembang yang optimal. Sasaran BKB secara langsung adalah orangtua yang memiliki balita dan secara tidak langsung juga anggota keluarga yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, dll (organisasi profesi, LSM). Dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, diharapkan orang tua yang mempunyai balita merencanakan kelahiran anak berikutnya sehingga orang tua dapat fokus pada pengasuhan balitanya. Capaian kinerjanya, selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.223 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	Jiwa	3.449	3.160	3.874	3.980	7.787
2	Jumlah Anggota kelompok BKB	Jiwa	4.104	3.955	4.707	4.786	11.666
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	84,04	79,90	82,30	83,15	66,87

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

32.Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Bina keluarga remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program bina keluarga remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif. Dalam wadah BKR ini diharapkan dapat meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian berKB bagi anggota kelompok.

**Tabel 2.224 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jiwa	2.611	2.577	2.614	2.995	6.869
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Jiwa	3.180	3.020	3.048	3.467	14.507
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	82,11	85,33	85,76	86,38	47,34

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

33.Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memiliki lanjut usia, diharapkan PUS dalam keluarga menjadi akseptor KB.

**Tabel 2.225 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Jiwa	1.427	1.420	1.394	1.386	493
2	Jumlah anggota kelompok BKL	Jiwa	1.759	1.749	1.710	1.687	7.793
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,13	81,19	81,52	82,15	6,32

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

34. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Salah satu faktor penghambat pembentukan PPKS ini adalah Kader atau petugas PPKS yang masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Olehnya itu, masih diperluakan komitmen dan upaya yang lebih serius untuk membentuk dan mengembangkan PPKS di seluruh kecamatan di Kab. Luwu Timur. Selengkapnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.226 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PPKS	Klp	1	1	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	Kec	11	11	11	11	11
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	%	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

(PPKS) di setiap Kecamatan							

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah PPKS tetap dari tahun ke tahun tetap berjumlah 1 PPKS, tetapnya jumlah PPKS dikarenakan adanya kendala sehingga sulit untuk membentuk PPKS di setiap kecamatan. Syarat utama pembentukan PPKS adalah memiliki sarana prasarana untuk menunjang program. Selama beberapa tahun ini hanya satu PPKS yang memiliki sarana prasarana yang dianggap memadai yaitu di PPKS Batara Guru di Kecamatan Malili.

35.Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.227 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PIK R/M	49	48	49	49	49
2	Jumlah kecamatan	11	11	11	11	11
3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	445,55	436,36	445,45	445,45	445,45

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

36.Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Tabel 2.228 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	Jiwa	114	112	107	100	96
2	Jumlah PKB/PLKB	Jiwa	114	112	107	100	96

3	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

37. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendiring, diantaranya adanya *reward* pemerintah bagi penyuluh dan peserta KB mandiri dari UPPKS, dan pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan melakukan pembinaan keterampilan kelompok UPPKS bagi PUS yang ber-KB mandiri. Di sisi lain terdapat pula faktor penghambat, meliputi : pengetahuan dan sikap masyarakat yang tidak merespon dengan baik untuk ber-KB utamanya pada pasangan usia subur (PUS) sehingga untuk kelompok UPPKS tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya stigma di masyarakat untuk menolak ber-KB mandiri pada PUS karena memerlukan waktu dan biaya, dan dukungan dari suami yang kurang serta efek samping dari ber-KB masih tinggi karena kurangnya sosialisasi. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.229 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Jiwa	385	385	385	373	350
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Jiwa	44.971	44.679	45.075	42.541	35.108
3	Cakupan PUS peserta KB dan (UPPKS) yang	%	0,86	0,86	0,85	0,88	0,99

	ber-KB mandiri						

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

38.Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Beberapa faktor pendorong keberhasilan PPKBD dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesertaan ber KB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PPKBD diantaranya adalah 1) Meningkatkan motivasi kerja PPKBD perlu ditumbuhkan melalui pemenuhan kebutuhan dalam diri PPKBD mulai dari yang paling dasar sampai pada tingkatan tertinggi yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan memperoleh harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri, 2) Peningkatan kualitas PPKBD melalui pelatihan untuk mendukung kemampuan kerja sekaligus menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan utamanya dalam berkomunikasi, mengolah data dan berkoordinasi, 3) Pemberian insentif bagi kader PPKBD, mengingat tidak adanya gaji tetap dan penghasilan yang memadai. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.230 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	Jiwa	127	127	127	127	128
2	Jumlah desa/kelurahan	Jiwa	127	127	127	127	128
3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

39.Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk

memenuhi permintaan masyarakat.

Tabel 2.231 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	Jiwa	33.227	32.381	31.634	41.478	81.981
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	Jiwa	24.036	28.464	28.792	31.354	35.948
3	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	%	138,24	113,76	109,87	132,28	228,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

40.Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Ketersediaan layanan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan, akan berdampak pada peningkatan kesertaan KB aktif, karena masyarakat akan lebih mudah memperoleh layanan berkualitas. Untuk kedepannya diharapkan seluruh faskes dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga meningkatkan minat PUS untuk ber KB. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.232 Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	21	22	22	22
2	Jumlah Faskes dan jejaring	21	21	22	22	22

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Faskes Dan Jejaringnya Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

41. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2.233 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	Data	18	-	18	18	18
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	Data	18	-	18	18	18
3	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19)	100	100	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

42. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel 2.234 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	KLP	218	239	291	299	315

2	Jumlah kelompok kegiatan	KLP	347	336	378	382	385
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62,82	71,13	76,98	78,27	81,81

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

43. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pembinaan keluarga dalam melaksanakan fungsi pengasuhan dan tumbuh kembang anak dilakukan melalui aktifitas kelompok Bina Keluarga Balita. Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.235 Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kab. Luwu Timu, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jiwa	2.730	2.368	2.594	4.310	4.605
2	Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Jiwa	10.791	10.874	11.575	11.599	18.905
3	Cakupan Keluarga Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	%	25,29	21,77	22,41	37,15	24,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

44. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tabel 2.236 Rata-rata usia kawin pertama wanita Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	19	19	20	20,8	22,5

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

45. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.237 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Kab. Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0061	0,0058	0,043	0,041	0,05

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2.1.3.2.9 Perhubungan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.238 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kab. Luwu Timur tahun 2019-2023

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	277.291	209.996	217.879	228.364	230.576
2	Jumlah penumpang Kereta Api	Orang	0	0	0	0	0
3	Jumlah penumpang Kapal Laut	Orang	0	0	0	0	0
4	Jumlah penumpang Pesawat udara	Orang	22.934	6.018	3.581	8.710	0

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah Penumpang Kapal di Danau	Orang	76.733	37.782	38.531	153.444	115.566
6	Total jumlah penumpang	Orang	376.958	253.796	259.991	390.518	346.142

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Jumlah penumpang angkutan umum di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena data penumpang pesawat yang sudah tidak masuk ke Dinas Perhubungan dan penumpang kapal di danau yang mengalami penurunan.

Untuk penumpang Kapal di Danau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini karena adanya beberapa kapal yang dalam tahap perbaikan sehingga tidak beroperasi, dan juga ketika terjadi musim kemarau beberapa kapal tidak dapat sandar di pelabuhan karena air danau yang surut.

Untuk penumpang Pesawat udara datanya sudah tidak masuk ke Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur karena telah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.239 Rasio Ijin Trayek Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

NO.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Izin trayek perkotaan	Ijin	0	0	0	0	0
2	Izin trayek pedesaan	Ijin	43	33	13	26	33
3	Jumlah izin trayek	Ijin	43	33	13	26	33
4	Jumlah penduduk	Orang	300.374	302.039	304.727	306.082	311.062
5	Rasio Izin Trayek	%	0,00014	0,00011	0,000043	0,000085	0,000106

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahun 2023 rasio ijin trayek tidak tercapai karena hanya ada 33 unit kendaraan yang mengurus izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.240 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

NO	Uraian	Tahun														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%	Jml	Jml KIR	%
1	Mobil penum pang umum	198	64	32,32	198	70	35,35	54	12	22,222	48	10	20,833	44	13	29,545
2	Mobil Bus	145	145	100	186	183	98,39	200	183	91,500	215	194	90,233	227	230	101,322
3	Mobil Barang	1545	1480	95,79	1623	1612	99,32	1722	1514	87,921	1.769	1.671	94,460	1.837	1.831	99,673
4	Truck Sumbu II	563	526	93,43	587	556	94,72	625	624	99,840	652	642	98,466	663	840	126,697
5	Truk Sumbu III	199	190	95,48	213	219	102,82	214	214	100,000	216	216	100	216	216	100,00
6	Jumlah	2650	2405	90,75	2807	2640	94,05	2815	2547	90,480	2.900	2.733	94,241	2987	3130	104,787

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2023 sebanyak 3.130 unit angkutan penumpang umum dan angkutan barang dianggap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor terutama pengujian kendaraan yang dilakukan secara aktif, yakni tenaga penguji yang meskipun masih kekurangan personil tetapi dapat bekerja handal dan profesional. Fasilitas dan perlengkapan pengujian yang cukup lengkap melalui pengadaan alat uji sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemeliharaan secara rutin serta Kalibrasi terhadap alat pengujian. Perbaikan prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan juga mendukung dalam pencapaian target.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

**Tabel 2.241 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
2	Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Terminal Bis	3	3	3	4	4
4	Jumlah Dermaga	8	8	8	8	8
4	Jumlah	15	15	15	16	16

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pelabuhan Laut yang ada di Kabupaten Luwu Timur ada 3 Yaitu Pelabuhan laut Lampia dibawah Kewenangan Kementerian, Pelabuhan PT. Vale dibawah kewenangan PT. Vale dan Pelabuhan Laut CLM dibawah kewenangan PT.CLM

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

**Tabel 2.242 Persentase Layanan Angkutan Darat
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan darat	Bis	343	384	254	263	271
2	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	277.291	209.996	217.879	228.364	230.576
3	Persentase layanan angkutan darat	%	0,124	0,183	0,117	0,115	0,118

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Persentase layanan angkutan darat tahun 2023 meningkat dari tahun 2023 hal ini karena jumlah penumpang angkutan yang menurun dan jumlah angkutan darat meningkat.

Semakin tinggi persentase layanan angkutan darat, semakin tinggi kemampuan/ kinerja angkutan darat dalam melayani mengangkut penumpang.

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

**Tabel 2.243 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	unit	245	167	268	143	31
2	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	unit	2.650	2.807	2.815	2,900	2,987
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	9,25	5,95	9,52	4.93	1.04

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Persentase kepemilikan KIR Tahun sebesar 1,04% atau perbandingan antara 31 unit angkutan umum yang tidak memiliki KIR dengan jumlah angkutan umum yang ada yaitu 2.987.

7. Pemasangan Rambu Rambu Jalan

**Tabel 2.244 Presentase Pemasangan Rambu-rambu
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu	unit	46.155	46.121	54.272	54.352	54.378
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	unit	46.155	46.121	54.272	54.352	54.378
3	Pemasangan Rambu rambu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Persentase Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2023 mencapai 100% karena realisasi pengadaan rambu berupa marka jalan sesuai dengan target pada tahun 2023.

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

**Tabel 2.245 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2,229.87
2	Jumlah Kendaraan	Unit	33.192	30.393	32.131	37.444	56,507
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	17.569	16.087	17.007	19.819	25.341

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

untuk tahun 2023 Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan sebesar 25,3441 atau 1 km jalan di Kabupaten Luwu Timur melayani 26 unit kendaraan.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

**Tabel 2.246 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Sepeda Motor	Unit	29.645	26.586	28.246	27.632	54.534
2	Mobil Penumpang Bukan Umum	Unit	371	369	388	6.059	607
3	Minibus Umum	Unit	110	82	86	173	199
4	Bus Umum	Unit	83	73	95	66	100
5	Bus Bukan Umum	Unit	105	136	165	200	209
6	Pick up Umum	Unit	8	7	5	3	7

7	Pick up Bukan Umum	Unit	2.052	2.316	2.316	2.486	2.496
8	Truck Umum	Unit	171	142	126	110	115
9	Truck Bukan Umum	Unit	647	682	704	715	734
JUMLAH		Unit	33.192	30.393	30.393	32.131	56.507

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.247 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah orang	Orang	376.958	253.796	259.991	390.518	346,142
2.	Jumlah Barang	Ton	290.241	139.023	139.967	255.085	130,817

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.248 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga	76.733	26.600	37.782	13.001	38.531	10.072	153.444	55.285	115.566	30.323
2.	Bandara	22.934	28.182	6.018	84.923	3.581	53.539	8.710	100.270	-	-
3.	Terminal	277.291	55.459	209.996	41.099	217.879	76.356	228.364	99.530	230.576	100.494
Jumlah		376.958	110.241	253.796	139.023	259.991	139.967	390.518	255.085	346.142	130.817

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 2.249 Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	213	206	303	238	265
2	Kerugian Materiil	Rupiah	461.950.000	373.950.000	417.450.000	270.900.000	398.900.000
3	Jumlah Korban	Orang	375	352	529	436	501
4	Meninggal	Orang	42	45	38	56	49
5	Luka Berat	Orang	0	1	7	46	24
6	Luka Ringan	Orang	333	306	484	334	428

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2.250 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah pada tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Rambu-rambu lalu lintas	985	985	985	1.065	1.091	buah
2	RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	46	46	46	46	46	buah
3	Cermin tikungan	6	6	6	6	6	buah
4	Marka jalan	150.710	150.710	158.861	158.861	160.558	m ²
5	Traffic light (APILL)	4	4	4	4	4	unit
6	Warning Light	32	32	32	32	32	unit
7	Guard rail (pagar pengaman)	235	235	235	235	235	meter
8	Halte	23	23	24	24	24	unit
9	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	0	0	26	titik

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, 2024

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (handphone/HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon selular modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti Short Messages Services (SMS), Multimedia Messages Service (MMS), e-mail dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi. Saat ini, Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler yaitu Global System for Mobile Telecommunications (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA).

Tabel 2.251 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	83,73	85,14	91,83	89,51	85,16

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada penurunan penggunaan HP/Telepon dalam 2 tahun terakhir, hal ini belum bisa kami simpulkan penyebab penurunan ini karena data ini bersumber dari BPS yang dipublikasi melalui situs resmi BPS Luwu Timur.

2. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2.252 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	43,93	53,44	64,40	65,55	69,15

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Transformasi Digital Nasional merupakan solusi strategis dan langkah besar untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Rencana strategis pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional (ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat), dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik. Intensitas kegiatan masyarakat yang meningkat dalam penggunaan ruang digital tergambar dalam peningkatan persentase rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur yang mengakses internet di tahun 2023 sebesar 69,15 persen dari seluruh rumah tangga di Luwu Timur. akses penggunaan internet ini melalui HP dan Komputer/Laptop/Tablet. dan jika melihat dari tabel diatas ada peningkatan penggunaan internet pada rumah tangga yang ada di kabupaten luwu timur dari tahun ke tahun.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Presentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi secara Nasional dimasa mendatang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi kualitas, tapi masih lemah dari segi kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi yang mandiri.

Pembangunan koperasi adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan tersistem dimana dalam mempraktekannya menggunakan prinsip-prinsip koperasi yaitu garis-garis penuntun yang digunakan oleh anggota koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam prakteknya seperti : keanggotaan sukarela dan terbuka.

Dari data dibawa ini munjukkan tingkat keaktifan koperasi menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun , tapi masih sangat banyak koperasi yang tidak aktif karena pengurus dan anggota sudah tidak ada tetapi tidak bisa dibubarkan karena masih terdaftar dan berbadan hukum.

Tabel 2.253 Persentase Koperasi Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	Unit	121	125	130	133	137

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah seluruh koperasi	Unit	160	165	170	172	173
3	Persentase koperasi aktif	%	75,63	75,75	76,47	77,33	79,19

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari table dibawah ini persentase keaktifan koperasi menurut kecamatan, terdapat kecamatan Wotu terdiri dari 12 koperasi semuanya aktif dengan persentase 100% kemudian kecamatan Burau 83,33% dan kecamatan Angkona 82,35%, sedang kecamatan yang kurang aktif ada dikecamatan Tomoni Timur 50%, Kecamatan Mangkutana 60% dan Kecamatan Nuha 66,67%. Dari data ini kita bias melihat masih perlu adanya pembinaan agar koperasi bias aktif kembali sesuai amat dan dasar hukum koperasi.

Tabel 2.254 Presentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kab Luwu Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Akif
1	Burau	12	10	83,33
2	Wotu	12	12	100
3	Tomoni	16	13	81,25
4	Mangkutana	16	10	62,50
5	Tomoni Timur	6	3	50
6	Kalaena	11	9	81.82
7	Angkona	17	14	82,35
8	Malili	40	34	80
9	Wasuponda	11	9	85
10	Towuti	23	17	73,91
11	Nuha	9	6	66,67
JUMLAH		173	137	79,19

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

UKM atau usaha kecil menengah saat ini memiliki posisi yang sangat penting bukansaja dalam penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat didaerah, dalam banyak hal UKM menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan denganhal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan

iklim kondusif bagi perkembanganUKM serta pelatihan kepada masyarakat untuk dapat menciptakan peluang usaha.

Pemberdayaan UKM merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku UKM untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usahanya agar dapat berdaya saing. Berdasarkan data statistic Nasional bahwa struktur pelaku ekonomi Nasional masih didominasi oleh pelaku UKM yakni sebesar 99,1% dari total keseluruhan pelaku usaha.

Dari data dibawa ini menunjukka peningkatan yang berarti dari tahun ketahun walaupun dari segi pendanaan dari pihak BPR atau LKM tapi masih mampu bangkit dan berperan serta dalam pemberdayaan UKM secara menyeluruh.

2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Jumlah UKM non BPR/LKM tahun 2023 sebanyak 26.101 yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan dan terus mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.255 UKM Non BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	16.959	20.179	25.319	25.725	26.101
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM aktif	Unit	16.959	20.179	25.319	25.725	26.101
3	Persentase UKM non BPR/aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Persentase BPR/LKM aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun Jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel ini :

Tabel 2.256 Persentase BPR/LKM Aktif Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	70	70	70	70	70
2	Jumlah seluruh BPR/LKM aktif	Unit	70	70	70	70	70
3	Persentase BPR LKM aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah badan yang didirikan khusus untuk mendukung pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama pemilik badan usaha kecil atau UMKM yang dikenal sebagai badan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat serta memiliki tujuan membantu perputaran roda ekonomi pelaku UMKM, utamanya melalui model bisnis yang berbeda dari perbankan pada umumnya, LKM dapat memperluas aksesibilitas pembiayaan mikro yang belum tersentuh (unbanked/underserved).

Jika secara bisnis, LKM dibagi menjadi konvensional dan syariah, sedangkan dari bentuk badan hukumnya, jenis Lembaga Keuangan Mikro terbagi menjadi Koperasi dan Perseroan Terbatas. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 70 LKM yang terdiri dari 69 Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang tersebar dalam wilayah Kab. Luwu Timur dan 1 (satu) Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir..

4. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Tabel 2.257 Persentase Usaha Mikro dan Jumlah seluruh UMKM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	16.011	19.227	24.815	25.701	26.007
2	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	16.959	20.179	25.319	25.725	26.101
3	Persentase Usaha Mikro dan Jumlah	%	94,41	95,28	98,01	99,91	99,64

	seluruh UMKM						

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,64%. Pada tahun 2017 jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 7.652 unit dan pada tahun 2021 sebesar 24.815 unit. Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah usaha untuk semua sektor kegiatan ekonomi masih didominasi oleh pelaku usaha skala usaha mikro dan kecil.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN/PMA) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Tabel 2.258 Jumlah Investor PMDN/PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2018	Jumlah Investor	34	5	39
2	2019	Jumlah Investor	32	5	37
3	2020	Jumlah Investor	21	5	26
4	2021	Jumlah Investor	41	5	46
5	2022	Jumlah Investor	30	5	35

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2023

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala

nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.259 Jumlah Investasi PMDN Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41		41	567.486.903.997
2022	50	146.276.480.552	72	1.144.862.849.673

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2023

Tabel 2.260 Jumlah Investasi PMA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2018	34	-	34	Rp. 396.134.523.000
2019	13	-	13	Rp.6.120.947.250.000
2020	8	-	8	Rp.2.185.879.358.954
2021	8	-	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	3.793.644.289.506	10	Rp.2.947.236.398.569

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2023

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.261 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	%	6.694	9.576	7.251	19.123	20.688
2	jumlah seluruh PMA/PMDN	%	33	59	26	42	153

3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	202,8	162,3	278,9	455,30	135,21

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2023

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.262 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rp	516.916.000.000	598.558.569.406	1.636.201.132.539	567.486.903.997.00	1.144.862.849.673
2	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rp	456.500.000.000	470.000.000.000	483.500.000.000	1.511.201.132.539.00	132.514.000.000
3	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	128,51	135,45	328,19	37,55	331,98

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Luwu Timur, Tahun 2023

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

1. Persentase organisasi pemuda yang aktif

Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pembinaan pemuda dilakukan melalui pembinaan organisasi kepemudaan. Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.263 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif		30	30	30	38	38

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
2.	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda		70	74	74	89	89
3.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	42,85	40.54	40.54	42,69	42,7

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.264 Persentase Wirausaha Muda Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Wirausaha Muda	Orang	7	10	13	30	26
2	Jumlah Seluruh Wirausaha	Orang	19	19	19	50	56
3	Persentase Wirausaha Muda	%	36.84	52.63	68.42	60,00	46,43

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan Pembinaan Olahraga merupakan Jumlah Cabang olahraga yang dibina dibandingkan Jumlah Cabang olahraga yang dibina, selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.265 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	Cabor	5	6	0	2	20
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	21	21	21	25	170
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	23,80	28,57	0	8,00	11,76

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Tabel 2.266 Cakupan Pembinaan Olahraga Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	20	40	40	40	20
2	Jumlah Seluruh Pelatih	Orang	113	153	153	153	170
3	Jumlah Persentase organisasi	%	17,68	26,14	26,14	26,14	11,76

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.267 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlet pelajar yang di bina	Atlet	40	40	0	0	40
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	Atlet	40	40	40	40	40
3	Jumlah Persentase organisasi	%	100	100	0	0	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.268 Jumlah Atlet Berprestasi Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	47	64	30	74	21

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.269 Jumlah Prestasi Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Prestasi cabang olahraga yang menangkan dalam satu tahun	Medali	5	6	3	75	197

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2.1.3.2.14 Statistik

pada tahun 2022, kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) menandatangani kontrak kerja sama dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendapatkan layanan BigBox, sebagai penyedia digital platform “Satu Data Indonesia”. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mewujudkan platform satu data Indonesia yang terintegrasi dan lebih update, dimana data data statistik kabupaten Luwu Timur bisa diakses oleh setiap masyarakat sesuai dengan kebutuhan data mereka.

Tabel 2.270 Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Luwu Timur, 2024

Tabel 2.271 Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Luwu Timur, 2024

Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Luwu Timur yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan instansi lain di lingkup Kabupaten Luwu Timur. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa

tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kecamatan untuk melihat keterbandingan antar wilayah.

Tabel 2.272 Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Buku PDRB	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Luwu Timur, 2024

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Luwu Timur. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Luwu Timur secara deskriptif. Dalam buku ini ditampilkan tabel-tabel PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal. Adapun Buku PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 belum diterbitkan oleh BPS sebagai lembaga penyedia data statistik.

2.1.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian.

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab (JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi persandian dalam Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini.

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup kabupaten Luwu Timur. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Luwu Timur melalui tercapainya pengelolaan persandian dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang diamankan

sesuai dengan peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan.

Tabel 2.273 Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kab Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	28	28	28	30	30
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	28	28	29	30	30
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Tabel 2.274 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	0	0	1	4

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Festival budaya tahun 2023 telah di selenggarakan di Makassar dengan mengikuti even yang di selenggarakan pada bulan Oktober 2023 dan bertempat di benteng somba opu. Even ini di adakan untuk mempersatukan kembali budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga, mempererat kembali semua peninggalan adat istiadat salah satu lewat tarian yang menceritakan sejarah dari tarian tersebut. Khususnya untuk Kabupten Luwu Timur kami membawa tarian Pajaga Lili yang berasal dari Suku Luwu.

Selain itu kegiatan adapula kegiatan Gita Bahana Nusantara yang merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan tujuan membentuk tim paduan suara dan orkestra terdiri dari 136 orang vokalis dan 70

orang pemusik terbaik hasil audisi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023 di Makassar. Asapun perwakilan dari Kabupaten Luwu Timur: 1. Meysi Florensia Kareawu (Sopran). 2. Indhi Simon (Bass). 3. Azharyne Evelyn Theora (Alto). 4. Alfirdaus (Tenor).

**Tabel 2.275 Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Di Lestarikan
Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	13	15	18	4	8
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	71	71	71	48	48
3	Persentase Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	%	28	25	28	8,3	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur 2023

Dari hasil sidang TACB ada 8 cagar budaya yang telah di tetapkan oleh TACB tahun 2023. Diantaranya yaitu: 1. Kompleks Makam Temmallipa (Ussu), 2. To'Liang Batu (Mangkutana), 3. Peti Kubur To'Liang Batu (Mangkutana), 4. Sumur Tua Benteng Wotu (Wotu), 5. Benteng Wotu (Wotu), 6. Kompleks Makam Syekh AL-Joefry (Wotu), 7. Makam Temmallipa (Ussu), 8. Makam Syekh AL-Joefry (Wotu). Tangga penetapan cagar budaya oleh TACB yaitu bertempat di malili, tanggal 06 Juni tahun 2023. Adapun tim TACB berjumlah 5 orang yang telah memiliki sertifikat sebagai tim Ahli.

Setelah di temukan 8 jumlah kawasan cagar budaya pada tahun 2023 dari 48 total . Maka, di peroleh persentase Persentase Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Dari hasil pengumpulan data yang di dapatkan dari 8 diduga cagar budaya yang telah di tetapkan.

**Tabel 2.276 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi
Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	13	15	48	48	48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur 2023

Sementara hasil pengumpulan data yang di revitalisasi dan inventarisasi terdapat 48 objek dari beberapa benda, situs dan kawasan cagar budaya, Sementara hasil pengumpulan data terdapat 48 objek yang di kumpulkan dan tim akan melakukan observasi dari beberapa objek yang telah di kumpulkan, Dari data yang berjumlah 48 ini. Ada 8 objek cagar budaya yang telah di SK kan. Karena, 8 objek ini di anggap merupakan warisan peninggalan berupa benda- benda peninggalan para raja dahulu kala. tersebar di beberapa kecamatan. Yang sekiranya akan di observasi untuk persiapan tahun 2024, Sudah ada beberapa lokasi yang akan di data untuk di jadikan objek yang di duga cagar budaya.

**Tabel 2.277 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	3	29	4	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur 2023

Sementara jumlah cagar budaya yang di kelola pada tahun ini. Terdapat 8 objek yang sekiranya di lindungi, diperhatikan dan di jaga secara terpadu oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dari hasil sidang TACB ada 8 cagar budaya yang telah di tetapkan oleh TACB tahun 2023. Diantaranya yaitu: 1. Kompleks Makam Temmallipa (Ussu), 2. To'Liang Batu (Mangkutana), 3. Peti Kubur To'Liang Batu (Mangkutana), 4. Sumur Tua Benteng Wotu (Wotu), 5. Benteng Wotu (Wotu), 6. Kompleks Makam Syekh AL-Joe fry (Wotu), 7. Makam Temmallipa (Ussu), 8. Makam Syekh AL-Joe fry (Wotu). Tangga penetapan cagar budaya oleh TACB yaitu bertempat di malili, tanggal 06 Juni tahun 2023. Adapun tim TACB berjumlah 5 orang yang telah memiliki sertifikat sebagai tim Ahli.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

**Tabel 2.278 Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	216.118	221.736	15.596	8.082	15.451
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	99	99	99	99	99
3	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2.18	2.24	158	82	156,07

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 216.118 pengunjung. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kunjungan ke perpustakaan sebanyak 221.736, tahun 2020 mengalami penurunan pengunjung perpustakaan menjadi 15.596 karena adanya covid-19. dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali dengan target 12.000 terealisasi hanya 8082 pengunjung ke perpustakaan, masa pandemi covid 19 dan pemberlakuan PPKM sehingga tidak mencapai target. Tahun 2022 ada peningkatan pengunjung dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 15.451 dengan target 12.200 pengunjung.

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.279 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	13.363	13.363	13.463	13.931	23.673
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	34.633	34.633	34.733	36.555	50.684
3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	38.58	38.58	38.7	38.11	46,71

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Jumlah Judul buku pada tahun 2018 sebanyak 13.363 judul 34.633 Eksamplar, peningkatan ini terjadi karena adanya sumbangan buku. Pada tahun 2019 jumlah buku tidak mengalami perubahan, masih sebanyak 13.363 judul 34.633 Eksamplar, karena tidak ada pengadaan buku. Pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten melakukan pemeriksaan terkait jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah, dan dihasilnya : 1. jumlah buku dalam keadaan baik 20.483 buah buku, 2. jumlah buku yang rusak 737 examplar. Peminjaman oleh organisasi-organisasi, sekolah dan desa sebanyak 1.777 buah buku, peminjaman perorangan sebanyak 402 buah buku. Pengadaan buku 100 judul dan 463 eksamplar sehingga jumlah koleksi yang ada pada tahun ini sebanyak 23.864 eksamplar dengan 9.946 judul. Pada tahun 2021 penambahan dari pengadaan buku sebanyak 468 judul 1.822 eksamplar, ada peningkatan jumlah koleksi di perpustakaan daerah menjadi 10.411 judul 25.684 eksamplar. Dan pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 13.262 judul dan jumlah buku sebanyak 25.000 eksamplar. sehingga jumlah keseluruhan adalah 23.673 Judul dan 50.684 eksamplar Jumlah koleksi buku.

3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Tabel 2.280 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan	Unit	318	336	336	339	381
2	Jumlah penduduk	Jiwa	299,975	300,374	302,975	304,405	306.082
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	1.06	1.12	1.11	1.10	1,24

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Jumlah perpustakaan pada Tahun 2018 sebanyak 318. Pada tahun 2019-2020 bertambah menjadi 336 atau mengalami penambahan 18 perpustakaan baik dari perpustakaan desa maupun sekolah. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 339 perpustakaan yang terdiri dari 237 perpustakaan Sekolah dan 102 perpustakaan Desa. Dan tahun 2022 jumlah perpustakaan sebanyak 381 dengan rincian, ada penambahan pada perpustakaan sekolah sebanyak 277 dan 104 perpustakaan desa. Dan untuk jumlah penduduk pada tahun 2022 masih menggunakan data penduduk pada semester I yaitu 306.082, sehingga untuk perhitungan Rasio perpustakaan persatuan penduduk mendapatkan hasil 1,24.

4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

**Tabel 2.281 Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rata Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	18.010	13.112	11.962	8.082	15.451

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Pada tahun 2018 realisasi rata-rata pengunjung perpustakaan sebanyak 18.010 pengunjung/tahun. Pada tahun 2019 terealisasi 13.112 orang pada tahun 2020 target meningkat lagi menjadi 11.484 dan realisasi menurun menjadi 11.962 dan tahun 2021 mengalami penurunan 8082 dari target 12000, tidak mencapai target karena adanya PPKM (pandemi covid 19). Dan pada tahun 2022, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mencapai 15451 pengunjung/tahun melebihi target yang ditentukan.

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

**Tabel 2.282 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Luwu Timur 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Judul	13.363	13.363	13.463	13.931	23.673

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Target koleksi judul buku perpustakaan Tahun 2018 realisasi 13.363 judul. Pada tahun 2019 Target 16.000 realisasi tidak ada perubahan, tidak ada penambahan buku karena adanya efesiensi anggaran. Tahun 2020 ada penambahan judul buku sebanyak 100 Judul sehingga koleksi bertambah menjadi 9,946 judul Namun tidak mencapai target dari 18.000 judul. dan pada tahun 2021 menjadi 10,411 atau bertambah 468 Judul. Dan untuk tahun 2022 ada penambahan sebanyak 13.262 judul sehingga jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 23.673 judul.

6. Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis,dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

**Tabel 2.283 Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis,dan Penilai yang Memiliki Sertifikat
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022**

NO	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang bersertifikat	Orang	2	2	3	5	5
2	Jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis,dan penilaian yang memiliki sertifikat	Orang	14	17	16	14	15
3	Jumlah pustakawan tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	%	30	36	35	33	35

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai pada tahun 2018 sebanyak 16

orang, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 19 orang, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 19 orang. Dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ada penambahan pada tenaga teknis sehingga jumlah seluruh pustakawan dan tenaga teknis berjumlah 20 orang.

2.1.3.2.18 Kearsipan

1. persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Capaian pendampingan kepada Unit Kerja dan desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di OPD tidak terlepas dari kesadaran Unit Kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan. Capaian Pengelolaan Kearsipan tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.284 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	19	23	34	5	39
2	Jumlah perangkat daerah	OPD	39	39	39	39	41
3	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	48,72	58,97	87,18	12,82	95,12

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Dalam Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah dokumen kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Massa dan Perorangan.

Terkait dengan fungsi dan kegunaan arsip yang sangat strategis, penting dilakukan pembinaan penataan, pengelolaan arsip dengan baik agar mudah diakses dan di gunakan oleh yang berhak.

Untuk capaian dari tahun 2018 sampai 2022, telah dilakukan penerapan arsip dengan melakukan pembinaan arsip kepada pengelola OPD dan

desa/Kelurahan. Untuk penerapan arsip secara baku. Pada tahun 2018 ,OPD yang sudah menerapkan arsip secara baku, sebanyak 19 OPD(48,72%), tahun 2019sebanyak 23 OPD(58,97%). tahun 2020 sebanyak 34 OPD (87,18 %), tahun 2021 ada 5 OPD (12,82) yang menerapkan arsip baku sesuai target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2022 merupakan jumlah Organisasi perangkat daerah yang sudah mengelola arsip secara baku sesuai ketentuan yang berlaku, dengan capaian 95,12 %.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.285 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Keg	49	45	41	85	40

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Pentingnya arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadikan keberadaan arsip baik dinamis pada pencipta arsip maupun arsip statis pada LKD harus diperhatikan melalui upaya-upaya nyata baik mengacu pada pedoman, standar, system pengelolaan sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya sehingga arsip menjadi Sumber informasi manajemen dan memori kolektif bangsa. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen.

Pada tahun 2018 peningkatan SDM melalui kegiatan Lomba tertib Arsip (OPD dan Desa/Kel) sebanyak 49 pengelola, tahun 2019 dilakukan lomba tertib arsip (OPD dan Desa) sebanyak 45 pengelola, dan pada tahun 2020 lomba arsip terdiri 41 yang terdiri dari pengelola arsip OPD dan Desa. untuk 2021 peningkatan pengelola kearsipan sebanyak 85 pengelola OPD dan Desa. Dan pada tahun 2022 dilakukan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pengelola Arsip OPD desa/kelurahan.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Tabel 2.286 Kunjungan Pariwisata Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata sekabupaten dan kota	Orang	30.391	29.925	8.978	36.990	300.625
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan sekabupaten dan kota	Orang	22.000	24.500	27.500	30.000	32.000
3	Kunjungan wisata	%	138,14	122,14	32,64	123,30	939,45

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.287 Lama Kunjungan Wisata Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Hari	2	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2.1.3.3.2 Pertanian

1. Cakupan bina kelompok petani

Tabel 2.288 Cakupan Bina kelompok Tani Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	klp	353	352	297	336	336
2	jumlah kelompok tani	klp	2.162	2.306	2.589	2.700	2.700
3	Cakupan bina kelompok petani	%	16,33	15,26	11,47	12,44	12,44

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada table diatas dilihat bahwa cakupan bina kelompok tani tahun 2022 itu masih sama dengan tahun 2023, yang mana dalam meningkatkan cakupan kelompok tani itu dibutuhkan pengawasan yang melekat terhadap capaian kinerja penyuluh pada point outcome kinerja penyuluh yang berbasis kelompok.

Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

Tabel 2.289 Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani

No	Kondisi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Tani	2.101	2.162	2.306	2.598	2.700
a	Kelas Pemula	1.496	1.541	1.647	2.009	1.857
b	Kelas Lanjut	562	582	605	538	788
c	Kelas Madya	40	45	49	46	50
d	Kelas Utama	3	4	5	5	5
2. a.	Jumlah Petani/Buruh Tani	51.790	53.294	56.844	60.755	61.471
b	Jumlah Keanggotaan dalam Kelompok Tani	25	25	25	25	23
c	Rasio jumlah kelompok tani dibanding jumlah petani/buruh tani	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Dari tabel dapat diketahui bahwa Peningkatan jumlah kelompok tani di Kab. Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022, menandakan bahwa, kesadaran petani akan pentingnya berkelompok sudah baik dan Penyuluh pertanian telah mengemban tugas memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara befikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. Upaya pengembangan kelompok tani perlu terus digalakkan. Untuk terwujudnya kelompok tani yang dinamis, para petani harus mempunyai disiplin, tanggung jawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usaha taninya. Berkurangnya jumlah anggota dalam Poktan disebabkan oleh, petani penggarap beralih profesi ke tempat lain.

2.1.3.3.3 Peternakan

Tabel 2.290 Data Populasi Ternak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	JenisTernak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I.	Ternak Besar	23.295	21.109	21.371	21.222	18.298
a.	Sapi Potong	22.148	20.464	20.753	20.688	18.002
b.	Kerbau	1.147	645	586	534	296
II.	Ternak Kecil	38.152	37.003	36.931	37.217	13.614
a.	Kambing	14.978	12.554	12.970	13.114	12.339

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
b.	Babi	23.174	24.449	23.961	24.103	1.275
III.	Ternak Unggas	1.338.291	888.679	513.954	525.643	421.270
a.	Ayam Buras	240.465	210.609	244.784	244.920	244.896
b.	Ayam Ras Petelur	130.101	140.385	130.531	127.365	124.098
c.	Ayam Pedaging	933.718	498.535	97.519	106.319	9.881
d.	Itik	15.743	19.166	22.768	23.225	21.542
e.	Itik Manila	18.264	19.984	24.352	23.814	20.853

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Saat ini Populasi ternak Kab. Luwu Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan populasi pada tahun 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa factor umum dan juga faktor khusus. Faktor umum yang mempengaruhi penurunan populasi pada tahun 2023 yaitu faktor pengeluaran ternak dan kematian dan pemotongan sedangkan faktor khusus yaitu kemampuan reproduksi serta adanya penyakit pada ternak

Berdasarkan Data pada Tabel 2.274 keadaan populasi ternak Kab. Luwu Timur, jumlah populasi dibagi atas populasi ternak besar, populasi ternak kecil dan populasi ternak Unggas. Pada populasi ternak besar, menurun 13,77% atau 2.924 ekor dari tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah ini baru mencapai 75,89% dari target populasi ternak besar triwulan IV 2023 yaitu 24.109 ekor. Populasi kerbau mengalami penurunan sebanyak 238 ekor dan sapi 2.686 ekor hal ini dikarenakan masa bunting ternak sapi dan kerbau yang relatif panjang sehingga hanya bisa melahirkan 1 anak dalam 2 tahun disertai dengan lemahnya deteksi birahi ternak dalam melakukan perkawinan sehingga angka kelahiran menurun, dampak penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022 dan penyakit jembrana yang terjadi pada tahun 2023 mengakibatkan produktifitas ternak menurun, karena itulah banyak peternak yang menjual ternaknya pada pedagang keluar wilayah Luwu Timur dan untuk dipotong utamanya ternak sapi betina yang masih produktif yang semakin mengurangi populasi.

Pada populasi ternak kecil, menurun 63,425 atau 23.603 ekor dari tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah ini hanya mencapai 47,83% dari target populasi ternak kecil triwulan IV 2023 yaitu 28.462 ekor. Populasi ternak kambing menurun 775 ekor. Populasi ternak babi paling menurun drastis karena adanya wabah penyakit

demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) yang sangat mematikan sehingga hanya menyisakan populasi 1.275 ekor dari populasi awal 24.769 ekor.

Pada populasi ternak Unggas, menurun 19,86% atau 104.373 ekor dari tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah ini hanya mencapai 44,37% dari target populasi ternak unggas triwulan IV 2023 yaitu 949.529 ekor. Populasi ayam buras hanya menurun 24 ekor. Populasi ayam ras petelur menurun 3.267 ekor. Populasi ayam pedaging menurun 96.438 ekor hal ini karena dinamikanya sangat cepat yakni 60 hari mulai masa awal hingga panen dan sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini peternak ayam pedaging di Kabupaten Luwu Timur telah menurun drastis karena pasarnya tersaingi oleh ayam pedaging yang masuk dari luar Luwu Timur sehingga yang dipelihara oleh peternak local banyak dikirim keluar daerah dan banyak yang tidak melanjutkan usaha peternakannya. Populasi ternak itik menurun 1.683 ekor. Populasi ternak itik menurun 2.961 ekor.

Tabel 2.291 Situasi Umum Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Jumlah Jenis Penyakit dan jumlah kasus penyakit (ekor)											
		2019		2020		2021		2022		2023		Rata - Rata	
		Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)	Jumlah jenis penyakit	Jumlah kasus (ekor)
1	Ayam	2	889	2	809	5	2.352	6	3.409	6	3.444	4	2181
2	Sapi	7	652	7	771	10	994	9	1.112	8	3.1383	8	1333
3	Kerbau	0	0	0	0	1	3	1	2	3	33	1	8
4	Anjing	2	187	2	106	2	137	3	35	2	154	2	124
5	Kambing	5	347	5	713	5	196	4	221	4	499	5	395
6	Babi	4	259	2	216	7	569	4	141	1	41.000	4	8437

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Ternak ayam terdiri atas 3 jenis yaitu ayam kampung, ayam petelur dan ayam pedaging, didapati 6 jenis penyakit sepanjang tahun 2023 yaitu: Flu burung/Avian Influenza (AI), Newcastle Disease, Salmonellosis, Scabies, Helminthiasis (cacingan), dan Snot. Kasus penyakit tertinggi pada tahun 2023 adalah AI sebanyak 2.160 kasus. Ternak sapi sepanjang tahun 2023 ditemukan kasus 8 jenis penyakit yaitu: Bovine Viral Diarrhoea, Jembrana, Surra, Scabies, Helminthiasis, Tympani (Kembung), Diare dan demam 3 hari/Bovine Ephemeral Fever (BEF). Kasus penyakit yang tertinggi adalah scabies sebanyak 828 kasus. Ternak kerbau sepanjang tahun 2023 ditemukan kasus penyakit yang tertinggi adalah Helminthiasis (cacingan) sebanyak 28 kasus.

Pada anjing sepanjang tahun 2023 ada 2 jenis penyakit yaitu Scabies dan Helminthiasis kasus terbanyak pada penyakit scabies. Ternak kambing sepanjang tahun 2023 ditemukan kasus 4 jenis penyakit yaitu: Scabies, Helminthiasis

(cacingan), Tympani (Kembung), dan Diare. Kasus penyakit yang tertinggi adalah scabies sebanyak 195 kasus. Ternak babi sepanjang tahun 2023 telah mewabah penyakit Demam Babi Afrika/African Swine Fever (ASF) mengakibatkan jumlah kasus kematian 40.000 ekor.

Telah terus dilakukan upaya pencegahan penyakit melalui sosialisasi pencegahan penyakit hewan pada masyarakat, disinfeksi pada kandang ternak untuk menghilangkan agen pembawa penyakit serta vaksinasi pada ternak untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Jembrana dan flu burung. Untuk mencegah penyakit zoonosis (menular ke manusia) pada hewan berpotensi menularkan rabies utamanya anjing maka rutin setiap tahun dilakukan vaksinasi rabies.

2.1.3.3.4 Perdagangan

1. Ekspor bersih perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi, distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.

Tabel 2.292 Ekspor bersih perdagangan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$	660.572.391,96	773.511.973,67	919.980.853,88	1.251.398.446	1.313.160.356,70

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.293 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun

			2019	2020	2021	2022	2022
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun-n	pedagang	763	1.190	1.572	2.426	7.360
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha infromal	pedagang	4.230	4.100	4.100	4.100	10.813
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	18.04	29.02	38.34	59,17	68,07

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Secara keseluruhan kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan pemda telah memiliki legalitas usaha. Pada tahun 2023 terdapat 7.360 kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan dari 10.813 kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Luwu Timur khususnya pada sektor perdagangan sehingga capaiannya sebesar 68,07%. Jika dibandingkan pada beberapa tahun sebelumnya terjadi peningkatan setiap tahun.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah. Hampir semua negara memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Pembangunan ekonomi di suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pengembangan industri di Kabupaten Luwu Timur tersebar hampir di seluruh Kecamatan salah satunya Industri Kerajinan dan Furniture lainnya. Arah kebijakan industri yang tertuang dalam dokumen RPIK Kab. Luwu Timur menjadikan industri kerajinan sebagai komoditi unggulan yang perlu dikembangkan dan dibina.

Tahun 2023 sebanyak 18 usaha industri kerajinan yang telah dibina dalam bentuk fasilitasi promosi, fasilitasi bantuan melalui proposal serta pendataan sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah kelompok perajin yang

dibina mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sehingga cakupan bina kelompok pengrajin pun mencapai 6,65 %.

Pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur dilakukan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para pelaku IKM dalam mengembangkan produk-produk sehingga mampu berdaya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku IKM. Persentase target binaan pelaku IKM belum maksimal sehingga diharapkan setiap tahunnya kegiatan pembinaan ini terus dijalankan bahkan tidak hanya melalui fasilitasi promosi tetapi juga pembinaan dalam bentuk pelatihan.

Tabel 2.294 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	IKM	74	81	50	15	19
2	Jumlah kelompok pengrajin	IKM	1150	1150	249	246	271
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	6,47	7,04	20,08	6,10	7,02

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin skala IKM dari tahun 2017 sampai Berdasarkan tabel 2.274 diatas, Jumlah Pengrajin ditahun 2022 mengalami penurunan disebabkan ada usaha yang tidak berjalan karena adanya kendala permodalan. Sementara itu, cakupan bina Kelompok Pengrajin skala IKM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan jumlah IKM yang dibina disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Jumlah IKM yang dibina sebanyak 15 IKM.

Pembinaan terhadap industri kecil dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Luwu Timur dilakukan untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan para pelaku IKM dalam menggambarkan produk-produk sehingga mampu berdaya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi para pelaku IKM. Salah satu potensi produk kerajinan di Kbupaten Luwu Timur adalah Anyaman teduhu yang berasal dari Desa Nuha Kecamatan Nuha. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengembangan IKM kerajinan anyaman teduhu pemerintah daerah membentuk sentra kerajinan di Desa Nuha Krcamatan Nuha dengan Nama Sentra Kerajinan Anyaman Serat Alam Nuha Handicraft. Diharapkan melalui penguatan lembaga akan memacu

peningkatan produksi dan melalui pelatihan akan meningkatkan kualitas produk kerajinan. Persentase target binaan pelaku IKM belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Diharapkan setiap tahunnya kegiatan ini terus dijalankan sehingga seluruh pengrajin mendapatkan kesempatan untuk dibina melalui pelatihan.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

1. Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigran swakarsa adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Tabel 2.295 Persentase Transmigran Swakarsa Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah transmigran swakarsa	KK	0	0	0	0	0
2	Jumlah transmigrasi	KK	1.255	1.255	1.278	1.370	1.385
3	Persentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Transmigrasi Swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, tetapi berdasarkan bimbingan dan arahan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2023 belum ada transmigran swakarsa yang ditempatkan. Penempatan warga transmigran yang ada di Kabupaten Luwu Timur merupakan transmigran swakarya yaitu Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Warga transmigran akan diberikan lahan dan tempat tinggal serta jaminan hidup selama beberapa bulan. Selain itu para transmigran akan diberikan Lahan Usaha untuk dapat diolah dan menjadi sumber dari penghasilannya.

Pada tahun 2023, penempatan warga transmigrasi sebanyak 15 KK yang terdiri dari 8 KK Transmigrasi Asal (TPA) dan 7 KK dari Transmigran setempat (TPS). Sampai dengan Tahun 2023 total Jumlah Transmigran yang telah ditempatkan yakni 1.385 KK.

2.1.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi perikanan

Produksi perikanan adalah perbandingan jumlah produksi ikan dengan target daerah dimana jumlah produksi ikan merupakan cakupan semua hasil penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 produksi perikanan Kab Luwu Timur mencapai 389.369,73 ton dimana produksi tersebut mencakup produksi perikanan budidaya sebesar 378.996,70 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 10.373 ton.

Kenaikan produksi perikanan didukung oleh peningkatan produksi Perikanan budidaya dan Perikanan Tangkap. Pada Perikanan budidaya total produksi pada tahun 2023 sebesar 378.996,70 ton atau 97,33 persen dari produksi perikanan tahun 2023 yang meliputi, Produksi Air Tawar, Produksi Air Payau meliputi komoditi Unggulan Udang, Bandeng dan Rumput Laut (kering) dan Produksi Pengembangan Budidaya Laut berupa Rumput Laut Cottoni. Sedangkan Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 sebesar 10.373 ton atau sebesar 2,67 persen total produksi perikanan selengkapnyanya pada tabel berikut.

Tabel 2.296 Produksi perikanan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi ikan	Ton	320,368	325.355	325.622	329.212	389.369,73
2	Jumlah target daerah	Ton	319.394	320.411	325.359	325.730	325.926
3	Produksi perikanan	%	100	101	100	101,6	119,4

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas persentase produksi perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu mengalami kenaikan capaian produksi. Hal ini

menandakan jumlah produksi ikan telah mencapai target yang telah ditetapkan daerah bahkan telah melebihi target daerah. Peningkatan produksi perikanan tidak terlepas dari sumbangsih Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya dan penangkapan ikan.

Melihat Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Ketersediaan lahan yang luas dan layak menunjang peningkatan produksi serta peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga memudahkan dalam pemasaran hasil-hasil perikanan dan kelautan, tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif cukup besar dan menjanjikan. Namun yang menjadi kendala ketersediaan sarana dan prasarana belum cukup untuk menunjang potensi yang ada.

2. Konsumsi ikan

Persentase konsumsi ikan diperoleh dari jumlah konsumsi ikan dibanding target daerah. Persentase konsumsi ikan pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Kabupaten Luwu Timur tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sumber Pangan dari Laut dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan. Berikut tabel data capaian konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.297 Konsumsi ikan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah konsumsi ikan	Kg	44,99	45,42	45,85	46,28	46,71
2	Jumlah target daerah	Kg	44,96	45,39	45,82	46,25	46,68
3	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang terdaftar di daerah. Dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2023 sebanyak 133 kelompok dengan jenis bantuan sarana dan prasarana alat tangkap sesuai permohonan proposal yang diajukan oleh kelompok yang telah dibantu,

dengan jumlah kelompok yang terdaftar sampai tahun 2023 sebanyak 135 Kelompok, dengan persentase kelompok yang telah dibantu dari kelompok yang ada sebesar 78,23 persen. Berikut data cakupan bina kelompok nelayan.

Tabel 2.298 Cakupan bina kelompok nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan	Kelompok	11	17	23	32	50
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	130	134	137	120	170
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	8,46	12,68	16,79	26,66	29,41

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan merupakan indikator yang didapatkan dari jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dibandingkan jumlah produksi ikan di daerah. Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap pemerintah Kab. Luwu Timur telah memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan. Produksi kontribusi hasil kelompok nelayan didapatkan berdasarkan data kelompok yang menerima bantuan pemerintah provinsi berdasarkan usulan yang diajukan oleh masyarakat nelayan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.299 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kab Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah produksi ikan kontribusi	Ton	9.995	10.012,71	12.342.23	10.247,8	10.373

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	hasil kelompok nelayan						
2	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	320,368	325.355,71	325,622.5	329,212.09	389,369,73
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	3,11	3,07	3,11	3,11	3,75

: Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nelayan yang telah berkelompok berkontribusi terhadap produksi perikanan rata- rata sebesar 3,75 persen.

Dari data tersebut jumlah produksi nelayan yang berkelompok selalu berubah meskipun jumlah produksi nelayan yang berkelompok masih kecil dibanding nelayan yang tidak berkelompok namun hasil produksi meningkat dari tahun ketahun.

Nelayan yang berkelompok memang memiliki tangkapan masih kurang dibanding nelayan yang tidak berkelompok, karena nelayan yang berkelompok rata-rata nelayan yang melaut di sekitar pesisir pantai dibanding nelayan yang tidak berkelompok seperti nelayan bagang yang dapat menangkap ikan diluar pesisir dengan alat tangkap yang besar.

5. Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman

Tabel 2.300 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman Kab Luwu Timur Tahun 2019-2029

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2022
1	Jumlah tangkapan ikan	Ton	9.995	10.012,71	10.037	10.267,50	10.373
2	80 % dari tangkapan maksimum lestari	Ton	11.994	12.015	12.044	12.044	12.044

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2022
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	83.33	83.33	83.33	85,24	86,12

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Proporsi tangkapan ikan dari tahun 2019 sampai 2023 Proporsi tangkapan berada dalam batasan biologis yang aman dengan angka 86,12 persen yang dapat dieksplor oleh nelayan. Walaupun proporsi tersebut mengalami kenaikan, namun masih dapat dikendalikan untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80 persen dari jumlah tangkapan lestari (maksimum sustainable yield-MSY).

6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Luas kawasan konservasi perairan di Kab Luwu Timur pada tahun 2019 sebesar 606,5 Ha, sedangkan total luas perairan teritorial kabupaten Luwu Timur seluas 4.805.000 Ha. berdasarkan data ini diketahui Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,001 Persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.301 Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kawasan lindung perairan	%	606,5	606,5	606,5	606,5	606,5
2	Total luas perairan teritorial	%	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000	4.805.000
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

7. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan diidentifikasi dengan mengukur Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTN). Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan dan pembudidaya ikan.

Tabel 2.302 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks yang di terima nelayan	%	127,26	127,34	127,36	127,40	128,09
2	Indeks yang di bayar nelayan	%	122,52	122,53	122,55	122,58	114,88
Nilai tukar nelayan		%	103,71	103,86	103,92	103,92	111,49

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.4 Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen perencanaan RPJPD Kab. Luwu Timur telah tersedia yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur 2005 -2025.

Tabel 2.303 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur telah tersedia. RPJMD Kab. Luwu Timur telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016 -2021.

Tabel 2.304 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2018 – 2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tabel 2.305 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.306 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Dokumen Perencanaan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Tabel 2.307 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	466	467	466	233	
2.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	Program	472	479	479	233	
3	Penjabaran Konsistensi	%	98,73	97,49	97,29	100	

NO.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Program RPJMD kedalam RKPD						

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2022

6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Tabel 2.308 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Program	445	435	435	232	
2.	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	Program	466	467	466	233	
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	95,49	93,15	93,34	99,57	

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur, 2022

2.1.3.4.2 Keuangan

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal dimana telah diterapkan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur dengan komitmen dari seluruh manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secara konsisten menjaga dan mentaati aspek – aspek penting dalam siklus pengelolaan keuangan serta sinergitas dalam tahap penyusunan dan penetapan laporan keuangan. Data Opini BPK Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.309 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2. Persentase SILPA

Tabel 2.310 Persentase SILPA Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Realisasi SILPA	Rp.	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25	113.846.853.327,37	187.277.150.586,31	113.357.372.086,58
2	Total APBD	Rp	1.520.300.617.280,13	1.436.964.978.788,05	1.498.407.798.338,00	1.724.113.886.050,00	1.795.452.047.734,02
3	Persentase SILPA	%	1,72	5,07	7,60	10,86	6,31

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024 (Unaudited)

Total Realisasi Silpa untuk laporan Keuangan Unaudited Tahun 2023 sebesar Rp113.357.372.086,58 terdiri dari :

Kas di Kas Daerah	: 102.054.252.000,99
Kas di BLUD	: 5.412.677.057,00
Kas Dana BOS	: 570.437.921,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	: 1.232.875.314,59
Kas Lainnya	: <u>4.087.129.766,00</u>
	113.357.372.086,58

Total Realisasi APBD untuk laporan Realisasi Unaudited Tahun 2023 sebesar Rp1.795.452.047.734,02 terdiri dari :

Belanja Operasi	: 1.152.988.274.823,67
Belanja Modal	: 310.952.927.428,75
Belanja Tdak Terduga	: 548.000.000,00
Belanja Transfer	: <u>330.962.845.481,60</u>
	1.795.452.047.734,02

Persentase SILPA atas total realisasi Anggaran = **6,31 %**

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Tabel 2.311 Persentase Belanja Pendidikan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Realisasi Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Rp	340,996,954,738.65	334,072,059,524.08	353,871,279,491.48	306.044.766.262,00	351.837.651.008,31
2	Total APBD	Rp	1,520,300,617,280.13	1,436,964,978,788.05	1,478,098,933,563.34	1.724.113.886.050,00	1.795.452.047.734,02
3	Persentase Realisasi belanja pendidikan	%	22,43	23,25	23,94	17,75	19,60

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Total Realisasi Belanja Bidang Urusan Pendidikan Unaudited Tahun 2023 sebesar Rp351.837.651.008,31 dari Realisasi APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.795.452.047.734,02 atau 19,60. belanja pendidikan terdiri dari :

Belanja Operasi : 314.283.628.744,01

Belanja Modal : 37.554.022.264,30

351.837.651.008,31

Persentase realisasi belanja pendidikan dan Total Belanja APBD Tahun 2023=
19,60%

4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Belanja kesehatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kab. Luwu Timur sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 10 persen dari APBD. Persentase belanja kesehatan di Kab. Luwu Timur selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.312 Persentase Belanja Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan	Rp	314,815,234,479.98	350,546,382,276.34	391,989,763,600.29	394.794.589.878,00	435.142.380.882,00
2	Total APBD	Rp	1,609,008,544,799.42	1,489,289,489,113.78	1,565,315,094,982.00	1.724.113.886.050,00	1.937.326.930.321,00
3	Persentase belanja kesehatan	%	19,57	23,62	25,04	22,89	22,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Anggaran urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan TA. 2023 sebesar Rp.435.142.380.142.882,00 atau 22,46% dari total belanja dalam APBD 2023 sebesar Rp. 1.937.326.930.321,00. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.403.134.373.638,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.32.008.007.244,00. Diuraikan atas 5 (lima) Program, 22 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp.224.079.180.557 dan
 2. RSUD I La Galigo sebesar Rp.149.161.659.091
- serta 18 (delapan belas) unit SKPD yaitu:
1. Puskesmas Burau sebesar Rp.3.605.906.304;
 2. Puskesmas Wotu sebesar Rp.4.790.606.911;
 3. Puskesmas Mangkutana sebesar Rp.4.208.129.000;
 4. Puskesmas Tomoni sebesar Rp.4.095.760.000;
 5. Puskesmas Tomoni Timur sebesar Rp.3.370.938.000;
 6. Puskesmas Kalaena sebesar Rp.3.283.685.278;
 7. Puskesmas Angkona sebesar Rp.4.152.287.549;
 8. Puskesmas Lakawali sebesar Rp.2.913.932.264;
 9. Puskesmas Parumpanai sebesar Rp.2.291.368.000;
 10. Puskesmas Malili sebesar Rp.5.320.939.482;
 11. Puskesmas Lampia sebesar Rp.2.637.883.719;
 12. Puskesmas Wasuponda sebesar Rp.3.403.226.574;
 13. Puskesmas Nuha sebesar Rp.3.157.474.500;
 14. Puskesmas Wawondula sebesar Rp.4.230.716.408;
 15. Puskesmas Timampu sebesar Rp.2.274.938.000;
 16. Puskesmas Mahalona sebesar Rp.2.348.523.850;
 17. Puskesmas Bantilang sebesar Rp.2.822.885.395;
 18. Puskesmas Bonepute sebesar Rp.2.992.340.000.

5. Penetapan APBD

Tabel 2.313 Penetapan APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tanggal 13	Tepat Waktu (Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tanggal 17	Tepat Waktu (Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan APBD Tanggal 16

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
			Tanggal 11 Oktober 2019)	Tanggal 19 Oktober 2020)	Oktober 2021	Oktober 2022)	Oktober 2023)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.4.3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan

**Tabel 2.314 Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	6 JP	1 JP	9 JP	7 JP	11 JP

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023 adalah 11 JP. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023 diperoleh dari total keseluruhan JP dari 8 jenis Diklat dengan 313 peserta kemudian dibagi dengan jumlah PNS kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 3.795 Orang. Adapun Diklat yang diikuti oleh PNS selama tahun 2023 beserta perhitungan untuk memperoleh rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta	JP	
1	Diklat Penyusunan RPJPD Periode 2025-2045	60	68	4080
2	Diklat Contraceptive Technique Update (CTU)	40	50	2000
3	Diklat Pengendalian Penyakit Hewan Menular bagi Petugas	30	56	1680
4	Diklat Emotional Spiritual Question (ESQ)	63	24	1512

5	Diklat Master of Ceremony (MC)	82	12	984
6	PKA	3	923	2769
7	PKN	5	818	4090
8	PKP	30	905	27150
Total Jumlah JP selama tahun 2023				44265
Jumlah PNS Tahun 2023				3795
Rata-rata lama pegawai memperoleh pendidikan dan pelatihan tahun 2023				11

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Tabel 2.315 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN Yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	711	251	295	229	313
2	JumlahTotal ASN	Orang	3.992	3.877	3.937	4.506	5.101
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17,81	6,46	7,49	5,08	6.14

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2023 jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023 mencapai 5.101 orang (PNS sebanyak 3.795 orang dan PPPK sebanyak 1.306 orang). Dari keseluruhan jumlah ASN di tahun 2023 terdapat 313 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BKPSDM. Terdapat 8 jenis Diklat yang diselenggarakan selama tahun 2023 yang terdiri dari 5 Diklat Teknis dan 3 Diklat Struktural. Adapun Diklat Teknis yang diselenggarakan diantaranya yaitu Diklat Penyusunan RPJPD Periode 2025-2045 sebanyak 60 orang peserta, Diklat

Contraceptive Technique Update (CTU) sebanyak 40 orang peserta, Diklat pengendalian Penyakit Hewan Menular bagi Petugas sebanyak 30 orang peserta, diklat Emotional Spiritual Question (ESQ) sebanyak 63 orang peserta diklat Master of Ceremony (MC) sebanyak 82 orang peserta. Untuk 3 Diklat Struktural yang diselenggarakan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 3 orang peserta, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 5 orang peserta, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 30 orang peserta.

3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural

Tabel 2.316 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Struktural Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pejabat ASN Yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	463	465	470	477	515
2	Jumlah Total Pejabat	Orang	550	528	361	398	407
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan struktural	%	84,18	88,07	130,19	119,85	126,54

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Persentase capaian pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami peningkatan dari 119,85% di tahun 2022 menjadi 126, 54% pada tahun 2023. Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023 yaitu sebanyak 38 orang dari 407 orang pejabat struktural per 31 Desember 2023. Adapun jenis diklat yang diikuti terdiri dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikuti 3 orang, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) diikuti 5 orang, dan 30 orang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur Per 31 Desember 2023 terisi 32 orang, jabatan yang lowong 3 jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan (mutasi setelah lulus Selter JPT dilingkungan Pemprov Sulsel), Kepala BPBD (pensiun karena meninggal dunia) dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (pensiun dini). Rencana pelaksanaan Jobfit sebagai upaya pengisian

jabatan lowong tersebut tidak terlaksana pada tahun 2023 karena adanya surat edaran yang tidak memperbolehkan mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Masa Kerja yang belum cukup 2 tahun, sehingga kegiatan Jobfit tersebut akan dilakukan pada tahun 2024.

Tabel 2.317 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	30	27	30	31	32

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur Per 31 Desember 2023 terisi 32 orang, jabatan yang lowong 3 jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan (mutasi setelah lulus Selter JPT dilingkungan Pemprov Sulsel), Kepala BPBD (pensiun karena meninggal dunia) dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (pensiun dini). Rencana pelaksanaan Jobfit sebagai upaya pengisian jabatan lowong tersebut tidak terlaksana pada tahun 2023 karena adanya surat edaran yang tidak memperbolehkan mutasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Masa Kerja yang belum cukup 2 tahun, sehingga kegiatan Jobfit tersebut akan dilakukan pada tahun 2024.

5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas :

- Jabatan administrator; dimana pejabatnya bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, atau disebut juga pejabat eselon III.
- Jabatan pengawas; dimana pejabatnya bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, atau disebut juga pejabat eselon IV.
- Jabatan pelaksana; dimana pejabatnya bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.318 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	802	787	817	944	937

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Untuk data jumlah jabatan administrasi atau jabatan pelaksana non Eselon pada OPD lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 per tgl 31 Desember 2023 adalah sebanyak 937 orang. Jumlah jabatan administrasi di tahun 2023 ini berkurang sebanyak 7 orang dari tahun 2022 dikarenakan terdapat pejabat yang pensiun BUP serta terdapat pejabat yang meninggal dunia. Jumlah Jabatan Administrasi per 31 Desember 2023 berjumlah 937 orang yang terdiri dari Eselon III.a 53 Orang, Eselon III.b 104 Orang, Eselon IV.a sebanyak 175 Orang, Eselon IV.b sebanyak 43 Orang, Pelaksana 562 Orang. Adapun total jabatan struktural (diluar JPTP) yang lowong berjumlah 11 Orang.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas :

- Jabatan fungsional keahlian; ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama.
- Jabatan fungsional keterampilan: penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Tabel 2.319 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	2.640	2.572	2.757	2.936	2.826

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 2.826 orang sedangkan di tahun 2022 jumlah ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.936 orang. Terdapat penurunan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 110 orang. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat beberapa pejabat

fungsional yang dilantik menjadi pejabat struktural, terdapat pejabat yang pensiun BUP dan meninggal dunia serta terdapat juga pejabat fungsional yang beralih ke jabatan pelaksana.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.320 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelitbangan yang di tindaklanjuti	Buah	N/A	N/A	2	3	5
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Buah	N/A	N/A	12	12	12
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	N/A	N/A	16,67	25	41,60

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

2. Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel 2.321 Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang di fasilitas	OPD	N/A	N/A	9	10	12
2	Jumlah total perangkat daerah	OPD	N/A	N/A	39	41	41
3	Persentase perangkat daerah yang di fasilitas dalam penerapan inovasi daerah	%	N/A	N/A	23,08	24,40	29,27

Sumber : Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2022

2.1.3.4.5 Pengawasan

1. Persentase Tindaklanjuti Temuan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Terkait dengan adanya temuan hasil pemeriksaan dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pegawai pengelola keuangan. Angka peningkatan capaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan antara lain adanya respon dan koordinasi aktif dari perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan dan peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan laporan keuangan dan aset.

**Tabel 2.322 Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Temuan	383	44	100	1.496	30
2	Jumlah total temuan	Temuan	521	190	121	1.669	123
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	73,51	23,16	82,64	89,63	24,39

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah temuan yang ditindak lanjuti Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Jumlah sebanyak 30 temuan dari total 123 Temuan dengan angka persentase tindak lanjut sebesar 24,39 persen. Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2023 mengalami penurunan di bandingkan periode tahun sebelumnya,di sebabkan oleh factor adanya pembinaan yang terus dilakukan secara berkelanjutan baik dalam hal pelaksanaan pengawasan regular monitoring evaluasi dan reuiu.

**Tabel 2.323 Tindak Lanjut Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI,
Inspektorat Prov. Sul-Sel & Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

No	Pemeriksaan	Jumlah Temuan/ Rekomendasi	Jumlah yang Telah di Tindak Lanjuti	Sisa	Presentase
1.	BPK RI	19	10	9	52,63

2.	Inspektorat Prov. Sul-Sel	12	10	2	83,33
3	Inspektorat Kab. Luwu Timur	123	30	93	24,39

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah temuan/Rekomendasi dari BPK RI yang di tindak lanjuti Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Jumlah sebanyak 19 temuan dan telah di tindaklanjuti 10 temuan dengan persentase 52,63 persen dari total keseluruhan jumlah temuan ,kemudian jumlah temuan inspektorat Provinsi, Jumlah sebanyak 12 temuan dan telah di tindak lanjuti 10 temuan dengan Persentase 83,33 persen sedangkan jumlah Temuan/Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, Jumlah sebanyak 123 Temuan dan telah di tindak lanjuti 30 Temuan dengan persentase 24,39 persen tindak lanjut temuan pada tahun 2023 mengalami penurunan di bandingkan periode tahun sebelumnya,di sebabkan oleh factor adanya pembinaan yang terus dilakukan secara berkelanjutan baik dalam hal pelaksanaan pengawasan regular monoitoring evaluasi dan reviu.

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.324 Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	0	0	7	75	8
2	Jumlah total ASN	Orang	3.992	3.877	3.935	4.506	8
3	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0,0018	0,0166	1,77

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah ASN yang dikenai sanksi telah di tindak lanjuti Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Jumlah sebanyak 8 Orang dari Jumlah total ASN 8 Orang dengan angka persentase tindak lanjut sebesar 1,77 %. Persentase Pelanggaran Pegawai pada tahun 2023 mengalami penurunan di bandingkan periode tahun sebelumnya,di sebabkan oleh factor adanya pembinaan yang terus dilakukan secara berkelanjutan baik dalam hal pelaksanaan pengawasan regular monoitoring evaluasi dan reviu.

3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.325 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	23	8	57	713	19

Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan sampai saat ini telah menunjukkan adanya sinergitas antara program kerja pemerintah daerah dan DPRD yang diindikasikan dengan ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.326 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Merupakan ketersediaan rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Banmus, BK dan Komisidan bapemperda) di tahun 2023. Pada Setiap tahun anggaran, rencana kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD (Badan Anggaran, Banmus, BK dan Komisi) selalu tersedia (ada sesuai target kinerjanya).

2. Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk

Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)

Tabel 2.327 Tersusun Dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersusun dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKP)	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2024

program kerja DPRD tahun 2023 dalam RPJM dan RKPD. Pada setiap tahun anggaran, program kerja DPRD tahun 2023 dalam RPJM dan RKPD tersusun dan terintegrasi (ada sesuai target kinerjanya). Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023.

3. Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2.328 Terintegrasi Program Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen

**Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada Setiap tahun anggaran, program kerja DPRD kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD selalu terintegrasi (ada sesuai target kinerjanya). Hal tersebut dilakukan guna mendukung Fungsi DPRD dalam hal pengawasan, pembentukan perda dan anggaran maka perlu didukung dengan program-program dan kegiatan DPRD yang diakomodir dalam RKA dan DPA Sekretariat DPRD. Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023.

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.4.1.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

**Tabel 2.329 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut
Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun
2021- 2023**

No	Kelompok Makanan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Padi-padian	86.168	84.543	92.477
2	Umbi-umbian	5.489	5.661	5.444
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	72.925	78.137	82.103
4	Daging	25.499	20.340	21.832
5	Telur dan Susu	33.194	31.419	39.857
6	Sayur-sayuran	38.608	38.819	40.542
7	Kacang-kacangan	9.190	8.125	9.884
8	buah-buahan	20.856	42.282	62.894
9	Minyak dan Kelapa	12.806	16.375	15.960
10	Bahan minuman	21.449	20.523	19.999
11	Bumbu-bumbuan	13.332	14.082	14.063
12	konsumsi lainnya	10.201	12.128	13.261
13	Makanan dan minuman jadi	129.800	142.555	151.676
14	Rokok	83.162	92.718	100.777
Total		562.679	607.706	670.768

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2024

2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk nonpangan).

Tabel 2.330 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023

No	Kelompok Makanan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	337.756	353.803	358.506
2	Aneka komoditas dan jasa	121.008	116.220	124.716
3	pakaian, alas kaki dan tutup kepala	37.284	35.883	45.027
4	Komoditas tahan lama	92.722	81.431	69.101
5	pajak, pungutan dan asuransi	99.664	80.695	87.156
6	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	15.937	18.426	35.392
Total		741.528	704.371	686.458

Sumber: BPS Luwu Timur Dalam Angka 2024

1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.331 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun

			2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan	Km	1.889,27	1.889,27	1.889,27	1.889,27	2.229,87
2	Jumlah Kendaraan	Unit	33.192	30.393	32.131	37.444	56.507
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	17.569	16.087	17.007	19.819	25.341

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor

Untuk tahun 2023 Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan sebesar 25,3441 atau 1 km jalan di Kabupaten Luwu Timur melayani 26 unit kendaraan

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Pada Tahun 2023 Jumlah penumpang dan barang yang diangkut menggunakan transportasi di darat, dan laut di Kabupaten Luwu Timur, mengalami penurunan dari tahun 2022, sedangkan untuk transportasi udara sudah tidak ada karena sudah di ambil alih oleh provinsi.

**Tabel 2.332 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah orang	Orang	376.958	290.241	259.991	390.518	346.142
2.	Jumlah Barang	Ton	290.241	253.796	139.967	255.085	130.817

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara/terminal setiap tahunnya meningkat, selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.333 Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/terminal per tahun Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

NO	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1.	Dermaga	76733	26600	37782	13001	38.531	10.072	153.444	55.285	115.566	30.323
2.	Bandara	22934	28182	6018	84923	3.581	53.539	8.710	100.270	-	-
3.	Terminal	277291	55459	209996	41099	217.879	76.356	228.364	99.530	230.576	100.494
4	Jumlah	376958	290241	253796	139023	139.023	259.991	390.518	255.085	346.142	130.817

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.4.1.3 Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.334 Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kabupaten Luwu Timur

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus Narkoba	4	23	30	48	
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	1	0	
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	6	18	19	33	
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	56	70	73	127	
5.	Jumlah kasus Pencurian	53	40	59	55	
6.	Jumlah kasus Penipuan	0	7	15	9	
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	119	158	197	371	
9.	Jumlah Penduduk	300.374	302.039	304.938	306.082	

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,0003	0,0005	0,0006	0,0012	

Sumber : Polres Luwu Timur, 2024

b. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.335 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Demonstrasi Politik	1	7	2	2	0
2	Demonstrasi Ekonomi	20	14	21	19	9
3	Demonstrasi Mogok Kerja	8	7	6	2	2
Jumlah Demonstrasi		33	29	28	29	11

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Luwu Timur 2024

Dari data demonstrasi bidang politik pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah demonstrasi politik yang terjadi dari tahun 2019 (1 Kasus) mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak (7 kasus) hal ini terjadi karena pada tahun 2020 merupakan atau memasuki tahun politik sehingga aksi unjuk rasa tidak bisa terbendung. Dan untuk tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebanyak 2 kasus diantaranya demo terkait percepatan pemekaran desa Arolipu sebanyak 1 kali, aksi solidaritas bela palestina sebanyak 1 kali dan di tahun 2022 terjadi demo sebanyak (2 kasus) yakni demo terkait penolakan wacana penundaan pemilu oleh aliansi gempar dan elemen pemuda (empati) sampai di penghujung tahun 2023 tidak ada kasus demo terkait politik yang terjadi.

Dari data demonstrasi bidang ekonomi pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah demonstrasi ekonomi yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yakni tahun 2019 (20 Kasus) dan tahun 2020 (14 kasus), terjadi penurunan berkat mediasi pemerintah, TNI/POLRI dengan pihak terkait (pengunjuk rasa) dalam penyelesaian masalah, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 26 kasus rata-rata permasalahan yang menonjol adalah terkait rekrutmen tenaga kerja oleh PT. VALE, PT. WIKI dan PT. MPA ini dikarenakan banyaknya warga lokal yang tidak mendapat kesempatan menjadi karyawan di perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan tingginya jumlah unjuk rasa, sedangkan untuk tahun 2022 mengalami penurunan yakni sebanyak 19 kasus dan lagi kasus yang menonjol adalah demo terkait rekrutmen tenaga kerja oleh PT. Vale dan bantuan sosial PT. Vale ke masyarakat di 4 (empat) kecamatan daerah pemberdayaan PT. Vale, untuk permasalahan ini pemerintah berupaya untuk membicarakan ke pihak PT. Vale karna terkait internal PT. VALE dalam perekrutan tenaga kerja masyarakat lokal dan pemberian bantuan PT. Vale ke Masyarakat dan

sampai di penghujung tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak (9 kasus) yakni kasus yang menonjol terkait ketenaga kerjaan di PT. Minja Global Mandiri (PT. MGM), PT. CLM dan terkait ganti rugi lahan oleh PT. VALE.

Dari data demonstrasi Mogok kerja pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah demonstrasi mogok kerja yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yakni untuk tahun 2019 (8 kasus), tahun 2020 (7 kasus) dan untuk tahun 2021 sebanyak 1 kasus yakni aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PKW PT. CLM terkait pengangkatan karyawan baru menjadi karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus yakni aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT. HSU, PT. Ninja Global dan PT. Saweri terkait masalah kesejahteraan karyawan dan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan operator crew PT. Lycan Asia Mandiri Guding utama juga terkait masalah kesejahteraan karyawan. Dari kasus mogok kerja yang terjadi dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan berkat mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan terkait namun untuk tahun 2022 naik 1 kasus tetapi mampu diselesaikan dengan baik melalui media dengan perusahaan tersebut dan di tahun 2023 terjadi (2 kasus) yakni aksi mogok kerja yang dilakukan oleh PT. MGM dan telah terselesaikan dengan baik.

6. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Tabel 2.336 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Unsur	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Peraturan	1	3	4	1	7
	Jumlah		1	3	4	1	7

Sumber : Setdakab Luwu Timur, Bag. Hukum Tahun 2024

Jumlah perda yang mendukung Iklim Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 sebanyak 16 Perda sebagai berikut :

1. peraturan Daerah No. 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Program Tanggungjawab Sosial di lingkungan Usaha.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum.

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pasar.
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Waemami.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan Non Berusaha;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mami;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 Tentang Sistem Pertanian Organik;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal Luwu Timur Gemilang.

2. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Luwu Timur diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Tabel 2.337 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lulusan S1	13,097	14,211	14.862	16.107	17.670
2	Jumlah Lulusan S2	364	396	405	452	497
3	Jumlah Lulusan S3	5	6	6	5	7
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	13,466	14,613	15.273	16.564	18.174
5	Jumlah Penduduk	300,374	302,039	304.727	306.082	313.404
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,05	0,04	0,05	0,054	0.058

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

Tabel diatas menyajikan Rasio Lulusan S1/S2/S3 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran yang melihat kualitas penduduk suatu wilayah. Semakin Tinggi tingkat pendidikan yang di tammatkan maka diharapkan semakin baik pula kualitas sumberdaya manusia pada wilayah tersebut. Kualitas Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur di tiap tahun mengalami peningkatan. Ini terlihat jumlah Lulusan S1, S2 dan S3 yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Penduduk muda berusia 0-14 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia di atas 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio keterrgantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Tabel 2.338 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 14 tahun	85.815	86.518	86.160	86,481	86.389
15 - 64 tahun	199.698	200.727	203.754	206.492	210.458
65+	14.861	14.794	15.024	15.557	16.557

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	100.676	101.312	101.184	102,038	102.946
Rasio Ketergantungan	50.41	50.47	49,65	49,41	48.92

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Data Kependudukan Semester II Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas secara keseluruhan Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2023 memiliki rasio ketergantungan sebesar 48,92, yang dapat diartikan setiap 100 penduduk Kabupaten Luwu Timur yang produktif memiliki tanggungan sebanyak 48-49 jiwa penduduk yang belum produktif dan yang di anggap tidak produktif lagi. Indikator ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 penduduk usia kerja di Kabupaten Luwu Timur masih di bebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.

Tabel 2.339 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2	Pertumbuhan PDRB	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66	melampaui	2,98
3	Laju inflasi	1,91	1,21	2,96	5,13	2,21	Melampaui	1,18
4	PDRB per kapita Berlaku	Rp70,057,0 9	Rp70,495,4 7	78,58	92,98	69,70	Belum tercapai	72,55
5	PDRB per kapita Konstan	Rp53,468,1 0	Rp53,230,2 8	53,34	53,51	53,51	Melampaui	53,45
6	Indeks Gini	0,387	0,405	0,396	0,394	0,392	Melampaui	0,247
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,02	93,15	93,16	93,19	93,19	Belum tercapai	93,76

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
8	Indeks Pembangunan Manusia	72,8	73,22	73,34	73,92	75,84	Melampaui	74,40
9	Angka melek huruf	95,72	95,5	93,59	92,71	99,71	Melampaui	95,90
10	Angka rata-rata lama sekolah	8,54	8,8	8,81	8,92			9,60
11	Angka usia harapan hidup	70,38	70,53	70,63	70,94	74,32	Melampaui	71,00
12	Cakupan desa Siaga Aktif	100	100	100	100			100
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,48	72,36	73,14	71,51	67,48	Belum tercapai	153
14	Tingkat pengangguran terbuka	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42	melampaui	2,80
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,43	84,31	85,03	85,17	85,24	melampaui	86,00
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai	WTP
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
17	angka kriminalitas yang tertangani	0,03	0,0005	0,0006	0,0012	0,0012	Belum tercapai	4,73
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Pendidikan								
18	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,71	46,11	49,31	56,62	60,45		
19	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	45,71	46,11	49,31	56,62	60,45	Melampaui	68,60
Angka Partisipasi Murni								
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,39	92,54	93,07	99,65	97,08	Belum tercapai	102,65
21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	95,97	95,99	85,13	89,64	91,81	Belum tercapai	107,83
Angka Partisipasi Sekolah								
22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,93	95,95	90,87	97,09	94,54	Belum tercapai	99,30
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	98,37	98,49	71,00	82,67	84,73	Belum tercapai	97,90
Angka Putus Sekolah :								
24	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,1	0,07	0,40	0,32	0	Melampaui	0,29

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
25	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0,21	0,2	1,42	1,12	0	Melampaui	0,95
Angka Kelulusan:								
26	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,55	99,75	99,98	99,85	100,00	Melampaui	99,79
27	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,82	99,5	99,81	100,00	99,00	Belum tercapai	99,54
Angka Melanjutkan								
28	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,75	95,76	92,76	94,53	95,68	Melampaui	93,55
Fasilitas Pendidikan:								
29	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,78	72,27	73,35	74,45	77,32	Melampaui	73,87
30	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	77	78,51	80,36	81,40	81,89	Belum tercapai	84,51
31	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,5	48,23	48,46	49,46	50,27	Belum tercapai	59,97
32	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	363	399	577	592	716	Melampaui	701,32
33	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	97,21	92,99	88,35	87,85	92,69	Melampaui	92,93
34	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,84%	99,37%	99,41	99,70	99,71	Melampaui	99,52
35	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93,70	91,70	84,09	95,05	96,33	Melampau	90,98
Kesehatan								
36	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiranhidup	8,03	8,16	9,56	10,28	13,44	Melampaui	7,75
37	angka kelangsungan hidup bayi	91,98	91,85	90,44	89,76			0,9923

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
38	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	8,92	8,88	9,93	11,81	15,48		0,72
39	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,06	5,80	7,35	6,86	11,40	Melampau	5,04
40	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	142,68	108,74	147,09	133,31	101,54	Belum tercapai	100,64
41	rasio posyandu per satuan balita	11,08	11,16	11,33	11,59	12,54	Melampau	11,03
42	rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	0,28	0,32	0,35	0,36	0,54	Belum tercapai	5,35
43	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	sesuai	0,006
44	rasio dokter per satuan penduduk	0,139	0,142	0,154	0,162	0,284		17,54
45	rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,312	0,294	0,304	0,256	0,389		32,44
46	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,97	81,15	82,73	81,73	60,48	Belum tercapai	83,00
47	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92,90	92,76	93,51	91,33	88,63	Belum tercapai	94,00
48	cakupan desa/keluurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,21	88,98	94,49	96,85	98,44	melampaui	93,00
49	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
50	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	105,89	96,85	91,73	94,60	91,30	Belum tercapai	97,00
51	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	3,31	4,45	2,31	2,32	3,31	melampaui	2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
52	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	36,02	7,64	20,78	39,27	52,09	Belum tercapai	100
53	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	sesuai	100
54	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	148,14	102,63	90,83	132,56	135,93		
55	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,66	0,66	0,65	4,86	0		<2
56	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	98,45	67,09	76,10	88,52	94,67		504
57	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	97,07	97,74	97,47	96,33	98	melampaui	95
58	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	sesuai	100
59	Penderita diare yang ditangani	159,15	99,79	50,37	114,55	139,27		100
60	Angka kejadian Malaria	7,32	4,30	4,26	18,15	21,69		<1
61	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0013	0,0013	0,0068	0,0045	0,0373		0,1
62	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	8,64	6,71	4,84	4,92	5,21	melampaui	4,5
63	Cakupan kunjungan bayi	97,71	88,52	97,96	100,15	98,03	melampaui	93
64	Cakupan puskesmas	154,6	154,6	163,6	163,6	163,6	Belum tercapai	164

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
65	Cakupan pembantu puskesmas	57,48	57,48	57,48	57,48	103,91	Belum tercapai	105,00
66	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97,05	88,34	91,61	86,55	84,64	Belum tercapai	93
67	Cakupan pelayanan nifas	92,37	92,71	93,13	91,26	87,76	Belum tercapai	94,0
68	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,82	48,64	55,89	56,08	44,37	Belum tercapai	48
69	Cakupan pelayanan anak balita	88,26	66,39	94,15	91,80	90,82	melampaui	78
70	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	59,57	78,29	95,74	100	sesuai	100
71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	130,79	134,51	100,53	83,08	80,06	Belum tercapai	106.763
72	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	Sesuai	100
73	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	0	0	0	0		95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Pekerjaan Umum								
74	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,396	0,400	0,392	0,341	0,298	Belum tercapai	0,4371
75	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0063	0,0063	0,0062	0,0061	0,0071	melampaui	0,00595
76	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik(> 40 KM/Jam)	39,59	40	39,18	34,12	29,82	Belum tercapai	43,71
77	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan	0,133	0,133	0,134	0,134	0,113	Belum tercapai	0,133

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)							
78	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,43	97,91	97,91	98,06	98,48		974,05 9
79	Persentase drainase dalam kondisi baik	84,93	84,64	85,52	84,21	87,53	Melampaui	86,24
80	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,34	50,72	54,00	55,97	56,21	Melampaui	54,85
81	Rasio Jaringan Irigasi	6,844	7,482	12,124	12,653	16,693	Melampaui	9,276
82	Persentase penduduk berakses air minum	49,59	57,48	58,70	60,67	61,20	Belum tercapai	63,94
83	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	89,41	-	58,70	60,67	61,20	Belum tercapai	63,94
Penataan Ruang:								
84	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	0,14	0,13	0,151	0,142	0,143	melampaui	0,1429
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
85	Rasio rumah layak huni	17,43	17,74	0,183	0,189	0,191	Melampaui	0,186
86	Rasio permukiman layak huni	74,98	75,74	0,93	0,947	0,954	Melampaui	0,766
87	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	84,56	86,65	87,50	89,00	61,90	Belum tercapai	88,75
88	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	54,92	58,12	66,45	67,30	13,70	Belum tercapai	62,62
89	Persentase pemukiman yang tertata	74,98	75,74	93,37	94,70	95,40	Melampaui	76,64
90	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Belum tercapai	0,05
91	Persentase luasan permukiman kumuh di	2,24	2,24	0,0737	2,70	2,30	Melampaui	2,09

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	kawasan perkotaan							
92	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	15,06	13,35	12,50	12,00	13,13	Melampaui	12,90
93	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	59,06	67,02	70,08	70,80	70,80	Melampaui	61,40
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
94	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12,7	9,13	7,16	7,34	7,31	Belum tercapai	10,00
95	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	100	100	100	100	100	Sesuai	100
96	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	20,34	25,64	22,89	22,80	25,40	Belum tercapai	54,25
97	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75,15	91,18	80,56	81,57	75,36	Belum tercapai	96,38
98	Persentase Penegakan PERDA	78,43	84,61	99,90	100			100
Sosial								
99	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,57	30,9	54,59	65,60	56,50	Melampaui	45,71
100	Persentase PMKS yang tertangani	36,59	26,39	52,70	66,50	56,50	Melampaui	40,56
101	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	32,2	28,32	56,83	65,60	56,50	Melampaui	43,25
102	Persentase panti sosial yang menyediakan	77,78	100	100	100	100	Melampaui	90

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial							
103	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	44,44	70	70	80	83,30	melampaui	90
104	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	Sesuai	100
105	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	Sesuai	100
106	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	7,71	7,39	7,72	9,13	9,90	Belum tercapai	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
Tenaga Kerja								
107	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	11,38%	22,82%	17,01	30	20	Melampaui	9,27
108	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	8,82%	12,00	80,43	36,67	Melampaui	14,29
109	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
110	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	73,83	75,75%	72,22	85,30	81,90	Melampaui	75,75

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	pelatihan berbasis kompetensi							
111	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
112	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
113	Rasio lulusan S1/S2/S3	448,31	483,81	0,05	100			510,23
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
114	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	75,72	76,02	78,29	82,30	59,30	Belum tercapai	74,65
115	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3,33	6,67	6,67	10	10	Sesuai	17,14
116	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,28	23,98	27,71	17,60	28,20	Melampaui	25,35
117	Rasio KDRT	0,04	0,03	0,037	0,31	0,007	Belum tercapai	0,11
118	Partisipasi angkatan kerja perempuan	11,83	12,44	21,33	30	53,70	melampaui	12,66
119	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	Sesuai	100
120	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban	100	100	100	100	100	Sesuai	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.							
121	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	89	94	76	100	100	Sesuai	100
122	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	89	94	100	100	100	Sesuai	100
Pangan								
123	Persentase Ketersediaan pangan utama	68,55	69,61	87,06	79,95	60,60	Belum tercapai	70
124	Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,731,26	3,258,86	212,69	212,77	208,39		2.463
125	Pengawasan dan pembinaan ke amanan pangan	55,5	0	0	66,66	66,66	Belum tercapai	73
Pertanahan								
126	Persentase luas lahan bersertifikat	38,29	39,65	41,56	59,90	60,70	melampaui	40,35
127	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100	100	100	Sesuai	100
128	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	sesuai	100
Lingkungan Hidup								
129	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		1
130	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
131	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		1
132	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	53,8	0	80,69	25,02	24,92	Belum tercapai	28,20
133	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	51,6	0	97,62	38,18	38,87	melampaui	29,65
134	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	70.24	0	76,48	16,52	16,31	Belum tercapai	30,50
135	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50	0	52	52	40	Belum tercapai	50
136	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada		1
137	Timbulan sampah yang ditangani	25.915	22.535.10	27.343.70	31,380,23	31,473,69	Belum tercapai	33.032
138	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	11,06	5,34	6,59	12,85	12,75	Belum tercapai	28,32
139	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	30,6	30,6	30,6	melampaui	0
140	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60,41	51,51	55,76	71,52	70,56	Belum tercapai	72,29
141	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1	0	0	73,25	0	Belum tercapai	1
142	Persentase izin pengelolaan	0	0	0	0	0	Sesuai	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	sampah oleh swasta yang di terbitkan							
143	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
144	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,97	1,00	0,99	0,97	0,98	Belum tercapai	1,00
145	Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,96	0,97	1	0,99	Melampaui	0,97
146	Rasio pasangan berakte nikah	0,33	0,41	0,44	0,49	0,56	Melampaui	0,50
147	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
148	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sesuai	Sudah
149	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96,51	99,71	98,73	97,17	98,21	Belum tercapai	99,87
150	Cakupan penerbitan akta kelahiran	93,48	95,54	96,99	100	99,03	melampaui	97,42
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
151	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100		125
152	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1		135
153	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87		370
154	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100		140
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
155	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,99	1,95	2,27	1,67	3,76	Melampaui	1,63
156	Total Fertility Rate (TFR)	2,21	2,21	2,79	2,79	2,31	Belum tercapai	2,47
157	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	56,25	56,25	32,14	57,14	57,14	Belum tercapai	100
158	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	32,14	32,14	0	0	100	Sesuai	100
159	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	0	Belum tercapai	2
160	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4	Sesuai	4
161	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan	1	1	1	2	6	Melampaui	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	pendidikan kependudukan							
16 2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	1,7	1,7	1,72	Belum tercapai	2,00
16 3	Ratio Akseptor KB	73,89	72,47	69,95	69,95	71,38	Melampaui	59,70
164	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,89	72,47	69,95	66,37	71,15	Melampaui	59,70
16 5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,98	Tidak Melaksanak an Pendataan (pandemi COVID 19)	1,21	0,98	0,98	Belum tercapai	2,96
166	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14,18	15,61	16,73		11,38	Belum tercapai	12,01
167	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,79%	24,98	37,07	34,24	33,84	Belum tercapai	40,81
168	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	26,66	37,98	42,96	50,66	40,53	Melampaui	37,00
16 9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	84,04	79,90	82,30	83,15	66,74	Belum tercapai	80,02
17 0	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	82,11	85,33	85,76	86,38	47,34	Belum tercapai	85,67
171	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	81,13	81,19	81,52	82,15	6,32	Belum tercapai	81,52
172	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	Belum tercapai	18,18
17 3	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	445,55	436,36	445,45	436,36	445,45	Melampaui	437,50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	Remaja/Mahasiswa							
174	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	Sesuai	100
175	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	0,86	0,86	0,85	0,88	0,99	Belum tercapai	1,00
176	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
177	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontra sepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	109,87	132,28	228,05	Melampaui	100
178	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
179	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap des	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19	100	100	100	Sesuai	100
180	Persentase remaja yang	0	0	0	0	0	Sesuai	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)							
181	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	62,82	71,13	76,98	78,27	81,81	melampaui	72,60
182	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	25,29	21,77	22,41	37,15	24,35	Melampaui	21,95
183	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19	19	20	20,8	22,5	Melampaui	21
184	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,0061	0,0058	0,043	0,041	0,051	Melampaui	0,0062
Perhubungan								
185	Jumlah arus penumpang angkutan umum	376.958	253.796	259.991	390.518	346.142	Melampaui	274.650
186	Rasio ijin trayek	0,014	0,011	0,000043	0,000084	0,000105	Belum tercapai	0,011
187	Jumlah uji angkutan umum	2405	2640	2547	2757	3130	Belum tercapai	5102
188	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	15	15	15	16	16	Melampaui	15
189	Persentase Layanan angkutan darat	0,124	0,183	0,117	0,115	0,118	Belum tercapai	0,176
190	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	9.25	5.95	9,52	4,93	1,04	Melampaui	0,62
191	Pemasangan Rambu-rambu	100	100	100	100	100	Melampaui	80,20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampa ui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
192	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,057	0,062	0,059	0,050	0,039	Belum tercapai	27,10
193	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	376.958	290.241	259,991	390.518	346.142		425.133
194	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	290.241	253.796	139,967	255.085	130.817		
195	jumlah Orang melalui dermaga/bendara /terminal per tahun	376958	253796	259,991	390.518	346.142		425.132
196	jumlah Barang melalui dermaga/bendara /terminal per tahun	110.241	139,023	139,023	255.085	130.817		
Komunikasi dan Informatika								
197	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	83.73	85.14	91,83	89,51	85,16	Belum tercapai	93,27
198	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	43.93	53.44	64,40	65,55	69,15	Belum tercapai	85,13
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
199	Persentase Koperasi aktif	75.63	75,75	76,47	77,33	79,19	Melampaui	56,41
200	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	Melampaui	95,45
201	persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	Melampaui	96,86
202	Persentase Usaha Mikro dan kecil	94,41	95,28	98,01	99,91	99,64	Melampaui	98,78
Penanaman Modal								
203	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37	26	46	85	78	Melampaui	40
204	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rp. 598.558. 569.406	Rp. 1,995,155, 132.539	Rp.567,487, 535,350	Rp.1.144.862 .849.673	Rp.1.049.645 .884.399	Melampaui	Rp.500 .000.00 0.000
205	Rasio daya serap tenaga Kerja	162,3	278.9	455,30	243,38	171,01	Belum tercapai	190,01
206	kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	135,45	32,19	37,55				100.00 0.000.0 00
Kepemudaan dan Olahraga								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
207	persentase organisasi pemuda yang aktif	40,54	40,54	42,69	42,69	50	Melampaui	50,56
208	persentase wirausaha muda	52,63	68,42	60,00	46,43	35,71	Belum tercapai	38,83
209	Cakupan pembinaan olahraga	28,57	0	8,00	74,07	100	Sesuai	100
210	Cakupan pelatih yang bersertifikat	26,14	26,14	26,14	11,76	0	Belum tercapai	78,57
211	Cakupan pembinaan atlet muda	100	0	0	100	32,20	Melampaui	22,86
212	Jumlah atlet berprestasi	64	30	74	21	76	Melampaui	15
213	Jumlah prestasi olahraga	6	3	75	197	213	Melampaui	6
Statistik								
214	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	Ada	Sesuai	Ada
215	Buku "Kabupaten dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	Ada	Sesuai	Ada
216	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai	Ada
Persandian								
217	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	sesuai	100
Kebudayaan								
218	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2	0	0	1	4	Melampaui	2
219	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	18,30	21,12	25,35	8,33	16,66	Melampaui	5
220	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	13	15	48	48	48	Belum tercapai	80
221	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	29	4	8	Melampaui	3
Perpustakaan								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
222	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2,24	158	82	156,07	227,54	Melampaui	151
223	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.39	0.39	38,11	0,47	0,46	Melampaui	0,46
224	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.12	1.11	1,11	1,14	1,13	Melampaui	1,08
225	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	13,112	11.962	8,082	15.451	22.527	Melampaui	15,01
226	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	13,363	9.946	10.411	23.673	24.079	Melampaui	12.863
227	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	11,76	18,75	35,71	33,33	35,71	Belum tercapai	100
Kearsipan								
228	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	58.97	87.18	12,82	95,12	100	Melampaui	25,64
229	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	4	85	40	700	Melampaui	105
Layanan Urusan Pilihan								
Pariwisata								
230	Kunjungan wisata	32,95	32,457	123,30	939,45	1.220,71		27
231	Lama kunjungan wisata	3	3	3	3	3	Belum tercapai	5
Pertanian								
232	Cakupan bina kelompok petani	0,06	0.06	11,47	12,44	12,44	Belum tercapai	58,75
Perdagangan								
233	Ekspor Bersih Perdagangan	660,572,391,96	773,511,973,67,	919,980,853,88	1.251.398.446	1.313.160.356,70	Melampaui	810.000.000
234	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	18,20	29,02	38,34	59,17	68,07	melampaui	19
Perindustrian								
235	Cakupan bina kelompok pengrajin	6,47%	7,04%	20,08	6,10	7,01	melampaui	6,08
Transmigrasi								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
236	Persentase transmigrasi swakarsa	Tidak ada Penempatan Transmigrasi Swakarsa Tahun 2019-2023						
Kelautan dan Perikanan								
237	Produksi perikanan	100	101	100	101,6	119,4	Melampaui	100
238	Konsumsi ikan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
239	Cakupan bina kelompok nelayan	8,46	12.68	16,79	26,66	29,41	Melampaui	15,00
240	Produksi perikanan kelompok nelayan	46,92	37,58	42,04	3,11	3,75	Belum tercapai	42,00
241	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1,25	1,25	88,33	85,24	86,12	Melampaui	1,29
242	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,23	0,23	0,001	0,001	0,001	Belum tercapai	0,23
Penunjang Urusan								
Perencanaan Pembangunan								
243	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
244	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
245	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
246	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGE T 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
247	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	97,49	97,29	100	100			Ada
248	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	93,15	93,34	99,57	99,56			Ada
Keuangan								
249	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai	WTP
250	Persentase SILPA	2,95	5,07	7,6	10,86	6,31	Melampaui	3
251	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	20,54	20,54	23,94	17,75	19,60	Melampaui	21
252	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	20,71	20,71	25,04	22,89	22,46	Melampaui	15
253	Penetapan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tanggal 13 Oktober 2021)	Tepat Waktu (Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tanggal 17 Oktober 2022)	Tepat waktu (Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tanggal 16 Oktober 2023)	sesuai	60 hari
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
254	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Hari	4 Hari	9 JP	7 JP	11 JP		
255	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	74,15%	82,61%	7,49	5,08	6,14	Belum tercapai	27,73
256	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	84,18%	88,07%	92,33	119,85	126,54	melampaui	38,82
257	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30 Orang	27 Orang	30 Orang	31 Orang	32 Orang	Belum tercapai	35 Orang

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
258	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	802 Orang	787 Orang	817 Orang	944 Orang	937 Orang	Melampaui	700 Orang
259	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2640 Orang	2572 Orang	2757 Orang	2936 Orang	2826 Orang	Belum tercapai	3600 Orang
Penelitian dan Pengembangan								
260	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	N/A	16,67	25	41,60			
261	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	N/A	23,08	24,40	29,27			50
Pengawasan								
262	Persentase tindak lanjut temuan	73,51	23,16	82,64	89,63	24,39	Belum tercapai	94
263	Persentase pelanggaran pegawai	0	1	0,0018	0,0166	0,1568	Melampaui	0
264	Jumlah temuan BPK	23	8	57	713	19	Belum tercapai	15

Sumber Data: Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023.

2.2 Capaian Indikator Pembangunan Daerah.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat) dan aspek daya saing daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, maka dirumuskan program pembangunan

daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Bupati Luwu Timur berdasarkan target RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yang ditetapkan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum

Tabel 2.340 hasil evaluasi capaian IKU daerah tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
						2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya							
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1:					
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1 Angka Kemiskinan	%	6,81	6,44	6,93
		Sasaran-1:					
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,92	74,10	75,84
		Sasaran-2:					
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	Maju	Maju
		Sasaran-3:					
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	106,54	90,00	90,34
		Tujuan-2:					
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	1,99	2,72-3,63	9,66
			6 Rasio Gini	Nilai	0,394	0,381	0,392
		Sasaran-4					
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	-1,84	1,98	1,19
		Sasaran-5:					
3	Menyediakan infrastruktur daerah	ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,48	3,05	5,42
		Tujuan-3:					
			9	nilai		20,666	60,44

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
						2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah			(Sedang)	
		Sasaran-6:					
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai		74,93	84,27
		Sasaran-7:					
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	88,70	88,10	80,09
			12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	176,14	202 (TINGGI)	152,28
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-4:					
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat		B	
		Sasaran-8:					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14 Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	A (Baik)	A (Baik)	A (2022) (Baik)
			15 Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	BB	B (66,51)
		Sasaran-9:					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16 IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai		84,75	98,49
			17 IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	87,80	84,31	87,84
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-5:					
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	18 Angka Kriminalitas	Point	0,000562	0,00056	0,0003469
		Sasaran-10:					
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19 Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	64,88	76,81	81,67

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
						2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-6:					
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai		75,92	79,49
			21 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai		54.77	-
		Sasaran-11:					
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	57,82	95	100
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%		95	89,14

Sumber Data: Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023.

2.2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek/fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Sebagai gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2023 capaian indikator kinerja daerah (IKD) sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.341 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai ($\lt$) sesuai ($=$)melampaui ($\gt$)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
2	Pertumbuhan PDRB	-1,39	1,99	9,66	Melampaui	2,72
3	Laju inflasi	2,96	5,13	2,21	Belum Tercapai	1,19
4	PDRB per kapita Berlaku	78,58	92,98	99,49	Melampaui	72
5	PDRB per kapitaKonstan	53,34	53,51	58,1	Melampaui	53,3
6	Indeks Gini	0,396	0,394	0,392	Belum Tercapai	0,264583333
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,16	93,19	93,07	Belum Tercapai	93,56
8	Indeks Pembangunan Manusia	73,34	73,92	75,84	Melampaui	74,1
9	Angka melek huruf	99,41	99,7	99,71	Melampaui	95,8
10	Angka rata-rata lama sekolah	8,81	8,92	8,93	Belum Tercapai	9,4
11	Angka usia harapan hidup	73,78	74,08	74,32	Melampaui	70,83

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
12	Cakupan desa Siaga Aktif	100	100	100	Sesuai	100
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	70,48	71,51	67,48	Belum Tercapai	71,1
14	Tingkat pengangguran terbuka	4,96	4,48	5,42	Belum Tercapai	3,05
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,03	85,17	85,24	Melampaui	85
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Sesuai	WTP
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	angka kriminalitas	0,0006	0,0012	0,000347	Melampaui	0,00056
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
Pendidikan						
17	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	49,31	56,62	60,45		
18	Angka PartisipasiKasar(PAUD)	49,31	56,62	60,45	Belum Tercapai	68,4
Angka Partisipasi Murni						
19	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	93,07	99,65	97,08	Belum Tercapai	102,6
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	85,13	89,64	91,81	Belum Tercapai	107,78
Angka Partisipasi Sekolah						
21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	90,87	97,09	94,54	Belum Tercapai	99,25
22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	71	82,67	84,73	Belum Tercapai	97,85
Angka Putus Sekolah :						
23	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,4	0,32	0	Melampaui	0,31
24	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1,42	1,12	0	Melampaui	1
Angka Kelulusan:						
25	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	99,85	100	Melampaui	99,78
26	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,81	100	99	Sesuai	99,53
Angka Melanjutkan						
27	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,76	94,53	95,68	Melampaui	93,5
Fasilitas Pendidikan:						
28	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	73,35	74,45	77,32	Melampaui	73,47

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
29	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,36	81,4	81,89	Belum tercapai	83,01
30	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,46	49,46	50,27	Belum tercapai	59,96
31	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	577	592	716	Melampaui	698,82
32	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	88,35	87,85	92,69	Melampaui	92,61
33	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,41	99,7	99,71	Melampaui	99,47.00
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85,48	93,76	95,44	Melampaui	90,48.00
Kesehatan						
35	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiranhidup	9,56	10,24	13,44	Belum tercapai	7,93
36	angka kelangsungan hidup bayi	0,990	0,990	0,987	Belum tercapai	0,9921
37	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	9,93	11,81	15,07	Belum tercapai	0,76
38	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,35	6,86	11,01	Belum tercapai	5,22
39	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	147,09	133,3	122,22	Belum tercapai	108,14
40	rasio posyandu per satuan balita	11,33	11,59	12,54	Melampaui	11,03
41	rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,35	0,36	0,54	Belum tercapai	5,35
42	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,006	0,006	0,006	Sesuai	0,006
43	rasio dokter per satuan penduduk	0,154	0,164	0,286	Belum tercapai	16,22
44	rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,304	0,258	0,392	Belum tercapai	29,46
45	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	82,70	69,5	60,69	Belum tercapai	82%
46	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93,51	91,33	88,63	Belum tercapai	93,50%
47	cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94,49	96,85	98	Melampaui	92%
48	cakupan balitagizi buru mendapat perawatan	100	100	100	Sesuai	100
49	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	91,73	94,60	91,3	Belum tercapai	96
50	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	1,73	1,2	3,31	Melampaui	2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
51	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	20,78	39,27	52,08	Belum Tercapai	100
52	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	Sesuai	100
53	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	74,44	100	100	Sesuai	100
54	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0,6	0	Sesuai	<2
55	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	76,10	88,52	94		472 org
56	Proporsikasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	97,47	96,33	98	Melampaui	95
57	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	Sesuai	100
58	Penderita diare yang ditangani	50,37	114,55	139,27	Melampaui	100
59	Angka kejadian Malaria	<1	<1	<1	Sesuai	<1
60	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0068	0,001	0,038	Melampaui	0,1
61	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,8	4,92	5,21	Melampaui	4,6
62	Cakupan kunjungan bayi	97,96	100,15	98,03	Melampaui	92
63	Cakupan puskesmas	163,6	163,6	163,6	Sesuai	164
64	Cakupan pembantu puskesmas	57,48	57,48	103,91	Sesuai	105
65	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	91,61	86,55	84,64	Belum tercapai	92
66	Cakupan pelayanan nifas	93,13	91,26	88,13	Belum tercapai	93,5
67	Cakupan pelayanan anak balita	94,15	91,80	90,82	Melampaui	77
68	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	78,29	95,74	100	Sesuai	100
69	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	99,292	83,08	80,06	Belum tercapai	106,763
70	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	Sesuai	100
71	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	Melampaui	95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai ($\leq$) sesuai (=)melampaui ($\geq$)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
Pekerjaan Umum						
72	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	39,18	34,12	29,82	Melampaui	0,42943
73	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0062	0,0062	0,0072	Melampaui	0,00604
74	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik($\geq$ 40 KM/Jam)	39,18	34,12	29,82	Belum tercapai	42,94
75	Persentasejalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,134	0,134	0,113	Belum tercapai	0,133
76	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,91	98,06	98,48		973,976
77	Persentase drainase dalam kondisi baik	85,52	90,24	87,53	Melampaui	85,3
78	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54	55,97	56,21	Melampaui	54,11
79	Rasio Jaringan Irigasi	12,124	12,65	12,693	Melampaui	8,843
80	Persentase penduduk berakses air minum	58,7	60,67	61,2	Belum tercapai	62,5
81	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,7	60,67	61,2	Belum tercapai	62,5
Penataan Ruang:						
82	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	0,151	0,177	0,143	Sesuai	0,1423
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
83	Rasio rumah layak huni	0,183	0,19	0,19	Sesuai	0,183
84	Rasio permukiman layak huni	0,93	0,95	0,954	Melampaui	0,763
85	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	87,5	89,05	89,28	Melampaui	88,05
86	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	66,45	67,35	13,79	Belum tercapai	61,12
87	Persentase pemukiman yang tertata	93,37	94,78	95,44	Melampaui	76,34
88	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04	0,04	0,04	Belum tercapai	0,05
89	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,0737	2,71	2,32	Belum tercapai	2,14
90	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	12,5	12,03	13,13	Belum tercapai	13,05
91	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	70,08	70,87	70,87	Melampaui	42,1
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
92	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	7,16	7,34	7,31	Belum Tercapai	10
93	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	Sesuai	100
94	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	22,89	22,89	25,43	Belum Tercapai	49,73
95	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80,56	81,57	75,36	Belum Tercapai	95,18
96	Persentase Penegakan PERDA	99,9	100	100	Sesuai	100
Sosial						
97	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	54,59	65,69	56,6	Melampaui	45,27
98	Persentase PMKS yang tertangani	52,7	66,56		Belum Tercapai	40,36
99	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	56,83	65,69		Belum Tercapai	43,18
100	Persentase partisipasi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	80	Sesuai	80
101	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	70	80		Belum Tercapai	80
102	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	Sesuai	100
103	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	Sesuai	100
104	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	7,72	9,13		Belum Tercapai	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
Tenaga Kerja						
105	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	17,01	30,06	20,00	Belum Tercapai	9,27
106	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12	80,43	36,67	Melampaui	14,29
107	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100	100	100	Sesuai	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
108	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,22	85,38	81,94	Melampaui	75,7
109	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	100	100	Sesuai	100
110	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	Sesuai	100
111	Rasio lulusan S1/S2/S3	523,02	557,64	579,89	Melampaui	500,23
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
112	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	78,29	82,35		Belum Tercapai	74,69
113	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6,67	10		Belum Tercapai	10
114	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	27,71	17,65		Belum Tercapai	25,31
115	Rasio KDRT	0,037	0,31		Belum Tercapai	0,11
116	Partisipasi angkatan kerja perempuan	21,33	30,01		Belum Tercapai	12,51
117	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	Belum Tercapai	100
118	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	Belum Tercapai	100
119	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	76	100	100	Belum Tercapai	100
120	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	100	Belum Tercapai	100
Pangan						
121	Ketersediaan pangan utama	87,06	79,64	118,77	Melampaui	70
122	Ketersediaan energi dan protein perkapita	212,69	3781	100		2.463
123	Pengawasan dan pembinaan ke amanan pangan	0	66,66	100	Melampaui	72

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
Pertanahan						
124	Persentase luas lahan bersertifikat	41,56	59,94	60,72	Melampaui	40,15
125	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100	Sesuai	100
126	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	Sesuai	100
LingkunganHidup						
127	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	Belum Tercapai	1
128	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	Belum Tercapai	90
129	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	1	1	Sesuai	1
130	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	80,69	66,52	66,25	Melampaui	28
131	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	97,62	94,27	95,97	Melampaui	29,6
132	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	76,48	75,45	74,46	Melampaui	30,5
133	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	52	52	22	Belum Tercapai	50
134	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	1	2	Melampaui	1
135	Timbulan sampah yang ditangani	31.352,00	31.380,23	31.473,69	Belum Tercapai	32,85
136	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6,59	12,85	15,47	Belum Tercapai	27,35
137	Persentase cakupan area pelayanan	30,6	30,06	30,06	Melampaui	0
138	Persentase jumlah sampah yang tertangani	55,76	71,52	70,56	Belum Tercapai	72,31
139	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	1	1	Sesuai	1
140	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0	Sesuai	0
141	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	Sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Siipil						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
142	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,99	0,98	0,98	Belum Tercapai	1
143	Rasio bayi berakte kelahiran	0,97	1	1	Melampaui	0,97
144	Rasio pasangan berakte nikah	0,44	0,49	56	Melampaui	0,48
145	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
146	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah	Sudah	Sesuai	Sudah
147	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,73	98,4	98,21	Belum Tercapai	99,85
148	Cakupan penerbitan akta kelahiran	96,99	100	99,03	Melampaui	97,05
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
149	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	125	Sesuai	125
150	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	100		Belum Tercapai	135
151	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,87	434		Belum Tercapai	370
152	Persentase PKK aktif	100	100	100	Belum Tercapai	140
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
153	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,27	1,67	1,67	Melampaui	1,7
154	Total Fertility Rate (TFR)	2,79	2,79	2.31	Melampaui	2,53
155	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	32,14	57		Belum tercapai	100
156	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0		Belum tercapai	100
157	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	0	Belum tercapai	2
158	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4		Belum tercapai	4
159	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan	1	2	6	Melampaui	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
	formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan					
160	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,7	1,77	1.72	Melampaui	2,01
161	Ratio Akseptor KB	69,95	69,94	65	Melampaui	58,9
162	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69,95	66,37	71,15	Melampaui	58,9
163	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,21	1,07	0.59	Melampaui	12,4
164	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,73	17,7	11,38	Melampaui	12,4
165	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	37,07	34,24	37,68	Belum tercapai	39,14
166	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	42,96	50,66	71.15	Melampaui	37,4
167	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	82,3	83,15		Belum tercapai	80,06
168	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,76			Belum tercapai	85,53
169	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	81,52	82,15		Belum tercapai	81,45
170	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,09	9,09		Belum tercapai	18,18
171	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	445,45	445,45		Belum tercapai	437,3
172	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	Sesuai	100
173	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	0,85	0,88		Belum tercapai	1
174	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	Sesuai	100
175	Cakupan ketersediaan dan distribusialat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	109,87			Belum tercapai	100
176	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh	100	100	100	Sesuai	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
	tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
177	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	Sesuai	100
178	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	Sesuai	0
179	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	76,98	78,29		Belum tercapai	72,46
180	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	2,594	37,15		Belum tercapai	21,9
181	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19	20,8	22,03	Melampaui	21
182	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,43	0,041		Belum tercapai	0,0061
Perhubungan						
183	Jumlah arus penumpang angkutan umum	259.991	390518	269265	Sesuai	269.265
184	Rasio ijin trayek	0,000043	85	0,00011	Belum Tercapai	0,011
185	Jumlah uji angkutan umum	2.547	2757	3139	Belum Tercapai	4260
186	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	15	15	15	Sesuai	15
187	Persentase Layanan angkutan darat	0,117	0,0798611	0,122	Belum Tercapai	0,162
188	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	9,52	0,23125	5,591	Melampaui	0,52
189	Pemasangan Rambu -rambu	100	53.05.00	70,5	Melampaui	60,1
190	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,059	5.05%	0,63	Belum Tercapai	32,4
191	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	259,991	390518	346.142	Belum Tercapai	416.797
192	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	139,967	645603	130.817	Belum Tercapai	
193	jumlah Orang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	139,023	390518	346.142	Belum Tercapai	416.797

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
194	jumlah Barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	259,991	645603	130.817	Belum Tercapai	
Komunikasi dan Informatika						
195	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	91,83	89,51	85,16	Belum Tercapai	89,21
196	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	64,4	65,55	69,15	Belum Tercapai	72,8
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
197	Persentase Koperasiaktif	76,47	77,33	79,19	Melampaui	55,15
198	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	Melampaui	95,22
199	persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	Melampaui	96,15
200	Persentase Usaha Mikro dan kecil	98,01	99,91	99,64	Melampaui	99,05
Penanaman Modal						
201	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	46	85	78	Melampaui	35
202	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rp.567,487,53 5,350		1049645884 334 2974791374 751	Melampaui	500.000.0 00.000
203	Rasio daya serap tenaga Kerja	455,3	135,21	171.01	Belum Tercapai	180,01
204	kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	37,55	331,98	304,37		75.000.00 0.000
Kepemudaan dan Olahraga						
205	persentase wirausaha muda	60	46.43	35,71	Belum Tercapai	42,07
206	Cakupan pembinaan olahraga	8	74,07	100	Sesuai	100
207	Cakupan pelatih yang bersertifikat	26,14	0,5111111	0	Belum Tercapai	100
208	Cakupan pembinaan atlet muda	0	100	32,2	Melampaui	22,86
209	Jumlah atlet berprestasi	74	21	76	Melampaui	20
210	Jumlah prestasi olahraga	75	197	213	Melampaui	7
Statistik						
211	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada		Sesuai	ada
212	Buku "Kabupatendalam Angka"	ada	ada	ada	Sesuai	ada
213	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	Sesuai	ada
Persandian						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
214	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	Sesuai	100
Kebudayaan						
215	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	0	1	3	Melampaui	2
216	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	18	4	4	Sesuai	4
217	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	48	48	22	Belum Tercapai	80
218	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	29	4	4	Melampaui	3
Perpustakaan						
219	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	82	156.07.00	227,54	Melampaui	126
220	Koleksibuku yang tersedia di perpustakaan daerah	38,11	46.71	46,00	Melampaui	0,45
221	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,1	02.24	1,13	Melampaui	1,09
222	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	8,082	15.451	22527	Melampaui	1
223	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	13,931	23.673	23817	Melampaui	12.121
224	Jumlah pusta kawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	33	35	38	Belum tercapai	100
Kearsipan						
225	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	12,81	95.12.00	100	Melampaui	25,64
226	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	85	40	700	Melampaui	104
Layanan Urusan Pilihan						
Pariwisata						
227	Kunjungan wisata	123,3	93945	402836	Melampaui	25
228	Lama kunjungan wisata	3	3	3	Belum Tercapai	4
Pertanian						
229	Cakupan bina kelompok petani	11,47	12,44	58,26	Belum Tercapai	58,57
Perdagangan						
230	Ekspor Bersih Perdagangan	919,980,853,88	1,25E+09	1.313.160.356,70	Melampaui	800.000.000
231	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	38,34	59,17	68,07	Melampaui	17

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai ($<$) sesuai ($=$)melampaui ($>$)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
Perindustrian						
232	Cakupan bina kelompok pengrajin	20,08	6,1	7,02	Melampaui	6,08
Transmigrasi						
233	Persentase transmigrasi swakarsa					
Kelautan dan Perikanan						
234	Produksi perikanan	100	101,06	119,4	Melampaui	100
235	Konsumsiikan	100	100	100	Sesuai	100
236	Cakupan bina kelompok nelayan	16,79	26,66	29,41	Melampaui	14
237	Produksi perikanan kelompok nelayan	42,04	34,91	34,76	Belum Tercapai	42
238	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	88,33	85.24.00	86,12	Melampaui	1,28
239	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,001	1	0,001	Belum Tercapai	0,23
Penunjang Urusan						
Perencanaan Pembangunan						
240	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Sesuai	ada
241	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Sesuai	ada
242	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Sesuai	ada
243	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetap kandungan PERDA	Ada	Ada	Ada	Sesuai	ada
244	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	Ada	Sesuai	ada
245	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	99,57	99,56	98,73	Sesuai	ada
Keuangan						
246	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	Sesuai	WTP
247	Persentase SILPA	7,6	10,86	-40,35	Belum Tercapai	3
248	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	23,94	17,75	21,91	Melampaui	21
249	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	25,04	22,89	13,46	Belum Tercapai	15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN			Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	TARGET 2023
		2021	2022	2023		
250	Penetapan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai	60 hari
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
251	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	9 JP	7JP	11 JP	Sesuai	
252	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	7,49	5,08	6,14	Belum Tercapai	20,49
253	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	92,33%	119,85%	126,54%	Melampaui	24,74
254	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30 Orang	31 Orang	32 Orang	Belum Tercapai	35 Orang
255	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	854 Orang	944 Orang	937 Orang	Melampaui	700 Orang
256	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2574 Orang	2936 Orang	2826 Orang	Belum Tercapai	3450 Orang
Penelitian dan Pengembangan						
257	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	25			Belum Tercapai	50
258	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	24,4			Belum Tercapai	50
Pengawasan						
259	Persentase tindak lanjut temuan	82,64	89,63	90	Belum Tercapai	92
260	Persentase pelanggaran pegawai	0	0,0116	0	Sesuai	0
261	Jumlah temuan BPK	57	713	22	Belum Tercapai	20

Sumber data: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 (data diolah)

2.2.2 Capaian Kinerja Kunci Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.342 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PENDIDIKAN					
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	179	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	60.02%
2	Jumlah peserta didik PAUD(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7139	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	98.73
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	7139	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,75
4	Jumlah minimal Kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	-	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	31,81
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	736			
6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	475			
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan	157			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah				
8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	172			
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703			
10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703			
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35703			
12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16696			
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	175			
14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	294			
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2195			
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1001			
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	158			
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	33			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	516			
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	238			
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	768			
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	387			
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172			
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	51			
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0			
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0			
27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	172			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703			
29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16696			
30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35703			
31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16696			
32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	175			
33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	294			
34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2195			
35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1001			
36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	158			
37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	33			
38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	516			
39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	238			
40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	238			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	768			
42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172			
43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	51			
44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0			
45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0			
46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7			
47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3920			
48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3920			
49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0			
50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	14			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	14			
52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172			
53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KESEHATAN					
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	200/313.404=0,64
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2			86/313.404=0,27
3	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	8 Jenis barang/ Alat			Total TT = 286/313.404 =0,91
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4 Tenaga per Puskesmas	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	2/2 x100 =100
5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis Alat			
6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3 Tenaga per Puskesmas	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,73
7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis barang/Alat	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,96
8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3 Jenis tenaga	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,23
9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis barang/Alat	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,02

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3 Jenis tenaga	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Alat	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (usia produktif)	100
12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	7 Jenis tenaga	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,25
13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11 Jenis barang/Alat	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Jenis tenaga	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/Alat	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/Alat	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Jenis Tenaga			
19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/Alat			
20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga			
21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/Alat			
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Jenis Tenaga			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/Alat			
24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Jenis Tenaga			
25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis barang/Alat			
26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga (85) + 2 = (87) Untuk PKM Nuha dan Mangkutana masing masing tambahan 1 orang Apoteker			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEKERJAAN UMUM					
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, nerosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,58
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (m)	-	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	62,60%

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
				perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten /kota	Ada	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,98%
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	ada	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	90,82%
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/ kota	i.3020 m	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	810,271 KM
		ii.271 m	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	64%
		iii.-	9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
		iv.2 unit			
		vi.-			
		vii.32,70			
8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten /kota (ha)	Tidak ada			
9	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	Tidak ada			
10	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada			
11	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
12	Rencana Tata Pengaturan air dan tatapengairan/ Rencana Pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada			
13	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada			
14	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i.3020 m			
		ii.271 m			
		iii.-			
		iv.2 unit			
		v. -			
		vi.-			
		vii. 32,70 m			
15	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	67,44			
16	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	71,26			
17	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	72,41			
18	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dok			
19	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0			
20	Jumlah BUMD dan atauUPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1			
21	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
22	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada			
23	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	92.734 Rumah			
24	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	360 Rumah			
25	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	93.094 rumah			
26	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	2777 Rumah			
27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	2777 Rumah			
28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	360 Rumah			
29	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	96,98%			
30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	4,56%			
31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100%			
32	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	96,98			
33	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	20%			
34	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	4,20%			
35	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%			
36	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	4,56%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
37	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	155%			
38	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	333%			
39	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada			
40	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung	1 DOK			
41	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada			
42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada			
43	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	8 gedung terbangun, 4 gedung dimanfaatkan 3 gedung masih tahap lanjutan			
44	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2 gedung			
45	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2229,87 Km			
46	Panjang jalan yang dibangun	56,902 Km			
47	Panjang jembatan yg dibangun	24,066 KM			
48	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	56,902 Km			
	Aspal	24,066 KM			
	Beton	2,923 Km			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	Kerikil	29,912 Km			
49	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	5,50 M			
50	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	15,513 Km			
51	Panjang jembatan yang direhabilitasi	810,271 KM			
52	Panjang jalan yang dipelihara	15,513 Km			
53	Panjang jembatan yang dipelihara	87,00 M			
54	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3 Kegiatan			
55	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	247 Orang			
56	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	237 orang			
57	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir	1 SK			
58	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	764 potensi pasar APBD			
59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	92 potensi pasar APBN			
60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1 Kegiatan			
61	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang	856 paket			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
62	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1 informasi personil			
63	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/ kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	3 kegiatan			
64	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	237 orang			
65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	237 orang			
66	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	28 badan usaha			
67	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada			
68	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan Ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 Hasil pengawasan			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
69	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100% tanpa kecelakaan konstruksi			
70	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 hasil pengawasan			
71	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	323 badan usaha			
72	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada			
73	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yg terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	168 Badan usaha			
74	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	28 Badan usaha			
75	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada			
76	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 jumlah pengawasan			
77	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Kecelakaan			
78	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	315 jumlah pengawasan			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	87	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	5	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	5	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	2,81%
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	5	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,94%
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	2,65%
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-			
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-			
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	5			
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0			
10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2			
11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah	-			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-			
13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1.230			
14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-			
15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-			
16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	51,9			
17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-			
18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,67			
19	Jumlah rumah di kab/kota	98.614			
20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1701			
21	Jumlah rumah tidak layak huni	7.134			
22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	-			
23	Rasio rumah dan KK	0,001519			
24	Jumlah rumah pembangunan baru	-			
25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1728			
26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-			
27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-			
28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-			
29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-			
31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-			
32	Jumlah pengembang yang teregistrasi	-			
33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM Dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	378 kasus	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	128 orang	2	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	32	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,46%
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 orang	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	20 SOP	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	37,58	6	Persentase pelayanan penyelamatan evakuasi kebakaran dan korban	75,36%
7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.	12,25 menit
8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	91,46%			
9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%			
10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,03%			
12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,08%			
13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%			
14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%			
15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%			
16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%			
17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%			
18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%			
19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	192 kali			
20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	9 posko di kecmtan + 1(kantor dinas damkar dan penyelamatan			
21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/ desa	Tidak ada			
23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	ada			
24	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 orang			
25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah binaan satuan relawan thun 2023 sebanayk 11 desa dengan jumlah personal binaan sebanyak 55 orang			
26	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	sebanyak 3 jenis kegiatan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN SOSIAL					
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	88 orang	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	100

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
				setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0			
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	88 orang			
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit			
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	50 orang			
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0			
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50 orang			
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	96 orang			
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0			
11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0			
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	30 orang			
13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0			
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	60 orang			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	5 orang			
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 kali			
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	11 orang			
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	30 orang			
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	30 orang			
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	30 orang			
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	30 orang			
22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	327 orang			
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0 orang			
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 orang			
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	74 orang			
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0 orang			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
27	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	60 orang			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN TENAGA KERJA					
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25,00%
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	150	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	RP 190.940.307
4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	33,33%	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5,40%
5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	40%	5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	29,01%
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16,12%			
7	Persentase LPK yang terakreditasi	28,57%			
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%			
9	Jumlah penganggur yang dilatih	306 orang			
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	60,78%			
11	Persentase penyerapan lulusan	37,63%			
12	Lulusan bersertifikat kompetensi	100%			
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1 pelatihan			
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	62,67%			
16	Data tingkat produktivitas total	7,44			
17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	60%			
18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	26.08%			
19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	33 SP/SB &1 SP/SB/di luar perusahaan			
20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	140,90%			
21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%			
22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	14%			
23	Jumlah mogok kerja	1			
24	Jumlah penutupan perusahaan	0			
25	Jumlah perselisihan kepentingan	3			
26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0			
27	Jumlah perselisihan PHK	10			
28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	48			
29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3 kasus			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS Tripartit			
31	Persentase perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	36,67%			
32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	116 loker			
33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5732 orang			
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3 BKK			
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	0			
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 Orang			
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	7 LPTKS			
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	8103			
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0			
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	7 ORNG			
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7 Orang			
42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	53 orang			
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0			
45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dan PERLINDUNGAN ANAK					
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	41 SKPD	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	40,3396284
2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	240 KEGIATAN	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03%
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,51%
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 unit			
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%			
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0			
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)	1 unit			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	32 lembaga			
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	300 orang			
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	12 lembaga			
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga			
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program			
13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 unit			
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PANGAN					
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2 desa		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	12,65% ¹
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	5 gapoktan			
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-			
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	13 kelompok			
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	8 desa			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
6	Tertanganinya kerawanan pangan	ada			
7	Tersalurkannya adangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-			
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	15 sampel			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERTANAHAN					
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Tidak ada
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	88,16%
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak ada	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%
4	Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada	4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak ada	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak ada
			6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap :	66,25	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	80,09

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,97	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	70,56%
	b. Indeks tutupan hutan (ITH)	74,46	3		0
	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)				
2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	70,56%			
3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	100%			
4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	11,11%			
5	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 1 Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2.Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	0			
6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0			
7	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
8	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Penerbitan Akta Perkawinan	100%	1	Perekaman KTP-el	98,21%
2	Penerbitan akta perceraian	100%	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	52,79%
3	Penerbitan akta kematian	100%	3	Kepemilikan akta kelahiran	97,58%
4	Penyajian data kependudukan	100%	4	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	80%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	38 desa	1	Persentase peningkatan status desa mandiri	35,29%
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100%	2	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	74%	3	Persentase peningkatan status desa mandiri	35,29%
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	26%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN STATISTIK					

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	30	2	Persentase OPD yang Menggunakan Data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	6			
4	Jumlah survey statistik sektoral yang endapat rekomendasi BPS	1			
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1			
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	77%			
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	37%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,31%
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,5 tahun	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,15%
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30,60%	3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,38%
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	88,16%			
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	159 terdiri dari 127 ppkb,11 kecamatan dan 21 faskes			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%			
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,84%			
8	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	ada			
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	71,17			
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	62,64			
11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	90,59%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,56%	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,56%
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,56%	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	100%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
5	sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yg sesuai standar	100%			
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%			
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70%			
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95%			
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	66%			
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0			
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%			
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%			
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	93%			
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	93%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi Inovasi yang mendukung smart city	76%			
16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%			
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%			
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	140%			
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	72,40%			
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	130%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERHUBUNGAN					
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	1	Rasio konektivitas Kabupaten Kota	0,58
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	104,79%	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,73
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%			
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	20 Orang
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50 OKP
3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	26 org
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	20 OKP			
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0			
6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7 Even			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 2daerah kabupaten/kota	4,61%	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	32,94%
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	0	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,49%
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,39%			
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,29%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8.67%			
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	0,23%			
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0			
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	0,57%			
9	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,35%			
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,57%			
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,15%			
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,39%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3,46%			
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,49%			
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,47%			
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,28%			
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	3,86%			
18	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3,43%			
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,57%			
20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1.99%			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PENANAMAN MODAL					
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	ada	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-1,653478
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tdk ada			
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tdk ada			
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tdk ada			
5	Kegiatan pameran penanaman modal	4 kali			
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal				

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	28 kontruksi			
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	11.261 izin			
9	Laporan realisasi penanaman modal	4.024.437.259.150			
10	Pembinaan aparaturnya penanaman modal tingkat kabupaten/kota				
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	298 usaha			
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	2 dokumen data			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERSANDIAN					
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal ibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	57%
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	95,45%			
3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	95,45%			
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100% (2 titik)			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KEBUDAYAAN					

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	24	1	Terlestarikannya cagar budaya	27,27
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	15			
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15			
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	24			
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	12			
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	4			
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-			
8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-			
9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-			
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-			
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses	-			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
	masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.				
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-			
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1			
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-			
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1			
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-			
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-			
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-			
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PERPUSTAKAAN					
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,7145	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,43
2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	47,50%	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,37
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0014			
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	23%			
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	231 kali			
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada			
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak ada			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Tidak ada			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN KEARSIPAN					
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,46%
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	110.9%
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%			
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1,85%			
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.000 (80 box)			
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0			
7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah ecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	4641			
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yg sesuai NSPK	0			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang inyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0			
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	13 berkas			
URUSAN PILIHAN					
URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN					
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	226 RTP	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	119,46%
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	75%			
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	121 rekomendasi			
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1.059 orang kelompok			
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	75.640 ekor			
URUSAN PILIHAN					
URUSAN PARIWISATA					
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	61 obyek	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	47%

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	52	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	35,07%
		(41 gasebo)	3	Tingkat Hunian akomodasi	843 kamar
		11 tolier	4	Kotribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,10%
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	5	Kotribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	47			
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 Even			
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0			
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0			
8	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	0			
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	93,33%			
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0			
URUSAN PILIHAN					
URUSAN PERTANIAN					
1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	393 Klp	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,26%
2	Prasaran pertanian yang digunakan	793 paket	2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1,28%
3	Penerbitan izin usaha pertanian	-			
4	Persentase prasarana yang digunakan	100%			
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	-			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	98.65			
URUSAN PILIHAN					
URUSAN PERDAGANGAN					
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : • Pusat perbelanjaan • Toko swalayan	100%	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%
			2	Persentase kinerja pupuk	82%
			3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,53%
2	Persentase penerbitan TDG	100%			
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	-			
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : • Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100%			
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	-			
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-			
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%			
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,97%			
9	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	27.489,551 ton			
10	Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	64,53%			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
11	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%			
URUSAN PILIHAN					
URUSAN PERINDUSTRIAN					
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8,81%
2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50%
3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yg diterbitkan per jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk di x100% Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon atau pemhajuan izin masuk di x	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
		100% Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan			
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota di SIINas per total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di Kab/kota	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	-
			6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	115%
URUSAN PILIHAN					
URUSAN TRANSMIGRASI					
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai			

NO	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja 2023	NO	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
		permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi			
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan permukiman berupa 1 kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga			
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 Kawasan (SKPC.SP.1. Koromolai)			

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD tahun 2023

2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan program periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Sejumlah 138 program penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dimana dari 168 indikator program terdapat 58 program melampaui target, 91 program sesuai dengan target, dan 19 program belum mencapai target. Berikut evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.343 Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
Urusan Pendidikan					
1	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	%	100	97,09	Sesuai
2	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%	100	82,67	Belum Tercapai
3	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(Paud)	%	100	56,62	Belum Tercapai
4	Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	100	93,94	Sesuai
Urusan Kesehatan					
Dinas Kesehatan					
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	97,43	Sesuai
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	81,66	100	Melampaui
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	%	70,01	70,01	Sesuai
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100	100	Sesuai
Rsud I Lagaligo					
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	%	24,5	30	Melampaui
9					
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	%	8,84	12,69	Melampaui

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
		%	47,28	49,09	Melampaui
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	60,18	62,5	Melampaui
12	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	%	54,16	0	Belum Tercapai
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	%	0,86	4,56	Melampaui
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	%	85,3	91,76	Melampaui
15	Program Penataan Bangunan Gedung	%	91,57	90,82	Sesuai
		%	100	142,86	Melampaui
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	%	0,26	0,29	Melampaui
17	Program Penyelenggaraan Jalan	%	42,94	29,82	Belum Tercapai
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	%	100	100	Sesuai
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	49,24	39,94	Belum Tercapai
Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman					
20	Program Pengembangan Perumahan	%	100	100	Sesuai
		%	100	100	Sesuai
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	95	95	Sesuai
22	Program Kawasan Permukiman	%	18,94	18,59	Sesuai
		%	18,94	2,71	Belum Tercapai
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	%	70,87	79,53	Melampaui
Urusan Sosial					
24	Program Pemberdayaan Sosial	%	43,93	43,78	Sesuai
25	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	Sesuai
26	Program Rehabilitasi Sosial	%	100	100	Sesuai
27	Program Perlindungan Dan Jaminansosial	%	100	100	Sesuai
28	Program Penanganan Bencana	%	100	100	Sesuai
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat					
29	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	%	100	91,46	Sesuai
		%	100	100	Sesuai
		%	100	100	Sesuai
30	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100	100	Sesuai
		%	100	100	Sesuai
		%	100	100	Sesuai
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	%	17,19	34,37	Melampaui
		%	100	100	Sesuai

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Urusan Tenaga Kerja					
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	75,6	87,74	Melampaui
33	Program Penempatan Tenaga Kerja	%	22,47	29,01	Melampaui
34	Program Hubungan Industrial	%	22,82	20	Sesuai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
35	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	100	100	Sesuai
36	Program Perlindungan Khusus Anak	%	0	0	Sesuai
37	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	74,69	75,25	Melampaui
			25,31	17,65	Belum Tercapai
38	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	%	100	100	Sesuai
39	Program Perlindungan Perempuan	%	81,82	99,25	Melampaui
40	Program Peningkatan kualitas keluarga	%	0,11	0,11	Sesuai
Urusan Pangan					
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	%	100	100	Sesuai
42	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa	2	8	Belum Tercapai
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	Sesuai
44	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	100	100	Sesuai
Urusan Pertanian					
45	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	92	Sesuai
46	Program Penatagunaan Tanah	%	39,85	60,72	Melampaui
47	Program Pengelolaan Tanah Kosong	%	100	100	Sesuai
46	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	Sesuai
47	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	%	100	100	Sesuai
Urusan Lingkungan Hidup					
48	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	1	1,01	Melampaui
49	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	%	100	100	Sesuai
50	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	%	100	100	Sesuai
51	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	%	50	40	Sesuai

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
52	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	MHA	3	0	Belum Tercapai
53	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	100	Sesuai
54	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	50	100	Melampaui
55	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	Sesuai
56	Program Pengelolaan Persampahan	%	70	70,56	Melampaui
Urusan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil					
57	Program Pendaftaran Penduduk	%	99,85	98,21	Sesuai
58	Program Pencatatan Sipil	%	97,05	99,03	Melampaui
59	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	50	60	Melampaui
60	Program Pengelolaan Propil Kependudukan	%	100	100	Sesuai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa					
61	Program Penataan Desa	%	75	87,32	Melampaui
62	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	%	65	80,65	Melampaui
63	Program Administrasi Pemerintahan Desa	%	75	80	Melampaui
Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana					
64	Program Pengendalian Penduduk	Anak	2,01	1,72	Melampaui
		%	58,9	71,15	Melampaui
65	Program Pembinaan Keluarga Berencana	%	58,9	71,15	Melampaui
		%	26,76	35,41	Melampaui
		%	12,4	11,37	Sesuai
		%	39,14	33,84	Sesuai
66	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Nilai	21	22,5	Melampaui
Urusan Perhubungan					
67	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LlaJ	%	94,41	104,78	Melampaui
		%	61,12	61,12	Sesuai
68	Program Pengelolaan Pelayaran	%	43,75	43,74	Sesuai
		%	31,98	26,87	Belum Tercapai
Urusan Komunikasi & Informatika					
69	Program Aplikasi Informatika	%	100	95	Sesuai
70	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	%	100	95	Sesuai
71	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	90	100	Melampaui
Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah					
72	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	%	32,63	34,94	Melampaui

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
73	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	%	33,8	33,82	Sesuai
74	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	%	4,9	5	Melampaui
75	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	%	12,18	13,43	Melampaui
76	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkh)	%	45	45,57	Melampaui
77	Program Pengembangan Umkm	%	3,89	4,12	Melampaui
Urusan Penanaman Modal					
78	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Angka	40	40	Sesuai
79	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	3,3	4,02	Melampaui
80	Program Pelayanan Penanaman Modal	%	75	94,29	Melampaui
81	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	80	84,22	Melampaui
82	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Angka	1	1	Sesuai
Urusan Kepemudaan & Olahraga					
83	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	37,22	38	Melampaui
84	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	71,43	72,2	Melampaui
85	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	93	93	Sesuai
Urusan Statistik					
86	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	%	100	100	Sesuai
Urusan Kebudayaan					
87	Program Pengembangan Kebudayaan	%	80	80	Sesuai
88	Program Pembinaan Sejarah	%	100	100	Sesuai
89	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	100	100	Sesuai
90	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	100	Sesuai
Urusan Perpustakaan					
91	Program Pembinaan Perpustakaan	%	100	100	Sesuai
Urusan Kearsipan					
92	Program Pengelolaan Arsip	%	100	100	Sesuai
93	Program Perizinan Penggunaan Arsip	%	25	25	Sesuai
94	Program Perlindungan Penyelamatan Arsip	%	100	100	Sesuai
Urusan Pilihan					
Urusan Kelautan & Perikanan					
95	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ton	10.216,00	10.373,00	Melampaui
96	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Ton	315.710,00	378.996,00	Melampaui
97	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	%	94	95	Melampaui

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
98	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	335	564,46	Melampaui
Urusan Pariwisata					
99	Program Pemasaran Pariwisata	%	81,82	81,82	Sesuai
100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	36,96	38,33	Melampaui
101	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	29,51	78,69	Melampaui
Urusan Pertanian					
102	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ekor Unggas	949.529,00	421.270,00	Belum Tercapai
		Ton Sawit	11,95	16,55	Melampaui
		% Sarana Pertanian	100	97,22	Sesuai
		Ton Jagung	6,51	5,22	Belum Tercapai
		Ton Padi	7,13	6,70	Belum Tercapai
		Ton Lada	0,97	0,74	Belum Tercapai
		Ekor Ternak	28.462,00	12.339,00	Belum Tercapai
		Ton Kakao	0,82	0,56	Belum Tercapai
		Ekor Ternak Besar	24.109,00	18.298,00	Belum Tercapai
103	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	Sesuai
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	99,46	Sesuai
105	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100	99,46	Sesuai
		%	1,4	1,28	Sesuai
106	Program Penyuluhan Pertanian	%	58,57	23,97	Belum Tercapai
		%	100	100	Sesuai
Urusan Perdagangan					
107	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	8	2,76	Melampaui
108	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	%	5	3,81	Belum Tercapai
109	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	10	9,68	Sesuai
110	Program Pengembangan Ekspor	%	15	16,06	Melampaui
Urusan Perindustrian					
111	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dok	1	1	Sesuai

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
112	Program Pengelolaan sistem informasi industri Nasional	%	5	6,86	Melampaui
Urusan Transmigrasi					
113	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Ha	30	30	Sesuai
114	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	%	100	100	Sesuai
115	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	100	100	Sesuai
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
Urusan Administrasi Pemerintahan					
Sekretariat Daerah					
116	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	Sesuai
117	Program Perekonomian Dan Pembangunan	%	85	105	Melampaui
Sekretariat DPRD					
118	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	%	90	81,21	Sesuai
Urusan Keuangan					
Badan Keuangan & Aset Daerah					
119	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	%	96,7	99,58	Melampaui
120	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	91	91	Sesuai
121	Program Pengelolaan Pendapatan	%	97,5	100,36	Melampaui
Urusan Perencanaan					
Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah					
122	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100	Sesuai
123	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	Sesuai
		%	100	98,67	Sesuai
Urusan Penelitian & Pengembangan					
124	Program Pengembangan Dan Penelitian	%	20,51	29,82	Melampaui
		%	100	100	Sesuai
Urusan Pengawasan					
Inspektorat					
125	Program Penyelenggaraan Pengawasan	%	95	86,19	Sesuai
126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	%	95	98,06	Melampaui
Urusan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan					
127	Program Kepegawaian Daerah	%	97	95,37	Sesuai
128	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	30	39,82	Melampaui
Kecamatan					
129	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100	38,05	Belum Tercapai

No.	Program	Satuan	Tahun 2023		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	98,8	Sesuai
131	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	92,97	Sesuai
132	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	95,07	Sesuai
133	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	93,92	Sesuai
Kesatuan Bangsa					
134	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	95	100	Sesuai
135	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	Sesuai
136	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	100	Sesuai
137	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	106	Melampaui
138	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	Sesuai

2.2.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Luwu Timur diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Kabupaten Luwu Timur. Adapun indikator SPM untuk tahun 2022 dan 2023 dari 29 (dua puluh sembilan) indikator, terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator yang sesuai dan 1 (satu) indikator yang belum tercapai.

Tabel 2.7.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022-2023

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2022	2023	
	PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar					
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	%	97,09	63,87%	Belum Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan					
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	100	%	93,94	98,68%	Sesuai

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2022	2023	
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
3	Pendidikan Anak Usia Dini					
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	%	56,62	100%	Sesuai
KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	%	92,81	95,73	Sesuai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	%	99,9	99,96	Sesuai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	98,21	98,23	Sesuai
4	Pelayanan Kesehatan Balita					
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	93,34	92,02	Sesuai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	%	95,74	100	Sesuai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	67,15	100	Sesuai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	%	80,29	83,25	Sesuai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	65,56	100	Sesuai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus					
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	Sesuai
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	64,95	100	Sesuai

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2022	2023	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB					
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayana TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	Sesuai
12	Pelayanan Kesehatan Orang denga Resiko Teninfeksi HIV					
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	Sesuai
PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum					
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	100	%	37,14	93,54	Sesuai
	1). Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	%	37,14	93,2	
	2). Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	%	60,9	100	
2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestic					
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	100	%	0	100	Sesuai
	1.Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	%	0	100	
	2. Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses aman	100	%	8,03	100	
PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten					
2	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100	100	Sesuai
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah					
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	%	100	100	Sesuai
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	100	100%	Sesuai
2	Pelayanran informasi rawan bencana					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	92,16	91,46%	Sesuai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	100	100%	Sesuai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	100	100%	Sesuai
5	Pelavanan Penvelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2022	2023	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	100	100%	Sesuai
SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.65%	100%	Sesuai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.32%	100%	Sesuai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.65%	98%	Sesuai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	99.96%	100%	Sesuai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten					
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	93,58%	100,00%	Sesuai

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD tahun 2023

2.2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan kabupaten. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.344 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0,31875		Belum Tercapai	06.44	RPJMD
2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	133%	100.78%	Melampaui	98,01	Dinas Kesehatan
3	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100	100	Sesuai	100	Dinas transnaker
4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			Belum Tercapai	30	Dinas Sosial & P3A
5	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.			Belum Tercapai	7,5	Dinas Sosial & P3A
6	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99.90	99,96%	Belum Tercapai	93,5	Dinas Kesehatan
7	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94.05.00	84,35	Belum Tercapai	85	Dinas Kesehatan
8	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	66.37.00	71,15	Belum Tercapai	72,49	DP2KB
9	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	60,67	61,2	Belum Tercapai	62,5	dinas PU

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
10	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	98,06	98,48	Melampaui	62,5	dinas PU
11	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	99.65	94,54	Belum Tercapai	106	dinas pendidikan
12	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	89.64	84,73	Belum Tercapai	100,14	dinas pendidikan
13	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	94.83	97,58	Melampaui	91,76	disdukcapil
14	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.			Belum Tercapai	39,21	Perkintam/Dishub
15	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	41,49	46,02		PM	BPBD
16	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	4	4	Sesuai	4	BPBD
17	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		176,14	Melampaui	202	BPBD
18	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1,722,735,000	5.033.184.000,00		PM	BPBD
19	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	2	Sesuai	2	BPBD
20	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	0,185416667	5,4	Belum Tercapai	0,125	dinkes

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
21	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	03.22	4,2	Melampaui	6,5	Dinas Kesehatan
22	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	03.28	1,6	Melampaui	7,5	Dinas Kesehatan
23	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	01.09	1,9	Melampaui	2,1	Dinas Kesehatan
24	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	04.34	5,4	Melampaui	11	Dinas Kesehatan
25	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	73.38.00	72,3	Melampaui	67	Dinas Kesehatan
26	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	133,31/10 0.000 KH	101,85 Per 100.000 KH	Melampaui	108,14	Dinas Kesehatan
27	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	100 %	Melampaui	94	Dinas Kesehatan
28	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	99.90	99.96&	Melampaui	93,5	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
29	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,52/1000 KH	2,03 Per 1000 KH	Belum Tercapai	0,052777778	Dinas Kesehatan
30	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	6,86/1000 KH	11,41 Per 1000 KH	Belum Tercapai	5,22	Dinas Kesehatan
31	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	10,28/1000 KH	13,4 Per 1000 KH	Belum Tercapai	0,35	Dinas Kesehatan
32	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	94.05.00	100,62	Melampaui	85	Dinas Kesehatan
33	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	00.01	1	Belum Tercapai	0,01	Dinas Kesehatan
34	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	409	431	Belum Tercapai	157,03	Dinas Kesehatan
35	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	< 1	<1	Sesuai	<1	Dinas Kesehatan
36	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	11	11	Sesuai	11	Dinas Kesehatan
37	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100	100	Sesuai	100	Dinas Kesehatan
38	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0	Belum Tercapai	19	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
39	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0	Belum Tercapai	1	Dinas Kesehatan
40	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	1	1	Sesuai	1	Dinas Kesehatan
41	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	04.59	05.24	Melampaui	5,4	Dinas Kesehatan
42	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	65.56.00	26,7	Melampaui	27	Dinas Kesehatan
43	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	04.05	2,85	Melampaui	17	Dinas Kesehatan
44	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0	0	Sesuai	0	Dinas Kesehatan
45	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	tidak tersedia data	tidak tersedia data		0	Dinas Kesehatan
46	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	66.37.00	71.15	Belum Tercapai	72,49	DP2KB
47	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	34.24.00	33.84%	Belum Tercapai	39,14	DP2KB
48	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	35.41.00	30.60%	Melampaui	26,76	DP2KB

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
49	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	0,13819444	2.31%	Melampaui	2,53	DP2KB
50	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95.48.00	96,26	Belum Tercapai	97	Dinas Kesehatan
51	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	90	Belum Tercapai	100	Dinas Kesehatan
52	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	78	0,392	Melampaui	0,167361111	Dinas Kesehatan
53	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	100%	Melampaui	96,31	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
54	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	76.42	73,06	Belum Tercapai	85,94	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
55	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	59.28	58,26	Belum Tercapai	84,05	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
56	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	103.04	98,87	Belum Tercapai	114,57	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
57	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	90.23	92,78	Belum Tercapai	139,38	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
	Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
58	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,92	8,93	Belum Tercapai	9,4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
59	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	56.62	60,45	Belum Tercapai	68,4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
60	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	RAPM SD : 99,65, RAPM SMP = 89,64	RAPM SD : 97,08, RAPM SMP = 91,81	Belum Tercapai	RAPM SD : 100, RAPM SMP : 100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
61	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98.13.00			97,09	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
62	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	PAMH 15 - 24 : 99.70 PAMH 15 - 59 : 97.23			PAMH 15-24 : 99.55, PAMH 15-59 : 96.62	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
63	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air	PSDAF (a) : 99,55 PSDAF (b) : 93,3 PSDAF (c) : 93,3	PSDAF (a) : 99,55 PSDAF (b) : 93,3 PSDAF (c) : 93,3	Melampaui	PSDAF(a): 97.60, PSDAF(b): 53.69, PSDAF(c): 39.06, PSDAF	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
			minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	PSDAF (d) : 100%	PSDAF (d) : 100%		(d):1.25,PSDA F(f):95.16,PSD AF(g):79.30,PS DAF(h): 97.60	
64	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	TK : 15,27 SD : 39,68 SMP : 49,19	TK : 29,79 SD : 34,12 SMP : 34,41	Belum Tercapai	TK : 73.43,SD : 65.40,SMP : 67.57	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
65	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	5		Belum Tercapai	6	Dinsos
66	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Belum Tercapai	0,02	Dinsos
67	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	00.03		Belum Tercapai	25	Dinsos
68	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.			Belum Tercapai	0,01	Dinsos
69	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100		Belum Tercapai	100	Dinsos
70	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	10			0,296527778	Dinsos
71	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20.45			12,4	DP2KB

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
72	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	66.37.00			75	DP2KB
73	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	60,67	61,2	Belum Tercapai	62,5	Dinas PU
74	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	60,67	61,2	Belum Tercapai	62,5	Dinas PU
75	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.				74,01	Dinas PU
76	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	98,06	98,48	Melampaui	97,04	Dinas PU
77	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	80	80	Belum Tercapai	128	Dinas Kesehatan
78	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	127	128	Sesuai	128	Dinas Kesehatan
79	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	1	1	Sesuai	1	Dinas PU
80	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	360	360	Melampaui	0.1199359	Dinas PU
81	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan	1	1	Sesuai	1	Dinas PU

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
			pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).					
82	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	0		0.1199359	Dinas PU
83	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	0,86	1,25			DLH
84	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	0,86	1,25			DLH
85	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1,99	9,66	Melampaui	1,46	Bappelitbangda
86	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	92.98	99,49	Melampaui	72	Bappelitbangda
87	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	35,76	35,71	Melampaui	42,45	Dinas Transnaker
88	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	20.164	21.444	Melampaui	20,08	Dinas Transnaker

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
89	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4,48	5,42	Belum Tercapai	4,17	Dinas Transnaker
90	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.			Belum Tercapai	PM	Dinas Pariwisata
91	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		47	Melampaui	25	Dinas Pariwisata
92	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	300.962	402.789	Melampaui	4	Dinas Pariwisata
93	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.				1,18	Dinas Pariwisata
94	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	0,7125			PM	DPMPTSP

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
95	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	5			PM	DPMPTSP
96	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	76,55	79,58	Melampaui	PM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
97	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	8	8	Sesuai	8	dishub
98	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3,37	3,1	Melampaui	0,1875	disdagkop
99	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	11,07	-0,68	Belum Tercapai	0,225694444	disdagkop
100	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	19,02	17,25	Melampaui	0,690972222	disdagkop
101	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	1,49	22,45	Belum Tercapai	30,31	disdagkop

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
102	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	15	0,04	Belum Tercapai	22,01	disdagkop
103	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	PM			PM	kominfo
104	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	89.51.00	85,16		PM	kominfo
105	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	65.55.00			PM	kominfo
106	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,27361111	0,26458333	Belum Tercapai	0,181944444	Bapelitbangda
107	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	0,31875	6,44	Sesuai	6,44	Bapelitbangda
108	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	0% atau 0 (nol) desa	0% atau 0 (nol) desa	Melampaui	4	DPMD
109	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	8,06% atau 10 desa mandiri	19,2% atau 24 desa mandiri	Melampaui	5	DPMD
110	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100	100	Sesuai	100	dinas transnaker

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
111	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	95,27			88,7	tarkim
112	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	41,49	46,02		PM	BPBD
113	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	176,14	152,28	Melampaui	202	BPBD
114	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	0		0	BPBD
115	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1,722,735,000	5.033.184.000,00		PM	BPBD
116	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	71,52	70,56		PM	DLH
117	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	2	Sesuai	2	BPBD
118	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	3,734.44				DLH
119	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	5,640.72	5679,72	Belum Tercapai	4	DLH
120	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	1	Sesuai	1	DLH
121	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	2	Sesuai	2	BPBD

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
122	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,65	0,97		PM	BPBD
123	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0			PM	Polres
124	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0			0	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
125	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				PM	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
126	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.				PM	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
127	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				PM	BPS
128	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.				96,5	BKAD
129	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP	Sesuai	WTP	BKAD
130	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				76,85(BB)	Sekretariat Daerah
131	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.				75	Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Target 20223	OPD
	Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
13 2	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai RB Tahun 2022: 57,68%			100	Sekretariat Daerah
13 3	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				100	Sekretariat Daerah
13 4	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	10			0,296527778	Dinsos
13 5	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	12.19			25	Dinsos

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
	Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
136	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100	99,03	Melampaui	97,05	Disdukcapil
137	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Na	na		91,76	Disdukcapil
138	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	94.83	97,58	Melampaui	91,76	Disdukcapil
139	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0			5	Kominfo

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
140	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1.20	1,29		PM	Bapenda
141	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,71	0,8		PM	Bapenda
142	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.					Bapenda
143	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	PM				Kominfo
144	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	PM			PM	Kominfo
145	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	65.55.00			PM	Kominfo
146	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.					Kominfo
147	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.				90	BPS
148	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.				88	BPS
149	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).				6	BPS

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI 2022	REALISASI 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	Target 20223	OPD
150	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.				65	Bapelitbangda
151	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Ada	Sesuai	Ada	Disdukcapil
152	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.				11,55	BPS
153	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).				82	BPS

Sumber Data: Hasil Evaluasi RKPD TAHUN 2023

2.3 Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan program periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Sejumlah 138 program dengan 168 indikator penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan tahun 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Sesuai dengan Hasil Analisis Terhadap Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dari 168 total indikator terdapat 58 indikator **melampaui** dari target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 90 indikator yang telah **sesuai** dengan target, sedangkan 20 indikator lainnya **belum mencapai** target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Evaluasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur,

1. Jenis pelayanan dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Dasar
- 2) Pendidikan Kesetaraan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini

2. Target Pencapaian SPM

Target capaian penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2023 :

- 1) Pendidikan Dasar target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 2) Pendidikan Kesetaraan target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini target capaian SPM 100 % Setiap Tahun

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pendidikan bersumber dari APBD dan APBN tahun 2023 sebesar Rp.119.436.143.293 dengan besaran Realisasi Anggaran sebanyak Rp.118.022.596.486 (98,82 %)

4. Permasalahan

- a. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
- b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD,
- c. Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dimana pada usia tersebut adalah usia pertumbuhan anak atau yang disebut Golden ages,
- d. Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata,
- e. Masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas walaupun secara rasio berdasarkan jumlah keseluruhan, jumlah guru dan siswa masih cukup baik dengan Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 1 : 22 dan SMP/MTs sebesar 1 : 27 dan;
- f. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum memadai,
- g. Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru) serta;
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menganalisis dan mengolah data pada satuan Pendidikan

5. Solusi

- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
- c. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemeratan guru pada satuan pendidikan,
- d. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
- e. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaraan,
- f. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,
- g. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
- h. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bidang urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency*)

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Kesehatan bersumber dari APBD (BOK) tahun 2023 sebesar Rp.17.711.778.772 dan realisasi sebesar Rp.16.690.363.201, (94,23%)

3. Permasalahan

- a. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak segera memeriksakan kehamilannya, serta adanya kehamilan pada usia dini
- b. Masih ada persalinan yang ditolong dirumah karena si ibu tidak mau melahirkan di fasilitas kesehatan.
- c. Adanya kematian neonatal yaitu sebanyak 54 kasus, ada beberapa neonatal yang tidak datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk control bayinya, serta ada beberapa bidan yang bidan desanya kurang aktif melakukan kunjungan rumah, ibu bayi pulang kampung atau pindah domisili sehingga tidak dipantau Kesehatan bayinya.
- d. Masih ada balita yang tidak berkunjung lagi ke posyandu jika sudah lengkap imunisasinya
- e. Kurangnya strip pemeriksaan kolesterol yang merupakan salah satu indikator pelayanan Kesehatan usia lanjut sesuai standar

4. Solusi

- a. Pencegahan perkawinan usia dini dan Peningkatan KIE tentang Kesehatan reproduksi pada remaja
- b. Meningkatkan KIE kepada ibu hamil agar melahirkan di fasilitas Kesehatan.
- c. Penyediaan sarana mobilitas untuk menjemput dan mengantarkan pulang ibu yang bersalin di puskesmas.
- d. Pendampingan 1000 HP, mulai dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun oleh bidan, jadi semua bidan harus ada ibu hamil/bayi yang didampingi.
- e. Pemberdayaan kader untuk menggerakkan masyarakat yang punya balita agar dibawa ke posyandu setiap bulannya.
- f. Bidan desa aktif melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.
- g. Pengadaan strip kolesterol sesuai jumlah warga lanjut usia

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut Target capaian SPM.

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar Rp.17.292.926.275,00 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan realisasi sebesar Rp Rp.16.553.438.155,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), persentase realisasi, sebanyak (95,72 %),

3. Permasalahan

- a. Dukungan Anggaran
- b. Dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
- d. Terdapat sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana
- e. Terdapat aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan

4. Solusi

- a. Dukungan anggaran perlu ditingkatkan
- b. Diperlukan tambahan personil pada bidang yang menangani SPM
- c. Diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
- d. Diperlukan penanganan terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,
- e. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut ;

- 1) Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 :

- 1) Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah, target capaian SPM 100% setiap tahun.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat bersumber dari APBD Tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 26.925.500, belanja modal tanah untuk Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp. 500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 146.078.000, Badan Keuangan dan Aset Daerah realisasi untuk Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Kepada Korban Bencana Kebakaran, Bencana Tanah Longsor dan Bencana Angin Kencang sebesar Rp.156.500.000 sesuai Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 187/F-04/V/Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 156.500.000 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar ke 123 Desa masing-masing Desa 10 Unit Total 1230 Unit dengan Alokasi Anggaran Rp. 15.000.000 Per Unit dengan Total Rp. 18.450.000.000

4. Permasalahan

- a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pendataan, sehingga identifikasi yang dilakukan masih bersifat makro.
- b. Belum tersedia basis data
- c. Tidak ada penetapan status bencana.
- d. Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana
- e. Data yang tersedia tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan inputansi data SPM bidang perumahan.
- f. Anggaran telah disiapkan, tapi tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status bencana.

5. Solusi

- a. Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi-lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
- b. Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana.

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

2. Target Pelayanan SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 yakni:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar **Rp.14.132.085.715** dan realisasi sebesar **Rp.13.521.314.121**

4. Permasalahan

1. Untuk pelayanan dasar dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara berdasarkan tabel diatas dihitung berdasarkan jumlah kasus penegakan perda/perkada yang dilaporkan dan ditangani selama Tahun 2023 dimana terdapat 853 kasus pelanggaran perda yang di laporkan dan semua kasus dapat ditangani. namun dari penegakan perda/perkada tersebut tidak ada warga Negara yang terkena dampak kerugian materil maupun pelayanan pengobatan akibat dari penegakan perda dan perkara sehingga capaian 100 Kendala, Permasalahan dan Solusi
2. Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk

- memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang
3. Dalam Penginputan capaian SPM juga masih terjadi perbedaan persepsi terkait indikator kinerja layanan SPM
 4. Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang,
 5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
 6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada,
 7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis,
 8. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas yang baru mandiri pada tahun 2022, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Dinas Satpol PP dan Damkar. Untuk itu kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan masih sangat terbatas, baik itu sarana prasarana, sumber daya manusia, dan jumlah anggaran
 9. Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat maka Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menempatkan personil di Kecamatan. Namun pelayanan ini tidak dapat maksimal dilakukan mengingat personil Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang PNS pelaksana Satpol PP selain itu, SDM Aparatur Satpol PP di Kecamatan masih terbatas bahkan sarana dan prasarana dikecamatan belum memadai
 10. Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana,
 11. Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat dan data base terkait jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana masih skala desa,
 12. Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah yang cukup luas, sehingga Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat maka diperlukan penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), dimana waktu tanggap/respon time akan jauh dari target karena pelayanan yang sangat jauh dan luas.

13. kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan yang masih sangat terbatas sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Damkar yang tugas pokok dan fungsi adalah urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan Dinas Damkar saat ini yang sangat diperlukan adalah mobil pemadam kebakaran yang masih sangat kurang, mobil suplay (tangki) serta alat pelindung diri (APD) untuk personal.

5. Solusi

1. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
2. Memaksimalkan penyebaran informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
3. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
4. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
5. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun,
6. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
7. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
8. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
9. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
10. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
11. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,
12. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
13. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada dirjen bina pembangunan daerah terkait indikator dan capaian kinerja SPM;
14. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
15. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,

16. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
17. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

2. Target SPM

Target capaian penerapan SPM urusan sosial tahun 2023:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti target capaian SPM 100% Setiap Tahun,
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Sosial bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 1,366,352,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,309,973,120,- (95,87%),

4. Permasalahan

- a. Belum adanya Rumah Singgah
- b. Belum dibentuknya TRC Ketelantaran
- c. Belum adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM
- d. Minimnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM

5. Solusi

- a. Melaksanakan pendataan PPKS Target SPM;
- b. Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2.3.3 Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Kabupaten Luwu Timur menentukan target 153 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di mana 36 indikator (23,53) melampaui target, 20 Indikator (13,07%) telah tercapai target, 45 Indikator (29,41%) belum tercapai target, dan 52 Indikator (33,99%) yang datanya tidak tersedia. Hal ini menunjukkan kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2023 masih memerlukan langkah-langkah strategis dalam mengungkap pencapaian indikator ini pada masing-masing OPD pengampu.

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 72 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 20 indikator melampaui target dan 8 indikator telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya di bawah target sebanyak 35 indikator dan data tidak tersedia sebanyak 9 indikator.

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 3 tujuan mencakup sebanyak 26 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 11 indikator melampaui target dan 3 indikator telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya di bawah target sebanyak 6 indikator dan data tidak tersedia sebanyak 6 indikator.

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 4 tujuan mencakup sebanyak 24 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 3 indikator melampaui target dan 7 indikator telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena di bawah target sebanyak 4 indikator dan data tidak tersedia sebanyak 10 indikator.

Pilar Pembangunan Kelembagaan dengan 2 tujuan mencakup sebanyak 31 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 2 indikator melampaui target dan 2 indikator telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena data tidak tersedia sebanyak 27 indikator.

Tabel 2.345 Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan Kab.Luwu Timur Tahun 2023

	Jumlah Indikator	Sesuai	%	Melampaui	%	Belum Tercapai	%	Data Tidak Tersedia	%
Pilar Sosial	72	8	11,11	20	27,78	35	48,61	9	12,5
Pilar Ekonomi	26	3	11,54	11	42,31	6	23,08	6	23,08
Pilar Lingkungan	24	7	29,17	3	12,50	4	16,67	10	41,67
Pilar Kelembagaan	31	2	6,45	2	6,45	0	0,00	27	87,10
	153	20	13,07	36	23,53	45	29,41	52	33,99

Sumber: Bappelitbangda Kab.Luwu Timur (Data diolah), 2023

2.3.4 Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2023

2.3.4.1 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

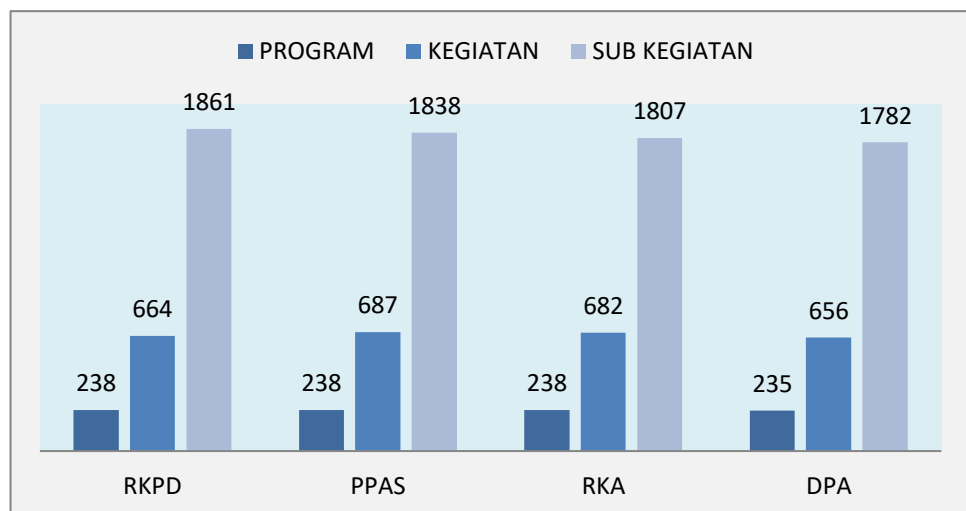
1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.3.4.2 Konsistensi Program dan Anggaran Antara RKPD dengan APBD Tahun 2023

Jumlah Program dalam RKPD sebanyak **238 Program** yang terdiri dari **664 Kegiatan** dan **1861 Sub Kegiatan**, sementara jumlah Program dalam APBD 2023 sebanyak **235 Program** yang terdiri dari **656 Kegiatan** dan **1782 Sub Kegiatan**. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan penggunaan program sebesar **3(tiga) program**, kegiatan sebesar **8 (delapan) Kegiatan** dan **Sub Kegiatan** sebesar **19 Sub Kegiatan** dari dokumen RKPD ke APBD Tahun Anggaran 2023. Nilai penurunan ini merupakan dampak *refocusing* program, kegiatan dan sub kegiatan pada seluruh OPD

Berikut disajikan konsistensi jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada grafik berikut:

Grafik..... Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023



Sumber: Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD, setelah diolah 2023

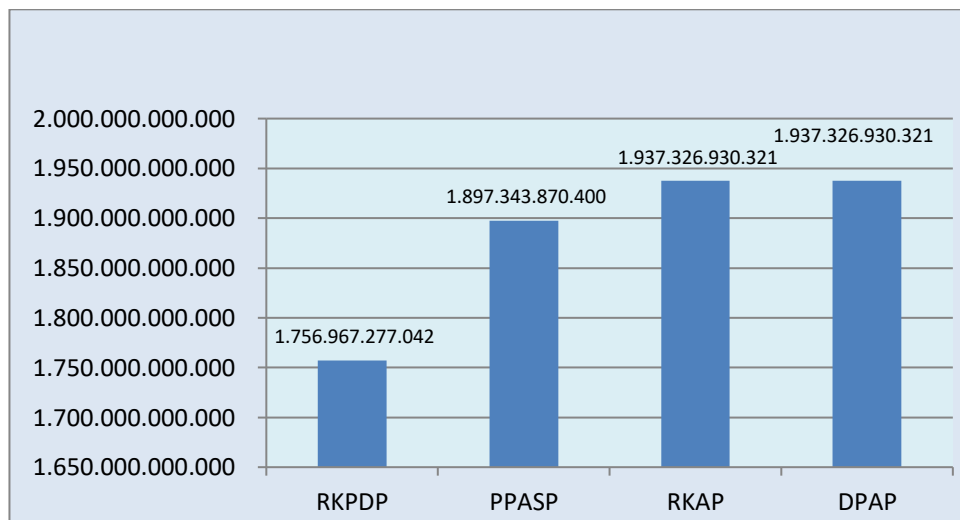
2.3.4.4 Konsistensi Anggaran Antara RKPD dengan APBD Tahun 2023

Jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD-P Tahun 2023 sebesar Rp1,756,967,277,042 sedangkan jumlah anggaran dalam APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp1.937.326.930.321,-. Dengan demikian, ada selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD-P Tahun 2023 dengan jumlah anggaran yang diakomodir ke dalam APBD-P Tahun 2023, yakni bertambah sebesar Rp. 180.359.653.279,00

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan belanja sebesar 10% pada APBD-P dari total anggaran yang direncanakan pada RKPD. Salah satu penyebab penambahan ini terjadi, yakni naiknya target pendapatan yang semula hanya Rp. 1,714,005,834,919,- menjadi Rp.1,776,608,283,423,- atau naik sebesar Rp. 62.602.448.504,- atau 3,6%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum ada keselarasan anggaran APBD-P Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Berikut disajikan konsistensi anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun 2023 seperti pada grafik berikut ini:

Grafik
Jumlah Anggaran Pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kebupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023



Sumber: Dokumen Perencanaan dan Penganggaran TA 2023, setelah di olah 2023

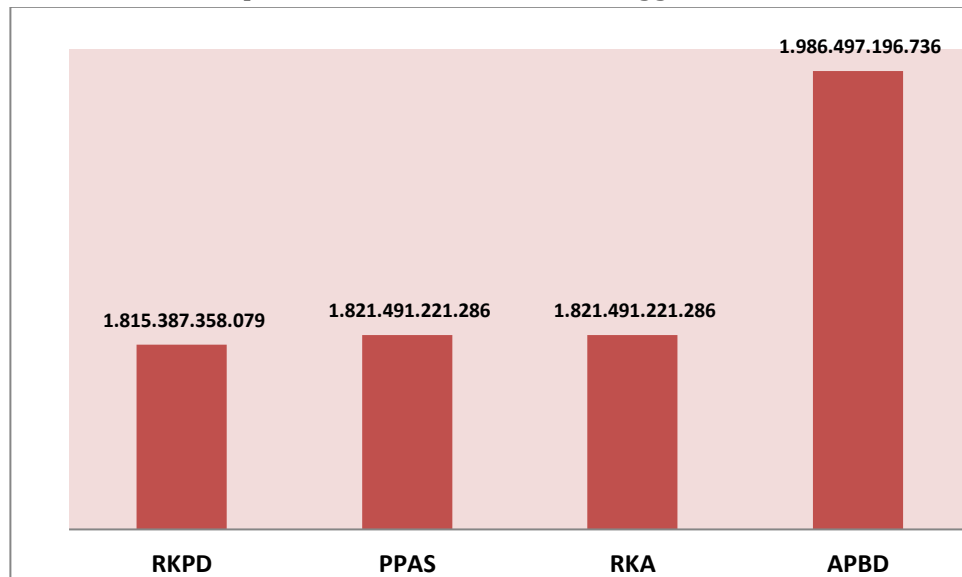
2.3.4.5 Konsistensi Anggaran Antara RKPD dengan APBD Tahun 2024

Jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp.1.815.387.358.079,- sedangkan jumlah anggaran dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1.986.497.196.736,-

Dengan demikian, ada selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2024 dengan jumlah anggaran yang diakomodir ke dalam APBD Tahun 2024, yakni bertambah sebesar Rp. 171.109.838.657,-

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan belanja sebesar 8,6% pada APBD dari total anggaran yang direncanakan pada RKPD.

Grafik
Jumlah Anggaran Pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Kebupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024



Sumber: Dokumen Perencanaan dan Penganggaran TA 2023, setelah di olah 2024

2.3.4.6 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Adapun komposisi program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.346 Tabel Keselarasan Program,Kegiatan,Sub Kegiatan RKPD & APBD 2024

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Deviasi RKPD dan APBD (RKPD-APBD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	2	10	10	70	74	0	0	-4	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	19	20	70	74	0	-1	-4	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	9	9	12	12	0	0	0	RSUD I LAGALIGO
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	26	26	86	86	0	0	0	PUPR
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	17	17	37	37	0	0	0	DISPERKINTAM
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	11	11	56	42	0	0	14	SATPOL PP
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	12	12	39	38	0	0	1	DAMKAR
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	2	2	13	12	53	51	0	1	2	BPBD

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Deviasi RKPD dan APBD (RKPD-APBD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	12	12	28	28	0	0	0	DINSOS
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	14	14	36	36	0	0	0	TRANSNAKER
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	5	8	8	9	9	0	0	0	DINSOS
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11	10	24	21	50	50	1	3	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							0	0	0	DISPERKINTAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	18	18	41	40	0	0	1	DLH
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	14	14	37	32	0	0	5	DUKCAPIL
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	11	11	40	40	0	0	0	DPMD
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	15	16	53	52	0	-1	1	KB

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Deviasi RKPD dan APBD (RKPD-APBD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	18	18	41	39	0	0	2	DISHUB
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	12	12	37	37	0	0	0	KOMINFO
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	16	16	40	40	0	0	0	DISDAKOPRINUM
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	14	14	38	34	0	0	4	DPMTSP
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7	7	20	20	47	47	0	0	0	DISPARMUDORA
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	2	2	0	0	0	KOMINFO
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	KOMINFO
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	5	5	6	6	0	0	0	PK
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	10	10	31	31	0	0	0	DPK
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	5	5	6	6	0	0	0	DPK
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	18	18	41	41	0	0	0	DISPARMUDORA
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7	7	20	20	47	47	0	0	0	DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Deviasi RKPD dan APBD (RKPD-APBD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11	10	24	21	50	50	1	3	0	DISPERKINTAM
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	6	6	10	10	0	0	0	DISDAKOPRINUM
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	5	5	0	0	0	DISDAKOPRINUM
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	3	3	8	8	0	0	0	TRANSNAKER
34	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	21	21	67	67	0	0	0	SETDA
35	SEKRETARIAT DPRD	2	2	18	18	56	55	0	0	1	SETWAN
36	PERENCANAAN	3	3	14	13	47	47	0	1	0	BAPELITBANGDA
37	KEUANGAN	3	3	15	13	64	57	0	2	7	BKAD
38	KEUANGAN	2	2	9	9	36	36	0	0	0	BAPENDA
39	KEPEGAWAIAN	2	2	12	12	44	44	0	0	0	BPKSDM
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	2	4	4	0	0	0	BPKSDM
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	4	4	7	7	0	0	0	BAPELITBANGDA
42	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	9	9	35	35	0	0	0	INSPEKTORAT
44	KECAMATAN BURAU	6	6	14	13	32	31	0	1	1	Kecamatan Burau
45	KECAMATAN WOTU	6	6	15	15	33	33	0	0	0	Kecamatan Wotu
46	KECAMATAN TOMONI	6	6	16	16	38	38	0	0	0	Kecamatan Tomoni
47	KECAMATAN MANGKUTANA	6	6	14	14	38	36	0	0	2	Kecamatan Mangkutana
48	KECAMATAN TOMONI TIMUR	6	6	15	15	35	35	0	0	0	Kecamatan Tomoni Timur
49	KECAMATAN KALAENA	6	6	15	15	40	33	0	0	7	Kecamatan Kalaena

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Deviasi RKPD dan APBD (RKPD-APBD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KECAMATAN ANGKONA	6	6	14	14	36	34	0	0	2	Kecamatan Angkona
51	KECAMATAN MALILI	6	6	16	16	35	34	0	0	1	Kecamatan Malili
52	KECAMATAN WASUPONDA	6	6	14	14	33	33	0	0	0	Kecamatan Wasuponda
53	KECAMATAN TOWUTI	6	6	14	14	34	34	0	0	0	Kecamatn Towuti
54	KECAMATAN NUHA	6	6	15	14	35	35	0	1	0	Kecamatan Nuha
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	13	13	35	35	0	0	0	KesbangPol
TOTAL		245	243	688	678	1911	1868	2	10	43	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada komposisi program terdapat deviasi 2 (dua) program antara jumlah program perangkat daerah yang terdapat dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2024 sebanyak 245 program, sementara jumlah program perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 243. Begitu pula pada komposisi jumlah kegiatan, dimana dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2024 sebanyak 688 kegiatan, sementara jumlah kegiatan perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 678, terjadi deviasi 10 (sepuluh) kegiatan. Pada komposisi sub kegiatan terjadi deviasi 43 kegiatan, dimana dalam RKPD/Renja OPD Tahun 2024 sebanyak 1911 sub kegiatan, sementara jumlah sub kegiatan perangkat daerah dalam APBD/DPA OPD sebanyak 1868 sub kegiatan. Secara umum faktor yang mempengaruhi deviasi adalah hasil dari pembahasan antara DPRD dan OPD yang melahirkan pergeseran dan atau perubahan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang sebelumnya sudah tercantum di dalam Rancangan KUA dan PPAS, dan itu berarti juga merubah besaran anggaran RKPD pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini terjadi karena usulan tersebut tidak dapat terakomodir dalam Musrenbang RKPD, akibat tidak adanya usulan tersebut di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD yang bersangkutan.

Dokumen RKPD mempunyai nilai sangat strategis dan penting, karena dokumen ini merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD hasil proses teknokratis. Selain itu, dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan untuk menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. RKPD merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara) untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

RKPD menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RAPBD yang dibuat oleh Kepala Daerah, DPRD dan SKPD sendiri dalam pembuatan kebijakan umum terkait rancangan anggaran di daerah. RKPD menjadi literatur utama dalam pembuatan anggaran dikarenakan di dalam dokumennya sudah memuat rencana kinerja selama satu tahun dari seluruh SKPD di level pemerintah daerah. RKPD membantu memberikan sumber informasi mengenai perkembangan capaian program yang sudah dilakukan oleh SKPD, mengetahui besaran serapan dana yang dikeluarkan oleh SKPD, mengetahui kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah dalam pembuatan skala prioritas kerja SKPD dan mengetahui setiap persoalan-persoalan yang sifatnya publiknes dan segera membutuhkan respon langsung dari

pemerintah daerah. Pelaksanaan RKPD dalam kurung waktu sampai dengan Triwulan I 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.347 Hasil Pelaksanaan RKPD TW I Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	APBD	ANGGARAN KAS TW I	REALISASI KEUANGAN	% KINERJA	KATEGORI	% KEUANGAN	KATEGORI	SISA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.940.933.725,00	150.111.364.637,50	56.768.375.025,00	15,22	SR	37,82	SR	316.172.558.700
2	Dinas Kesehatan	236.966.074.630,00	95.493.763.008,00	48.753.963.261,00	20,57	SR	51,05	R	188.212.111.369
3	RSUD I Lagaligo	174.829.865.153,00	46.274.842.078,00	26.007.268.961,00	14,88	SR	56,20	R	148.822.596.192
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.901.835.750,00	56.142.277.034,00	749.058.876,00	0,37	SR	1,33	SR	204.152.776.874
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.085.801.700,00	6.129.397.973,50	1.200.414.581,00	5,20	SR	19,58	SR	21.885.387.119
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.564.219.900,00	4.585.334.085,00	2.065.362.244,00	15,23	SR	45,04	SR	11.498.857.656
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.851.656.559,00	31.470.141.599,00	413.809.050,00	5,46	SR	6,56	SR	35.786.294.315
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.172.606.050,00	1.863.798.288,00	1.015.965.801,00	19,64	SR	54,51	R	4.156.640.249
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.691.385.828,00	3.093.663.317,00	1.657.351.205,00	19,07	SR	53,57	R	7.034.034.623
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.725.105.200,00	6.012.009.546,00	809.443.153,00	6,36	SR	13,46	SR	11.915.662.047
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.462.511.065,00	3.566.064.182,00	970.783.056,00	9,28	SR	27,22	SR	9.491.728.009
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.042.932.613,00	2.036.790.422,00	994.590.670,00	14,12	SR	48,83	SR	6.048.341.943

NO	OPD	APBD	ANGGARAN KAS TW I	REALISASI KEUANGAN	% KINERJ A	KATEGO RI	% KEUANGA N	KATEGO RI	SISA ANGGARAN
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.461.302.211,00	2.815.743.268,50	491.825.515,00	7,61	SR	17,47	SR	5.969.476.696
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.549.661.371,00	2.579.440.108,50	813.782.903,00	5,59	SR	31,55	SR	13.735.878.468
15	Dinas Perhubungan	18.636.939.064,00	4.434.968.670,00	2.290.301.440,00	12,29	SR	51,64	R	16.346.637.624
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.929.891.555,00	4.232.172.012,00	1.247.946.654,00	11,42	SR	29,49	SR	9.681.944.901
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.388.300.498,00	2.114.636.738,00	649.962.050,00	12,06	SR	30,74	SR	4.738.338.448
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.032.817.525,00	3.735.780.883,00	1.399.986.367,00	19,91	SR	37,48	SR	5.632.831.158
19	Dinas Perikanan	22.820.307.700,00	5.688.319.625,00	718.284.459,00	3,15	SR	12,63	SR	22.102.023.241
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	22.571.849.125,00	5.571.705.237,00	1.085.754.792,00	4,81	SR	19,49	SR	21.486.094.333
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81.615.687.214,00	21.120.989.193,00	5.762.688.418,00	7,06	SR	27,28	SR	75.852.998.796
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	30.140.567.596,00	2.836.575.627,00	804.394.477,00	2,67	SR	28,36	SR	29.336.173.119
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7.897.427.349,00	2.534.309.937,00	593.287.958,00	7,51	SR	23,41	SR	7.304.139.391
24	Sekretariat Daerah	66.689.405.984,00	14.482.132.007,00	6.701.313.044,00	10,05	SR	46,27	SR	59.988.092.940
25	Sekretariat DPRD	46.488.337.755,00	18.752.110.643,00	7.741.317.744,00	16,65	SR	41,28	SR	38.747.020.011

NO	OPD	APBD	ANGGARAN KAS TW I	REALISASI KEUANGAN	% KINERJ A	KATEGO RI	% KEUANGA N	KATEGO RI	SISA ANGGARAN
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.076.339.560,00	3.638.032.431,00	482.937.559,00	4,79	SR	13,27	SR	9.593.402.001
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	384.432.293.656,00	91.242.777.515,00	13.139.907.809,00	3,42	SR	14,40	SR	371.292.385.847
28	Badan Pendapatan Daerah	19.457.645.050,00	8.542.718.754,00	5.465.477.541,00	28,09	SR	63,98	R	13.992.167.509
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.964.329.798,00	4.719.144.566,00	2.483.136.538,00	20,75	SR	52,62	R	9.481.193.260
30	Inspektorat	13.666.351.300,00	5.978.662.586,00	2.963.214.237,00	21,68	SR	49,56	SR	10.703.137.063
31	Kecamatan Burau	3.230.965.850,00	1.549.841.577,00	689.380.203,00	21,34	SR	44,48	SR	2.541.585.647
32	Kecamatan Wotu	3.061.372.275,00	1.443.160.155,00	825.552.687,00	26,97	SR	57,20	R	2.235.819.588
33	Kecamatan Tomoni	4.841.963.425,00	1.983.129.140,00	489.671.890,00	10,11	SR	24,69	SR	4.352.291.535
34	Kecamatan Mangkutana	2.818.872.800,00	992.370.386,00	506.358.129,00	17,96	SR	51,03	R	2.312.514.671
35	Kecamatan Tomoni Timur	2.670.877.206,00	1.227.642.778,00	461.523.521,00	17,28	SR	37,59	SR	2.209.353.685
36	Kecamatan Kalaena	2.758.235.300,00	1.230.735.925,00	393.056.740,00	14,25	SR	31,94	SR	2.365.178.560
37	Kecamatan Angkona	2.812.183.900,00	1.213.295.637,00	452.597.255,00	16,09	SR	37,30	SR	2.359.586.645
38	Kecamatan Malili	4.201.996.550,00	1.805.982.421,20	500.655.365,00	11,91	SR	27,72	SR	3.701.341.185
39	Kecamatan Wasuponda	2.774.336.400,00	1.296.971.796,00	269.709.909,00	9,72	SR	20,80	SR	2.504.626.491

NO	OPD	APBD	ANGGARAN KAS TW I	REALISASI KEUANGAN	% KINERJ A	KATEGO RI	% KEUANGA N	KATEGO RI	SISA ANGGARAN
40	Kecamatan Towuti	3.862.968.600,00	1.312.893.956,00	490.544.404,00	12,70	SR	37,36	SR	3.372.424.196
41	Kecamatan Nuha	4.097.190.250,00	1.735.058.859,00	551.757.790,00	13,47	SR	31,80	SR	3.545.432.460
42	Puskesmas Burau	3.942.090.386,00	1.381.897.772,00	623.537.025,00	15,82	SR	45,12	SR	3.318.553.361
43	Puskesmas Wotu	4.763.073.002,00	2.292.196.480,00	413.906.590,00	8,69	SR	18,06	SR	4.349.166.412
44	Puskesmas Mangkutana	4.019.062.386,00	841.362.000,00	359.158.414,00	8,94	SR	42,69	SR	3.659.903.972
45	Puskesmas Tomoni	3.918.841.386,00	1.210.302.000,00	202.649.999,00	5,17	SR	16,74	SR	3.716.191.387
46	Puskesmas Tomoni Timur	2.876.606.586,00	765.233.000,00	276.807.180,00	9,62	SR	36,17	SR	2.599.799.406
47	Puskesmas Kalaena	3.167.820.986,00	1.147.774.575,00	163.793.676,00	5,17	SR	14,27	SR	3.004.027.310
48	Puskesmas Angkona	3.850.594.686,00	1.471.508.686,00	589.876.737,00	15,32	SR	40,09	SR	3.260.717.949
49	Puskesmas Lakawali	2.822.433.386,00	867.664.400,00	221.013.946,00	7,83	SR	25,47	SR	2.601.419.440
50	Puskesmas Parumpanai	2.146.146.386,00	655.081.250,00	51.331.328,00	2,39	SR	7,84	SR	2.094.815.058
51	Puskesmas Malili	4.968.606.452,00	1.955.734.755,00	656.309.998,00	13,21	SR	33,56	SR	4.312.296.454
52	Puskesmas Lampia	2.496.000.536,00	767.021.250,00	325.044.033,00	13,02	SR	42,38	SR	2.170.956.503
53	Puskesmas Wasuponda	3.817.176.386,00	1.076.677.000,00	276.513.191,00	7,24	SR	25,68	SR	3.540.663.195
54	Puskesmas Nuha	3.098.023.412,00	475.434.453,00	342.804.508,00	11,07	SR	72,10	S	2.755.218.904

NO	OPD	APBD	ANGGARAN KAS TW I	REALISASI KEUANGAN	% KINERJ A	KATEGO RI	% KEUANGA N	KATEGO RI	SISA ANGGARAN
55	Puskesmas Wawondula	3.525.165.190,00	946.765.050,00	95.102.000,00	2,70	SR	10,04	SR	3.430.063.190
56	Puskesmas Timampu	2.280.142.386,00	585.572.000,00	405.052.712,00	17,76	SR	69,17	S	1.875.089.674
57	Puskesmas Mahalona	2.613.810.286,00	820.030.247,00	97.011.088,00	3,71	SR	11,83	SR	2.516.799.198
58	Puskesmas Bantilang	2.844.249.586,00	912.306.000,00	64.577.100,00	2,27	SR	7,08	SR	2.779.672.486
59	Puskesmas Bonepute	2.894.768.386,00	1.201.027.962,00	251.759.136,00	8,70	SR	20,96	SR	2.643.009.250
TOTAL		1.986.229.956.850,0 0	646.964.337.481,20	207.288.961.942,0 0	10,44	SR	32,04	SR	1.778.940.994.9 08

Sumber data: Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total anggaran RKPD Rp. 1,9 trilyun lebih, dan hingga Maret 2023 realisasi keuangan baru mencapai Rp.207 milyar lebih atau 10,44 %. Rendahnya capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan oleh karena peletakan anggaran kas belum sejalan dengan percepatan realisasi anggaran. Proses penyesuaian dalam penerapan SIPD sebagai aplikasi perencanaan, pembayaran, pelaporan menyebabkan realisasi keuangan mengalami keterlambatan. Poses Belanja barang habis pakai dengan sistem e-katalog, pengadaan barang dan jasa, serta peletakan anggaran belanja gaji dan tunjangan yang belum efektif menjadi faktor utama perlambatan pencapaian kinerja pada triwulan I 2024 . Diharapkan pada tahun 2024 seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kas yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2024 Triwulan I

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan pada pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan I, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD diperoleh nilai 32,04% sedangkan untuk realisasi anggaran nilainya mencapai 10,44% Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, hasil kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Triwulan I termasuk dalam kategori “**Sangat Rendah**”, dan hasil realisasi anggaran juga termasuk pada kategori “**Sangat Rendah**”.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Perumusan

permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan.

2.4.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun keempat RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Rumusan Permasalahan pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 merupakan Hasil Identifikasi dan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2023 dan target capaian tahun 2023 yang dirangkum meliputi :

1. Belum optimalnya Laju Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan perekonomian daerah mengalami tren fluktuatif sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dan secara rata-rata dapat dikatakan masih dibawah rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini disebabkan oleh: Kesenjangan produktivitas lapangan usaha; Belum optimalnya peningkatan ekonomi dari sektor lapangan usaha sekunder dan jasa; Rendahnya nilai tambah ekonomi lapangan usaha pembentuk PDRB; Rendahnya penerapan IPTEKIN dalam kegiatan produksi lapangan usaha.

Nilai pembentuk PDRB Kabupaten Luwu Timur masih di dominasi oleh sektor lapangan usaha pertambangan dan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas di pasar internasional. Ketika harga komoditas sedang tinggi, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB dan pendapatan daerah. Namun, penurunan harga yang tiba-tiba atau penurunan permintaan global dapat menyebabkan penurunan drastis sektor ini terhadap PDRB. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan pada akhirnya menekan optimalisasi laju pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Ketimpangan pendapatan masyarakat masih tinggi

Distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat Luwu Timur masih tergolong rendah atau dengan kata lain ketimpangan masih tergolong tinggi. Hal ini tergambar dari indeks Rasio Gini yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan sejumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Provinsi dan Nasional. Kondisi ini disebabkan oleh: Distribusi yang rendah terhadap kepemilikan dan akses sumberdaya ekonomi antar golongan masyarakat kaya dengan golongan masyarakat miskin; Limpahan manfaat dari golongan masyarakat kaya tidak mampu ikut dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin, akselerasi pembangunan daerah kaya tidak cukup memberi *multiplier effect* bagi daerah miskin; Kegiatan ekonomi belum memberi akses yang sama pada semua golongan masyarakat; Kualitas Sumber daya manusia tidak cukup kompetitif untuk diserap dalam lapangan usaha yang jumlahnya tidak berimbang dengan jumlah partisipasi angkatan kerja; Kebijakan pembangunan belum diterapkan secara optimal dalam mengakselerasi kemajuan wilayah.

2. Masih rendahnya daya saing daerah.

Masih rendahnya daya saing daerah di tandai dengan nilai perolehan indeks daya saing daerah yang belum optimal. Perolehan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 untuk Kabupaten Luwu Timur masih diurutan terendah ketiga dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Penyebab masih rendahnya daya saing daerah disebabkan karena lapangan usaha ekonomi produktif dan bernilai tambah tinggi yang menjadi unggulan Kabupaten Luwu Timur dalam menopang dan mengakselerasi perekonomian daerah secara berkesinambungan dalam jangka panjang diluar dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian belum di dukung oleh industri pengolahan yang memadai. Kondisi yang sama pada aspek SDM sebagai penggerak utama perekonomian daerah, kualitas SDM masih perlu ditingkatkan karena belum cukup mampu menghasilkan inovasi dan kreativitas yang unggul dan berbeda dalam mewujudkan produktivitas ekonomi daerah yang tinggi. Dalam hal ketersediaan fasilitas dan infrastruktur wilayah, maka Luwu Timur belum mampu bersaing dalam hal ketersediaan dan kualitas fasilitas dan infrastruktur wilayahnya. Ketiga unsur daya saing ini berdampak secara langsung pada lemahnya daya saing iklim investasi, selain yang terkait dengan faktor masih rendahnya kemudahan investasi dari layanan publik yang belum merata pada seluruh wilayah. Pada saat yang sama situasi politik lokal yang dinamis, tidak memberikan kepastian jaminan investasi yang aman, ditandai dengan masih adanya kerawanan keamanan dan ketertiban daerah yang belum stabil berdampak pada rendahnya daya saing iklim investasi ini.

Daya saing juga mencakup daya saing digital yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur telekomunikasi (BTS) yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata; masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat; masih rendahnya kemampuan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

3. Kualitas layanan kesehatan belum optimal dan merata

Gambaran Usia Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend kenaikan dan lebih baik bila di dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun gambaran kualitas kesehatan dapat dikatakan masih belum optimal dengan tingginya Angka Kematian Ibu yang mengalami trend kenaikan, prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, dan meningkatnya kasus tuberculosis dari tahun ke tahun.

Kondisi ini disebabkan oleh Upaya promotif dan preventif yang belum optimal dilakukan; Belum semua fasilitas kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut mempunyai sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; Sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal belum mencukupi kebutuhan secara merata; Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menjangkau seluruh keluarga di Luwu Timur secara merata; Penerapan pola hidup sehat belum melembaga di masyarakat; dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum belum semua dipenuhi di seluruh layanan kesehatan;

4. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan yang belum optimal diindikasikan oleh : capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun masih dibawah capaian provinsi; APK PAUD yang masih rendah, kompetensi Literasi dan Numerasi yang belum menjadi prioritas; Rendahnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi; dan Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja yang diiringi peningkatan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan/bidang lapangan kerja yang ada.

Kondisi ini disebabkan oleh : Penerapan Standar Pelayanan Minimum belum semua dipenuhi di seluruh layanan; Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun keatas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi; Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan

distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standard kompetensi; Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan,; kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah.

5. Melambatnya penurunan tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Luwu Timur belum optimal diindikasikan oleh berfluktuasinya capaian tingkat kemiskinan bahkan menunjukkan tren peningkatan.

Kondisi ini disebabkan oleh : Belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memerlukan perhatian khusus; Peningkatan Beban Tanggungan Bagi Usia Produktif akibat Rasio Ketergantungan Penduduk Meningkat; Belum optimalnya integrasi layanan dan system data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; Lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor primer. Ketidaksetaraan dalam akses pembiayaan dan sumberdaya antara perdesaan dan perkotaan; Rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal; serta Terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.

6. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan lemahnya dukungan IPTEK dan Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Perekonomian Luwu Timur rentan dengan perubahan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di dominasi oleh sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah serta inovasi dari lapangan usaha pembentuk PDRB. Peningkatan produktivitas sangat terkait dengan jumlah lapangan usaha (investasi), hilirisasi industri, ketersediaan IPTEK dan Sumberdaya terampil dan terdidik serta kebijakan pemerintah yang strategis terhadap optimalisasi sumber daya. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan dukungan IPTEK disebabkan oleh : Pada sektor perikanan dan pertanian lemahnya pengelolaan nilai tambah komoditas unggulan daerah dari sisi diversifikasi industri, kurang berkembangnya hilirisasi industri, lambatnya pertumbuhan industri kreatif. Ketersediaan fasilitas sarana pengolahan dan sarana pengembangan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi industri, keselarasan keahlian dan keterampilan dan pendidikan sumber daya

manusia untuk kebutuhan industri serta pembinaan dan intervensi pemerintah dan stackholder sangat penting dalam pengembangan industri. Hal ini akan berdampak pada Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan. Pada sektor pariwisata pengelolaan Pariwisata belum Berbasis Pariwisata Berkelanjutan, Belum optimalnya nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism). Pada sektor Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi promosi dan distribusi hasil, dan rendahnya inovasi usaha. Pemanfaatan IPTEKIN menjadi suatu kebutuhan namun membutuhkan investasi besar dalam penggunaannya.

7. Masih Rendahnya Stabilitas Ekonomi Makro dan Terbatasnya kapasitas fiskal daerah

Stabilitas Ekonomi Makro yang rendah terjadi karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah yang dapat mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan; Kurangnya kemandirian kapasitas fiskal daerah yang diindikasikan fiskal Kabupaten Luwu Timur bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena ketergantungan terhadap Transfer ke daerah yang masih tinggi, rasio pajak daerah yang masih rendah, serta belum optimalnya pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), aset daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, dan Transfer ke Daerah (TKD). Kualitas belanja daerah masih rendah dimana rata-rata porsi belanja pegawai meningkat tidak berbanding lurus dengan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan asset terhadap total belanja daerah. Sedangkan tingkat inflasi di Luwu Timur yang cenderung fluktuatif karena rentannya kenaikan harga barang dan jasa.

8. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Pemajuan kebudayaan di Luwu Timur belum berjalan dengan baik. Indikasi ini tergambar dari belum tersedianya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mengukur nilai dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Pemajuan kebudayaan yang belum menunjukkan hasil yang optimal di Sulawesi Luwu Timur disebabkan oleh beberapa hal yaitu : Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif; Kurang berkembangnya inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya; Melemahnya

pelestarian nilai-nilai budaya positif di Tengah Masyarakat dan keluarga; Lemahnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas antara pelaku seni dan pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; Lemahnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, dan; Belum tersedianya informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

Kerukunan umat beragama di kabupaten Luwu Timur berjalan dengan cukup baik namun belum menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan sumber daya manusia kabupaten Luwu Timur. Belum melakukan pengukuran IKB secara konsisten dan berkala menjadi ukuran belum menjadi prioritasnya penilaian kerukunan umat beragama. IKB merupakan alat untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan, pencegahan, aksi dalam menjaga nilai toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama. Kesadaran akan perbedaan menjadi penting untuk di tanamkan sejak dini lewat keluarga, menjaga dialog antar umat beragama terutama dalam menangkal isu-isu paham fanatisme, ekstrimisme, radikalisme yang dapat menjadi perpecahan antar umat beragama menjadi penting untuk menciptakan hubungan kerukunan beragama yang harmonis yang berkelanjutan

9. Kualitas Ketahanan Keluarga Belum berkembang Optimal

Belum berkembangnya ketahanan keluarga ditandai dengan besaran capaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) dimana pada tahun 2022 posisi indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Luwu Timur masih dibawa target IPK Indonesia dengan kategori berkualitas yaitu dengan nilai 70 keatas. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, meliputi : Belum terbangunnya upaya sinergis lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; Belum tersedianya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi , baik dari aspek tenaga pemberi layanan, sarana prasarana, dan jenis layanannya ; dan Kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

10. Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kepemudaan Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kepemudaan merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat, keluarga dan

orangtua atau wali. Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kepemudaan yang belum melembaga diindikasikan oleh: 1. Belum meningkatnya pencapaian Luwu Timur sebagai kabupaten layak anak; 2. Belum tersedianya capaian Indeks Perlindungan Anak; 3. Belum tersedianya capaian Indeks Pembangunan Pemuda; 4. Indeks ketimpangan gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi -Selatan

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : Belum efektifnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berakibat belum maksimalnya implementasi perencanaan dan proporsi anggaran yang berpihak pada anak; Belum efektifnya peran bimbingan dan pengawasan terhadap perwujudan Kabupaten/kota Layak Anak ; Permasalahan anak belum dianggap sebagai urusan lintas sektor (*cross cutting issues*) sehingga efektifitas sistem perlindungan anak sebagai sebuah ekosistem menjadi lemah; Belum efektifnya (kapasitas dan kuantifikasi) layanan pengaduan terpadu, penyediaan layanan yang aksesibel dan inklusif bagi anak antar sektor dan antar wilayah; Perkembangan teknologi dan informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, pengembangan dan pelebagaan pengasuhan dan perawatan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak dan meningkatkan kerentanan anak menjadi korban perlakuan salah; Belum optimalnya peningkatan kualitas anak dan pemuda termasuk penyandang disabilitas, yang dapat membentuk resiliensi, meningkatkan kompetensi dan daya saing anak dan pemuda ,serta menghindarkan anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

11. Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial

Ketimpangan gender ditandai dengan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Luwu Timur yang tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan meskipun menunjukkan tren penurunan ketimpangan dari tahun ke tahun.

Kondisi ini disebabkan oleh : Pada dimensi kesehatan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas layanan kesehatan yang belum merata dirasakan semua masyarakat secara adil. Pelayanan kesehatan menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan memberi akses yang sama bagi gender yang rentan yaitu masyarakat miskin, ibu dan anak, penyandang disabilitas, serta pemenuhan akan jaminan kesehatan merupakan langkah penting dalam percepatan penurunan ketimpangan gender.

Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa penyebab ketimpangan gender yaitu rendahnya akses masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan, Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan SDM tenaga pendidik/kependidikan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas maupun kualitas, perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan masyarakat miskin, budaya patriarki yang menempatkan laki laki memiliki peluang pendidikan lebih besar dibanding perempuan,

Pada dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan dan peluang kerja, terutama untuk perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum setaranya akses perempuan dan kelompok rentan dalam memperoleh peluang pekerjaan, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memiliki proporsi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding perempuan serta belum setaranya proporsi perempuan terlibat dalam politik.

12. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup ditentukan oleh pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah.

IKLH Luwu Timur cenderung fluktuatif dan mengalami tren penurunan khususnya pada Indeks Kualitas Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan terdapatnya kondisi kualitas air dalam status cemar ringan. Pada Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman memberikan gambaran bahwa akses sanitasi aman masih rendah . Pada Pengelolaan Sampah memberikan gambaran tren kenaikan timbunan sampah dari tahun ke tahun.

Kondisi ini disebabkan oleh: Alih fungsi penutupan yang mengakibatkan pengurangan neraca sumber daya lahan; Belum optimalnya upaya penguatan pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi; Perencanaan tata ruang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana; Belum optimalnya penguatan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah; Belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan Belum optimalnya pemenuhan penyediaan akses sanitasi melalui sistem terpusat(IPLT); Belum terpadunya

pengelolaan sampah untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber dan belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah.

13. Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Ancaman ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator. Belum tersedianya gambaran Indeks ketahanan energi untuk menentukan pasokan ideal kebutuhan energi industri dan rumah tangga dapat menjadi ancaman ke depan manakala pertumbuhan rumah tangga dan industri semakin tinggi tanpa di dukung dengan data dalam rangka perencanaan pasokan energi yang cukup. Ancaman terhadap ketahanan air diukur dari Indeks ketahanan air dilihat dari kapasitas air baku yang cenderung stagnan dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan masih rendah yang belum merata menjangkau seluruh rumah tangga terdata. Pada kemandirian pangan, meskipun Luwu Timur masuk dalam kategori wilayah paling tahan pangan namun beberapa indikator pembentuk indeks tidak menggambarkan kondisi baik. Begitupun Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami stagnasi dan cenderung mengalami penurunan serta Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yang belum mengalami penurunan secara signifikan.

Kondisi ini disebabkan oleh : Menurunnya ketahanan energi disebabkan Belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan industri; belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya pada daerah terluar atau terpencil. Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan. Sedangkan permasalahan terkait ketahanan air disebabkan oleh: masih terbatasnya pembangunan tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat; dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air.

14. Rendahnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Belum optimalnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ditandai dengan capaian nilai Indeks Resiko Bencana (IRB) dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). IRB Luwu Timur termasuk dalam kelas risiko tinggi terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas yang berada pada urutan 51 kelas risiko tinggi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan masih di atas Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kondisi ini disebabkan oleh : belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam pemenuhan rencana aksi kebencanaan, sosialisasi dan keterlibatan elemen masyarakat secara efektif dalam pengenalan risiko bencana, belum optimalnya kelembagaan penanggulangan bencana, sumber daya manusia, peringatan dini dan kajian risiko bencana, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar serta pembangunan kesiapsiagaan di seluruh lini

Adapun Luwu Timur penyumbang Intensitas Emisi Sulawesi Selatan yang mengalami tren fluktuasi kurun waktu 6 tahun terakhir masih jauh di bawah capaian Nasional. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat intensitas emisi menjadi Zero emission antara lain: a) lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak aktivitas perekonomian komoditas/sektor unggulan; b) masih terjadinya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan (untuk perkebunan monokultur, pertanian, pertambangan); c) rendahnya praktik dan pemanfaatan teknologi berkelanjutan serta ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan; d) kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian cenderung bersifat ekstensifikasi dibanding intensifikasi. Diperlukan beberapa upaya antara lain mendorong peningkatan produktivitas ekonomi yang tetap mengupayakan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam dan jasa ekosistem, mendorong intensifikasi sektor ekonomi unggulan yang rendah karbon, serta transisi dari subsidi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

2.4.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD,

- Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dimana pada usia tersebut adalah usia pertumbuhan anak atau yang disebut Golden ages,
- Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata,
- Masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas walaupun secara rasio berdasarkan jumlah keseluruhan, jumlah guru dan siswa masih cukup baik dengan Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 1 : 22 dan SMP/MTs sebesar 1 : 27 dan;
- Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum memadai,
- Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru) serta;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menganalisis dan mengolah data pada satuan Pendidikan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

- Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup mengalami tren kenaikan;
- Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup mengalami tren kenaikan;
- Meningkatnya angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup;
- Meningkatnya angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup;
- Belum terpenuhinya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk;
- Belum terpenuhinya rasio dokter per satuan penduduk;
- Masih rendahnya rasio tenaga medis per satuan penduduk;
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami tren penurunan;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami tren penurunan;
- Rendahnya cakupan balita pneumonia yang ditangani;
- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 mengalami tren penurunan;
- Cakupan pelayanan nifas mengalami tren penurunan;
- Belum terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin bahkan mengalami penurunan;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a. Pekerjaan Umum

- Belum tercapainya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik(> 40 KM/Jam);

- Terbatasnya dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
- Masih rendahnya persentase penduduk berakses air minum;
 - Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi;
 - Belum termanaatkannya potensi sumber air baku;
 - Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi;
 - Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase;
 - Kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pentingnya IMB masih kurang;
 - Belum optimalnya ketersediaan fasilitas air bersih tingkat rumah tangga;
 - Sumber daya manusia pengelola sampah, limbah dan pertamanan publik serta kapasitas kelembagaan yang kurang memadai;
 - Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu;
 - Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat;
 - Terbatasnya peralatan yang dimiliki dan Kualitas alat berat yang dimiliki kurang memadai.
- b. Penataan Ruang
 - Masih terbatasnya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis;
 - Pengelolaan data tata ruang belum optimal;
 - Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
 - Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);
- Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

- Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan PSU Perumahan Umum;
- Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah;
- Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- Belum ditetapkan kawasan kumuh dibawah 10 Ha, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur;
- Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- Kurangnya alokasi anggaran untuk pendataan, sehingga identifikasi yang dilakukan masih bersifat makro.
- Belum tersedia basis data
- Tidak ada penetapan status bencana.
- Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana
- Data yang tersedia tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan inputansi data SPM bidang perumahan.
- Anggaran telah disiapkan, tapi tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status bencana.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

- Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;
- Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah;
- Masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik mobil damkar maupun APAR;
- Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran;
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;

- Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi;
- Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana;
- Penyeragaman kapasitas BPBD Kabupaten yang satu dengan yang lain.
- Untuk pelayanan dasar dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara berdasarkan tabel diatas dihitung berdasarkan jumlah kasus penegakan perda/perkada yang dilaporkan dan ditangani selama Tahun 2023 dimana terdapat 853 kasus pelanggaran perda yang di laporkan dan semua kasus dapat ditangani. namun dari penegakan perda/perkada tersebut tidak ada warga Negara yang terkena dampak kerugian materil maupun pelayanan pengobatan akibat dari penegakan perda dan perkara sehingga capaian 100
- Kendala, Permasalahan dan Solusi
- Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang
- Dalam Penginputan capaian SPM juga masih terjadi perbedaan persepsi terkait indikator kinerja layanan SPM
- Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang,
- Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada,
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis,
- Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas yang baru mandiri pada tahun 2022, dimana sebelumnya merupakan salah

satu bidang pada Dinas Satpol PP dan Damkar. Untuk itu kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan masih sangat terbatas, baik itu sarana prasarana, sumber daya manusia, dan jumlah anggaran

- Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat maka Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menempatkan personil di Kecamatan. Namun pelayanan ini tidak dapat maksimal dilakukan mengingat personil Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang PNS pelaksana Satpol PP selain itu, SDM Aparatur Satpol PP di Kecamatan masih terbatas bahkan sarana dan prasarana dikecamatan belum memadai
- Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana,
- Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat dan data base terkait jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana masih skala desa,
- Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah yang cukup luas, sehingga Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat maka diperlukan penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), dimana waktu tanggap/respon time akan jauh dari target karena pelayanan yang sangat jauh dan luas.
- kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan yang masih sangat terbatas sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Damkar yang tugas pokok dan fungsi adalah urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan Dinas Damkar saat ini yang sangat diperlukan adalah mobil pemadam kebakaran yang masih sangat kurang, mobil suplay (tangki) serta alat pelindung diri (APD) untuk personal.

6. Sosial.

- Belum validnya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- Belum termanfaatkannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pihak;
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.
- Belum adanya Rumah Singgah
- Belum dibentuknya TRC Ketelantaran

- Belum adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM
- Minimnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM

2.4.2.2 Permasalahan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja.

- Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
- Rendahnya minat pencari kerja untuk meningkatkan kapasitasnya;
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
- Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

3. Pangan.

- Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
- Harga bahan pangan masih fluktuatif;
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman.

4. Pertanian.

- Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terjadinya perselisihan sengketa pertanahan milik Negara dan masyarakat;
- Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

5. Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil.

- Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena cakupan jangkauan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang luas.

6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- Masih tingginya unmet need;
- Wilayah sasaran program KB memiliki topografi dan tingkat kesulitan yang berbeda;
- Jumlah dan Kualitas SDM di lini lapangan masih terbatas;
- Kasus pernikahan usia dini masih tinggi;
- Persalinan remaja masih cukup tinggi;
- Kasus perceraian cenderung meningkat;
- Angka kemiskinan masih tinggi;
- Masih terbatasnya kemampuan sebagian besar kader bina keluarga.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Masih lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
- Belum optimalnya BUMDes yang terbentuk;

- Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur;
- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa dalam memahami regulasi.

8. Perhubungan.

- Masih minimnya penyediaan terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah;
- Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten;
- Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat;
- Belum optimalnya penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR.

9. Komunikasi dan Informatika.

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan kegiatan komunikasi dan informatika;
- Masih minimnya sumber daya manusia pengelolaan Informatika dan Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan E - Government;
- Masih minimnya akses internet bagi masyarakat pada ruang-ruang publik di Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terbatasnya jangkauan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Timur.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM;
- Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
- Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;

- Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi;
- Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
- Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

11. Penanaman Modal.

- Masih minimnya regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal;
- Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Instansi Pemerintah dan dunia usaha;
- Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

12. Kepemudaan dan olahraga.

- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
- Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda;
- Belum tersedianya sarana kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi kepemudaan;
- Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Masih minimnya prestasi kepemudaan dan bidang olah raga di tingkat Provinsi dan Nasional.

13. Lingkungan Hidup.

- Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
- Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;

- Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
- Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
- Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Akhir sampah;
- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle);
- Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
- Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Luwu Timur masih belum dapat memenuhi baku mutu.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.

14. Statistik

- Keterbatasan SDM dan kapasitas pengelola data statistik;
- Belum terpusatnya penyediaan data statistik sektoral;
- Keterbatasan anggaran pengelolaan data statistik sektoral.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan SDM;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Keterbatasan anggaran.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur, hal ini dipengaruhi oleh faktor belum adanya petunjuk teknis;
- Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya ketersediaan sarana dan prasarana budaya;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pembinaan kapasitas tenaga pelatihan, pembinaan maupun pelaku budaya;

- Masih rendahnya daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pemahaman dan keterampilan dalam mengolah dan mengembangkan budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Masih kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
- Masih terbatasnya koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa;
- Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan;
- Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK);
- Masih terbatasnya tenaga pustakawan daerah.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis;
- Masih rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
- Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

2.4.2.3 Permasalahan Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Masih maraknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;
- Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Belum optimalnya produksi olahan ikan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata.

- Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya pada tingkat Nasional dan Internasional;
- Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;

- Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
- Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas;
- Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata potensial seperti Danau Matano dan obyek wisata potensial lainnya, serta berbagai obyek wisata skala perdesaan.

3. Pertanian.

- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian;
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani;
- Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
- Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
- Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan;
- Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target;
- Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air;
- Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi;
- Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak;
- Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
- Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;

- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar;
- Masih rendahnya daya saing produk perkebunan terhadap produk impor;
- Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan;
- Kurang tersedianya benih unggul yang bermutu;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- Keterbatasan akses permodalan bagi peternak;
- Kurangnya betina produktif (sapi), inbreeding dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer;
- Masih banyaknya pemotongan ilegal di luar RPH;
- Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan belum tangguh dan mandiri;
- Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan, dan teknologi alsintan;
- Belum optimalnya infrastruktur Pertanian;
- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan;
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis.

4. Perdagangan.

- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

5. Perindustrian.

- Masih rendahnya produktifitas IKM;
- Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM;
- Belum terjalannya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM;
- Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku IKM.

6. Transmigrasi.

- Belum optimalnya aksesibilitas transportasi ke daerah transmigrasi;

- Masih minimnya dukungan infrastruktur penunjang pada wilayah transmigrasi;
- Belum sepenuhnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh para pihak;
- Tingkat kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan.

2.4.2.4 Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Unsur Sekretariat Daerah

- Banyaknya program dan kegiatan yang terkait Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait;
- Masih kurangnya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- Belum tertibnya administrasi data usul rancangan produk hukum daerah;
- Masih lambatnya penyelarasan dan penyesuaian produk hukum daerah yang ada dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat;
- Belum tersedianya alat (tool) yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen rancangan produk hukum daerah yang sedang diproses;
- Masih lambatnya pembentukan produk hukum daerah;
- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah akibat terbatasnya SDM di Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengelola JDIIH;
- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;
- Masih lemahnya pengertian tentang bantuan hukum pada Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata;
- Masih lambatnya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah;

- Belum ada pustakawan yang mengelola arsip dan belum ada staf yang mengikuti pendidikan dan latihan khusus JDIIH;
- Evaluasi kelembagaan belum diterapkan secara berkala;
- Pola tata hubungan kerja belum terkoordinasi antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah;
- Kebijakan pelayanan publik belum diimplementasikan secara maksimal;
- Belum tersusunya peta proses bisnis (Probis);
- Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- Rencana aksi delapan area perubahan pada reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal;
- Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi lingkup pemerintah Kabupaten;
- Kematangan kelembagaan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kualitas tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum optimal, dimulai dari tahap perencanaan anggaran, tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak;
- Penguatan regulasi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkup Pemerintah Kabupaten belum terwujud sesuai standar;
- Ketersediaan SDM pengelolaan P Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait kuantitas dan kualitas yang belum memadai di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan masih lambatnya pengumpulan data pendukung IKK LPPD dari tiap-tiap perangkat daerah;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam hal mengimplementasikan penyelenggaraan kerja sama;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Bina Wilayah.

2. Unsur Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- Masih terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD terhadap penyusunan legal drafting;

- Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD khususnya di bidang informasi dan Tehnologi.

2.4.2.5 Permasalahan Unsur Pengawasan

1. Pengawasan.

- Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa;
- Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
- Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten;
- Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodic;
- Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3.

2.4.2.6 Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan.

- Kurangnya SDM perencana;
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

2. Keuangan.

- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas;
- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak masih rendah;
- Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah;
- Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang;
- Ruang pelayanan pajak kurang representatif.

3. Kepegawaian.

- Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;
- Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
- Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Database kediklatan yang belum memadai;
- Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
- Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat.

5. Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- Belum optimalnya pengembangan penelitian untuk kepentingan pembangunan;
- Belum adanya keserasian pemanfaatan hasil-hasil penelitian daerah;
- Belum tersedianya pejabat fungsional khusus peneliti.

2.4.2.7 Permasalahan Unsur Kewilayahan

Kecamatan

- Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas;
- Belum sepenuhnya dilakukan pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Camat;
- Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan luas wilayah.
- Belum memadainya infrastruktur pada sebagian besar desa;
- Belum termanaatkannya potensi ekonomi perdesaan untuk kegiatan produktif.

2.4.2.8 Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Belum optimalnya pola koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi maupun dengan Instansi Vertikal;
- Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
- Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

2.5 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan

peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai Isu-Isu Strategis. Selain itu, Perumusan Isu juga didasarkan pada Permasalahan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Permasalahan Pembangunan dan Isu Global, Nasional maupun Daerah di tahun berjalan maupun pada beberapa tahun terakhir dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan target capaian RKPD Tahun 2024 serta merujuk pada Arah Kebijakan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahun 2025. Adapun Isu Strategis yang berdampak langsung terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian antara lain:

Isu Global

(1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goal (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan yang disepakati oleh negara-negara di dunia demi kebaikan umat manusia dan kelestarian planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan global yang berakhir pada tahun 2030. TPB/SDGs mencakup 17 Goals/Tujuan yaitu (1) Tanpa

Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam upaya Indonesia untuk mencapai setiap tujuan pada TPB/SDGs yang dapat dikatakan sangat ambisius tersebut, ada kebutuhan indikator TPB/SDGs yang dibutuhkan untuk memonitor dan evaluasi setiap kegiatan serta pengambilan kebijakan terkait pencapaian setiap tujuan dari TPB/SDGs. Kebutuhan tersebut dirasakan sangat strategis dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan data yang berupa indikator TPB/SDGs merupakan salah satu syarat demi suksesnya program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya data-data indikator TPB/SDGs maka perkembangan target-target TPB/SDGs dapat dimonitor serta kegiatan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan tersebut dapat di evaluasi. Hampir satu dekade Indonesia telah mengadopsi tujuan dan sasaran TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan Indonesia. Ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan TPB/SDGs khususnya terkait penyediaan data. Tantangan tersebut diantaranya :

- a. Belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- b. Belum tersedianya SDM dan anggaran yang memadai;
- c. Disagregasi statistik untuk menggambarkan tren khusus pada subpopulasi; dan
- d. Terdapat sejumlah indikator TPB/SDGs belum tersedia datanya.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya dan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dari setiap daerah, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten, rumusan TPB/SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik dengan mengusung prinsip universal, integrasi, inklusif dan no one left behind.

Pelaksanaan TPB/SDGs telah memasuki 10 (sepuluh) tahun atau disebut dekade aksi (Decade of Action), sehingga diperlukan upaya percepatan pencapaian target oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan akselerasi dan komitmen yang kuat dengan mengubah Perpres No. 59 Tahun 2017 yang sebelumnya dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia menjadi Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Beberapa perubahan dalam Perpres No. 111 Tahun 2022 di antaranya adalah memutakhirkan sasaran nasional TPB/SDGs, menekankan peran para pihak, mendorong platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs, menguatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah, dan amanat memutakhirkan peta jalan TPB/SDGs serta Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs.

(2) Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius di tahun 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim. Dorongan positif juga datang dari sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan (EBT). Sektor EBT juga menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi di masa depan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi dalam jangka menengah panjang. Strategi ini juga akan membantu Indonesia dalam mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas meliputi energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Melalui Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dari kondisi business as usual. Penurunan emisi GRK tersebut terutama akan didorong pada sektor Agriculture, Forest, and Land Use (AFOLU) serta energi. Penerapan Pembangunan Rendah Karbon juga diharapkan dapat terus menekan emisi hingga 34% - 41% di 2045 melalui pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan, dan penanganan limbah terpadu. Net-Zero Emission adalah target yang ingin dicapai Pemerintah di 2060 mendatang dan telah dicantumkan dalam penyampaian

dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTSLCCR 2050) kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Penguatan komitmen Indonesia untuk mencapai berbagai target tersebut menjadi sangat krusial menjelang pelaksanaan COP26 di Glasgow Skotlandia. Di sini, peran pembiayaan hijau menjadi sangat krusial. Pemerintah telah mendorong pengembangan berbagai instrumen pembiayaan hijau, di antaranya melalui Green Sukuk. Green Sukuk edisi 2020 mencapai US\$2,5 miliar, sementara permintaan yang diperoleh sebesar 6,7 kali lipatnya atau jauh di atas target pemerintah di tengah kondisi pasar yang volatile ini. Beberapa pemanfaatan refinancing Green Sukuk yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energy terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan mini hidro. Dengan pembangunan proyek-proyek ini nantinya dapat dihitung berapa besar pengurangan emisi CO₂ yang dapat dicapai. Tidak terbatas pada pembiayaan APBN saja, instrumen alternative seperti blended finance juga telah disiapkan untuk memperkuat skema pembiayaan dengan menampung dana dari swasta serta donor internasional untuk kegiatan pengembangan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) juga telah didirikan oleh Pemerintah pada 2019 untuk membantu meningkatkan kualitas pembiayaan pada program ekonomi hijau. Di saat yang sama, Pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Beberapa program EBT di Indonesia telah terbantu dengan dukungan pembiayaan dari lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA). Dari sektor keuangan, penerapan ekonomi hijau telah didorong melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap ini menjadi kerangka acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan ekonomi hijau sehingga dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan dan investasi di sektor terkait. Dalam aspek regulasi, saat ini kita sudah mempunyai UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menyempurnakan berbagai UU lintas sektoral. Khusus untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UU yang disempurnakan adalah UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tujuan utama regulasi ini adalah menciptakan kemudahan ekosistem berusaha, tanpa mengesampingkan standar, nilai-nilai keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Salah satu implementasi UU ini adalah melalui sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu.

Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA). Lembaga ini berguna untuk memberikan alternatif investasi terhadap pembangunan ekonomi hijau. INA juga akan berperan dalam mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor utama, termasuk infrastruktur digital sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Investasi yang dikelola oleh INA diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan mendorong transisi menuju ekonomi baru yang berbasis digital. Pemerintah akan segera mengalokasikan modal tambahan sebesar Rp 60 triliun untuk mendukung optimalisasi INA bagi perekonomian.

(3) Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti culture dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri.

Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital. Ekonomi digital adalah salah satu isu yang diusung di Presidensi G20 Indonesia 2022 yang juga dirangkaikan dengan peluncuran (kick off) Digital Working Group (DEWG) G20. Tema besar yang diusung Indonesia di DEWG G20, yakni “Achieving a Resilient Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainable Transformation”.

Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global. Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat, di sisi lainnya digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat. G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi. Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media social, maupun bisnis. Peluang tersebut dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan internet secara lebih produktif didukung dengan pemerataan akses infrastruktur digital. Ada beberapa isu soal digitalisasi yang menjadi bahasan di forum G20, yakni Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

2.5.1 Isu Nasional

(1) Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), yang berisi penugasan dari Presiden kepada Para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang ditujukan di seluruh wilayah yang didapati penduduk miskin ekstrem.

Tantangan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dirasa akan semakin berat. Pada level makro, mencakup kebijakan menjaga stabilitas inflasi/harga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan

lapangan kerja produktif, maupun menjaga iklim investasi dihadapkan dengan kenyataan terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Fenomena ini sebagai akibat perang Ukraina-Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada level mikro, kebijakan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dua isu strategis yang menjadi tantangan pada level mikro adalah akurasi data dan sinergi antar program yang melibatkan kementerian/lembaga dan dunia usaha.

(2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian SPM juga diposisikan untuk menjawab

isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normative dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun sebuah Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal guna mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan dasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang merevisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Permendagri 59 Tahun 2021 pasal 18 meliputi :

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e) Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f) Sosial.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

(3) Bonus Demografi

Pada Tahun 2030-2040, Indonesia di prediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Untuk diketahui, saat ini Indonesia menghadapi dua tantangan utama terkait ketenagakerjaan. Pertama, berdasarkan data BPS (Agustus 2020) sekitar 56 persen tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Kondisi tersebut berdampak terhadap produktivitas dan daya saing tenaga kerja yang relatif rendah. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan fokus pada dua isu, yakni pendidikan dan tenaga kerja.

Untuk pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, termasuk mengembangkan pendidikan kejuruan atau vokasi untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas. Terkait tenaga kerja, salah satu arah kebijakan adalah memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global.

(4) Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan Badan Perwakilan BKKBN nomor 12 tahun 2021, pencapaian indikator yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus terarah pada lima program prioritas, yaitu pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan surveilans, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tematik stunting (audit kasus stunting, mini lokakarya, elektronik siap nikah dan hamil, serta TPK). Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan. Angka stunting Nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Meski sudah turun drastis,

Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, dimana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 21,6% di tahun 2022 menjadi 21,5% di 2023. Stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis. Infrastruktur dan lembaga yang ada harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat, ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode two stage stratified sampling secara potong lintang (cross-sectional). Hasil SSGI ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Menkes mengatakan mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun. Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa, sehingga diharapkan di masa yang normal tahun ini penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai. Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.

(5) Pasokan Pangan dan Energi

Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa saat ini dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada kemungkinan kenaikan harga pangan dan energi yang signifikan. Harga pangan dunia mencapai rekor tertinggi pada Februari 2022 dengan kenaikan tahunan mencapai 20,70 persen. Saat ini harga komoditas energi dan sumber daya mineral, seperti minyak mentah, crude palm oil (CPO), dan komoditas mineral seperti nikel dan batu bara sudah melonjak. Harganya diperkirakan akan semakin melambung seiring pecahnya perang Rusia-Ukraina yang akan membuat permintaan dunia tinggi, sementara pasokan berkurang yang akan meningkatkan inflasi termasuk di Indonesia.

Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah harus memastikan stok kebutuhan pangan tercukupi untuk enam bulan ke depan dan menggalakkan pemanfaatan penggunaan sumberdaya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan

pangan dan bahan baku yang terkait dengan energi, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor. Data menunjukkan tahun lalu importasi minyak goreng mencapai 93,3 juta dolar AS atau Rp 1,34 triliun (kurs Rp14.408 per dolar AS). Nilai ini naik 38,34 persen dibanding tahun sebelumnya. Impor minyak goreng berasal dari lima negara utama yakni Malaysia, Thailand Australia, Spanyol dan Italia. Pada Januari 2022 impor minyak goreng nabati tercatat sebanyak 4,42 juta kg. Jumlah ini naik 4,37 persen dibandingkan Januari 2021 sebanyak 4,23 juta kg, setara dengan 8,2 juta dolar AS atau naik 42,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

(6) Rantai Nilai

Laju perekonomian Indonesia 2024 diperkirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada 2025. Perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasokan dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menguatnya keterkaitan antarwilayah dalam rantai nilai (*value chains*) yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi penggunaan input antara domestik dan wilayah lain untuk produksi di dalam satu wilayah. Dengan kata lain aktivitas produksi di suatu wilayah semakin terkait dengan wilayah lain dan proporsi penggunaan input yang mengandalkan dari dalam wilayah sendiri menurun yang berimplikasi pada kebijakan penguatan konektivitas dan sistem logistik antar wilayah guna memperkuat integrasi perekonomian wilayah.

2.5.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- 1) Potensi sumber daya alam dan hilirisasi komoditas unggulan wilayah yang

belum optimal

- 2) Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan kawasan pesisir serta peran Sulawesi Selatan sebagai poros maritim
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
- 4) Masih tingginya kesenjangan pendapatan
- 5) Angka prevalensi stunting lebih tinggi dari angka rata-rata nasional
- 6) Kurang meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
- 7) Belum optimalnya reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan berbasis digital
- 8) Menurunnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup serta belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan potensi bencana

2.5.3 Isu Strategis Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rumusan Isu Global, Nasional dan Provinsi yang telah diuraikan, dapat diuraikan beberapa Isu Strategis Kabupaten Luwu Timur yang perlu menjadi perhatian di Tahun 2025 diantaranya adalah :

(1) Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti itulah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan dalam masyarakat dapat dipandang dari beberapa aspek penyebabnya, di antaranya: a) kemiskinan berhubungan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, sering disebut kemiskinan kultural. Dalam konteks ini kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja. b) Kemiskinan timbul sebagai akibat adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Golongan yang memiliki akses kuat terhadap faktor-faktor produksi cenderung mendominasi dan melakukan ekspansi ekonomi yang kemudian menyisihkan golongan masyarakat pinggiran (peripheral). Akibatnya muncul kemiskinan struktural karena lemahnya kemampuan usaha dan terbatasnya akses pada kegiatan ekonomi. c) Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kekurangberuntungan (disadvantages), yaitu fisik yang lemah, kerentanan (vulnerability), keterisolasian, serta ketidakberdayaan (powerlessness).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan apakah penduduk tergolong miskin atau tidak (garis kemiskinan/poverty line), di antaranya menggunakan indikator pengeluaran rata-rata per bulan yang

mencukupi konsumsi makanan setara kalori tertentu per kapita, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada dasarnya perspektif kemiskinan sangat luas, tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga meliputi dimensi sosio kultural. Karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki, baik skill, pendidikan maupun faktor produksi, kelompok ini kalah bersaing dalam memperebutkan pasar kerja, akibatnya banyak di antara mereka yang menjadi pengangguran. Karena pendapatan yang relatif rendah, menyebabkan berbagai kebutuhan yang paling pokok tidak bisa dipenuhi, seperti air bersih, fasilitas mandi cuci kakus yang sehat, akses terhadap fasilitas kesehatan dan lain-lain.

(2) Pembangunan Ekonomi Inklusif

Negara-Negara berkembang, termasuk Indonesia banyak yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Di sisi lain yakni di sektor primer, terutama sektor pertanian, kurang mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akibatnya terjadilah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dengan sektor manufaktur dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi tidak secara otomatis mereduksi ketimpangan ekonomi sosial, demikian juga apabila dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi juga masih menunjukkan adanya ketimpangan. Dampak dari kondisi tersebut masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin tertinggal jauh oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi inklusif dikenal dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka Indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-Pilar serta 21 indikator pembentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan,

serta akses dan kesempatan. Sementara World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi inklusif adalah produktivitas. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan sistem ekonomi Daerah membutuhkan peningkatan produktivitas.

Produktivitas mendorong Daerah berdaya saing tinggi dengan tingkat produksi yang efektif dan efisien serta tenaga kerja yang produktif. Produktivitas yang ideal di suatu Daerah akan meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi dan mutu kehidupan/kesejahteraan masyarakat di Daerah tersebut.

(3) Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha

Selama periode 2019-2023 PDRB Kabupaten Luwu Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2023 pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni mencapai 28 persen. Komponen net ekspor turun menjadi 27,17 persen dibanding tahun lalu. Di sisi lain, perdagangan luar wilayah Kabupaten Luwu Timur yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan ke luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam periode 2019- 2023 selalu menunjukkan posisi “surplus”. Pada tahun 2019-2023, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen net ekspor antar daerah menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, yaitu dari kisaran 20 sampai 30 persen.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 4-5 persen selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat kita lihat dari pergeseran distribusi komponen pengeluaran rumah tangga. Distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menurun dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan penduduk karena bergeser pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga menjadi suatu tabungan (saving) yang bersifat tahan lama seperti bangunan dalam PMTB yang distribusinya cukup tinggi. Di sisi lain, pada tahun 2019-2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur cenderung mengalami fluktuasi, yakni sebesar 1,17 persen (2019); 1,46 persen (2020); mengalami kontraksi sebesar -1,39 persen (2021); pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen dan 9,66 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Luwu Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian; serta Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; mengalami penurunan peranan PDRB dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan memiliki peranan kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah meningkatnya produksi pada lapangan usaha tersebut. Kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab peningkatan peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.

Dari trend perkembangan kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Luwu Timur, terlihat bahwa telah terjadi structural transformation sektor ekonomi, dari berbasis agraris menjadi berbasis industri pengolahan; dengan kontribusi sektor perdagangan juga besar dan relatif stabil perkembangannya. Pada dasarnya hal ini merupakan hal yang umum terjadi pada kawasan yang mengalami perkembangan ekonomi. Untuk itu, peran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah mengatur (sebagai regulator) agar sektor agraris tidak ditinggalkan, mengingat banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga perlu untuk mendorong industrialisasi pertanian agar memberikan nilai tambah yang baik bagi usaha sektor primer. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus tetap mendorong perkembangan sektor industri dan perdagangan sebagai dua sektor dengan kontribusi tertinggi pada perekonomian Kabupaten. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur wajib melanjutkan pembangunan yang telah

dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pertambahan penduduk, isu strategis lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Luwu Timur lebih mengutamakan kualitas dengan cara menggali potensi sumber pendapatan daerah lainnya yang belum dimaksimalkan. Dalam artian bahwa peningkatan PAD dilakukan dengan tidak membebani aktivitas pemerintahan sehingga tidak menghambat investasi dan kegiatan masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat tersebut, khususnya yang berasal dari daerah sendiri adalah dengan Optimalisasi maupun Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Optimalisasi maupun Pendirian BUMD ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka peningkatan PAD dan tentunya turut berperan penting dalam perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu BUMD juga diharapkan dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, usaha BUMD tidak terfokus pada satu bidang tetapi dapat melakukan berbagai usaha seperti di bidang Pembangunan, Agrobisnis, Industri Strategis, Jasa/Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Pertambangan),

Kelautan dan Perikanan, dan usaha lain sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan, sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD itu sendiri. Sejalan dengan optimalisasi BUMD, sebagai daerah penghasil Nikel terbesar di Indonesia maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu menggali potensi pendapatan pada sektor usaha pertambangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berencana mengambil alih Divestasi Saham Perseroan Terbatas Vale Indonesia, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 112, Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. Diharapkan proses divestasi seluruh kewajiban perusahaan dapat terwujud sehingga menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur seiring dengan investasi miliaran dolar untuk mendukung pertumbuhan produksi nikel yang berkelanjutan. Dengan adanya kepemilikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, potensi tambang nikel diyakini dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan manfaat keberadaan tambang menjadi lebih terasa karena masyarakat ikut memiliki perusahaan dan dapat ikut menguasai kekayaan alamnya sendiri serta memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.

(4) Kesenjangan Wilayah

Dalam proses pembangunan di suatu wilayah seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan yang harus dapat dicapai secara bersamaan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (kaya dan miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (maju dan tertinggal). Ketimpangan yang tinggi dapat memunculkan berbagai permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Dampak lain seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah yang terlihat dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut menjadi tindak kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap Pemerintah. Ketimpangan antar wilayah juga turut mewarnai dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Luasnya wilayah Indonesia dan tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antar Provinsi, antar Kabupaten, antara Kota dengan Kabupaten. Dalam tujuan pembangunan wilayah sampai tahun 2024, Pemerintah Pusat terus berupaya mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Meskipun ketimpangan belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan namun tingkat ketimpangan yang rendah dapat menjadi cerminan belum meratanya tingkat pembangunan di seluruh wilayah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals juga menyinggung mengenai ketimpangan, yakni pada tujuan kesepuluh. Tujuan kesepuluh menyatakan bahwa pada tahun 2030 kesenjangan atau ketimpangan di dalam dan antar Negara semakin berkurang. Kesenjangan yang terjadi dapat mengancam pembangunan sosial maupun ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan tersedianya kesempatan yang sama serta menurunkan kesenjangan pendapatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi belum seluruhnya sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten. Terlihat dari capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, baru 24 Desa dengan Status Desa Mandiri, 59 Desa dengan Status Desa Maju dan 42 Desa dengan Status Desa Berkembang.

(5) Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu-isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (Developmentalism). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (Cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan Pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (benefit) ekonomi yang diperoleh. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, namun demikian

pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan. Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara. Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 29,94% pada tahun 2025 dan 81,96% di tahun 2045 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagi program dan kegiatan melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bersama Perangkat Daerah terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi diikuti dengan percepatan pembangunan biasanya berbanding lurus dengan tingginya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal itu terjadi karena kurang mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan seyogyanya harus masuk dalam arus tengah kebijakan pembangunan.

(6) Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perwujudan Good Government di setiap lingkungan Pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja Pembangunan Nasional. Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten. Mencermati kinerja “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain : belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik merupakan salah satu Misi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Luwu Timur. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertekad untuk mengembangkan etika Birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu Birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Luwu Timur, jika dilihat dari Delapan Aspek yaitu Aspek Manajemen Perubahan; Aspek Peraturan Perundang-Undangan; Aspek Kelembagaan; Aspek Ketatalaksanaan; Aspek Sumber Daya Aparatur; Aspek Pengawasan; Aspek Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Pelayanan Publik. Dalam hal Ketatalaksanaan, E-Government sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal. Belum seluruhnya sistem informasi yang terintegrasi sehingga sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah belum bisa terbangun dan terkonsolidasi dalam satu jejaring. Optimalisasi sistem informasi dalam wujud E-Government yang terintegrasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam ketatalaksanaan birokrasi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi tentunya akan mendukung kecepatan, ketepatan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

(7) Kondusifitas Wilayah

Berbicara berkenaan dengan permasalahan sosial erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat. Hubungan antar masyarakat yang beranekaragam menciptakan suatu interaksi dan kebiasaan yang kemudian dikenal dengan budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat harus bersumber dan terbentuk dari nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Beberapa dampak sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur yang dapat mengganggu terwujudnya suasana yang kondusif meliputi: lahirnya karakteristik individualis yang mengarah kepada peningkatan penyalahgunaan obat terlarang merupakan salah satu dampak dari adanya arus globalisasi. Selain itu, Angka kriminalitas telah menjadi salah satu indikator baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengukur kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu wilayah. Karena angka kriminalitas menjadi salah satu cerminan bagi suatu Pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial budaya masyarakatnya, kondisi ketenteraman dan ketertiban itu sendiri. Kondusifitas daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, semakin baik perekonomian daerah biasanya memiliki kondisi masyarakat yang kondusif. Dengan adanya kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proposional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia khususnya bagi Kabupaten Luwu Timur untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang akan turut ikut melaksanakan Pilkada serentak pada Tahun 2024. Dengan keberagaman Agama dan Budaya, secara khusus Kabupaten Luwu Timur juga dinilai memiliki tantangan-tantangan yang dapat mengganggu pasca pilkada serentak 2024, sehingga

peran seluruh elemen elemen mulai Pemeintah, TNI/Polri, Pemuka Agama, Ormas serta seluruh Lapisan masyarakat untuk tetap selalu bersinergi dalam menjaga kondusifitas wilayah.

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui program prioritas pada kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Prioritas program pembangunan daerah di rumuskan dengan berpijak pada kondisi perekonomian Nasional. Sebagaimana kebijakan Pemerintah, pada tahun 2025 Ekonomi Nasional dirancang tumbuh 7%, sehingga arah kebijakan Ekonomi Daerah terhadap pencapaian target Indikator Makro Ekonomi Daerah harus ditopang oleh program-program yang menunjang pembangunan ekonomi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dengan misi yaitu : (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, (2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas, (3) Menyediakan Infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas, (4) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, (5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat, dan (6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, maka arah kebijakan ekonomi daerah di arahkan berdasarkan sasaran misi RPJMD yaitu : (1) Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing, dengan arah kebijakan peningkatan kemampuan literasi masyarakat, pencegahan dan penanganan stunting secara integratif dan Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting. (2) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan Penguatan ketahanan ekologi desa, Pengembangan teknologi tepat guna, dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. (3) Meningkatnya kesetaraan Gender, dengan arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (4) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan arah kebijakan Penerapan Inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, Pengembangan Industri Pengolahan dan hilirisasi produk SDA, Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya.

(5) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha dengan arah kebijakan perbaikan pelayanan penanaman modal. (6) Meningkatnya daya guna dan hasil guna Infrastruktur daerah, dengan arah kebijakan Pembangunan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan perhubungan darat, danau, sungai dan laut. (7) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recycle. (8) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan arah kebijakan Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan bagi fungsi perangkat daerah dan modernisasi sistem pengelolaan arsip. (9). Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dengan arah kebijakan percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan. (10). Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat, dengan arah kebijakan penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara, dan (11). Penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan dengan arah kebijakan pengelolaan cagar budaya secara terpadu, Pembinaan sejarah daerah dan pengembangan sarana/prasarana ibadah.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka pada tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dirumuskan dengan tema yaitu Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa yang terintegrasi dengan Indikator Makro Ekonomi Daerah yang meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak di bagian timur Sulawesi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dibagian utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dibagian timur, Teluk Bone dibagian selatan dan Kabupaten Luwu Utara dibagian Barat. Dengan posisi yang strategis ini, maka Kabupaten Luwu Timur mempunyai spektrum perekonomian antar wilayah.

Perekonomian Kabupaten Luwu Timur, sampai saat ini masih di dominasi oleh Sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan dengan keberadaan PT.Vale Indonesia yang bertempat di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengurangi ketergantungan atau dominasi sektor pertambangan dalam struktur perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupaya mendorong sektor-sektor yang lain melalui program-program yang telah direncanakan, khususnya sektor Pertanian. Hal ini dikarenakan, dalam Struktur PDRB Kabupaten Luwu Timur, Sektor Pertambangan sangat berpengaruh pada Laju pertumbuhan ekonomi,

sehingga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur cenderung rendah. Namun, jika tanpa memasukkan sektor pertambangan sebagai variabel maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur tumbuh sangat positif dan mencapai 5,76% pada tahun 2021 yang di kontribusi secara besar oleh Sektor Pertanian, Sektor Industri pengolahan dan sektor Konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut, maka sektor pertanian Kabupaten Luwu Timur menjadi lokomotif utama dalam perekonomian daerah yang harus terus didorong. Hal tersebut terkonfirmasi dengan data statistik Luwu Timur tahun 2023, dimana produksi peternakan, perikanan dan pertanian mengami peningkatan produksi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pembangunan infastruktur dalam menunjang roda perekonomian daerah dengan stimulus pembiayaan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global.

Tahun 2025 perekonomian diproyeksikan masih akan diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi global yang cukup tinggi. Beberapa tantangan utama yang perlu diwaspadai diantaranya adalah ***Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global*** Banyak negara maju diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada permintaan global terhadap produk-produk Indonesia, terutama komoditas. ***Inflasi*** Tekanan inflasi global masih akan menjadi tantangan. Kenaikan harga energi dan pangan dapat memicu ketidakstabilan harga di dalam negeri. ***Kenaikan Tingkat Bunga*** Upaya bank sentral di berbagai negara untuk mengendalikan inflasi melalui kenaikan suku bunga dapat berdampak pada aliran modal asing ke Indonesia. ***Geopolitik*** Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung dapat mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan ketidakpastian investasi. ***Perubahan Iklim***, Dampak perubahan iklim seperti bencana alam dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan infrastruktur.

Ketidakpastian global semakin kompleks tersebut diatas, sangat berpengaruh besar terhadap sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta

meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional.

Di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2023 mencapai 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari 5,17% pada triwulan sebelumnya. Pada akhir 2023, pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,05%, dengan target 5,3–5,9% untuk 2024 dan 5,3–5,7% untuk 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh stabilnya sektor keuangan. Di pasar modal, IHSG pada 30 November 2023 menguat 3,36% menjadi Rp7.080,74. Sektor perbankan menunjukkan kinerja baik dengan penyaluran kredit mencapai Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% yoy). Di sektor keuangan non-bank, pendapatan premi asuransi mencapai Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% yoy), dan piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh 15,02% yoy). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski ada tantangan global.

Untuk 2024, ekspor barang dan jasa Indonesia diperkirakan tumbuh positif, didorong oleh pertumbuhan negara mitra dan peningkatan harga komoditas. Namun, ada tantangan seperti kelangkaan kontainer dan ketidakstabilan politik di Eropa Timur. Risiko varian baru COVID-19 juga bisa memperlambat perdagangan jasa. Pada 2025, meskipun ekonomi mitra dagang diperkirakan pulih, hambatan ekspor akibat proteksionisme dan isu lingkungan tetap ada. Kinerja ekspor non-komoditas masih menghadapi masalah seperti produktivitas, akses bahan baku, dan dukungan investasi.

Beberapa tantangan perekonomian nasional yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata
5. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Daerah.

Kabupaten Luwu Timur, yang terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Meskipun sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Pdrb kabupaten luwu timur sebesar 50,30% namun pemerintah daerah menempuh kebijakan bahwa prioritas Sektor pertanian menjadi tulang punggung lokomotif ekonomi daerah ini, dengan kontribusi kedua terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat kabupaten luwu timur bekerja pada sektor pertanian, Komoditas utama seperti padi, sawit, kakao, jagung, dan berbagai tanaman hortikultura menunjukkan tren peningkatan produksi, berkat penerapan teknologi pertanian modern dan dukungan program pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur hingga tahun 2023 mencatatkan angka positif, meskipun tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak perubahan iklim tetap ada. Data menunjukkan bahwa luas panen dan hasil pertanian terus meningkat, berkontribusi pada ketahanan pangan daerah. Program-program yang fokus pada peningkatan kualitas lingkungan dan aksesibilitas pasar telah membantu memperkuat posisi petani lokal.

Dalam hal ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan penurunan, dengan sektor informal memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak pekerjaan yang dihasilkan bersifat temporer, sehingga perlu adanya inisiatif untuk pelatihan keterampilan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur yang terus ditingkatkan, seperti jalan dan fasilitas umum, diharapkan dapat mendorong investasi lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa minat investor, baik lokal maupun asing, meningkat, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata. Potensi pariwisata yang kaya, dengan keanekaragaman alam dan budaya, menjadi peluang yang menjanjikan untuk diversifikasi ekonomi.

Meskipun terdapat kemajuan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih ada. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, ekonomi Kabupaten Luwu Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif, didukung oleh sektor-sektor utama yang saling berhubungan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi, Luwu Timur berpotensi untuk terus berkembang dan memberikan

manfaat bagi masyarakatnya. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah ini sangat bergantung pada kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Secara umum gambaran perekonomian Kabupaten Luwu Timur, meskipun menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pertumbuhan di tahun 2024 dan 2025. Diantaranya:

1. Fluktuasi Harga Komoditas

Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sangat bergantung pada harga komoditas. Fluktuasi harga, baik di pasar lokal maupun global, dapat mempengaruhi pendapatan petani dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diversifikasi produksi dan peningkatan akses pasar menjadi sangat penting.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan signifikan bagi Luwu Timur, yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem. Dampak dari bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, dapat mengganggu hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Penyesuaian dalam praktik pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi risiko ini.

3. Ketersediaan Infrastruktur

Meski ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, masih banyak daerah yang memerlukan perhatian. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur transportasi dapat menghambat distribusi produk dan investasi di sektor lain. Oleh karena itu, investasi lebih lanjut dalam infrastruktur dasar adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Ketenagakerjaan dan Keterampilan

Tingkat pengangguran masih menjadi masalah, terutama di kalangan pemuda. Banyak pekerjaan yang tersedia di sektor informal, yang sering kali kurang stabil. Upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

5. Kesejahteraan Sosial

Meskipun ada perbaikan dalam indikator pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial masih ada. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Ketergantungan pada Sektor Tertentu

Ekonomi Luwu Timur masih cukup bergantung pada sektor pertanian dan ekstraktif. Untuk mengurangi risiko terkait volatilitas di sektor-sektor ini, perlu adanya upaya untuk mendorong pengembangan sektor industri dan pariwisata yang lebih beragam.

Tantangan perekonomian Kabupaten Luwu Timur di tahun 2024 dan 2025 memerlukan perhatian serius dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, Luwu Timur dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3.1.1.5 Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

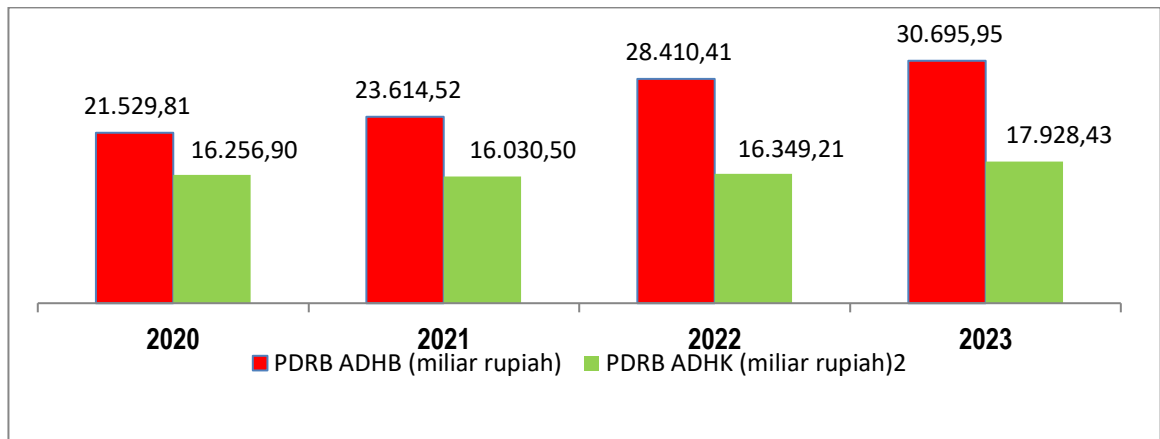
A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai standar perhitungan *System National Accounts* yang terdiri dari 17 kategori lapangan usaha.

Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan dengan besaran nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 30,695,96 triliun rupiah, Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 17.928,43 triliun rupiah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,30 persen. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 3.1 Berikut :

Grafik 3. 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (miliar rupiah),
Tahun 2020– 2023



Sumber : BPS Luwu Timur,

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya.

PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian menurut lapangan usaha dibandingkan sektor yang lain. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur (persen) Tahun 2021-2023

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,19	-1,65	1,19	25,01	21,93	22,15
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,81	1,66	16,74	43,99	50,04	50,30
C	Industri Pengolahan	6,58	7,50	-2,55	3,65	3,37	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,10	5,57	5,95	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Daur Ulang	11,76	9,24	2,5	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,65	2,56	6,14	10,78	9,69	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	6,72	7,83	4,05	4,07	3,79	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan	6,73	11,67	2,93	0,71	0,72	0,72

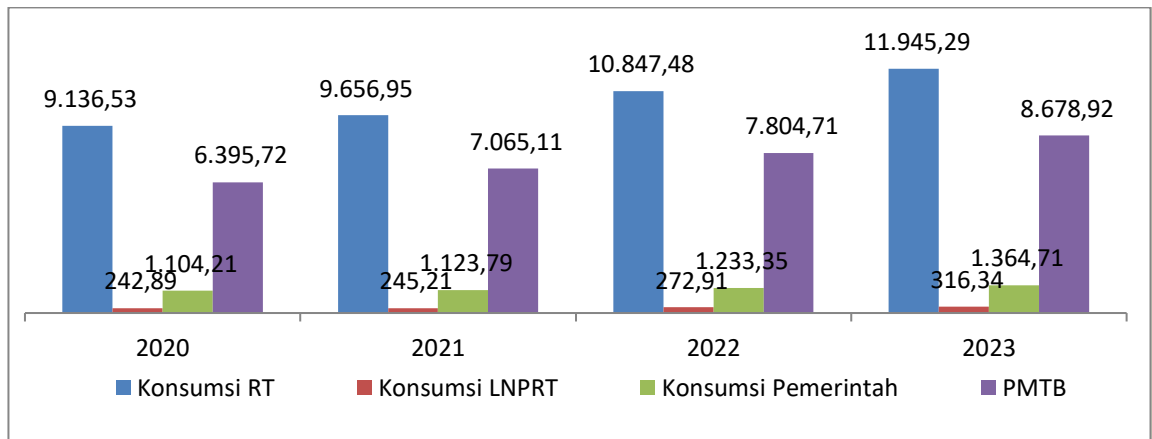
	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	9,91	4,16	0,18	0,17	0,16
J	Informasi dan Komunikasi	7,64	6,72	-3,27	1,65	1,49	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,08	2,40	4,06	1,00	0,90	0,89
L	Real Estate	5,72	6,17	0,66	2,43	2,22	1,99
M,N	Jasa Perusahaan	3,79	6,33	5,71	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	5,98	2,93	7,67	2,60	2,24	2,27
P	Jasa Pendidikan	5,60	2,97	8,08	2,18	1,90	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	9,58	7,40	6,14	1,52	1,38	1,35
R,S	Jasa Lainnya	6,54	7,32	3,80	0,12	0,11	0,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-1,39	1,99	9,66	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Luwu Timur,

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) atas penggunaan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan melalui proses produksi untuk wilayah tertentu. PDRB menurut pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran LNPRT, Pengeluaran Pemerintah, Pembentukan Modal tetap Bruto, Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa.

Grafik 3. 2 PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran diKabupaten Luwu Timur (miliar rupiah), Tahun 2020– 2023



Sumber : BPS Luwu Timur,

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran rumah tangga mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

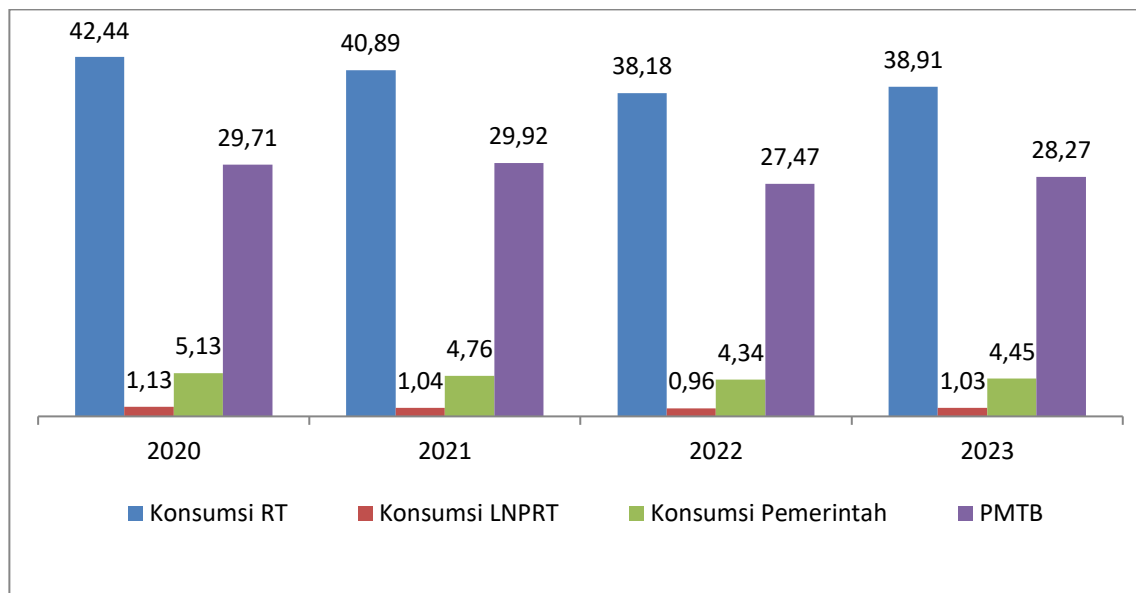
Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) kabupaten/kota mencakup:

- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah desa/kelurahan ada di wilayah kabupaten/ kota;
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kabupaten/kota;

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu, merupakan pengeluaran yang diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, social security, sports, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya) (2). Pengeluaran konsumsi untuk kolektif, merupakan pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan-barang publik (administrasi publik, pertahanan, keamanan, infrastruktur dan pembangunan ekonomi, Resource and Development, dan sebagainya).

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Penambahan aset tetap atau yang dikenal sebagai PMTB pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi, sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai oleh suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Untuk setiap sektor PDRB menurut pengeluaran pada Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3. 3 Sektor PDRB Menurut Pengeluaran ADHB terhadap PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020– 2022 (%)



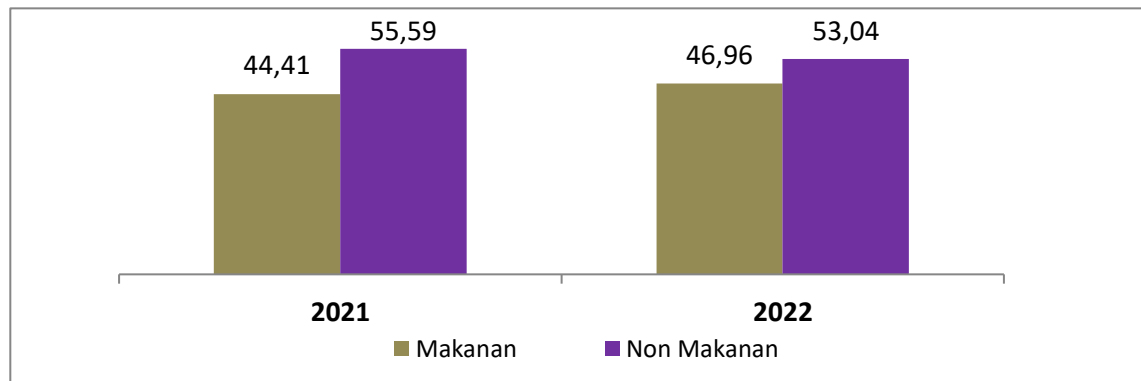
Sumber : Data diolah

Berdasarkan PDRB Menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan secara persentase terhadap PDRB yang mencapai 38,91% pada tahun 2023 yang jika dirata-ratakan konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 sampai 2023 sebesar 40%.

Untuk sektor LNPRT sangat rendah dan cenderung stagnan dari tahun 2020-2023 dan konsumsi pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2023 hanya mencapai 4,45% terhadap PDRB sedangkan pembentukan modal bruto (PMTB) juga mengalami penurunan pada tahun 2022 yang mencapai 27,47% terhadap PDRB dan 28,27% pada tahun 2021

Pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu Timur mengalami pola yang sama antara tahun 2021 dan tahun 2022, untuk pemenuhan pengeluaran non makanan masih dikisaran 50an persen. Pada tahun 2021 pengeluaran penduduk untuk non makanan sebesar 55,59% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 yang mencapai 53,04%. Sedangkan pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 44,41% dan pada tahun 2022 sebesar 46,96%.

Grafik 3. 4 Persentase pengeluaran Perkapita sebulan tahun 2021-2022



Sumber : BPS Luwu Timur,

Pola pengeluaran perkapita sebulan, pengeluaran untuk kebutuhan makanan lebih banyak oleh golongan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Sedangkan untuk golongan teratas lebih banyak mengeluarkan kebutuhan untuk non makanan hingga Rp.1.294.164 sebulan atau 60,18 persen dari total pengeluaran.

Tabel 4. 1 Pengeluaran Perkapitan Sebulan (rupiah), 2022

Golongan	Makanan	Non Makanan
40% terbawah	305.023	216.603
40% tengah	630.202	617.108
20% teratas	1.167.392	1.764.056
Rata-rata Pengeluaran	607.706	1.294.164

Sumber : BPS Luwu Timur,

Pembangunan Daerah dapat di ukur dengan statistik kunci yang meliputi aspek Sosial dan Ekonomi. Aspek Sosial meliputi Populasi penduduk, Angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat pengangguran terbuka, Persentase penduduk miskin dan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Untuk aspek Ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan PDRB Perkapita Harga Berlaku. Berikut adalah capaian statistik pembangunan daerah pada aspek sosial ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3. 2 Statistik Kunci Kabupaten Luwu Timur 2021-2023

Rincian	Satuan	2021	2022	2023
Sosial				
Penduduk	Ribu/Jiwa	300,03	304,30	308,53
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,11	1,42	1,39
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,78	74,08	74,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,14	71,51	67,48
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,96	4,48	5,42
Penduduk Miskin	Ribu/Jiwa	20,99	20,89	21,57
Persentase Penduduk Miskin	%	7,00	6,86	6,99
Indeks Pembangunan Manusia	-	74,83	75,41	75,84
Ekonomi				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Miliar Rupiah	23.614,52	28.410,41	30.695,95
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,39	1,99	9,66
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	78,71	93,36	99,49

Sumber : BPS Luwu Timur,

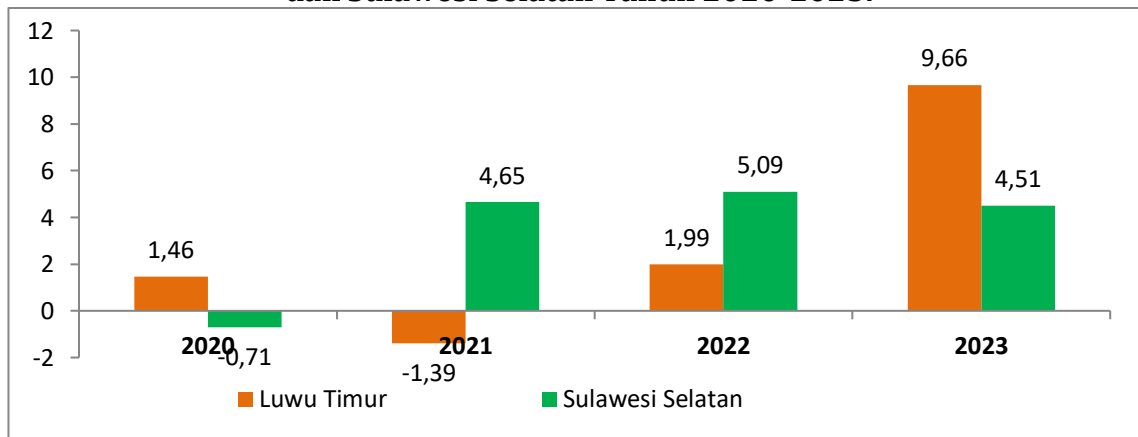
3.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan realitas ekonomi makro suatu wilayah tertentu. Angka pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa terjadinya ekspansi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan terjadinya kontraksi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mengalami kontraksi yang mencapai -1,39%, tahun 2022 tumbuh positif 1,99% dan pada tahun 2023 tumbuh signifikan sebesar 9,66%. Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur lebih dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang mendominasi Struktur PDRB menurut lapangan usaha. Pada PDRB ADHB Sektor pertambangan pada tahun 2021 sebesar 10.387,74, tahun 2022 sebesar 14.212,80 dan pada tahun 2023 sebesar 15.441,18.. Besarnya sektor pertambangan yang mendominasi pada PDRB kabupaten luwu timur tidak terlepas oleh keberadaan PT.Vale Indonesia,Tbk yang berada di Kabupaten Luwu Timur.

Struktur perekonomian Luwu Timur pada sektor pertanian mempunyai prospek yang cukup bagus. Hal ini terkonfirmasi dengan besarnya sektor pertanian sebagai sektor kedua terbesar pada Struktur PDRB setelah sektor pertambangan. Sektor Pertanian dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Hal ini terkonfirmasi dengan data PDRB ADHB sektor pertanian pada tahun 2021 sebesar 5.906,03, pada tahun 2022 sebesar 6.229,88 dan pada tahun 2023 sebesar 6.779,93. Dengan terus meningkatnya sektor pertanian dari tahun ke tahun, maka Kabupaten Luwu Timur bisa menjadi salah satu kontributor dalam menopang ketahanan pangan baik pada lingkup Propinsi ataupun Nasional.

Grafik 3. 5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Luwu Timur dan Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023.



Sumber : BPS Luwu Timur,

3.1.1.7 Ketenagakerjaan

Untuk membahas tentang ketenagakerjaan, pemahaman mengenai konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi penduduk yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau pengangguran.

Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran. Jumlah Angkatan kerja yang besar, apabila dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika keseluruhan angkatan kerja dapat diserap oleh kesempatan kerja.

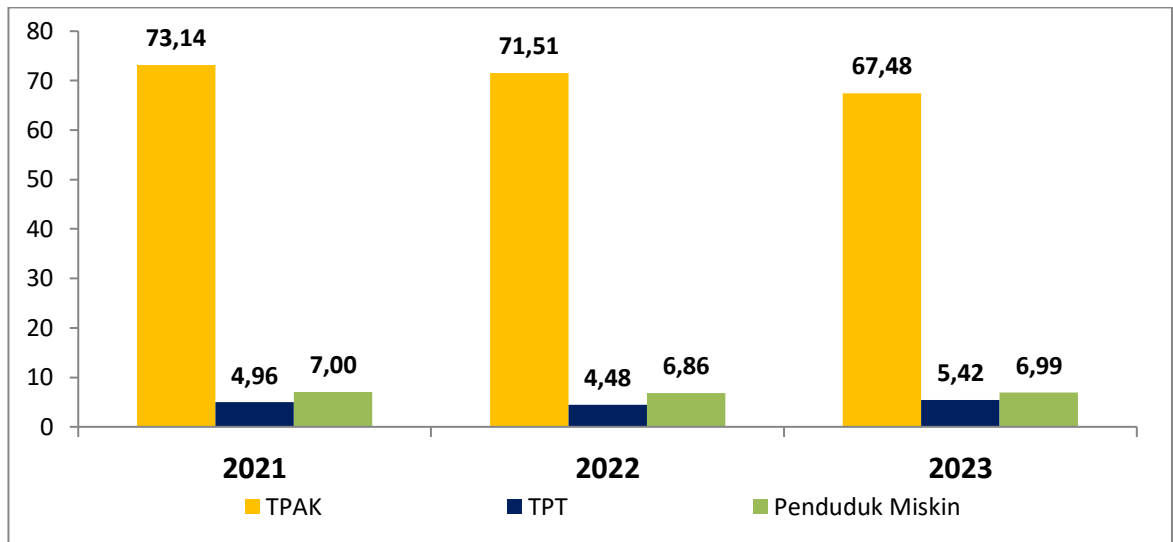
Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Jika terjadi gap antara banyaknya angkatan kerja dan kesempatan kerja maka banyaknya pengangguran akan meningkat. Semakin tingginya angka pengangguran maka beban yang akan ditanggung oleh suatu daerah menjadi semakin besar.

3.1.1.8 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Konsep Kebutuhan Dasar menjadi tolok ukur untuk mengukur kemiskinan disuatu wilayah, yang berarti bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Berikut adalah perbandingan pertumbuhan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 3. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur (%) Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Luwu Timur,

Proses Pembangunan Ekonomi tidak terlepas dari adanya pertumbuhan penduduk. Hal ini terkait erat dengan sumber daya yang mendukung perkembangan perekonomian, yang mana sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan sumber daya alam, modal/teknologi dan sosial.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mencapai 308,53 (ribu) atau tumbuh 1,39% dibandingkan tahun 2022. Namun, laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan Tingkat Partisipasi angkatan kerja yang mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 67,48% mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 71,51%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan persentase penduduk miskin juga mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini tentu akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi pada tahun 2025 mendatang.

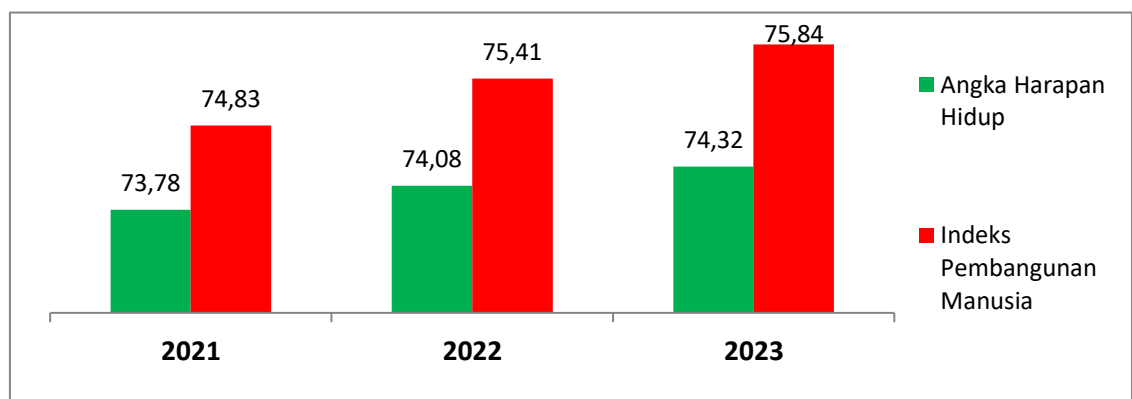
3.1.1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang

bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun yang sejalan dengan angka harapan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan merumuskan program-program yang mengarah pada pembentukan pembangunan manusia yang terus konsisten dari tahun ke tahun.

Grafik 3. 7 Angka Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Luwu Timur

3.1.1.10 PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi

sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang. Namun untuk Kabupaten Luwu Timur, PDRB Perkapita masih dipengaruhi oleh sektor pertambangan, dikarenakan meningkatnya PDRB perkapita tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan.

PDRB Perkapita Harga berlaku Kabupaten Luwu Timur terus bertumbuh dari tahun ketahun, pada tahun 2021 sebesar 78,71 Juta rupiah, tahun 2022 sebesar 93,36 juta rupiah dan tahun 2023 sebesar 99,49 juta rupiah. Bertumbuhnya PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur tersebut tidak terlepas dari PDRB ADHB Menurut lapangan usaha yang didominasi oleh sektor pertambangan yang juga terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

3.1.1.11 Target Perekonomian Daerah Tahun 2025

Perekonomian Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 di arahkan untuk mencapai indikator ekonomi daerah yang sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2026, yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB Perkapita dan Rasio Gini.

Tabel 3.3 Target makro ekonomi daerah Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024*	Proyeksi Tahun 2025**
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	9,66	2,98-3,71	3,22
2	Tingkat kemiskinan	Persen	6,99	6,24	6,04
3	Tingkat Pengangguran	Persen	5,42	2,80	2,55
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,84	74,40	74,70
5	PDRB perkapita	Juta Rupiah	99,49	72,55	73,10

6	Rasio Gini	Poin	0,393	0,247	0,217

Sumber : BPS Luwu Timur; *RKPD 2024; **RPJMD

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah harus didukung dengan pembiayaan sebagai konsekuensi logis sebagai tindak lanjut dari desentralisasi fiskal yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan program pembangunan untuk satu tahun anggaran yang biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Untuk merumuskan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun 2025, maka perlu menyajikan gambaran keuangan daerah 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun berjalan sebagai indikator dalam mengukur capaian kinerja keuangan daerah sebagai dasar untuk mengukur kapasitas fiskal daerah sebagai proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun berikutnya yang di komparasikan dengan target pada ekonomi makro daerah dan rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Arah kebijakan keuangan daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang direncanakan dan dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, ekonomis dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga arah pendapatan daerah di rumuskan secermat mungkin untuk membiayai program-program pada tahun 2025. Arah kebijakan pendapatan daerah lebih diarahkan pada penguatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-undang tersebut mengatur dua substansi besar yaitu pertama tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada Pasal 102 pada Undang-undang tersebut disebutkan penganggaran pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit :

- a. Kebijakan Makro Ekonomi Daerah
- b. Potensi Pajak dan retribusi

Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi : Struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan pertauran pelaksanaannya. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersebut, maka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Optimalisasi penerapan sistim perpajakan yang efektif dan efisien dengan kebijakan biaya operasional pemungutan pajak daerah harus lebih rendah dibandingkan masing-masing komponen PAD.
2. Pelaksanaan kebijakan yang mendorong tumbuhnya ketaatan wajib pajak yang semakin baik melalui optimalisasi sosialisasi dan uji petik dan mengajak segenap pelaku usaha serta pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen tingkat ketaatan pajak yang tinggi.
3. Mendorong Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD melalui langkah-langkah strategis yang meliputi perluasan wajib pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan tarif dan perluasan subyek dan obyek penerimaan PAD bagi sumber penerimaan PAD yang potensial.
4. Memaksimalkan Basis data potensi penerimaan yang mencakup dan obyek penerimaan PAD sebagai dasar dalam menentukan target PAD khususnya Pajak Daerah.
5. Mengoptimalkan Penerimaan BLUD pada Rumah Sakit Daerah untuk menunjang kemandirian Rumah Sakit dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai sepenuhnya melalui pendapatan BLUD.
6. Menambah penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sul-selbar untuk memaksimalkan deviden dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah, maka arah kebijakan dalam penerimaan pendapatan pada Pendapatan Transfer baik Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Daerah akan tetap mengupayakan peningkatan indikator-indikator yang berkontribusi pada DBH dan DAU dengan kebijakan yang terus mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB Perkapita,

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila daerah memiliki kapasitas keuangan yang memadai, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam hal pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kewenangannya akan terlihat, antara lain dari kemudahan pemberian pelayanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan keberhasilan tersebut memerlukan sumber-sumber pendanaan di daerah yang representatif. Penggalan sumber-sumber keuangan daerah harus dioptimalkan dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang yang mengatur masalah keuangan di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk merumuskan Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2025, maka perlu menyandingkan capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022-2023 dan target pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Uraian	Realisasi		Target 2024	Tahun Rencana Tahun 2025	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2026**
	2022	2023*			
PENDAPATAN DAERAH	1.732.661.442.909,29	1.830.266.348.086,89	1.910.663.329.895,00	1.951.918.000.000,00	1.969.656.406.000,00
Pendapatan Asli Daerah	341.265.079.449,43	242.667.512.680,14	391.302.390.695,00	396.171.000.000,00	401.541.000.000,00
Pajak Daerah	202.810.479.953,20	102.205.124.615,72	207.090.490.085,00	210.550.000.000,00	215.250.000.000,00
Retribusi Daerah	3.181.939.987,00	2.966.337.069,00	8.629.471.620,00	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00
Hasil Penngelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	23.740.807.304	23.588.575.458,00	48.391.000.000,00	48.391.000.000,00	48.391.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	111.531.852.205,23	113.907.475.537,42	127.191.428.990,00	128.330.000.000,00	129.000.000.000,00
Pendapatan Tranfer	1.330.514.747.320,86	1.577.462.826.854,75	1.466.477.122.000,00	1.532.816.000.000,00	1.514.174.406.000,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.005.807.515.294,00	1.269.543.871.367,00	1.192.615.938.000,00	1.119.227.870.000,00	1.097.836.276.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	309.861.621.281,00	158.841.290.700,00	285.119.885.000,00	345.145.000.000,00	326.187.000.000,00
Dana Alokasi Umum	501.023.438.250,00	1.025.068.013.012,00	588.649.276.000,00	588.649.276.000,00	588.649.276.000,00
Dana Alokasi Khusus	194.922.455.763,00	85.634.567.655,00	53.238.342.000,00	185.433.594.000,00	183.000.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	103.003.087.000,00	116.442.075.000,00	125.196.772.000,00	120.838.130.000,00	120.838.130.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	5.897.251.000,00	15.230.394.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Dana Desa	103.003.087.000,00	110.544.824.000,00	109.966.378.000,00	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	221.704.145.026,86	191.476.880.487,75	273.861.184.000,00	292.750.000.000,00	295.500.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	206.876.727.007,00	188.567.162.487,75	261.361.184.000,00	280.250.000.000,00	283.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya	14.827.418.019,86	2.909.718.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	53.941.000.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	60.881.616.139,00	10.136.008.552,00	52.883.817.200,00	53.941.000.000,00	53.941.000.000,00
Hibah	42.436.704.251,00	10.136.008.552,00	50.463.059.000,00	53.941.000.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	18.444.911.888,00	0,00	2.420.758.200,00	0,00	0,00

*) LRA Anaudited

**) Proyeksi RPD Tahun 2026

Berdasarkan Tabel III.2 diatas, capaian realisasi pendapatan daerah kabupaten luwu timur dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan target tahun 2024 serta rencana tahun 2025 tumbuh secara positif, dan diharapkan terus bertumbuh dari sampai tahun 2026. Pada tahun 2023, capaian pendapatan daerah kabupaten luwu timur mengalami peningkatan sebesar Rp.1.830.266.348.086,89, naik sebesar Rp.97.604.905.177,60 atau 5,33%. Peningkatan pendapatan tersebut, ditunjang oleh kenaikan realisasi penerimaan pada pos pendapatan transfer yang naik sebesar Rp.246.948.079.533,89 atau 15,65% dari realisasi pendapatan transfer pada tahun 2022.

Pada Tahun 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.910.663.329.895, atau naik sebesar Rp.80.396.981.808,11 atau 4,21% dari realisasi tahun 2023. Struktur target APBD Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.148.634.878,86 atau 37,51% dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer pada target tahun 2024 turun sebesar Rp.110.985.704.854,75 atau (7,57%) dibandingkan realisasi pada tahun 2023 dan untuk Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar Rp.42.747.808.648, atau 80,83% dibandingkan realisasi pada tahun 2023.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang direncanakan untuk dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari proses pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Pada Tahun 2025, Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur di Arahkan pada Pembangunan yang berpijak pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang memuat Belanja wajib mengikat, Standar pelayanan minimal dan pencapaian visi misi yang tertuang pada RPJMD 2021-2026.

Tema RKPD pada Tahun 2025 adalah **Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Ketahanan Desa**, Sehingga Arah Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran belanja Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah;
2. Alokasi anggaran Dana Desa minimal 10% dari dana Transfer diluar Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, minimal 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan pada APBD;
4. Alokasi anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja daerah;
5. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa;
6. Alokasi anggaran Gaji pokok dan tunjangan ASN;
7. Alokasi anggaran peningkatan kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP;
8. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
9. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Islamic Center;
10. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue;
11. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue;
12. Alokasi anggaran penambahan ruang perawatan 1 pasien 1 kamar pada RSUD I Lagaligo;
13. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan gedung pemuda;
14. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan stadion;
15. Alokasi anggaran lanjutan pembangunan pasar tomoni;
16. Alokasi anggaran pembangunan Infrastruktur Jalan;
17. Pembangunan Panggung Upacara;
18. Lanjutan Pembangunan Terminal Tarengge;
19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Unit Transfusi Darah;
20. Perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
21. Lanjutan Pembangunan Kantor Kodim;

22. Pembangunan Sirkuit Road Race;
23. Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Puskesmas, Pengadaan Bus Sekolah, Mobil Jenazah, Pengadaan Kendaraan Persampahan, Pemadam Kebakaran dan Mobil Tangki PDAM;
24. Perbaikan Sarana dan Prasana Pendidikan, Kesehatan dan Puskesmas;
25. Bantuan Penyediaan Perlengkapan Sekolah (Seragam sekolah);
26. Pengadaan Benih Padi Unggul;
27. Pengembangan Sarana, Prasarana dan budidaya bidang perikanan;
28. Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu;
29. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah;
30. Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Beresiko Sosial;
31. Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pekerja Rentan;
32. Lanjutan Program Bantuan Keuangan 1 Miliar 1 Desa;
33. Pelaksanaan kegiatan prioritas hasil musrembang;
34. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
35. Pengembangan Destinasi wisata;
36. Pengembangan Pujasera Malili;
37. Pelaksanaan Pilkades.

**Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**

Uraian	Realisasi		Target 2024	Tahun Rencana Tahun 2025	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2026**
	2022	2023*			
BELANJA DAERAH	1.666.445.074.250,42	1.837.385.393.141,02	1.986.497.196.736,00	2.038.991.884.50,00	2.025.253.836.982,00
Belanja Operasi	1.060.206.782.144,49	1.192.100.388.211,67	1.303.164.083.591,00	1.320.440.018.242,00	1.331.846.544.845,00
Belanja Pegawai	486.820.782.784,00	537.295.321.549,48	615.012.659.762,00	638.663.910.908,00	639.843.795.900,86
Belanja Barang dan Jasa	486.675.232.900,43	572.856.276.882,27	600.029.635.605,00	612.897.783.340,00	622.091.250.090,10
Belanja Hibah	80.641.627.360,06	77.372.989.779,92	84.417.970.224,00	64.674.523.994,00	65.644.641.853,91
Belanja Bantuan Sosial	6.069.139.100,00	4.575.800.000,00	3.703.800.000,00	4.203.800.000,00	4.266.857.000,00
Belanja Modal	289.744.487.264,93	313.774.159.447,75	336.567.635.145,00	371.786.388.408,00	347.141.814.137,00
Belanja Modal Tanah	7.860.552.480,00	343.356.122,00	385.000.000,00	426.643.878,00	300.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.712.736.356,00	46.103.713.018,52	51.080.375.276,00	51.057.037.533,00	51.081.372.256,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	94.715.866.695,32	105.771.958.194,59	140.089.523.040,00	141.407.087.885,00	142.724.652.730,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.096.590.733,61	160.649.281.012,64	142.887.383.329,00	176.700.363.212,00	150.681.630.851,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	319.241.000,00	905.951.100,00	2.030.353.500,00	2.154.755.900,00	2.279.158.300,00
Belanja Modal Aset Lainnya	39.500.000,00	0,00	95.000.000,00	40.500.000,00	75.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	707.600.000,00	548.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	707.600.000,00	548.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Transfer	315.786.204.841,00	330.962.845.481,60	343.265.478.000,00	343.265.478.000,00	343.265.478.000,00
Belanja Bagi Hasil	18.735.918.471,00	20.599.397.923,00	21.572.100.000,00	21.572.100.000,00	21.572.100.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	173.050.286.370,00	186.363.447.558,60	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00
Belanja Bantuan Keuanan Khusus	124.000.000.000,00	124.000.000.000,00	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00

*) LRA Anaudited

**) Proyeksi RPD Tahun 2026

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

1. Memperhatikan batas maksimal kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan tentang penyusunan RAPBD.
2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan alokasi kebijakan keuangan sebagai implikasi dari rencana penerimaan Pendapatan dan rencana kebutuhan Belanja Daerah. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut dalam suatu kebijakan pembiayaan. Pada Tahun 2025 direncanakan komposisi Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp.66.063.884.650,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp.5.000.000.000,00

C. Pembiayaan Netto Rp.56.063.884.650

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.



Sasaran pembangunan adalah kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah sementara Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya adalah program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 menekankan pada pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021- 2026.

perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan pada (1) hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD; (2). identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional (3). rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta mengacu dan memperhatikan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Rencana kerja pemerintah daerah Sulawesi Selatan tahun 2025,
3. RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026,
4. Pokok –pokok pikiran DPRD

Secara garis besar substansi bab ini terdiri dari:

- A. Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026;
- B. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025; RKP Nasional 2025, RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2025, RKPD Kabupaten Luwu Timur 2025;
- C. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025;
- E. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDG's Kabupaten Luwu Timur ;
- D. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Luwu Timur;

- G. Dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- H. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
- I. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- J. Fasilitas Perubahan Iklim
- K. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- L. Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025. Secara detail diuraikan sebagai berikut.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disesuaikan berdasarkan Misi pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan ini dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara Misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya Visi.

4.1.1. Tujuan Pembangunan.

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara menciptakan kondisi yang memungkinkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan dalam RPJMD adalah kondisi yang akan dicapai atau sesuatu yang akan diubah selama periode RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, rumusan tujuan berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

1. ***Penjabaran tujuan pada Misi-1*** yakni “**Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh**” adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesetaraan gender
2. ***Penjabaran tujuan pada Misi-2*** yakni “**Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas**” adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah ; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. ***Penjabaran tujuan pada Misi-3*** yakni “**Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas**” adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan” dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. ***Penjabaran tujuan pada Misi-4*** yakni “**Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**” adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. ***Penjabaran tujuan dari Misi-5*** yakni “**Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat**” adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. ***Penjabaran tujuan dari Misi-6*** yakni “**Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya**” adalah Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

4.1.2. Sasaran Pembangunan.

Sasaran dalam RPJMD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Keterkaitan antar rumusan tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator sasaran, dan target berdasarkan masing-masing Misi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target/Proyeksi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2025

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target/Proyeksi Kinerja Tahun -		
					*2024	**2025	
1	2	3	4	5	10	11	
	Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya						
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1:					
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1	Angka Kemiskinan	%	6,24	6,04
		Sasaran-1:					
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,40	74,70
		Sasaran-2:					
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	Maju
		Sasaran-3:					
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	90,05	91,18
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Tujuan-2:					
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5	Pertumbuhan Ekonomi	%	2.98-3,71	3.22-3,50
			6	Rasio Gini	Nilai	0,247	0,232
		Sasaran-4					
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2.08	2.17
		Sasaran-5:					
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2.80	2.55
		Tujuan-3:					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target/ProyeksiKinerja Tahun -		
					*2024	**2025	
	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9	Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	2,2638 (Sedang)	2,3230 (Sedang)
		Sasaran-6:					
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	75,15	75,32
		Sasaran-7:					
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	88,35	88,70
			12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-4:					
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	B
		Sasaran-8:					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	A (Baik)	A (Baik)
			15	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	A	A
		Sasaran-9:					
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	85,68	87,78
			17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	86,23	88,10
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-5:					
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	18	Angka Kriminalitas	Point	0,000473	0,000451
		Sasaran-10:					
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	77,21	77,43

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target/Proyeksi Kinerja Tahun -	
					*2024	**2025
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-6:				
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	76,00	76,34
			21 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55.27	55.77
		Sasaran-11:				
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	95
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	95

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan juga memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

4.2.1. Tema pembangunan RKPD Tahun 2025

Tabel 4. 3 Tema Pembangunan Tahun 2025

Tema RKP Nasional	Tema Provinsi Sulawesi Selatan	Tema Kabupaten Luwu Timur
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas Ketahanan Desa

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan table tersebut, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 mengusung tema pembangunan yaitu ***Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas Ketahanan Desa***. Tema pembangunan tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan pembangunan tahun ke empat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

4.2.2. Prioritas pembangunan Tahun 2025

4.2.2.1. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4.1
Prioritas Nasional



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif; melalui upaya:
 - (a) Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel;
 - (b) Meningkatkan akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah;
 - (c) Optimalnya Kualitas pelayanan public;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata; melalui upaya
 - (a) Peningkatkan Pembangunan Infrastuktur yang berkualitas dan
 - (b) peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah

3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah; melalui upaya
 - (a) Peningkatan produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah
 - (b) Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata; melalui upaya
 - (a) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata
 - (b) Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja
 - (c) Menurunnya angka kemiskinan
 - (d) Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
 - (e) Meningkatnya Kualitas dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
5. Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup; melalui upaya
 - (a) Meningkatkan kualitaslingkungan hidup yang Berkelanjutan
 - (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Prioritas Pembangunan Tahun 2025 tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan isu strategis daerah.

Tabel 4. 4 Highlight Indikasi Intervensi di Sulawesi Selatan berdasarkan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	<i>Highlight Indikasi Intervensi*</i>
Prioritas Nasional 1: Memperkokohideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	▮ Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat ▮ Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkansistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	▮ Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros ▮ Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar

Prioritas Nasional	<i>Highlight Indikasi Intervensi*</i>
	- Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone - Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten
	- Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana - Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa - Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial - Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata - Fasilitasi <i>business matchmaking startup digital</i> - Fasilitasi <i>digital technopreneur</i> - Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	- Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara - Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo - Penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar-Parepare - Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto - Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim - Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	- Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto - Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar - Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan - Pengendalian sedimen Sungai Radda - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	- pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan - Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) - Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) - Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga - Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar - Pembangunan kualitas keluarga - Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) - Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Penguatan industri logam dasar - Hilirisasi industri kakao - Hilirisasi industri rumput laut - Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
	Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	- Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo - Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi - Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar - Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	- Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional - Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	- Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep - Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar - Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Sumber: rancangan akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD)

dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk pemantapan kualitas pelayanan public, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan kualitas ketahanan desa, dengan prioritas pembangunan sebagaimana berikut:

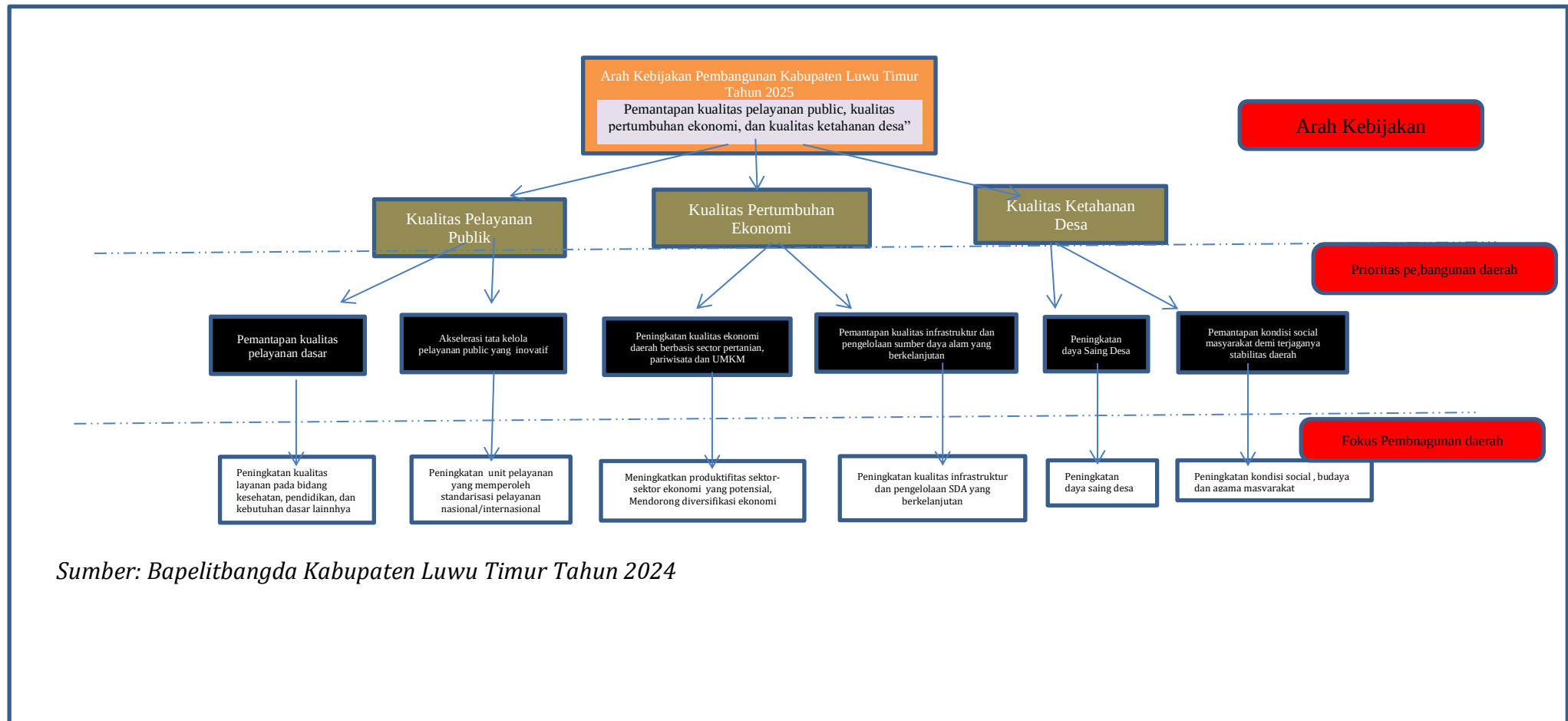
Tabel 4. 5 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Peningkatan kualitas layanan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya
2	Akselerasi tata kelola pelayanan public yang inovatif	Peningkatan unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional/internasional
3	Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	Meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi yang potensial, Mendorong diversifikasi ekonomi
4	Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan
5	Peningkatan daya Saing Desa	Peningkatan daya saing desa
6	Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Peningkatan kondisi social, budaya dan agama

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 4.2
Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Luwu Timur dengan Arah Kebijakan RPJMD tahun 2021-2026



Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam RKPD Tahun 2025 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD 2023 sejumlah 6 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan pemantapan kualitas pelayanan public, kualitas pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketahanan desa.

Tingkat kesesuaian dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD 2025 dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Luwu Timur, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) dan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025 secara nasional dituangkan ke dalam 8 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam RKPD 2025 dengan sasaran PN RKP 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 6 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025

NO	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP	Sasaran RKPD Luwu Timur	Indikator sasaran RKPD Luwu Timur
PN 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	Indeks Ketertiban dan Ketentraman
PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru			
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	Angka Kriminalitas Indeks Ketertiban dan Ketentraman
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Pertumbuhan Ekonomi (%) Rasio Gini (Nilai) Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatkan Pemberdayaan Gender (S3)	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)
PN.5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah (S3)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
PN 6. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1	Presentase Desa Mandiri	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa yang berkelanjutan (S2)	Indeks Desa Membangun (Status Desa)
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan penyeludupan			
1	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (S9)	Nilai SAKIP Daerah

NO	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP	Sasaran RKPD Luwu Timur	Indikator sasaran RKPD Luwu Timur
			IKM Pelayanan SPM (Nilai)
			IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Nilai)
PN 8. Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat			
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Indeks kerukunan umat beragama
			Indeks Pembangunan Kebudayaan
			Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat
			Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat
2	Indeks kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Indeks kerukunan umat beragama
			Indeks Pembangunan Kebudayaan
			Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat
			Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Sebagaimana telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 -2026 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 11 sasaran. Sedangkan, sasaran prioritas nasional tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, berjumlah 62 sasaran. Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 12 sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur, yang terkait dan sesuai dengan sasaran prioritas nasional adalah sebanyak 11 sasaran prioritas nasional tahun 2025. Secara persentase tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2025 sebesar 19,35%.

Keselarsan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tmur dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Luwu Timur
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila dan HAM	1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	6 Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah
		5 Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	5 Peningkatan daya Saing Desa
3	Melanjutkan pemgembangna infrstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendiring kewirausahaan, mengembangkan indutsri kreatif serta mengembangkan agromaritim indutsri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3 Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah 4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	4 Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4	Mempekuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presatsi olah raga, kesetraan gender serta pengutaan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	1 Pemantapan kualitas pelayanan dasar

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Kabupaten Luwu Timur
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	4	Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	3	Pemantapan kuliats Ketahanan Desa
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba judi dan penyelundupan	1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	2	Akselerasi tata kelola pelayanan public yang inovatif
8	Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatantoleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	6	Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 yang berjumlah 6 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 5 prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dengan prioritas nasional RKP tahun 2025 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

2. Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis Permasalahan pembangunan Kabupaten Luwu Timur telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Luwu Timur memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna

pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	* Masih tingginya angka kemiskinan	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat (St1)	Peningkatan kemampuan literasi masyarakat
		* pendataan PPKS belum optimal		Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)	Pencegahan dan penanganan stunting secara integratif
		* Masih Tingginya angka stunting		Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)	Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting
		* Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal			
		* masih adanya pengangguran			
		* masih adanya angka putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat			
		* Masih adanya anak usia sekolah tidak sekolah			
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	* Belum optimalnya peranan BUMD	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM (5)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		* masih kurangnya lapangan pekerjaan			Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan		Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		*	belum berkembangnya industri kreatif berbasis digital	Peningkatan daya Saing Desa	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)	Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA
		*	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan			Pengembangan sarana/prasarana ibadah
						Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya
3	Kesenjangan wilayah	*	kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM (5) Peningkatan daya Saing Desa	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut
		*	konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat			
		*	kondisi demografis yang berbeda			
4	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	*	rentan terjadinya gempa	(4) Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (3) Pemantapan Kualitas Ketahanan Desa	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)	Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis reduce, reuse dan recicle
		*	curah hujan yang cukup tinggi sehingga rawan terjadi longsor			Pengelolaan cagar budaya secara terpadu
		*	masih tingginya pencemaran air			Pembinaan sejarah daerah
		*	masih tingginya sampah yang belum dikelola			
5	Tata kelola pemerintahan	*	masih rendahnya etika birokrasi	(2) Akselerasi tata kelola pelayanan publik yang inovatif	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)	Perbaikan pelayanan penanaman modal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan		Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		*	masih rendahnya pelayanan publik		Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)	Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah
		*	belum optimalnya digitalisasi			Modernisasi sistem pengelolaan arsip
						Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan
6	Kondusifitas Wilayah	*	Masih tingginya angka kriminalitas	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)	Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara
		*	Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya dan agama		Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)	Pengembangan teknologi tepat guna
						Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						Pengembangan sarana/prasarana ibadah

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

3. Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2025 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, lada, kelapa sawit, padi, ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang memuat janji

tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 9 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran DPRD	
1	Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	1	percepatan pembangunan hilirasi industri
			2	Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan
			3	pendataan pelajar dan mahasiswa
2	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	4	Percepatan pembangunan sarana perhubungan udara, pelabuhan jaringan listrik, transportasi dan komunikasi
			5	Menggali potensi sumber-sumber PAD
3	Kesenjangan wilayah	(4) Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,	6	Percepatan pembangunan infrastruktur jembatan, sarana irigasi, pendukung pertanian, jalan tani, jaringan air bersih
			7	Menjaga stabilitas harga bahan pokok
		(5) Peningkatan daya Saing Desa	8	penindakan dan penertiban BBM dan pupuk ilegal
4	Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	(4) Pemantapan kualitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	9	Pencegahan dan pembangunan pasca bencana
			10	pencegahan kerusakan lingkungan
			11	Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang
5	Tata kelola pemerintahan	(2) Akselerasi tata kelola pelayanan publik yang inovatif	12	Peningkatan kualitas pelayanan publik
6	Kondusifitas Wilayah	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	13	Penataan pengelolaan pemerintahan desa
			14	Pembenahan sistem administrasi dan aset pemerintah daerah
			15	Peningkatan sarana ibadah

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Perlindungan Perempuan
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Pengelolaan Persampahan
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Informasi dan Komunikasi Publik
15. Program Aplikasi Informatika
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
23. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan
27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
28. Program Peningkatan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
29. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran

pembangunan daerah. Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas.

Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi dan prioritas nasional dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 4. 10 Keterkaitan Sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas Pembangunan, dan Prioritas Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya Kualitas Manusia yang berdayasaing (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	74,70	(1) Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas (PN 4)
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase capaian SPM Bidan Kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Berkompeten		
				Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif ('%) ('%)		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan ('%)	RSUD I LAGALIGO	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK ('%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial ('%)		
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialr ('%)		
				Program Pengendalian Penduduk	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Program Pembinaan keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)		
					Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)		
				Program Pembinaan keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (persen)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata-rata usia Kawin Pertama (Nilai)		
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) (Persen)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Keolahragaan	Persentase tingkat prestasi olahraga (%) (Persen)		
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif (Persen)		
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender ('%)	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan berkelanjutan (S2)	Indeks Desa Membangun (IDM) (Status Desa)	Maju	(5) Peningkatan Daya Saing Desa	Program Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan desa ('%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN 6)
				Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa ('%)		
				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran ('%)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)		
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)	Kecamatan	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)		
Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Indeks Pemberdayaan gender	91,18	(1) Pemantapan kualitas pelayanan dasar	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (persentase)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN 2)
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) ('%) ('%)		
			(6) Peningkatan kondisi sosial, budaya dan agama	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ('%) 76.02		
					Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta ('%)		
				Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ('%)		
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi ('%)		
				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO ('%)		
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Ratio layanan pembelajaran keluarga ('%)		
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Persen)	2,17	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan ('%)	Dinas Pertanian	1. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,M mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3)
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ('%)		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan (Kelurahan)		
					Jumlah Desa Rentan rawan pangan (Desa)		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu (Orang/Peserta)		
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi sehat ('%)	an, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi ('%)		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)		
				Program Pengembangan Umkm	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)		
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	Dinas Perikanan	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)		
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan (Ton)		
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata (Persen)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
				Program Pemasaran Pariwisata	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur (Persen)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	Dinas Pertanian	
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Populasi Unggas (ekor)		
					Jumlah Produktivitas kelapa sawit (Ton/ Ha)		
					Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen)		
					Jumlah Produktivitas Jagung (Ton/ Ha)		
					Jumlah Produktivitas padi (Ton/ Ha)		
					Jumlah Produktivitas lada (Ton/ Ha)		
					Jumlah Populasi ternak Kecil (ekor)		
					Jumlah Produktivitas kakao (Ton/ Ha)		
					Jumlah Populasi ternak Besar (ekor)		
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner ('%)		
					Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Presentase Perizinan usaha pertanian (Persen)		
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)		
					Presentase Penyuluhan Pertanian (Persen)		
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)		
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)		
Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	255,00	(3) Peningkatan kualitas ekonomi daerah berbasis sector pertanian, pariwisata dan UMKM	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	Dinas Trasnmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (%)		
				Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							Penyadang Disabilitas (PN 4)
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)	Disdagkop dan UKM	2. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,M engembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3)
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	DPMPTSP	
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi PMDN (Rupiah)		
					Jumlah Realisasi PMA (Rupiah)		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal ('%)		
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur (Persen)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi ('%)	Disdagkop dan UKM	
Meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur (S6)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)	75,59	(4) Pemantapan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio jaringan irigasi (Angka)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,M
					Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air ('%)		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun ('%)		mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 2)
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman ('%)		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik ('%)		
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) ('%)		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten ('%)		
					Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang di bangun ('%)		
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik ('%)		
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja ('%)		
					Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi ('%)		
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian penataan Ruang ('%)		
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Luas RTH publik yang ditata ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang ('%) Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni ('%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni () Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani ('%)		
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani ('%)		
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU ('%)		
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda ('%)		
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara ('%)		
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas lahan yang dibebaskan ('%)		
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase izin lokasi ('%)		
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan ('%)	Dinas Perhubungan	
					Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan ('%)		
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau		
					Persentase Kapal yang laik berlayar di laut ('%)		
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)	202 (Tinggi)	(4) Pemantapan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) (Point)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN 2)
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ('%)		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ('%)		
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender ('%)		
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat	DSP3A	
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)		2. Memperkuat Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	Dinas Lingkungan Hidup	Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas (PN 4)
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)		
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)		
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)		
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)		
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)		
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian ('%)	Dinas Pertanian	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Nilai SAKIP Daerah (Predikat)	A	(2) Akselerasi Tata Kelola Pelayanan Publik yang Inovatif	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) (Predikat)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas (PN 4)
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen ('%))	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen ('%))		
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ('%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD ('%)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender ('%)		
					Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik ('%)	Badan Pendapatan Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (Persen)	Inspektora t	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT ('%)	Kecamatan	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan ('%)		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	IKM Pelayanan SPM (Nilai) (Nilai)	87,78	(2) Akselerasi Tata Kelola Pelayanan Publik yang Inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)	Sekretariat Daerah	1. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan penyeludupan (PN 7)
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar ('%)	BKPSDM	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar ('%)	BPBD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar ('%)	BPKD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar ('%)	Bapelitban gda	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Perikanan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dukcapil	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Kesehatan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Lingkungan Hidup	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	PUPR	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	DPMD	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	DPMPTSP	Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3)
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dukcapil	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Disagkop	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Perhubungan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Perpus	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Pertanian	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Perkimtan \	3. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Satpol PP	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	SP3A	Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN 5)
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Sekretariat DPRD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Inspektora t	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Kesbang	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	RSUD I Lagaligo	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Damkar	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Pendapata n	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkatdaerah berjalan sesuai standar (%)	Kecamatan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) ('%)	DP3A	
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ('%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran ('%)		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi ('%)		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan data kependudukan yang disediakan ('%)		
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen ('%))	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender (persen ('%))		
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam ('%)	Disdagkop	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP ('%)	DPMPTSP	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam	Dinas Komunikasi dan					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen ('%'))	Informatika	
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan ('%')	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup ('%')		
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali ('%')	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar ('%')		
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan ('%')	Sekretariat Daerah	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan ('%')		
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Kegiatan Legislasi Yang DI Fasilitas (%) ('%')	Sekretariat DPRD	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat (%) (Persentase)	Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun (Persen)		
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah ('%)	Badan Perencana an, Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
					Persentase implementasi rencana kelitbangan ('%)		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina ('%)	Inspektora t	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)	Kecamatan	
Terpelihara nya rasa aman dan damai dalam	Indeks Ketertiban dan Ketentram an (Nilai)	77,43	(6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (Persen)	Satpol PP	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PN 1)
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Persen)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
masyarakat (S10)					Persentase Penegakan Perda (Persen)		
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Persen)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN 2)
					Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten (Persen)		
					Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran (Persen)		
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)	Kecamatan	3. Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat (PN 8)
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan ('%)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi ('%)		
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial ('%)		
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Cakupan penerapan nilai agama dalam masyarakat ('%)	95	(6) Pemanfaatan Kondisi Sosial Masyarakat Demi Terjaganya Stabilitas Daerah	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	Dinas Lingkungan Hidup	1. Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat (PN 8)
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna ('%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan ('%)	Dinas Pendidikan	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	persentase sanggar seni budaya yang dibina ('%)		
				Program Pembinaan Sejarah	persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan ('%)		
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan ('%)		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggungjawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

4.2.2.3.1 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025

Perencanaan Pembangunan infrastruktur pada RKPD Tahun 2025 diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan tidak sebatas pada bidang pekerjaan umum tetapi juga bidang pendidikan, kesehatan, pertanian serta sektor pariwisata.

Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik dan mendorong kemandirian dan ketahanan desa serta meningkatkan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi. Penguatan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi melalui peningkatan layanan infrastruktur khususnya jalan akan berdampak pada pergerakan ekonomi masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di sektor Pendidikan bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan pada masyarakat. Pembangunan fasilitas pendidikan akan berdampak pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pencegahan stunting.

Perencanaan pembangunan infrastruktur pada sektor Pertanian Ketahanan Pangan, dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan Penguatan sektor pertanian dan pariwisata, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

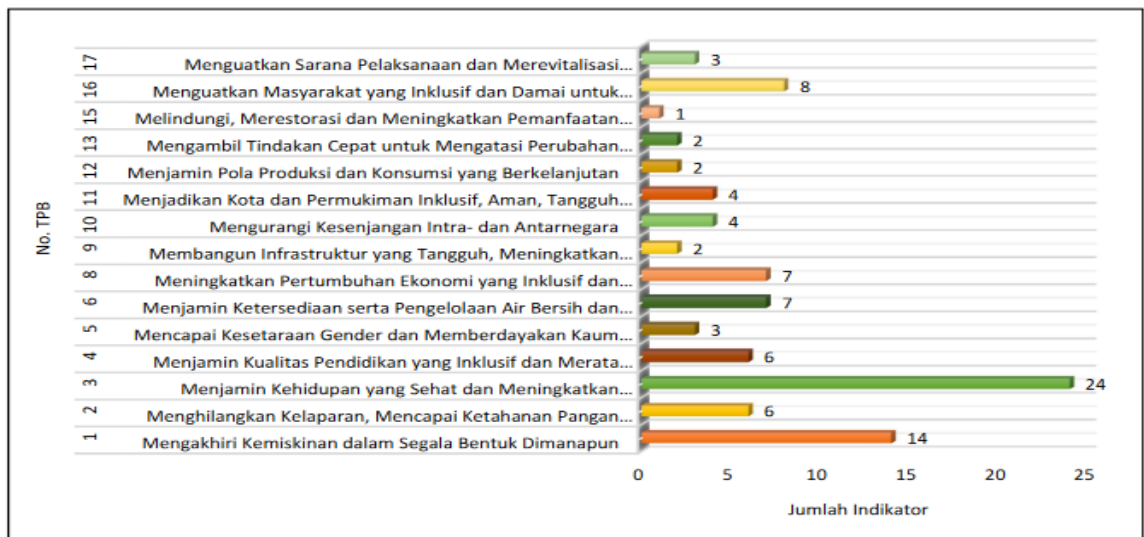
Perencanaan Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas tahun 2025 antara lain Lanjutan Pembangunan Islamic Centre, lanjutan Pembangunan stadion olahraga, lanjutan Pembangunan Malili River side, penataan Bundaran Bumi Batara

Guru, lanjutan pembanguna Rumah Sakit Atue dan Towuti, lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda, lanjutan Pembangunan pasar Tomoni serta berbagai sarana prasarana public.

4.2.2.3.2 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam mendukung pencapaian target SDGs Kabupaten Luwu Timur

Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 105 indikator dari total 202 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa TPB yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dengan jumlah keberhasilan paling banyak yaitu TPB 3 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) mencapai 24 indikator.

Gambar.4.3
Jumlah indikator pada setiap tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan 15 TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 93 dan telah

mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target tersebut. Guna meningkatkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, pencapaian target ini perlu dipertahankan dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Prioritas TPB di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 7 TPB Prioritas yaitu:

1. TPB 4: Pendidikan Berkualitas, dengan isu strategis Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Keterbatasan akses dan fasilitas Pendidikan.
2. TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, dengan isu strategis Masih rendahnya daya saing pada sektor industri dan Belum optimalnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
3. TPB 2: Tanpa Kelaparan, dengan isu strategis Belum terjaminnya keamanan pangan dan Belum optimalnya pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.
4. TPB 5: Kesenjangan Gender, dengan isu strategis Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
5. TPB 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, dengan isu strategis Minimnya sarana dan prasarana pengolahan sampah dan Masih adanya masyarakat bermukim di wilayah rawan bencana
6. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dengan isu strategis Belum meratanya fasilitas dan ketersediaan layanan Kesehatan.
7. TPB 13: Penanggulangan Perubahan Iklim, dengan isu strategis Masih rendahnya upaya adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

4..2.2.3.3 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam mendukung penanganan Stunting Kabupaten Luwu Timur

Masalah stunting masih menjadi episode panjang masalah kesehatan balita di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Target penurunan prevalensi stunting di Indonesia diselaraskan dengan target global, yaitu target World Health Assembly (WHA) untuk menurunkan prevalensi stunting sebanyak 40% pada tahun 2025 dari kondisi tahun 2013. Selain itu, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

(TPB/SDGs) adalah menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan penurunan stunting dari kondisi saat ini agar prevalensi stunting Balita turun menjadi 22% pada tahun 2025.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung penanganan stunting kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 4. 11 Sasaran, Prioritas Pembangunan Dan Program Yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
1	Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
4	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertahanan
5	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pemantapan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaam Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
7	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Akselarasi Tata Kelola Pelayanan Publik yang inovatif	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Pemantapan Kondisi Sosial Masyarakat Demi Terjaganya Stabilitas Daerah	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Akselarasi Tata Kelola Pelayanan Publik yang inovatif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Pemantapan Kondisi Sosial Masyarakat Demi Terjaganya Stabilitas Daerah	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Pemantapan Kondisi Sosial Masyarakat Demi Terjaganya Stabilitas Daerah	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Pelaksana
14	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemantapan Kondisi Sosial Masyarakat Demi Terjaganya Stabilitas Daerah.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Akselarasi Tata Kelola Pelayanan Publik yang inovatif.	Program Pencatatan Sipil	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Percepatan penurunan stunting dalam rancangan RKPD dialokasikan Sub kegiatan sebagai berikut antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil pada Dinas Kesehatan;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu bersalin pada Dinas Kesehatan;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir pada Dinas Kesehatan;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita pada Dinas Kesehatan;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif pada Dinas Kesehatan;
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir pada Dinas Kesehatan;
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 11) Sub kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calonpengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran baduta/balita) pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 12) Sub kegiatan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran baduta/balita pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 13) Sub kegiatan fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) di kampung keluarga berkualitas pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Strategi Nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi dengan kelompok sasaran meliputi: Remaja; Calon pengantin; Ibu hamil; Ibu menyusui; dan Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar memaksimalkan belanja untuk percepatan stunting sesuai keluaran (output) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

4.2.2.3.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan, menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) sebagaimana amanat butir E.2.ak.2). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengarahkan program-program yang dapat menyentuh indikator percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0% maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerapkan 3 strategi yaitu: **1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat** melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial melalui kelompok dan program/kegiatan seperti Bantuan Sosial, *Universal Health Coverage (UHC)* dalam pelayanan Kesehatan, Bantuan beasiswa Miskin dan berprestasi **2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat** seperti program padat karya, program vokasi dan Pelatihan, peningkatan akses aset produktif, dan KUBE. **3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar** seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rancangan RKPD dialokasikan Sub kegiatan sebagai berikut antara lain

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan peserta didik sekolah dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas siswa sekolah menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan peserta didik sekolah Menengah pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Sub Kegiatan perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Sub Kegiatan Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 9) Sub kegiatan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11) Sub kegiatan penyediaan permakaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12) Sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 13) Sub kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Sub kegiatan penyediaan makanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pada Dinas Perikanan;
- 16) Sub kegiatan Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pada Dinas perdagangan koperasi, UKM dan Perindustrian;
- 17) Sub kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinas perdagangan koperasi, UKM dan Perindustrian;
- 18) Sub kegiatan produksi dan pengolahan pemasaran sumber daya manusia serta desain dan teknologi pada Dinas perdagangan koperasi, UKM dan Perindustrian;

4.2.2.3.5 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Luwu Timur

Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (pengalaman, aspirasi, kebutuhan baik laki-laki maupun

perempuan) menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan, perencanaan dan penganggaran yang tepat. Hal ini sejalan dengan amanat INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sampai dengan tahun 2025, Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) telah ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan selain Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dimana dalam pelaksanaannya PUG harus terintegrasi didalam semua kebijakan, program dan seluruh kegiatan yang ada di setiap Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 12 Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Akselerasi Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Inovatif	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Perlindungan Anak

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Kebijakan daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 antara lain :

- Mendorong penyusunan kebijakan (Perda/Perbup) dan kebijakan daerah lainnya yang Responsif Gender
- Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, dengan demikian dapat dioperasionalkan menjadi program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang mengharuskan pelibatan perempuan/kelompok perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
- Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan daerah responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan **akses, kontrol, partisipasi** dan **manfaat** yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses dan

pelaksanaan pembangunan daerah.

- Mengintegrasikan PUG dalam penyusunan seluruh dokumen dan kebijakan daerah

4.2.2.3.6 Fasilitasi Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur adalah banjir, kebakaran rumah, kebakaran hutan dan lahan, orang hilang/tenggelam, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah pelepasan gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O), dan gas-gas lainnya ke atmosfer. Ketika gas-gas ini terkumpul di atmosfer, mereka menyebabkan efek rumah kaca, yang memungkinkan sinar matahari masuk ke atmosfer tetapi menghalangi panas untuk keluar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pola pertanian yang tidak berkelanjutan, merupakan penyebab utama dari emisi gas rumah kaca. Ini adalah masalah serius yang berkontribusi pada perubahan iklim global dan dapat memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Penurunan emisi gas rumah kaca adalah upaya untuk mengurangi jumlah gas-gas tersebut yang dilepaskan ke atmosfer. Langkah-langkah untuk mencapai penurunan ini antara lain transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah.

Gempa bumi adalah bencana yang terbanyak terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Potensi bahaya gempa bumi masuk dalam kategori tinggi, dan merupakan dampak dari aktivitas Sesar Matano dan Sesar Palu Koro. Sebanyak 11 kecamatan teridentifikasi pada potensi bahaya tersebut. Jumlah sesar yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 9 sesar, 6 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahun 2023 jumlah kejadian gempa bumi terjadi sebanyak 267 kali dengan skala 1,0 sampai 4,5 SR. Kejadian gempa bumi tersebut tidak mengakibatkan kerusakan, hanya getaran saja. Dari 267 kali kejadian, 3 kali kejadian yang berasal dari luar kabupaten Luwu Timur yaitu Bungapati, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara 1 kali kejadian, Laut Bone bolango Gorontalo 1 kali kejadian dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah 1 kali kejadian dan selebihnya 264 kejadian adalah gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Indeks Risiko Bencana adalah alat atau metode yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat risiko atau potensi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/ kota. Dan dapat juga digunakan untuk perbandingan tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lain.

Penurunan Nilai IRB setiap tahunnya karena beberapa indikator dalam pengurangan risiko bencana telah terpenuhi misalnya tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB, Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD, Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB), tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen RTRW, adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dan Pemulihan Pasca Bencana.

Pada tahun 2021 tingkat emisi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 341,31 ton CO₂e (equivalen). Angka ini naik menjadi 349,52 ton CO₂e pada tahun 2022 dan naik lagi menjadi 349,53 ton CO₂e pada tahun 2023. Pemerintah daerah Kabupaten

Luwu Timur terus berupaya untuk menekan intensitas emisi CO2 ini dengan melaksanakan penanaman pohon melalui dinas lingkungan hidup, serta menggunakan pupuk organik dalam kegiatan pertanian. Selain itu usaha dalam mengurangi intensitas emisi carbon oleh pemerintah daerah dengan menetapkan hari bebas kendaraan pada tanggal 5 setiap bulannya serta melakukan pengomposan terhadap sampah organik (tidak melakukan pembakaran sampah).

4.2.2.3.7 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, SPM Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta SPM Bidang Sosial Pemerintah daerah secara konsisten memenuhi mandatory yang diamanatkan oleh undang-undang. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 13 Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung SPM di Kabupaten Luwu Timur

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
			dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)			
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
			kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	a)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan			b)Program Pengelolaan dan Pengembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
			pengolahan air limbah domestik			Sistem Air Limbah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	Program Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1) Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar 6) Pemantapan kondisi social masyarakat demi terjaganya stabilitas daerah	a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum b) Program Penanggulangan Bencana c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Pelayanan Informasi rawan Bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara			
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Persentase anak telantar yang memperoleh	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan	Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar	a) Program Pemberdayaan Sosial;

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		telantar di luar panti	rehabilitasi sosial di luar panti	ketahanan bencana		b) Program Rehabilitasi Sosial; c). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e). Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber : Bapelitbangfda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, data diolah

4.2.2.3.8 Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025

Dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui berbagai tahapan kegiatan, salah satunya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD 2025. Adapun hasil Musrenbang antara lain sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

N o.	Tema Tahunan	Kebijakan Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah	Kecamatan
1	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pencegahan dan Penanganan Stunting secara integratif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pencegahan dan penanganan stunting	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Malili
2	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Optimalisasi Perumusan kebijakan dan fasilitas pelayanan bagi fungsi perangkat daerah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Optimalisasi Sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Dinas PUPR	Nuha
3	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Dinas PUPR	Wotu
4	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan	Peningkatan kemampuan literasi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Burau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

N o.	Tema Tahunan	Kebijakan Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah	Kecamatan
	Kualitas Ketahanan Desa						
5	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan	Kalaena
6	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	Dinas perdagangan, koperasi, UKM dan Perindustrian	Mangkutana
7	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di Tingkat	Persentase tingkat prestasi olahraga	Dinas Pariwisata, Kepemanduan Dan Olahraga	Tomoni Timur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

N o.	Tema Tahunan	Kebijakan Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah	Kecamatan
				kabupaten /kota			
8	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi , Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata a dan sektor jasa lainnya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Penyediaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Angkona
9	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi , Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata a dan sektor jasa lainnya	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Tomoni
10	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi , Dan Kualitas Ketahanan Desa	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata a dan sektor jasa lainnya	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jembatan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	Dinas PUPR	Towuti
11	Pemantauan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi , Dan	Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata a dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio jaringan irigasi	Dinas PUPR	Wasuponda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

N o.	Tema Tahun an	Kebijaka n Prioritas	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Perangk at Daerah	Kecam atan
	Kualitas Ketahan an Desa	sektor jasa lainnya					

Sumber: Bapeltbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD 2024 sebagaimana tabel diatas, terlihat bahwa terdapat keselarasan antara Tema Pembangunan, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program dengan usulan kegiatan Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.



5.1. Kerangka Pendanaan.

Perhitungan Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah dianalisis secara cermat dan terukur. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah, analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menyajikan Proyeksi Pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun 2025. Untuk mengetahui kapasitas fiskal riil keuangan daerah, maka yang pertama dianalisis adalah seluruh pengeluaran periodik wajib dan prioritas utama pada masa sebelumnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Tujuan dari perhitungan asumsi makro adalah untuk mengetahui besaran pendapatan dan belanja yang diperlukan dalam lima tahun kedepan.

Dalam menyajikan proyeksi pendapatan dan belanja, dengan melihat realisasi pendapatan lima tahun terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi asumsi pendapatan dan belanja daerah selama 2 tahun terakhir.

5.1.1 Asumsi Makro Ekonomi, Sosial dan kebijakan Fiskal Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam rancangan RPJMD tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 5. 1 Asumsi Target Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kab. Luwu Timur Tahun 2025

12	Indikator	Target RPJMD	Target RKPD
		2025	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	3.22-3,50	3,28
2	Tingkat Kemiskinan	2,55	5,73
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,04	4,15
4	Gini Ratio	74,70	0,377
5	IPM	0,332	75,30

Sumber: Rankhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Asumsi makro ekonomi daerah Kab. Luwu Timur disusun mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju diharapkan memberikan dampak yang besar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab.Luwu Timur sangat tergantung terhadap share sub sektor pertambangan Nikel yang mendominasi hampir kurang lebih 40% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Nikel dunia, hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Luwu timur dimasa pandemic ini tetap bertumbuh Positif, disaat kab/Kota di sulsel mengalami penurunan pertumbuhan hingga mencapai minus, selanjutnya sektor pertanian yang memberikan share terbesar kedua (30%) dengan semakin membaiknya perekonomian dalam negeri dan upaya pemerintah provinsi dalam pemulihan ekonomi utamanya pembangunan sektor pertanian sehingga pemerintah daerah tetap optimis share sektor ini dapat memberikan pertumbuhan yang positif. Demikian halnya dengan subsector lainnya dengan upaya yang keras dari pemerintah daerah mengoptimalkan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat bertumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Penetapan target asumsi makro ekonomi menggambarkan bahwa daerah tetap optimis dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kab. Luwu Timur lima tahun ke depan, adapun asumsi makro dimaksud mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita. Keempat indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

5.1.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

5.1.2.1 Proyeksi Pendapatan

Pendapatan dalam persepektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dengan melihat capaian realisasi dan pertumbuhan pendapatan lima tahun yang lalu. Selain itu proyeksi pendapatan untuk lima tahun kedepan setidaknya memperhatikan empat determinan yaitu (1) Asumsi Indikator Ekonomi Makro, (2) Kebijakan Keuangan negara, khususnya perubahan kebijakan untuk dana transfer pusat ke daerah, (3) Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Keuangan Daerah dan (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah.

Proyeksi Pendapatan tahun 2025 di proyeksikan mengalami peningkatan 1,46 persen dibandingkan target pendapatan daerah pada tahun 2024. Peningkatan ini di proyeksi di kontribusi oleh pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer mengalami peningkatan.

Capaian realiasi pendapatan untuk sektor PAD selalu melampaui target yang di tetapkan dalam RPJMD sedangkan untuk dana Transfer Pusat dan Lain-lain

pendapatan daerah yang sah capaian realisasinya di antara 80 – 90 Persen. Berikut di sajikan Proyeksi Pendapatan Untuk Tahun 2025.

Tabel 5. 2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2026**
PENDAPATAN DAERAH	1.951.918.000.000,00	1.969.656.406.000,00
Pendapatan Asli Daerah	396.171.000.000,00	401.541.000.000,00
Pajak Daerah	210.550.000.000,00	215.250.000.000,00
Retribusi Daerah	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	48.391.000.000,00	48.391.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	128.330.000.000,00	129.000.000.000,00
Pendapatan Tranfer	1.532.816.000.000,00	1.514.174.406.000,00
Transfer Pemerintah Pusat	1.119.227.870.000,00	1.097.836.276.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	345.145.000.000,00	326.187.000.000,00
Dana Alokasi Umum	588.649.276.000,00	588.649.276.000,00
Dana Alokasi Khusus	185.433.594.000,00	183.000.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	120.838.130.000,00	120.838.130.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Dana Desa	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	292.750.000.000,00	295.500.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	280.250.000.000,00	283.000.000.000,00
Pendapatan Lainnya	12.500.000.000,00	53.941.000.000,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	53.941.000.000,00	53.941.000.000,00
Hibah	53.941.000.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00

Sumber : BPKD Kab.Luwu Timur

5.1.2.2 Proyeksi Belanja

Sebagaimana Proyeksi Pendapatan, Proyeksi Belanja di asumsikan dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan sehingga Alokasi belanja kedepan tetap memperhatikan postur APBD yang Ideal dengan mengacu kepada Kebijakan Arah Pembangunan untuk lima tahun kedepan untuk membiyai Standar Pelayanan Dasar yang di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup sektor pendidikan, pelayanan kesehatan dan Infrastrukur. Selain itu kebijakan belanja juga memperhatikan belanja wajib mengikat serta prioritas utama sebagai kewajiban

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar **Rp. 2.038.991.884.50,00** di arahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten luwu timur, pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, dan pelaksanaan target visi misi pembangunan yang di tetapkan pada RPJMD. memperhatikan Proyeksi Pendapatan sehingga Postur APBD tetap menjaga besaran defisit untuk tetap melampaui batas yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana capaian Realisasi pendapatan, belanja dan defisit lima tahun terakhir tetap di bawah ambang batas sehingga postur APBD dan pelaksanaannya tetap konsisten dengan defisit yang telah di tetapkan.

Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding target pada tahun 2024 khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan untuk belanja transfer diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya mengakomodir salah Satu Program dari Visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih.

Selain itu Alokasi Belanja juga memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan dasar sebagai belanja wajib dan belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM) di tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 115.130.146.009** Alokasi belanja di arahkan untuk membiayai Program yang memuat Visi Misi Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pencapaiannya untuk lima tahun kedepan. Berikut di sajikan Proyeksi Belanja Untuk Tahun 2025.

Tabel 5. 3 Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target 2024	Tahun Rencana Tahun 2025	Proyeksi 1 Tahun setelah tahun rencana Tahun 2026**
BELANJA DAERAH	1.986.497.196.736,00	2.038.991.884.50,00	2.025.253.836.982,00
Belanja Operasi	1.303.164.083.591,00	1.320.440.018.242,00	1.331.846.544.845,00
Belanja Pegawai	615.012.659.762,00	638.663.910.908,00	639.843.795.900,86
Belanja Barang dan Jasa	600.029.635.605,00	612.897.783.340,00	622.091.250.090,10
Belanja Hibah	84.417.970.224,00	64.674.523.994,00	65.644.641.853,91
Belanja Bantuan Sosial	3.703.800.000,00	4.203.800.000,00	4.266.857.000,00
Belanja Modal	336.567.635.145,00	371.786.388.408,00	347.141.814.137,00
Belanja Modal Tanah	385.000.000,00	426.643.878,00	300.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.080.375.276,00	51.057.037.533,00	51.081.372.256,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	140.089.523.040,00	141.407.087.885,00	142.724.652.730,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.887.383.329,00	176.700.363.212,00	150.681.630.851,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.030.353.500,00	2.154.755.900,00	2.279.158.300,00
Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	40.500.000,00	75.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Transfer	343.265.478.000,00	343.265.478.000,00	343.265.478.000,00
Belanja Bagi Hasil	21.572.100.000,00	21.572.100.000,00	21.572.100.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00	196.693.378.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00

Sumber : Proyeksi BPKD Kab.Luwu Timur

5.1.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan yang memuat Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di asumsikan dengan mempertimbangkan besaran defisit antara Pendapatan dan belanja dan arah kebijakan Invesatasi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025.

Pembiayaan Daerah merupakan alokasi kebijakan keuangan sebagai implikasi dari rencana penerimaan Pendapatan dan rencana kebutuhan Belanja Daerah. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut

dalam suatu kebijakan pembiayaan. Berikut di sajikan proyeksi Pembiayaan untuk Tahun 2025.

Tabel 5. 4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PROYEKSI 2025
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp.66.063.884.650,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.66.063.884.650,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.5.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp.56.063.884.650

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan gambaran analisis kemampuan keuangan daerah diatas, dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam 3 (tiga) kategori prioritas (KP). Yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, **Prioritas I** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. **Prioritas II** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan **Prioritas Iii** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Untuk Tahun 2025, prioritas kapasitas keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur akan dominan diaokasikan, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar khususnya pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita

masyarakat. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dilakukan penyesuaian sesuai dengan realisasi dengan kondisi analisis standar biaya tahun rencana dan dialokasikan untuk program/kegiatan prioritas dan atau program kegiatan baru yang memiliki daya ungkit yang besar terhadap capaian kinerja pembangunan yang ditetapkan. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas Nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan pembangunan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengembangkan suatu wilayah selama periode tertentu. Beberapa karakteristik dari Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain Berdasarkan Kebutuhan Daerah Program ini disusun berdasarkan isu-isu dan kebutuhan pembangunan yang

paling mendesak, Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Program ini merupakan implementasi dari strategi dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, Berdampak Luas diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang luas bagi masyarakat, Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, realistik dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kerangka pendanaan Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai periode sebagaimana yang telah diatur dalam RPJMD Tahun 2021-2026, selain bersumber dari APBD Kabupaten, juga diupayakan sharing pembiayaan dari sumber lainnya seperti APBD I, APBN, Dana Pinjaman, serta melibatkan Stakeholders lainnya maupun swasta. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaanya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab sebagaimana disajikan pada **tabel 5.5. (*Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025*)**

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.



Kerangka Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada.

Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART” yaitu :

- 1) Terukur; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
- 2) Spesifik; dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya;
- 3) Terjangkau; Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
- 4) Realistis; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
- 5) Masa Waktu; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan arahan mengenai

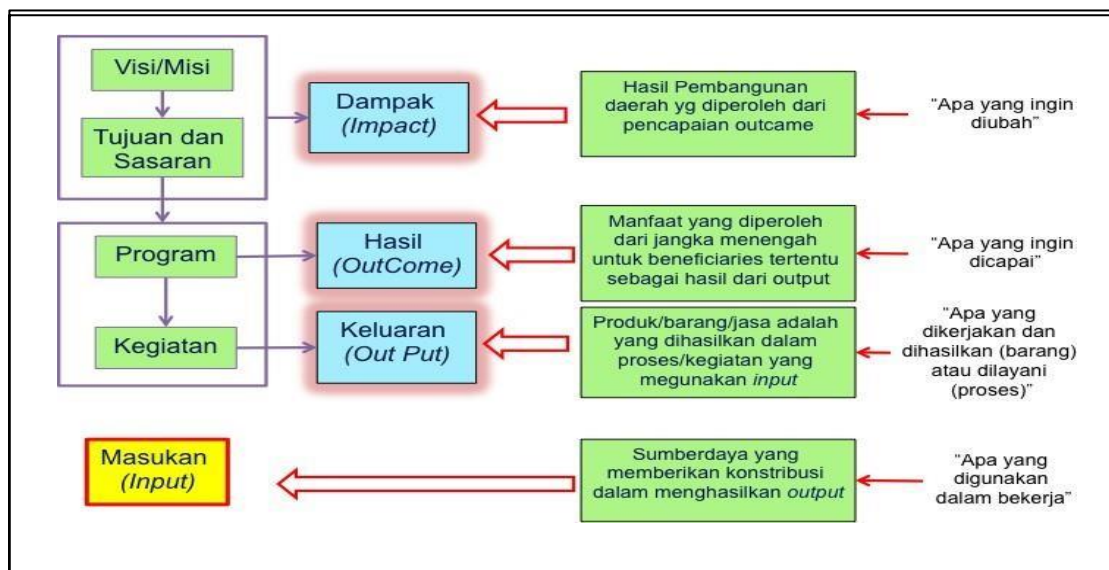
konstruksi kinerja pemerintah yang dibangun ke dalam sistem yang disebut dengan istilah “Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah”. Di dalam arsitektur kinerja pembangunan daerah tersebut, kinerja daerah dapat diukur melalui tiga tingkatan (*leveling indicator*), yaitu:

1. Dampak (*Impact*); dimana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada keberhasilan pencapaian visi/misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dikarenakan yang diukur adalah keberhasilan visi/misi, tujuan dan sasaran daerah yang tidak lain berkaitan dengan periodesasai kepala daerah terpilih, maka dampak (*impact*) dikatakan berhasil atau tidak tentunya dengan melihat perubahan kondisi setelah lima tahun pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan kata lain indikator dampak (*impact*) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan yang memiliki area perubahan jangka menengah lima tahunan. Visi/misi kepala daerah terpilih dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan kondisi sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sesuai dengan yang dijanjikan di dalam RPJMD.
2. Hasil (*Outcome*); dimana menekankan pada kondisi capaian hasil pembangunan yang merujuk pada kemanfaatan rangkaian keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sebuah atau beberapa kegiatan. Indikator hasil seyogyanya diukur setelah seluruh keluaran (*output*) kegiatan selesai dicapai, artinya dapat dikatakan bahwa hasil (*outcome*) merupakan berfungsinya sebuah output dalam mencapai suatu kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena hasil berkaitan dengan keluaran suatu kegiatan, maka pengukuran hasil pun kemudian dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan keluaran (*output*) kegiatan yang ada. Dikarenakan hasil (*outcome*) merupakan capaian kondisi yang merepresentasikan keberhasilan fungsi dari serangkaian keluaran

(*output*) kegiatan, maka hasil (*outcome*) ini menjadi kunci pokok pemerintah daerah dalam melihat pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh OPD dalam rangka mencapai visi/misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan kata lain hasil (*outcome*) mendefinisikan sebuah kondisi yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu program.

3. Keluaran (*Output*); dimana menekankan pada capaian suatu barang, jasa, atau kuantitas orang dari serangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator keluaran (*output*) menjadi domain kegiatan. Setiap kegiatan harus memiliki keluaran (*output*) yang jelas yang dicapai melalui serangkaian proses kegiatan disertai sejumlah alokasi anggaran untuk menggerakkan sumberdaya yang diperlukan. Dalam hal ini proses perumusan anggaran berdasar prestasi kerja sangat diperlukan agar besaran alokasi anggaran dapat merepresentasikan proses kegiatan dalam mencapai output secara wajar. Gambaran mengenai arsitektur kinerja pembangunan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 6.1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Pemisahan tingkatan indikator ini penting agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam implementasi setiap tahunnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggungjawaban oleh masing-masing OPD dan untuk kepentingan daerah. Teknis perumusan kerangka keberhasilan dan program pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026 dilakukan dalam tahap sebagai berikut:

Pertama, dimulai dengan melihat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang telah dianalisis dimana telah dirumuskan secara runtut dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

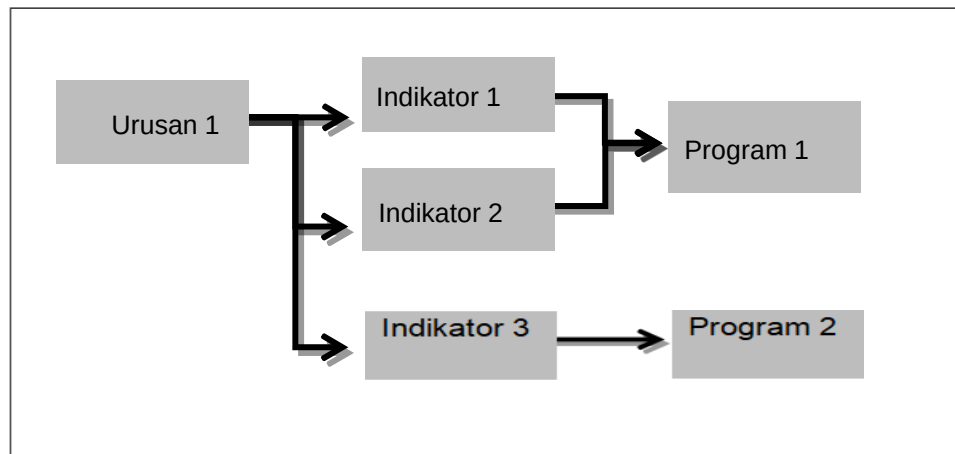
Kedua, memetakan alat ukur keberhasilan urusan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Alat ukur tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perumusan indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah terpilih. Bahan penyusunan kerangka keberhasilan mengambil dari hasil studi pendahuluan yang disesuaikan dengan regulasi yang ada, kewenangan, perkembangan pembahasan isu strategis, dan indikator tambahan yang merupakan kebutuhan kebijakan daerah.

Ketiga, perumusan program pembangunan dalam mencapai kerangka keberhasilan. Nomenklatur program sedapat mungkin menggunakan nomenklatur sebagaimana yang telah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun demikian beberapa hal kebijakan yang belum ada di dalam peraturan tersebut kemudian diarahkan menggunakan nomenklatur program baru yang merupakan *local content* kebijakan daerah. Perumusan program pembangunan juga melihat dari program-program yang telah berjalan dalam APBD Kabupaten Luwu Timur. Beberapa nomenklatur program yang masih dianggap relevan terhadap analisis permasalahan

pembangunan, isu strategis, kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tetap dipertahankan untuk dilanjutkan kembali.

Hubungan urusan, indikator dan program pembangunan daerah dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 6.2 Hubungan Urusan,
Indikator dan Program Pembangunan Daerah

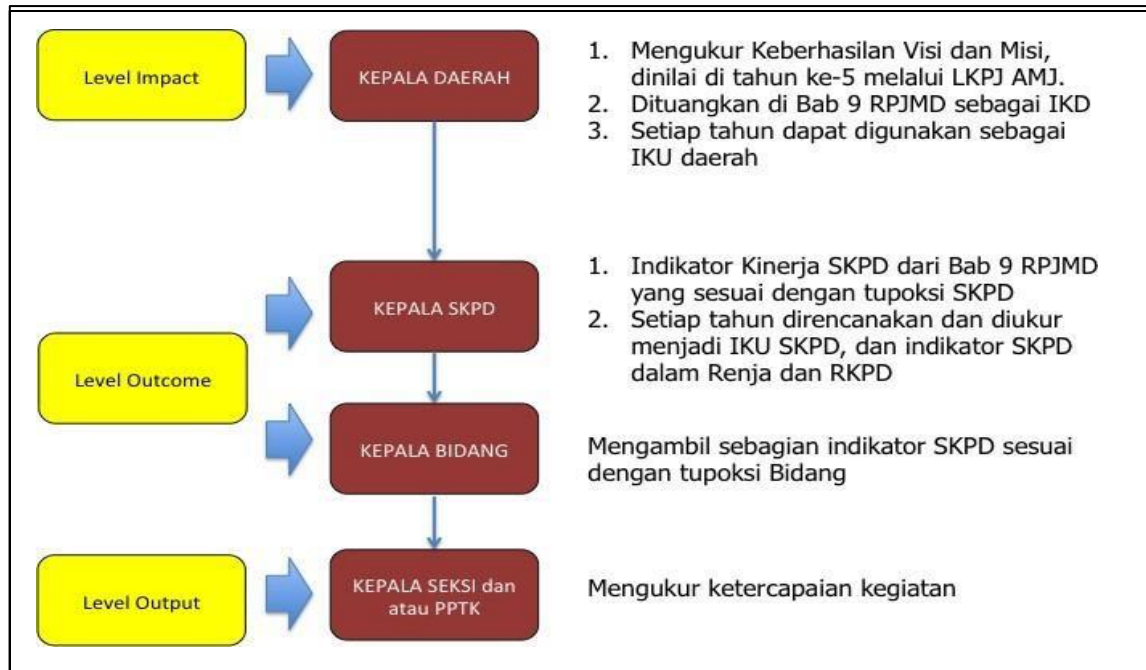


Dari gambar tersebut di atas menjadi jelas bahwa suatu indikator atau kerangka keberhasilan akan dicapai melalui program yang jelas oleh masing- masing OPD. Sehingga nantinya akan mudah dalam monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan OPD setiap tahunnya. Ketika indikatornya tidak tercapai maka pemerintah daerah dengan mudah dapat menentukan program apa dan OPD mana yang perlu untuk diintervensi melalui kebijakan percepatan pencapaian target.

Penulisan kerangka keberhasilan atau indikator tersebut berangkat dari masing- masing urusan hanya untuk ***memudahkan OPD*** nantinya dalam menyusun indikator program yang akan dituangkan di dalam Renstra OPD. Indikator di tiap urusan sebagaimana gambar di atas hanya bersifat alat bantu semata karena indikator dampak (*impact*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya baru akan

dirumuskan bersamaan dengan penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 6.3. Kerangka Keberhasilan Visi/Misi Kepala Daerah



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kerangka keberhasilan yang terdapat pada Bab IX RPJMD merupakan alat ukur keberhasilan visi/misi kepala daerah selama lima tahun ke depan. Di setiap tahunnya, indikator kinerja daerah tersebut digunakan sebagai target tahunan yang direncanakan, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Di tingkat OPD, indikator kinerja daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD merupakan indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD sebagai kepanjangan tangan kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah. Indikator Kinerja SKPD dapat digunakan sebagai indikator kinerja utama OPD selama lima tahun. Kondisi hasil (*outcome*) tersebut akan dicapai melalui serangkaian program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya, kondisi ini menjadi bahan penyusunan Renja OPD, masuk dalam DPA OPD, bahan perjanjian kinerja OPD, sampai dengan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan OPD.

Di tingkat personal, indikator kinerja utama OPD itulah menjadi tanggungjawab kepala OPD untuk mencapainya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD, tentunya kepala OPD dibantu oleh bidang-bidang yang menjadi struktur dibawahnya. Demikian juga indikator capaian yang menjadi kinerja kepala OPD juga dibantu oleh keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kesesuaian indikator dengan program di tiap bidang nantinya menjadi tanggungjawab kinerja masing-masing kepala bidang (eselon III). Di tingkat eselon IV, maka kinerjanya diukur melalui kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ketercapaian keluaran (output) kegiatan menjadi kinerja di tataran teknis. Distribusi tanggung jawab inilah bahan perumusan kinerja pegawai di masing- masing organisasi di daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Kerangka Keberhasilan yang digambarkan dalam indikator kinerja daerah menurut urusan secara lengkap dapat dilihat pada berikut.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Tabel 6 1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
1	Angka Kemiskinan (%)	6,44	6,93	6,24	6,24	6,04
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	74,10	75,84	74,40	74,40	74,70
3	Indeks Desa Membangun (IDM) (Nilai)	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Nilai)	90,00	90,34	90,05	90,05	91,18
5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,72-3,63	9,66	2,98-3,71	2,98-3,71	3,22-3,50
6	Rasio Gini (Nilai)	0,381	0,392	0,247	0,247	0,232
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	1.98	1.19	2.08	2.08	2.17
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.05	5,42	2.80	2.80	2.55
9	Indeks daya saing infrastruktur daerah (nilai)	2,0666 (Sedang)	60,44	2,2638 (Sedang)	2,2638 (Sedang)	2,3230 (Sedang)
10	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (Nilai)	74,93	84,27	75,15	75,15	75,32
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) (Point)	88,10	80,09	88,35	88,35	88,70
12	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Nilai)	202 (TINGGI)	152,28	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)	202 (TINGGI)
13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Predikat)	B		B	B	B
14	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) (Predikat)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)	A (Baik)
15	Nilai SAKIP Daerah (Predikat)	BB	B	A	A	A
16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	84,75	98,49	85,68	85,68	87,78
17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	84,31	87,84	86,23	86,23	88,10
18	Angka Kriminalitas (Point)	0,00056	0,0003469	0,000473	0,000473	0,000451
19	Indeks Ketertiban dan Ketentraman (Nilai)	76,81	81,67	77,21	77,21	77,43
20	Indeks kerukunan umat beragama (Nilai)	75,92	79,49	76,00	76,00	76,34
21	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai)	54,77	-	55,27	55,27	55,77
22	Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat (%)	95	100	95	95	95
23	Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat (%)	95	89,14	95	95	95

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026 (Data diolah)

6.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Selanjutnya, indikator kinerja Kunci (IKK) daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek Daya Saing Daerah. Hala ini sekaligus memberikan gambaran terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6 2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,74	9,66	2,98	2,98	3,22
	Laju inflasi (%)	1,19	2,21	1,18	1,18	1,16
	PDRB per kapita Berlaku (Juta)	72,00	99,49	72,55	72,55	73,65
	PDRB per kapita Konstan (Juta)	53,30	58,1	53,45	53,45	53,75
	Rasio Gini (Angka)	0.381	0,392	0,247	0,247	0,232
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	93,56	93,07	93,76	93,76	93,96
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	74,10	75,84	74,40	74,40	74,70
	Angka melek huruf (%)	95,80	99,71	95,90	95,90	96,00
	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,40	8,93	9,60	9,60	9,80
	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70,83	74,32	71,00	71,00	71,23
	Persentase balita gizi buruk (%)	0,02		0,02	0,02	0,01
	Prevalensi balita gizi kurang (%)	2,00		1,98	1,98	1,97
	Cakupan desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100
	Angka partisipasi angkatan kerja (Ribuan)	152,7		153	153	150,8
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,10	67,48	67,50	67,50	72,38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,05	5,42	2,80	2,80	2,55
	Rasio penduduk yang bekerja(%)	96,45		96,95	96,95	97,05
	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja (%)	0,0187		0,0190	0,0190	0,0193
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	0,69		0,72	0,72	0,89
	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	2,02		2,02	2,02	2,18
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I (%)	17,7		17,65	17,65	17,6
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	85,00	85,24	86,00	86,00	87,00
	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	23,50		24,52	24,52	25,53
	Opini BPK (Kategori)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (Nilai/Skor)	94		95	95	95
	Penguatan cadangan pangan (Kg)Ton	3		3	3	3
	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	82,91		88,57	88,57	94,27
	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,00		1,25	1,25	1,50
	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija)terhadap PDRB (%)	5,91		5,96	5,96	6,22
	Produksi Sektor Pertanian					
	Kontribusi Sektor Perkebunan(Tanaman Keras)Terhadap PDRB (%)	12,60		12,68	12,68	12,75
	Produksi sektor perkebunan (Ton)					
	Kakao	1,10		1,24	1,24	1,35
	Kelapa Sawit	12,60		12,68	12,68	12,75
	Lada	0,99		1,01	1,01	1,03
	Kontribusi Sektor (%) Pertambangan Terhadap PDRB	44,80		44,75	44,75	44,60
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	2,71		2,57	2,57	2,68
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB(%)	1,08		1,09	1,09	1,10
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	4,65		4,80	4,80	4,95
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	3,90		3,91	3,91	3,95
	Pertumbuhan Industri (%)	4,85		5,12	5,12	5,25
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita (Rupiah)	9.600.000		9.750.000	9.750.000	9.850.000
	Nilai Tukar Petani (%)	97,54		97,56	97,56	97,60
	Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita (%)	61,53		61,76	61,76	61,84
	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa(%)	4,03		5,65	5,65	5,65
	angka kriminalitas yang Tertangani (Kasus)	5,60	0,0012	4,73	4,73	4,50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)					
	Angka Partisipasi Kasar (%)	68,40	60,45	68,60	68,60	69,00
	Angka Pendidikan yang ditamatkan					
	APT SD/ sederajat (%)	26,33		26,31	26,31	26,29
	APT SMP/ sederajat (%)	15,98		15,96	15,96	15,94
	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/ Paket A (%)	102,60	97,08	102,65	102,65	102,70
	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTS/ Paket B (%)	107,78	91,81	107,83	107,83	107,88
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100		100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (%)	100		100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	100		100	100	100
	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100		100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A (%)	99,25	94,54	99,30	99,30	99,35
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/ Paket B (%)	97,85	84,73	97,90	97,90	97,95
	Angka Putus Sekolah :					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,31	0	0,29	0,29	0,27
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,00	0	0,95	0,95	0,90
	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,78	100	99,79	99,79	99,8
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,53	99	99,54	99,54	99,55
	Angka Melanjutkan (AM) (%)					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	93,50	95,68	93,55	93,55	93,60
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%)	93,03		93,05	93,05	93,007
	Fasilitas Pendidikan					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	73,47	77,32	73,87	73,87	74,27
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	83,01	81,89	84,51	84,51	86,01
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%)	59,96	50,27	59,97	59,97	59,98
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (%)	698,82	716	701,32	701,32	703,82

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar (%)	54.81		57.16	57.16	59.51
	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata (%)	650.22		650.92	650.92	651.62
	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	92.61	92,69	92.93	92.93	93.25
	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki (%)	99.47	99,71	99.52	99.52	99.57
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.09		97.14	97.14	97.19
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	90.48	95,44	90.98	90.98	91.48
Kesehatan						
	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk (%)	0.86		1.15	1.15	1.13
	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100		100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil (%)	100		100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100		100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	100		100	100	100
	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100		100	100	100
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Jiwa)	7,93	13,44	7,75	7,75	7,39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Angka kelangsungan hidup bayi (jiwa)	99,21	0,987	99,23	99,23	0,9926
	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup (jiwa)	0,76	15,07	0,72	0,72	0,54
	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup (jiwa)	5,22	11,01	5,04	5,04	4,67
	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup (jiwa)	108,14	122,22	100,64	100,64	92,64
	Rasio posyandu per satuan balita (1/1.000)	11,03	12,54	11,03	11,03	11,03
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (1/10.000)	5,35	0,54	5,35	5,35	5,35
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (1/100.000)	0,006	0,006	0,006	0,006	0,009
	Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah)	16,22	0,286	17,54	17,54	19,53
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1/100000)	29,46	0,392	32,44	32,44	35,42
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (jiwa)	82%	60,69	83%	83%	84%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangan yang memiliki kompetensi kebidanan (jiwa)	93,5%	88,63	94,0%	94,0%	94,5%
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (jiwa)	92%	98	93%	93%	93%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (jiwa)	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (jiwa)	96	91,3	97	97	97
	Non polio AFP rate per 100,000 penduduk (jiwa)	2	3,31	2	2	2
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (jiwa)	100	52,08	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (jiwa)	100	100	100	100	100
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (%)	<2	0	<2	<2	<2
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (Kasus)	472 org	94	504 org	504 org	504 org
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Kasus)	95	98	95	95	95
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (jiwa)	100	100	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani (jiwa)	100	139,27	100	100	100
	Angka kejadian Malaria (jiwa)	<1	<1	<1	<1	<1
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (jiwa)	0,1	0,038	0,1	0,1	0,1
	Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS (Orang)	600		600	600	600

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	4,6	5,21	4,5	4,5	4,4
	Cakupan kunjungan bayi (%)	92	98,03	93	93	94
	Cakupan puskesmas (%)	164	163,6	164	164	164
	Cakupan puskesmas pembantu (%)	105	103,91	105	105	105
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92	84,64	93	93	94
	Cakupan pelayanan nifas (%)	93,5	88,13	94,0	94,0	94,5
	Cakupan anjangan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	47		48	48	49
	Cakupan pelayanan anak balita (%)	77	90,82	78	78	79
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin (1/100)	45		47	47	49
	Cakupan penjangkauan anjangan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan anjangan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	106,763	80,06	106,763	106,763	106,763
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangan (RS) (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	95	100	95	95	95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Pekerjaan Umum						
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota (%)	42,943		43,71	43,71	44,742
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	52,86		53,6	53,6	54,33
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0		0	0	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	0,42943	29,82	0,4371	0,4371	0,44742
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (%)	0,00604	0,0072	0,00595	0,00595	0,00587
	Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 (%)	100		100	100	100
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam) (%)	42,94	29,82	43,71	43,71	44,74
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0,133	0,113	0,133	0,133	0,133
	Persentase Sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	0,01739		0,01805	0,01805	0,01871

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	973,976	98,48	974,059	974,059	974,152
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	231,836		231,836	231,836	231,836
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	85,3	87,53	86,24	86,24	87,07
	Tidak terjadi genangan 2 kali setahun (%)	75,61		73,26	73,26	72,2
	Persentase Pembangunan Turap diwilayah Jalan penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor (%)	47,98		51,21	51,21	54,44
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	54,11	56,21	54,85	54,85	55,59
	Rasio Jaringan Irigasi (Angka)	8,843	12,693	9,276	9,276	9,71
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	62,50	61,2	63,94	63,94	65,33
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	62,50	61,2	63,94	63,94	65,33
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan (%)	7		8	8	8
	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk (%)	0,2371		0,2360	0,2360	0,2350
	Penataan Ruang:					
	Rasio Ruangan terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB (Angka)	0,0026		0,0026	0,0026	0,0027
	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan (%)	0,262		0,264	0,264	0,266
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (Angka)	0,1423	0,143	0,1429	0,1429	0,1432
	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	49,24		57,35	57,35	60,97
	Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan Hasil Pemotretan citra satelit dan survai foto udara terhadap luas daratan (%)	71,00		71,10	71,10	21,25
	Ketaatan terhadap RTRW (%)	86,53		88,16	88,16	89,79
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100		100	100	100
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani (%)	2,14		2,09	2,09	2,04
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	21,05		19,30	19,30	19,30
	Rasio rumah layak huni (%)	0,183	0,19	0,186	0,186	0,186
	Rasio permukiman layak huni (%)	0,763	0,954	0,766	0,766	0,766
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	88,05	89,28	88,75	88,75	89,45
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	61,12	13,79	62,62	62,62	64,12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase pemukiman yang tertata (%)	76,34	95,44	76,64	76,64	76,94
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,05	0,04	0,05	0,05	0,06
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	2,14	2,32	2,09	2,09	2,04
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	13,05	13,13	12,90	12,90	12,75
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU (%)	42,10	70,87	61,40	61,40	80,70
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan (%)	100		100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100		100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100		100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100		100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100		100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100		100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (%)	95,18		96,38	96,38	97,59
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	10,00	7,31	10,00	10,00	10,00
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	49,73	25,43	54,25	54,25	58,78
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	95,18	75,36	96,38	96,38	97,59
	Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100
Sosial						
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100		100	100	100
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	45,27	56,66	45,71	45,71	46,07
	Persentase PMKS yang tertangani (%)	40,36		40,56	40,56	40,69
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	43,18		43,25	43,25	43,29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social (%)	80	80	90	90	100
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	80		90	90	100
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social (%)	100		100	100	100
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	100		100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100		100	100	100
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (%)	75,70		75,75	75,75	76,55
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000 perusahaan)	9,27	20,00	9,27	9,27	9,27
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	14,29	36,67	14,29	14,29	15,38
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	42,57		43,07	43,07	43,98
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100	100	100	100	100
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0		0	0	0
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	75,70	81,94	75,75	75,75	76,55
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100	100	100	100	100
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100	100	100	100	100
	Rasio lulusan S1/S2/S3(%)	500,23	579,89	510,23	510,23	510,23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	95		95	95	95
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (%)	41,5		41,75	41,75	42
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartip, Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	92,75		93,25	93,25	93,75
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten /kota (%)	42,57		43,07	43,07	43,98
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100		100	100	100
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	74,69		74,65	74,65	74,58
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	10		17,14	17,14	17,14
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	25,31		25,35	25,35	25,42
	Rasio KDRT (%)	0,11		0,11	0,11	0,11
	Persentase jumlah tenaga Kerja di bawah Umur(%)	0		0	0	0
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	12,51		12,66	12,66	12,72
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan PPT / PKT di rumah Sakit(Orang)	0		0	0	0
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak(%)	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum(%)	100	100	100	100	100
	Cakupan Layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan(%)	20		30	30	30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan anak korban kekerasan(%)	100		100	100	100
	Pangan					
	Persentase Ketersediaan pangan utama(%)	70	118,77	70	70	70
	Ketersediaan energi dan protein perkapita(Gram/perkapita/hari)	2.463	100	2.463	2.463	2.463
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan(%)	72	100	73	73	70
	Pertanahan					
	Persentase luas lahan bersertifikat(%)	40,15	60,72	40,35	40,35	40,55
	Penyelesaian kasus tanah Negara(%)	100,00	100	100,00	100,00	100,00
	Penyelesaian izin lokasi(%)	100,00		100,00	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup					
	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota(Nilai/Skor)	86,87		86,87	86,87	86,87
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	1	0	1	1	1
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	90	0	100	100	0
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1	1	1	1	1
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	28,00	66,25	28,20	28,20	28,50
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	29,60	95,97	29,65	29,65	29,70
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	30,50	74,46	30,50	30,50	30,50
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50	22	50	50	50
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1		1	1	1
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA(MHA)	3		3	3	3
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	3		3	3	3
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	1		1	1	1
	Penetapan hak MHA(MHA)	1		1	1	1
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	11		11	11	11
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	1		1	1	1
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	11		11	11	11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	2	1	1	1
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	5		5	5	5
	Timbulan sampah yang ditangani	32,850	31,473,69	33,032	33,032	33,397
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R(%)	27,35	15,47	28,32	28,32	30,89
	Persentase cakupan area pelayanan(%)	0	30,06	0	0	0
	Persentase jumlah sampah yang tertangani(%)	72,31	70,56	71,29	71,29	70,66
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1	1	1	1	1
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan(%)	0	0	0	0	0
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan(%)	0	0	0	0	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Perekaman KTP elektronik(%)	99,85		99,87	99,87	99,90
	Kepemilikan akta kelahiran(%)	91,76		93,32	93,32	95,53
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasrkan perjanjian kerja(%)	15,38		17,95	17,95	17,95
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk(Rasio)	1,00	0,98	1,00	1,00	1,00
	Rasio bayi berakte kelahiran (Rasio)	0,97	1	0,97	0,97	0,98
	Rasio pasangan berakte nikah(Rasio)	0,48	56	0,50	0,50	0,52
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	ada	ada	ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah/belum)	Sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	99,85	98,21	99,87	99,87	99,90
	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	97,05	99,03	97,42	97,42	98,02
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	60		75	75	90
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	15,38		17,95	17,95	17,95
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	100		100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri(%)	17,7		21,7	21,7	25,8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	125	125	125	125	125
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	135		135	135	135
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	370	2,87	370	370	370
	Persentase LSM Aktif (%)	00,4		00,4	00,4	0,04
	Persentase LPM Berprestasi (%)	20		20	20	20
	Persentase PKK aktif (%)	140	100	140	140	140
	Persentase Posyandu aktif (%)	274		274	274	274
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	80		80	80	80
	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	80		80	80	80
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	1,70	1,67	1,63	1,63	1,57
	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,53	2,31	2,47	2,47	2,40
	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek (Dok)	0		0	0	0
	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan) (%)	76,92		84,61	84,61	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	100		100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk(%)	100		100	100	100
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk (Perda/Perkada)	2		2	2	2
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Sektor)	4		4	4	4
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (Kerjasama)	4	6	4	4	4
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	2,01	1,72	2,00	2,00	2,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (%)	58,90	71,15	59,70	59,70	60,50
	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 pereempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	26,76		25,60	25,60	24,63
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun (%)	2,97	0,59	2,96	2,96	2,95
	Ratio Akseptor KB (%)	58,90	71,38	59,70	59,70	60,50
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,40	11,38	12,01	12,01	11,67
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	39,14	37,68	40,81	40,81	41,22
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	37,40	71,15	37,00	37,00	36,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	80,06	66,74	81,02	81,02	81,05
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	85,53	47,34	85,67	85,67	85,80
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	81,45	6,32	81,52	81,52	81,63
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	18,18	9,09	18,18	18,18	18,18
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	437,30	445,45	437,50	437,50	438,00
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	1,00	0,99	1,10	1,10	1,19
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	100	228,05	100	100	100
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0	0	0	0	0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	72,46	81,81	72,60	72,60	72,62
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	21,90	24,35	21,95	21,95	22,00
	Rata-rata usia kawin pertama wanita (%)	21	22,5	21	21	21
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	0,0061	0,051	0,0062	0,0062	0,0063
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) (%)	58,90		59,70	59,70	60,50
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (%)	12,40		12,01	12,01	11,67
Perhubungan						
	jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	269.265	346.142	274.65	274.65	280,143
	Rasio ijin trayek (%)	0,011	0,000105	0,011	0,011	0,011
	Jumlah uji kir angkutan umum (Kendaraan)	4260	3139	5102	5102	6166
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	15	16	15	15	15
	Persentase Layanan angkutan darat (%)	0,162	0,122	0,176	0,176	0,194
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0,52	1,04	0,62	0,62	0,74
	Pemasangan Rambu –rambu (%)	60,10	100	80,20	80,20	100,00
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan (%)	32,40	0,039	27,10	27,10	22,60
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (Org,Brg)	416.797	346.142	425.133	425.133	433,635
	jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun (Org,Brg)	416.797	346.142	425.132	425.132	280
Komunikasi dan Informatika						
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100		100	100	100
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan (Kelompok)	100		100	100	100
	Cakupan layanan Telekomunikasi (Desa/Kelurahan)	90,88		91,74	91,74	95,10
	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon (%)	89,21	85,16	93,27	93,27	95,28
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	72,80	69,15	85,13	85,13	90,11
	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	85,23		85,30	85,30	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Persentase Koperasi aktif	55,15	79,19	56,41	56,41	57,53
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	95,22	100	95,45	95,45	95,75
	persentase BPR/LKM aktif	96,15	100	96,86	96,86	97,14
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	99,05	99,64	98,78	98,78	98,25
	Penanaman Modal					
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (%)	35	78	40	40	45
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA(Perusahaan)	500.000.000.000	1.049.645.884.399	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
	Rasio Daya serap Tenaga Kerja (%)	180,01	171,01	190,01	190,01	200,01
	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN(Milyar rupiah) (Rupiah)	75.000.000.000		100.000.000.000	100.000.000.000	125.000.000.000
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Jumlah)	74		74	74	74
	Persentase organisasi Pemuda yang aktif (%)	44,94	50	50,56	50,56	56,18
	persentase wirausaha muda (%)	37,22	35,71	38,83	38,83	40,45
	Cakupan pembinaan olahraga (%)	100	100	100	100	100
	Cakupan pelatih yang bersertifikat (%)	67,14	0	78,57	78,57	90,00
	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	22,86	32,20	22,86	22,86	22,86
	Jumlah atlet berprestasi	15	76	15	15	20
	Jumlah Prestasi Olahraga	5	213	6	6	7
	Statistik					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100		100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100		100	100	100
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Ada/Tidak)	ada	ada	ada	ada	Ada
	Buku "Kabupaten dalam Angka" (Ada/Tidak)	ada	ada	ada	ada	Ada
	Buku "PDRB" (Ada/Tidak)	ada	ada	ada	ada	Ada
	Persandian					
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100
	Kebudayaan					
	Terlestarikannya Cagar Budaya	60		65	65	70
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (Kali)	2	4	2	2	2
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	4	16,66	5	5	5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Unit)	80	48	80	80	85
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Unit)	3	8	3	3	4
Perpustakaan 55.83						
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (%)	54.83		55.33	55.33	55.83
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	126	227,54	151	151	163
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (%)	1,09	1,13	1,08	1,08	1,07
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Tahun)	12.51	22.527	15.01	15.01	16,200
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	12.121	24.079	12.863	12.863	13,642
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	35,71	100	100	100
Kearsipan						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	25,64	100	25,64	25,64	12,82
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	104	700	105	105	110
Layanan Urusan Pilihan						
Pariwisata						
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,71		2,57	2,57	2,68
	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	1,18		1,31	1,31	1,44
	Kunjungan wisata	25	1.220,71	27	27	30
	Lama kunjungan wisata	4	3	5	5	7
	PAD sektor pariwisata	1,18		1,31	1,31	1,44
Pertanian						
	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB (%)	7,16		7,19	7,19	7,21
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	N/A		N/A	N/A	
	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	1,10		1,24	1,24	1,35
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	N/A		N/A	N/A	
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,16		7,19	7,19	7,21
	Cakupan bina kelompok petani	58,67	12,44	58,75	58,75	58,80
Perdagangan						
	Ekspor Bersih Perdagangan	800.000.000	1.313.160.356,70	810.000.000	810.000.000	850.000.000
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	17	68,07	19	19	22
Perindustrian						
	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	6,08	7.01	6,08	6,08	6,08

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	50		50	50	50
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	50		50	50	50
	Persentase jumlah hasil pemntauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industry(IPUI) Kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0		0	0	0
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUK) dan izin perluasan Kawasan industry(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota (%)	0		0	0	0
	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini (Ada/Tidak Ada)	Ada		Ada	Ada	Ada
Kelautan dan Perikanan						
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)					
	Produksi perikanan	100	119,4	100	100	100
	Konsumsi ikan	100	100	100	100	100
	Cakupan bina kelompok nelayan	14,00	29,41	15,00	15,00	16,00
	Produksi perikanan kelompok nelayan	42,00	3,75	42,00	42,00	42,00
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1,28	86,12	1,29	1,29	1,30
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,23	0,001	0,23	0,23	0,23
	Nilai Tukar Nelayan	106,87		107,73	107,73	108,59
Penunjang Urusan						
Perencanaan Pembangunan						
	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100		100	100	100
	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100		100	100	100
	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)	100		100	100	100
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/Tidak Ada)	ada	Ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan	ada	Ada	ada	ada	ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	PERDA/PERKADA (Ada/ Tidak Ada)					
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/ Tidak Ada)	ada	Ada	ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/ Tidak Ada)	ada	Ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Ada/ Tidak Ada)	ada	Ada	ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (Ada/ Tidak Ada)	ada		ada	ada	ada
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Sesuai/Tidak Sesuai)	sesuai		sesuai	sesuai	sesuai
Keuangan						
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (%)					
	Rasio PAD (%)					
	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA (%)	3	6,31	3	3	3
	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	2		2	2	2
	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana (%)	100		100	100	100
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21	19,60	21	21	21
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	15	22,46	15	15	15
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)					
	a. Belanja Operasi terhadap total Belanja (%)	65,68		67,34	67,34	60,52
	b. Belanja Modal terhadap Total Belanja (%)	15,25		13,81	13,81	17,78
	c. Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja (%)	0,19		0,19	0,19	0,06
	d. Belanja Transfer terhadap Total Belanja (%)	21,84		21,61	21,61	21,64
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	17.310.237.550		18.320.445.657	18.320.445.657	19.780.954.775
	Penetapan APBD	60 hari		60 hari	60 hari	60 Hari
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	20,49	6,14	27,73	27,73	34,88
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	24,74	126,54	38,82	38,82	52,66
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35 Orang	32 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	700 Orang	937 Orang	700 Orang	700 Orang	600 Orang
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3450 Orang	2826	3600 Orang	3600 Orang	3750 Orang
Penelitian dan Pengembangan						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Asumsi Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan (%)	50		50	50	60
	Persentase Implementasi rencana kelitbangan (%)	50		50	50	60
	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (%)	50		50	50	60
	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	50		50	50	60
Pengawasan						
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3		3	3	3
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3		3	3	3
	Persentase tindak lanjut temuan	92	24,39	94	94	95
	Persentase pelanggaran pegawai	0	0,1568	0	0	0
	Jumlah temuan BPK	20	19	15	15	8
Sekretariat Dewan						
	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota (Ada/ Tidak Ada)	ada		ada	ada	Ada
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD (Ada / Tidak Ada)	ada		ada	ada	ada
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (Ada / Tidak Ada)	ada		ada	ada	Ada

Sumber Data: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022 Data Diolah

6.3. INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah aturan tentang jenis dan kualitas layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah sebagai hak setiap warga negara. Pemerintah kabupaten Luwu Timur wajib memastikan pemenuhan SPM dengan menggunakan sumber daya yang ada, termasuk anggaran daerah. SPM diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjawab kebutuhan penting. Ini berlaku dalam konteks pemerintahan daerah untuk memastikan pelayanan dasar

yang mendukung kesejahteraan rakyat karena tujuan bernegara. SPM memastikan akses masyarakat ke layanan dasar dari pemerintah daerah sesuai indikator sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 berupa :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah merumuskan rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian SPM tahun 2021-2026 yang sejalan dengan periode RPJMD dimana didalamnya telah memuat target tahunan. Rencana ini selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan Tahunan (RKPD) sebagai rujukan dalam Dokumen Penganggaran Daerah berupa KUA dan PPAS, yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD oleh perangkat daerah pengampuih Urusan Pemerintahan dan selanjutnya ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenan, untuk merealisasikan pencapaian SPM. RKA-SKPD dalam mendukung pencapaian SPM disusun berdasarkan indikator kinerja, target, ASB, dan satuan harga. Pembiayaan pencapaian SPM oleh pemerintah pusat dapat berasal dari APBN sedangkan pemerintah daerah APBD. Target indikator SPM untuk Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut;

**Tabel 6 3. Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Permendagri No 59 Tahun 2021)**

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Perkiraan Capaian	Targ et
				2022	2023	2024	2025
	PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar						
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	%	97,09	63,87 %	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan						
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	93,94	98,68 %	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Perkiraan Capaian	Targ et
				2022	2023	2024	2025
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	%	56,62	100%	100	100
KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	%	92,81	95,73	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	%	99,9	99,96	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	98,21	98,23	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita						
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	93,34	92,02	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	%	95,74	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	67,15	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	%	80,29	83,25	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	65,56	100	100	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan	100	%	64,95	100	100	100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Perkiraan Capaian	Targ et
				2022	2023	2024	2025
	kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun						
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB						
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV						
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	100	100
PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum						
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	100	%	37,14	93,54	100	100
	1). Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	%	37,14	93,2	100	100
	2). Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	%	60,9	100	100	100
2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestic						
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	100	%	0	100	100	100
	1.Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	%	0	100	100	100
	2. Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses aman	100	%	8,03	100	100	100
PERUMAHAN RAKYAT							
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten						
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah						
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	100	100	100	100
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	100	100%	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	%	Capaian		Perkiraan Capaian	Target
				2022	2023	2024	2025
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	92,16	91,46 %	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	100	100%	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	100	100%	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	100	100%	100	100
SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti						
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.65 %	100%	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti						
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.32 %	100%	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti						
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	99.65 %	98%	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	99.96 %	100%	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten						
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	93,58 %	100,00 %	100	100

sumber data: Laporan SPM Kab. Luwu Timur Tahun 2023, Rencana Aksi SPM Tahun 2024,

6.4 INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga kehidupan sosial yang berkelanjutan, melindungi kualitas lingkungan, dan

memastikan pembangunan yang inklusif serta tata kelola yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, yang mewajibkan pemerintah daerah mengintegrasikan indikator TPB/SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan fokus pada 17 tujuan, yang dikelompokkan dalam empat pilar utama: pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan (governance). Adapun capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 6 4. Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya Tingkat kemiskinan menjadi 6,0 – 7,0 %	6,81			SELURUH OPD
2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		100.78%			Dinas Kesehatan
3	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		100			Dinas transnaker
4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.					Dinas Sosial & P3A
5	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.					Dinas Sosial & P3A
6	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		99,96%			Dinas Kesehatan
7	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		84,35			Dinas Kesehatan
8	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		71,15			DP2KB
9	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		61,2			dinas PU
10	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		98,48			dinas PU
11	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		94,54			dinas pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
12	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		84,73			dinas pendidikan
13	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		97,58			disdukcapil
14	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.					Perkintam/Dishub
15	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		46,02			BPBD
16	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.		4			BPBD
17	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		176,14			BPBD
18	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		5.033.184.000,00			BPBD
19	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		2			BPBD
20	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.		5,4			dinkes
21	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		4,2			Dinas Kesehatan
22	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		1,6			Dinas Kesehatan
23	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		1,9			Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
24	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		5,4			Dinas Kesehatan
25	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		72,3			Dinas Kesehatan
26	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).		101,85 Per 100.000 KH			Dinas Kesehatan
27	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		100%			Dinas Kesehatan
28	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		99.96%			Dinas Kesehatan
29	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		2,03 Per 1000 KH			Dinas Kesehatan
30	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		11,41 Per 1000 KH			Dinas Kesehatan
31	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		13,4 Per 1000 KH			Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
32	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.		100,62			Dinas Kesehatan
33	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		1			Dinas Kesehatan
34	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		431			Dinas Kesehatan
35	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.		<1			Dinas Kesehatan
36	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.		11			Dinas Kesehatan
37	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.		100			Dinas Kesehatan
38	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		0			Dinas Kesehatan
39	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.		0			Dinas Kesehatan
40	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).		1			Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
41	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		05.24			Dinas Kesehatan
42	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		26,7			Dinas Kesehatan
43	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		2,85			Dinas Kesehatan
44	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		0			Dinas Kesehatan
45	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		tidak tersedia data			Dinas Kesehatan
46	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		71.15.00			DP2KB
47	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		33.84%			DP2KB
48	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		30.60%			DP2KB
49	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		2.31%			DP2KB

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
50	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		96,26			Dinas Kesehatan
51	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		90			Dinas Kesehatan
52	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		0,392			Dinas Kesehatan
53	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		100%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
54	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		73,06			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
55	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		58,26			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
56	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		98,87			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
57	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.		92,78			Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
58	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		8,93			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
59	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		60,45			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
60	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		RAPM SD : 97,08, RAPM SMP = 91,81			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
61	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.					Dinas Pendidikan & Kebudayaan
62	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.					Dinas Pendidikan & Kebudayaan
63	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).		PSDAF (a) : 99,55 PSDAF (b) : 93,3 PSDAF (c) : 93,3 PSDAF (d) : 100%			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
64	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		TK : 29,79 SD : 34,12 SMP : 34,41			Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
65	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.					Dinsos
66	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.					Dinsos
67	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.					Dinsos
68	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.					Dinsos
69	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.					Dinsos
70	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.					Dinsos
71	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).					DP2KB
72	Mencapai Kestetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.					DP2KB
73	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		61,2			Dinas PU
74	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.		61,2			Dinas PU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
75	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.					Dinas PU
76	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		98,48			Dinas PU
77	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		80			Dinas Kesehatan
78	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		128			Dinas Kesehatan
79	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		1			Dinas PU
80	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		360			Dinas PU
81	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		1			Dinas PU
82	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		0			Dinas PU
83	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.		1,25			DLH
84	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		1,25			DLH
85	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		9,66			Bappelitbangda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
86	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.		99,49			Bappelitbangda
87	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.		35,71			Dinas Transnaker
88	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		21.444			Dinas Transnaker
89	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		5,42			Dinas Transnaker
90	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.					Dinas Pariwisata
91	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.		47			Dinas Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
92	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		402.789			Dinas Pariwisata
93	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.					Dinas Pariwisata
94	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa					DPMPTSP
95	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).					DPMPTSP
96	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		79,58			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
97	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.		8			dishub

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
98	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		3,1			disdagkop
99	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		-0,68			disdagkop
100	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		17,25			disdagkop
101	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		22,45			disdagkop
102	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		0,04			disdagkop
103	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.					kominfo
104	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		85,16			kominfo
105	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet					kominfo
106	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.		0,264583333			Bapelitbangda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
107	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		6,44			Bapelitbangda
108	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.		0% atau 0 (nol) desa			DPMD
109	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.		19,2% atau 24 desa mandiri			DPMD
110	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		100			dinas transnaker
111	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.					tarkim
112	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		46,02			BPBD
113	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		152,28			BPBD
114	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		0			BPBD
115	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		5.033.184.000,00			BPBD
116	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		70,56			DLH
117	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		2			BPBD
118	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).					DLH
119	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		5679,72			DLH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
120	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		1			DLH
121	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		2			BPBD
122	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		0,97			BPBD
123	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.					Polres
124	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.					Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
125	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.					Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
126	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.					Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
127	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).					BPS
128	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.					BKAD
129	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		WTP			BKAD
130	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					Sekretariat Daerah
131	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.					Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
132	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					Sekretariat Daerah
133	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).					Sekretariat Daerah
134	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).					Dinsos
135	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif,	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					Dinsos

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
136	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		99,03			Disdukcapil
137	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		na			Disdukcapil
138	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		97,58			Disdukcapil
139	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.					Kominfo
140	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		1,29			Bapenda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
141	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		0,8			Bapenda
142	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.					Bapenda
143	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.					Kominfo
144	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband					Kominfo
145	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.					Kominfo
146	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.					Kominfo
147	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.					BPS
148	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.					BPS
149	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).					BPS

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	CAPAIAN	Perkiraan Capaian 2024	Target 2025	OPD
					REALISASI 2023			
	Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
150	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.					Bapelitbangda
151	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada			Disdukcapil
152	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.					BPS
153	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).					BPS

Sumber Data: Hasil Evaluasi RKPD sampai dengan TRW.III dan KLHS Teknokratik RPJMD Data Diolah Tahun 2024.

BAB. VII. PENUTUP.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Daerah maka RKPD Tahun 2025 ini diharapkan dapat memperkuat capaian kinerja dalam mewujudkan prioritas pembangunan RPJMD 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan target capaiannya.

Selain itu pula RKPD Tahun 2025 diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RKP nasional, hal ini dimaksudkan guna menjamin sinergitas pembangunan antar level pemerintahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Nasional. Pada Bab penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini mencakup Dua sub Bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan, dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 memuat arah kebijakan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Daerah Untuk mendukung capaian indikator sasaran pembangunan dalam RKPD, Pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan pentahapan pembangunan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, dimana semua SKPD wajib untuk menerapkan Prinsip – prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif dalam pelaksanaannya. Dokumen ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) , serta Bagi seluruh stakeholders pembangunan daerah dalam membangun sinergitas yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta, guna mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, maka upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama oleh seluruh komponen yang terlibat didalamnya.

Dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD merupakan dokumen acuan rencana

perasional pembangunan Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025, maka seluruh SKPD wajib menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang mengacu pada RKPD.
2. Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi dan sinergitas antara RKPD dengan Renja-PD dengan tetap memperhatikan target capaian IKU RPJMD, IKK, SPM, TPB/SDGs.
3. Uraian program dan kegiatan prioritas yang direncanakan setiap SKPD harus terkait dan mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator sasaran setiap prioritas kebijakan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025.
4. Dalam menyusun program kerja tahunan, seluruh pemangku kepentingan serta dunia usaha agar berkontribusi dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan Perencanaan, Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD dan setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD.
6. Seluruh Organisasi kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Bapelitbangda menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2025 nantinya akan menjadi dasar bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
7. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, RKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Secara proaktif, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisa laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati .
9. Penyusunan RKPD Tahun 2025, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi

sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan berkesinambungan.

10. Kepada seluruh SKPD diharapkan untuk memperhatikan dan melaksanakan kaidah pelaksanaan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.

7.2 Kesimpulan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu : “Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Biorkrasi, Dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”, Sehingga diharapkan program dan kegiatan di SKPD mengarah kepada pencapaian sasaran sebagaimana tema yang telah ditetapkan tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian pembangunan pada tahun rencana.

RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dalam pelaksanaannya disinergiskan dengan perencanaan pembangunan Nasional, dan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka ditempuh kebijakan sharing pebiayaan pembangunan antara pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik berupa Cost sharing maupun activity sharing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber-sumber pendanaan lainnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini disusun untuk dijadikan sebagai Landasan, Pedoman, dan Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Malili, 04 Juli 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd

BUDIMAN



BUKU II

Tabel Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

RKPD 2025

BAPELITBANGDA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						387.309.183.725,00							295.862.218.943,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						384.856.438.125,00							294.662.218.943,00	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						384.856.438.125,00							294.662.218.943,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	256.938.265.610,00					-	-	135.468.841.609,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	316.877.100,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	196.047.442,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			7 Dokumen	164.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Dokumen	111.552.801,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan			10 Laporan	152.377.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Laporan	84.494.641,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	252.541.135.760,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	131.458.371.758,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			2593 Orang/bulan	252.250.696.860,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2.082 Orang/bulan	131.298.291.758,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan			18 Laporan	290.438.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Laporan	160.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	955.117.650,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	852.944.394,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			3 Paket	234.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			2 Dokumen	98.410.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Dokumen	29.882.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen			3 Dokumen	328.588.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Dokumen	419.023.104,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			426 Orang	220.198.250,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	401 Orang	256.378.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			7 Orang	73.620.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Orang	147.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	927.802.100,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	1.855.377.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			11 Paket	27.694.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	324 Paket	17.694.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket			73 Paket	20.015.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	73 Paket	10.015.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket			26 Paket	35.295.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	37 Paket	26.097.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			3 Paket	80.004.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Paket	109.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			0	0 Dokumen			75 0	8.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	84 Dokumen	8.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			4132 Laporan	93.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5,000 Laporan	138.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			1200 Laporan	662.754.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1,676 Laporan	1.544.730.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	1.029.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	176.505.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	38.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	4 Unit	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			6 Unit	75.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	22 Unit	96.505.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	916.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	718.283.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	706.945.465,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			3250 Laporan	33.623.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3,200 Laporan	10.283.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Laporan	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			4 Laporan	534.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Laporan	546.662.465,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	450.050.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	222.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit			67 Unit	116.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	67 Unit	115.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			62 Unit	70.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	78 Unit	62.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			1 Unit	263.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Unit	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	127.918.172.515,00						-	159.193.377.334,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	89.72 % 63.20 Nilai 25 guru 23 rkh			-	82.236.976.819,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	89.72 % 63.20 Nilai 25 guru 23 rkh	91.287.478.454,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang			5 Ruang	2.289.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTUR-SD, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Ruang	582.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			3 Ruang	371.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Ruang	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			1 Ruang	109.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKULTUR-SD	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Ruang	25.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			6 Unit	3.339.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	29 Unit	5.808.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			1 Unit	381.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			1 Ruang	109.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			0 Ruang	109.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYABIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit			2 Unit	218.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket			14 Paket	597.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Paket	330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket			13 Paket	2.600.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	30 Paket	1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik			173 Peserta Didik	604.973.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Peserta Didik	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang			511 Orang	10.770.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	964 Orang	55.723.598.371,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang			430 Orang	142.792.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	160 Orang	99.022.630,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan			173 Satuan Pendidikan	319.440.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1.100 Satuan Pendidikan	156.131.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan			173 Satuan Pendidikan	32.330.328.529,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	177 Satuan Pendidikan	22.564.925.953,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	1.248.261.790,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER SD	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	177 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket			5635 Paket	1.183.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6,500 Paket	1.365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang			22 Ruang	22.445.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Ruang	1.548.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			12 Ruang	1.735.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Ruang	390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				12 Paket	1.224.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	91,30 % 32 rkb 49,35 nilai 20 guru			-	31.824.041.076,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	91,30 % 32 rkb 49,35 nilai 20 guru	52.220.599.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang			1 Ruang	654.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			3 Ruang	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Ruang	160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang			1 Ruang	350.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang			5 Ruang	2.332.504.080,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Ruang	1.092.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang			1 Ruang	1.000.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Sorowako	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Ruang	870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			8 Unit	2.577.191.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	9 Unit	1.452.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			9 Ruang	218.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	3 Ruang	195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket			9 Paket	465.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	9 Paket	297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket			1 Paket	100.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	28 Paket	1.260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			1 Unit	138.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Burau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Unit	138.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik			50 Peserta Didik	541.781.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Peserta Didik	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang			289 Orang	5.553.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	305 Orang	28.316.445.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang			130 Orang	171.455.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	91 Orang	173.882.695,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan			50 Satuan Pendidikan	317.878.675,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1,100 Satuan Pendidikan	176.711.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan			54 Satuan Pendidikan	15.803.171.471,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	56 Satuan Pendidikan	13.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen			1 Dokumen	9.999.000,00	Kab. Luwu Timur, Maili, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	56 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang			7 Ruang	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	9 Ruang	2.619.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket			4500 Paket	945.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6,000 Paket	1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang			2 Ruang	296.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	20 rkb 73.54 % 18 guru			-	11.064.564.620,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 rkb 73.54 % 18 guru	11.698.239.405,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit			8 Unit	1.203.146.080,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	15 Unit	608.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket			3 Paket	89.610.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Paket	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket			10388 Paket	309.556.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	13,600 Paket	219.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang			25 Orang	2.292.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	189 Orang	4.353.127.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang			7573 Orang	156.689.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	68 Orang	76.033.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan			189 Satuan Pendidikan	358.332.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	6 Satuan Pendidikan	177.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan			190 Satuan Pendidikan	4.418.849.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD (UMUM-DANA)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	179 Satuan Pendidikan	4.835.474.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	516.274.128,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang			4 Ruang	930.709.112,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			11 Unit	212.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Unit	188.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				7 Paket	566.998.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		763.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	96,90 % 75 %			-	2.792.590.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	96,90 % 75 %	3.987.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan			10 Satuan Pendidikan	2.782.590.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	8 Satuan Pendidikan	3.977.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.452.745.600,00							1.200.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.452.745.600,00							1.200.000.000,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-			-	2.210.571.000,00						-	450.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	2.210.571.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	100 %	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek			6 Objek	2.210.571.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	6 Objek	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	-	-			-	83.999.600,00						-	300.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	80 %			-	83.999.600,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	80 %	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang			24 Orang	83.999.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	25 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-			-	58.190.000,00						-	200.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	58.190.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	100 %	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang			200 Orang	42.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen			1 Dokumen	16.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	80 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-			-	99.985.000,00						-	250.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	5.00 lokasi			-	99.985.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif	-	5.00 lokasi	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0 Objek			4 Objek	99.985.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang kondusif	-	5 Objek	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						247.175.014.630,00							214.530.272.200,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						247.175.014.630,00							214.530.272.200,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						247.175.014.630,00							214.530.272.200,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	128.711.269.120,00						100 %	128.835.186.100,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %			100 %	178.520.600,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan	100 %	181.875.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	59.385.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan	3 Dokumen	60.749.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	6.783.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan	2 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.390.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			10 Laporan	108.961.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan	9 Laporan	110.126.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 %			100 %	121.562.890.120,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	122.986.207.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11000 Orang/bulan			1118 Orang/bulan	121.389.602.370,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas	11000 Orang/bulan	122.811.207.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	173.287.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi keuangan Dinas Kesehatan dan Puskesmas	18 Laporan	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %			100 %	43.968.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan	100 %	43.995.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	43.968.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan	4 Laporan	43.995.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100 %			100 %	9.200.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Adminisitrasi pendapatan Dinas Kesehatan	100 %	9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	9.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Adminisitrasi pendapatan Dinas Kesehatan	4 Dokumen	9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100 %			100 %	464.057.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan	100 %	453.136.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				121 Paket	164.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	199.747.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan	12 Dokumen	183.426.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			10 Orang	99.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan	5 Orang	99.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 %			100 %	512.638.400,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	569.452.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	9.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	9.452.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			2 Paket	9.707.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	16.244.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Paket	16.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Paket	10.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen			12 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	165 Laporan			15 Laporan	19.836.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165 Laporan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	698 Laporan			227 Laporan	425.800.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	698 Laporan	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 %			100 %	1.221.675.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan	100 %	320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			3 Unit	928.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan	2 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			28 Unit	119.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan	5 Unit	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			8 Unit	137.025.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan	7 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			6 Unit	36.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %			100 %	3.601.150.000,00			-	04.Peringk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jasa Penunjang Dinas Kesehatan	100 %	3.660.070.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4444 Laporan			5000 Laporan	9.670.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jasa Penunjang Dinas Kesehatan	4444 Laporan	9.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	157.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jasa Penunjang Dinas Kesehatan	60 Laporan	180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180 Laporan			12 Laporan	3.434.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Jasa Penunjang Dinas Kesehatan	180 Laporan	3.470.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 %			100 %	1.117.170.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan di Pelihara	100 %	611.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit			23 Unit	160.960.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan di Pelihara	23 Unit	170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit			43 Unit	41.210.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan di Pelihara	47 Unit	41.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	915.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	BMD Dinas Kesehatan di Pelihara	2 Unit	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %			100 %	112.190.420.360,00						100 %	79.793.736.300,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota (%)	90.01 %			85.01 %	37.597.424.800,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	90.01 %	2.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	20.00 Unit			2 Unit	20.495.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Matompi Kab. Luwu Timur, Malli, Atue	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	20.00 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1.760.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-AFIRMASI-PENGUATAN PRASARANA DASAR PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit			2 Unit	2.210.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit			3 Unit	2.564.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit			1 Unit	197.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit			8 Unit	3.651.755.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	1 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit			8 Unit	994.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	18 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				179 Unit	150.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	88.01 Paket			2 Paket	5.062.076.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	88.01 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4 Keluarga	240.135.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			11616 Orang	64.765.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	11361 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123637 Orang			111885 Orang	286.724.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	123637 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17500 Orang			17000 Orang	76.969.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	17500 Orang	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31077 Orang			27495 Orang	38.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	31077 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2728 Orang			2420 Orang	38.731.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	2728 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	407 Orang			445 Orang	53.926.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	407 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			2975 Orang	95.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	330 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			4230 Orang	195.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	5540 Orang	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100 Dokumen			12 Dokumen	88.214.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	100 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			3 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	487 Dokumen	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen			18 Dokumen	50.970.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	18 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			65 Dokumen	85.600.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	80 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50500 Dokumen			20 Dokumen	93.516.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	50500 Dokumen	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18 Dokumen			12 Dokumen	41.659.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	18 Dokumen	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			52 Dokumen	163.666.860,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	10 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			7 Dokumen	267.915.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	20 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1223097 Dokumen			60 Dokumen	61.489.755.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), PAJAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	123097 Dokumen	65.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				75 Orang	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11 Dokumen			11 Dokumen	356.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	11 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit			18 Unit	189.088.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehahtan	9 Unit	189.088.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPCOT)	18 Unit			1 Unit	219.997.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan	18 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				425 Orang	85.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				120 Orang	40.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1000 Orang	75.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				4 Dokumen	4.520.195.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		4.520.195.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				14 Dokumen	132.254.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	99.965.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Fasilitas kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan (%)	85.01 %			80.01 %	44.989.000,00			-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Data sarana dan prasarana	85.01 %	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen			1 Dokumen	44.989.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Data sarana dan prasarana	3 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan (%)	50.01 %			50 %	38.259.000,00			-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Rumah sakit dan klinik	50.01 %	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0 Unit			2 Unit	38.259.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Rumah sakit dan klinik	0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	83.13 %			83.13 %	5.421.761.950,00						83.13 %	5.444.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kepemilikan SIP/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan (%)	100 %			100 %	55.756.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Izin praktik tenaga Kesehatan Kabupaten Luwu Timur	100 %	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				800 Dokumen	55.756.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Izin praktik tenaga Kesehatan Kabupaten Luwu Timur		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase rata - rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan (%)	100 %			100 %	5.034.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga SDM Kesehatan	100 %	5.034.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				350 Orang	5.034.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga SDM Kesehatan		5.034.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100 %			100 %	332.005.950,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Kesehatan	100 %	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	728 Orang			15 Orang	332.005.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Tenaga Kesehatan	728 Orang	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	73.01 %			73.01 %	502.430.700,00						73.01 %	107.349.800,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	95.01 %			95.01 %	107.349.800,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana pelayanan kefarmasian	95.01 %	107.349.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58 Dokumen			50 Dokumen	107.349.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana pelayanan kefarmasian	58 Dokumen	107.349.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	50.01 %			50.01 %	144.856.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana IRTP	50.01 %	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Dokumen			120 Dokumen	144.856.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana IRTP	90 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	250.224.900,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana IRTP	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				120 Unit	250.224.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sarana IRTP		0,00	DINAS KESEHATAN
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100 %			100 %	349.132.500,00						100 %	350.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)	127 Desa/Kel			127 Desa/Kel	349.132.500,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	UKBM	127 Desa/Kel	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			22 Dokumen	349.132.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	UKBM	278 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BURAU						4.027.090.386,00							4.072.231.800,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.027.090.386,00							4.072.231.800,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.027.090.386,00							4.072.231.800,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	66.000.000,00					-		69.300.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	66.000.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	69.300.000,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	66.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Laumo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		69.300.000,00	PUSKESMAS BURAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.961.090.386,00					-	-	4.002.931.800,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.961.090.386,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.002.931.800,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			377 Orang	17.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	18.711.000,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			360 Orang	3.790.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	3.979.500,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			3207 Orang	60.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	63.609.000,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			200 Orang	8.385.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	8.804.250,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			412 Orang	4.095.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	4.299.750,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	89.370.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	93.838.500,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	26.130.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	27.436.500,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	26.550.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	27.877.500,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	132.405.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	139.025.250,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.445.280.386,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.461.331.300,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	195.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalajaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		204.750,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	15.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		16.380.000,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	12.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Jalaja Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur, Burau, Lumbewe Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12.967.500,00	PUSKESMAS BURAU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	118.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Lauwo Kab. Luwu Timur, Burau, Jalaja Kab. Luwu Timur, Burau, Kalatiri Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Kab. Luwu Timur, Burau, Cendana Kab. Luwu Timur, Burau, Burau Pantai Kab. Luwu Timur, Burau, Lagego Kab. Luwu Timur, Burau, Batu Putih Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		124.467.000,00	PUSKESMAS BURAU
		PUSKESMAS WOTU						4.768.073.002,00							4.922.371.652,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.768.073.002,00							4.922.371.652,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.768.073.002,00							4.922.371.652,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	78.100.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	78.100.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	0,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				142 Paket	78.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS WOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	4.682.593.002,00					-	-	4.914.622.652,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	4.682.593.002,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.914.622.652,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			682 Orang	60.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	63.504.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			651 Orang	5.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	6.247.500,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			6396 Orang	94.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	99.645.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			80 Orang	7.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	8.190.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			681 Orang	28.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	30.166.500,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	309.936.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	325.432.800,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	41.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	43.816.500,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	46.045.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	48.347.250,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	274.625.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	286.256.250,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.662.547.002,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.845.674.352,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3.780.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	195.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		204.750,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	3.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.095.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6 Orang	390.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		409.500,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	22.765.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23.903.250,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	119.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		124.950.000,00	PUSKESMAS WOTU
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	7.380.000,00						-	7.749.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	7.380.000,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	7.749.000,00	PUSKESMAS WOTU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	7.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	7.749.000,00	PUSKESMAS WOTU
		PUSKESMAS MANGKUTANA						4.024.062.386,00							4.168.045.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.024.062.386,00							4.168.045.000,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.024.062.386,00							4.168.045.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30.250.000,00						-	60.500.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	30.250.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	60.500.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	30.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60.500.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.979.332.386,00						-	4.092.545.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.979.332.386,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.092.545.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			350 Orang	33.880.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	35.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			350 Orang	31.125.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	35.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			3116 Orang	76.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	55.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			272 Orang	26.675.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	6.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			383 Orang	3.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	272.442.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	270.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	10.530.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	9.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	65.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	55.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	202.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	190.900.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.090.525.386,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.250.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				1 Laporan	1.430.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.430.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				67 Orang	6.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	345.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		715.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	16.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		17.500.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	141.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		132.500.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	14.480.000,00					-		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	14.480.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	15.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	14.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS MANGKUTANA
		PUSKESMAS TOMONI						3.973.841.386,00							4.204.475.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.973.841.386,00							4.204.475.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.973.841.386,00							4.204.475.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	60.800.000,00						100 %	35.000.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100 %			100 %	60.800.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	35.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	60.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %			100 %	3.898.291.386,00						100 %	4.157.085.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			12 Dokumen	170.977.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	487 Dokumen	150.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			12 Dokumen	20.930.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	80 Dokumen	14.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			12 Dokumen	63.475.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	10 Dokumen	45.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			12 Dokumen	196.410.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	20 Dokumen	165.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			4 Dokumen	3.129.884.386,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat	18 Dokumen	3.500.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		3.600.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	575.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		575.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	7.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		2.600.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	9.620.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		10.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		7.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	156.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat		140.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	14.750.000,00					-	-	12.390.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/K el			-	14.750.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/K el	12.390.000,00	PUSKESMAS TOMONI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			4 Dokumen	14.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	12.390.000,00	PUSKESMAS TOMONI
		PUSKESMAS TOMONI TIMUR						2.941.606.586,00							2.989.490.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.941.606.586,00							2.989.490.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.941.606.586,00							2.989.490.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	59.950.000,00					-	-	59.950.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	59.950.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	59.950.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				109 Paket	59.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		59.950.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %			100 %	2.875.836.586,00						100 %	2.923.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	146.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	487 Dokumen	146.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	29.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	80 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	72.765.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	10 Dokumen	73.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	127.530.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	20 Dokumen	128.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.257.676.586,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	18 Dokumen	2.300.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				1 Laporan	520.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur		1.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	3.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur		3.500.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	260.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur		500.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	6.835.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur		7.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	110.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur		110.500.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif undefined	100 %			100 % undefined undefined	5.820.000,00						100 %	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) undefined	127 Desa/Kel			127 Desa/Kel undefined	5.820.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Kader desa di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	127 Desa/Kel	6.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	5.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Kader desa di wilayah kerja Puskesmas Tomoni Timur	278 Dokumen	6.000.000,00	PUSKESMAS TOMONI TIMUR		
		PUSKESMAS KALAENA							3.240.820.986,00								3.516.063.084,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.240.820.986,00							3.516.063.084,00			
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.240.820.986,00							3.516.063.084,00			
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.200.000,00						-	31.460.000,00			
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.200.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	31.460.000,00	PUSKESMAS KALAENA		
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	2.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		31.460.000,00	PUSKESMAS KALAENA		
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.233.010.986,00						-	3.478.432.084,00			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.233.010.986,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.478.432.084,00	PUSKESMAS KALAENA		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			231 Orang	44.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	48.510.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			220 Orang	16.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	17.875.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			1192 Orang	46.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	51.480.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			195 Orang	11.635.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	12.798.500,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			180 Orang	780.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	858.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	126.051.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	138.656.100,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	14.430.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	15.873.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	60.190.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	66.209.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	125.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	138.281.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.595.664.986,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	2.777.351.484,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	130.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		143.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				26 Orang	8.190.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9.009.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	2.340.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2.574.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	19.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		21.208.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	161.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Kalaena	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		177.606.000,00	PUSKESMAS KALAENA
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	5.610.000,00					-	-	6.171.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	5.610.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	6.171.000,00	PUSKESMAS KALAENA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	5.610.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Argomulyo Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Makmur Kab. Luwu Timur, Kalaena, Mekar Sari Kab. Luwu Timur, Kalaena, Pertasi Kencana Kab. Luwu Timur, Kalaena, Non Blok Kab. Luwu Timur, Kalaena, Sumber Agung Kab. Luwu Timur, Kalaena,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk at an Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	6.171.000,00	PUSKESMAS KALAENA
		PUSKESMAS ANGKONA						3.855.594.686,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.855.594.686,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.855.594.686,00							0,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	63.250.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	63.250.000,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	63.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkora, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS ANGKONA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.773.944.686,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.773.944.686,00			-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			231 Orang	13.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	5575 Orang	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			411 Orang	4.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	5570 Orang	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			811 Orang	60.060.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkora, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	11361 Orang	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			240 Orang	12.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	330 Orang	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			20 Orang	3.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	5540 Orang	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	157.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	487 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	17.030.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	80 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	10 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	115.765.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-	20 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.234.664.686,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	18 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	650.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-		0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				34 Orang	13.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-		0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	22.875.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anjutan	-		0,00	PUSKESMAS ANGKONA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	83.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS ANGKONA
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	18.400.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	18.400.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	-	127 Desa/Kel	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	-	278 Dokumen	0,00	PUSKESMAS ANGKONA
		PUSKESMAS LAKAWALI						2.934.433.386,00							2.990.100.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.934.433.386,00							2.990.100.000,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.934.433.386,00							2.990.100.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	52.800.000,00						-	60.000.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	52.800.000,00			-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	60.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
1.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				96 Paket	52.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.881.633.386,00						-	2.930.100.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.881.633.386,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.930.100.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			193 Orang	36.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			184 Orang	3.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	5.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			343 Orang	25.740.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	27.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			175 Orang	8.125.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			235 Orang	12.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	12.500.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	101.025.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	102.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	11.570.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	12.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	24.085.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Daerah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	25.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	91.695.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	92.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.462.653.386,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	2.500.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	325.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		500.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	3.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3.500.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	520.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		600.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	24.665.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	75.680.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali Kab. Luwu Timur, Malili, Tarabbi Kab. Luwu Timur, Malili, Lakawali	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		76.000.000,00	PUSKESMAS LAKAWALI
		PUSKESMAS PARUPANAI						2.151.146.386,00							2.337.103.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.151.146.386,00							2.337.103.900,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.151.146.386,00							2.337.103.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	34.650.000,00						-	35.000.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	34.650.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	35.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 Paket	34.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.106.296.386,00						-	2.285.383.900,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.106.296.386,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.285.383.900,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Anak Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			115 Orang	15.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	15.300.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			110 Orang	12.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	14.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			664 Orang	22.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	24.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			12 Orang	5.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	6.270.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			2 Orang	520.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	1.144.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	113.584.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	172.269.900,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	31.490.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	34.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	38.425.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	39.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	79.990.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	80.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	1.689.032.386,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	1.800.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.400.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	3.510.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	14.645.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	78.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		79.000.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	10.200.000,00						-	16.720.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	10.200.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	16.720.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Parumpantai Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Kawata	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	16.720.000,00	PUSKESMAS PARUMPANAI
		PUSKESMAS MALILI							4.973.606.452,00					5.125.695.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.973.606.452,00							5.125.695.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.973.606.452,00							5.125.695.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.100.000,00					-	-	0,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	1.100.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	0,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MALILI
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	4.972.506.452,00					-	-	5.125.695.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	4.972.506.452,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	5.125.695.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			486 Orang	38.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	45.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			464 Orang	8.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			7259 Orang	43.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Puncuk Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	0,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			432 Orang	30.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Puncuk Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	35.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			540 Orang	2.860.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Puncuk Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	3.500.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	168.457.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Puncuk Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	170.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	37.830.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Puncuk Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	45.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	146.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	155.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	4.287.309.452,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	4.500.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		9.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	130.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		195.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				80 Orang	13.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Malili, Atue	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MALILI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	7.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	21.840.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Balantang Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		23.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	125.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Manurung Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu Kab. Luwu Timur, Malili, Baruga Kab. Luwu Timur, Malili, Ussu Kab. Luwu Timur, Malili, Atue Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		130.000.000,00	PUSKESMAS MALILI
		PUSKESMAS LAMPIA						2.626.000.536,00							2.967.420.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.626.000.536,00							2.967.420.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.626.000.536,00							2.967.420.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	41.800.000,00					-		0,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	41.800.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	0,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				76 Paket	41.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili,	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS LAMPIA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.584.200.536,00					-		2.967.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.584.200.536,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.967.420.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			156 Orang	27.360.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	35.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			149 Orang	6.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	10.800.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			884 Orang	18.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	62.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			15 Orang	2.860.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	15.650.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			1 Orang	260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	1.300.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	103.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	150.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	12.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Pasinggi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	17.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	25.945.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	34.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	126.035.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	127.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.144.750.536,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	2.390.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)				1 Laporan	1.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				17 Orang	4.680.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7.020.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				173 Orang	390.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		650.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	29.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		32.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	79.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Harapan Kab. Luwu Timur, Malili, Laskap Kab. Luwu Timur, Malili, Pongkeru Kab. Luwu Timur, Malili, Rasinjasi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		82.000.000,00	PUSKESMAS LAMPIA		
		PUSKESMAS WASUPONDA							3.796.756.076,00								4.252.134.024,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.796.756.076,00							4.252.134.024,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.796.756.076,00							4.252.134.024,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	48.400.000,00						-	53.240.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	48.400.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	53.240.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 Paket	48.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		53.240.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.743.556.076,00					-		4.193.614.024,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.743.556.076,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	4.193.614.024,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			268 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	22.000.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			221 Orang	4.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	4.708.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			280 Orang	31.980.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	35.178.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			231 Orang	17.940.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	19.734.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			301 Orang	3.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	3.432.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	150.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	165.803.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	26.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	29.172.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	35.110.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	38.621.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	90.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	99.385.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.302.016.076,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.707.920.024,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	390.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		429.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	3.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3.432.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	6.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7.436.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	51.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		56.364.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	4.800.000,00					-	-	5.280.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	4.800.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	5.280.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	4.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	5.280.000,00	PUSKESMAS WASUPONDA
		PUSKESMAS NUHA						3.103.023.412,00							3.471.245.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.103.023.412,00							3.471.245.000,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.103.023.412,00							3.471.245.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	58.300.000,00						-	60.250.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	58.300.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	60.250.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	58.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60.250.000,00	PUSKESMAS NUHA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	3.034.713.412,00						-	3.400.985.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	3.034.713.412,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.400.985.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			474 Orang	10.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	12.500.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			437 Orang	5.470.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	6.500.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			471 Orang	23.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	24.660.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			25 Orang	3.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	8.150.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	97.899.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	80.000.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	11.635.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	11.635.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	22.490.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	23.000.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			0	20 Dokumen			0 0	149.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	20 Dokumen	155.000.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.638.814.412,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.000.000.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.200.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	260.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		260.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				45 Orang	4.875.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		5.000.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	780.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.430.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	9.880.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		10.130.000,00	PUSKESMAS NUHA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	52.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		58.520.000,00	PUSKESMAS NUHA
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	10.010.000,00						-	10.010.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	10.010.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	10.010.000,00	PUSKESMAS NUHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	10.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	10.010.000,00	PUSKESMAS NUHA
		PUSKESMAS WAWONDULA						3.882.176.386,00							4.155.465.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.882.176.386,00							4.155.465.000,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.882.176.386,00							4.155.465.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.100.000,00					-		60.000.000,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	1.100.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	60.000.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				103 Paket	1.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Luksa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		60.000.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %			100 %	3.881.076.386,00						100 %	4.095.465.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			216 Orang	6.825.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	7.500.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			382 Orang	2.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	2.860.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	116.225.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	131.765.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	22.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	25.025.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	60.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	72.831.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	117.745.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan atasan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	145.980.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	3.354.236.386,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	3.518.318.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	325.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		325.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	12.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		6.980.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	1.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.716.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	4.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Asuli Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.576.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak				1 Dokumen	99.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Lioka Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya Kab. Luwu Timur, Towuti, Wawondula	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		99.352.000,00	PUSKESMAS WAWONDULA		
		PUSKESMAS TIMAMPU							2.285.142.386,00								2.316.880.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.285.142.386,00							2.316.880.000,00			
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.285.142.386,00							2.316.880.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.282.622.386,00					-	-	2.313.880.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.282.622.386,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.313.880.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			166 Orang	11.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	13.680.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			158 Orang	6.375.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	6.500.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			1610 Orang	39.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	40.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			126 Orang	6.890.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	7.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			292 Orang	1.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	1.200.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	93.860.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	94.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	30.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	30.500.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	34.385.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	35.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	77.935.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	78.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	1.875.497.386,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	1.900.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	6.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	24.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	71.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		72.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
2	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	2.520.000,00						-	3.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	2.520.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	3.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	3.000.000,00	PUSKESMAS TIMAMPU
		PUSKESMAS MAHALONA						2.618.810.286,00							122.870.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.618.810.286,00							122.870.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.618.810.286,00							122.870.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	46.750.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	46.750.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	0,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	46.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MAHALONA
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.570.060.286,00						-	122.870.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.570.060.286,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	122.870.000,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			100 Orang	5.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	5.600.000,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			100 Orang	4.325.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	0,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			993 Orang	41.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	0,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			14 Orang	11.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	11.700.000,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			3 Orang	195.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	0,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	88.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	88.540.000,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	17.030.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	17.030.000,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	37.870.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MAHALONA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	90.870.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.175.275.286,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	2.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	2.925.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	13.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	78.790.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	2.000.000,00						-	0,00			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	2.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	0,00	PUSKESMAS MAHALONA		
		PUSKESMAS BANTILANG						2.919.249.586,00									2.978.650.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.919.249.586,00							2.978.650.000,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.919.249.586,00							2.978.650.000,00			
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	50.600.000,00						-	51.000.000,00			
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	50.600.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	51.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG		
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				92 Paket	50.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		51.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.864.979.586,00					-	-	2.923.650.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.864.979.586,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.923.650.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			231 Orang	19.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			95 Orang	8.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			844 Orang	41.860.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	42.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			59 Orang	10.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	11.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			86 Orang	3.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	4.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			1 Dokumen	52.890.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	53.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			1 Dokumen	27.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	28.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			1 Dokumen	29.470.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	30.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			1 Dokumen	111.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	112.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			1 Dokumen	2.446.024.586,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	2.500.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	325.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		650.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	1.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Masiku Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemantauan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	520.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Maeli	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	24.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Maeli	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	85.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Maeli	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		86.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG	
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	3.670.000,00						-	4.000.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	3.670.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	4.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			1 Dokumen	3.670.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Bantilang Kab. Luwu Timur, Towuti, Tokalimbo Kab. Luwu Timur, Towuti, Rante Angin Kab. Luwu Timur, Towuti, Loeha Kab. Luwu Timur, Towuti, Maeli	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	4.000.000,00	PUSKESMAS BANTILANG	
		PUSKESMAS BONEPUTE						2.958.768.386,00							3.040.300.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.958.768.386,00								3.040.300.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.958.768.386,00								3.040.300.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	31.350.000,00						-	30.800.000,00		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	31.350.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	30.800.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket	31.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30.800.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	2.914.668.386,00					-	-	2.994.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			-	2.914.668.386,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.994.500.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5575 Orang			300 Orang	17.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5575 Orang	20.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5570 Orang			300 Orang	20.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5570 Orang	25.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11361 Orang			750 Orang	33.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	11361 Orang	35.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	330 Orang			80 Orang	11.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	330 Orang	15.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5540 Orang			200 Orang	1.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5540 Orang	2.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	487 Dokumen			12 Dokumen	104.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	487 Dokumen	110.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	80 Dokumen			12 Dokumen	20.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 Dokumen	22.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen			12 Dokumen	5.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua kelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	40.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20 Dokumen			12 Dokumen	115.895.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	20 Dokumen	120.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18 Dokumen			12 Dokumen	2.460.863.386,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	18 Dokumen	2.500.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	650.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	4.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		4.500.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	2.340.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	18.720.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		0,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	97.770.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	12.750.000,00					-		15.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	127 Desa/Kel			-	12.750.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	127 Desa/Kel	15.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	278 Dokumen			12 Dokumen	12.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	278 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS BONEPUTE
		RSUD I LAGALIGO						166.451.465.153,00							158.761.011.822,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						166.451.465.153,00							158.761.011.822,00	
	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						166.451.465.153,00							158.761.011.822,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	150.813.613.630,00						100 %	138.843.385.584,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	59.520.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	42.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	47.806.500,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	8 Dokumen	20.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	11.713.500,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Laporan	22.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %			100 %	44.996.303.630,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	30.189.806.955,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/bulan			345 Orang/bulan	44.979.333.630,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	220 Orang/bulan	30.177.306.955,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	7 Laporan			7 Laporan	16.970.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	7 Laporan	12.500.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	341.750.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	677.500.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625 Paket			4 Paket	341.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Arolipu Kab. Luwu Timur, Wotu, Bire	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	0 Paket	677.500.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	80 %			80 %	12.725.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	80 %	8.500.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			5 Dokumen	12.725.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	5 Dokumen	8.500.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	10.034.715.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	10.097.720.669,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	10.034.715.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Laporan	10.097.720.669,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	185.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	657.857.960,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit			28 Unit	185.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	32 Unit	657.857.960,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	22 %			18.5 %	95.183.600.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	22 %	97.170.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	95.183.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Unit Kerja	97.170.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	25.5 %			25.5 %	15.035.351.523,00						25.5 %	18.970.626.238,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana,prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit	74 %			74 %	3.977.370.500,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	74.4 %	8.810.865.198,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	144 Unit			3 Unit	734.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Arolipu Kab. Luwu Timur, Wotu, Bire	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	1 Unit	742.857.960,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	346 Unit			102 Unit	2.143.370.500,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Unit	2.900.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	548 Unit			31 Unit	600.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	548 Unit	745.807.238,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	13 Unit			2 Unit	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	2 Unit	4.422.200.000,00	RSUD I LAGALIGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan yag dilayani	100 %			98.6 %	11.057.981.023,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	98.8 %	10.159.761.040,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10 Dokumen			7 Dokumen	11.057.981.023,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	10 Dokumen	10.159.761.040,00	RSUD I LAGALIGO
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK	62 %			62 %	602.500.000,00						62 %	947.000.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/ bimtek	100 %			100 %	602.500.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	100 %	947.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1002 Orang			75 Orang	602.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1) Pemanta pan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-	128 Orang	947.000.000,00	RSUD I LAGALIGO
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						200.901.835.750,00							205.861.835.750,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						200.901.835.750,00							205.861.835.750,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						200.901.835.750,00							205.861.835.750,00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-			100 %	13.149.005.724,00						-	12.294.095.424,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 %	177.819.290,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	177.819.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	90.276.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		90.276.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8.273.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangu nan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		8.273.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.128.790,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		4.128.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	75.140.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		75.140.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	-			100 %	10.106.717.526,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	9.289.556.292,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/bulan	10.040.568.201,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		9.223.406.967,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40.096.075,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		40.096.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	26.053.250,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		26.053.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	-			100 %	36.551.600,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	30.255.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	36.551.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		30.255.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	336.303.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	246.064.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	184.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	42.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		40.824.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	14.988.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		14.290.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	94.145.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		90.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	-			100 %	654.464.206,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	653.513.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.051.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		3.061.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	200.176.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		200.176.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					21 Paket	36.679.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		35.692.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6 Paket	11.830.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		11.530.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					72 Dokumen	6.160.006,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		7.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	23.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		23.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	372.816.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		371.384.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 %	213.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	273.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	22.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		82.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	18.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		12.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	447.918.902,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	447.656.402,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	22.322.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		22.060.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	145.396.252,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		145.396.252,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	280.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		280.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	-			100 %	1.176.231.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur	-	1.176.231.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	114.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		114.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	156.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		156.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	668.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		668.150.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	86.685.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		86.685.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	149.995.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Dinas PUPR Kab. Luwu Timur		149.995.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air Rasio Jaringan Irigasi	-			49,5 % 12,821 angka	9.790.607.748,00						-	10.791.107.748,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai	-			76,65 KM	6.943.212.848,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim	-	7.972.599.435,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	168.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		168.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				25 KM	855.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		855.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi				0,05 KM	222.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		222.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,64 KM	2.587.655.544,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		3.145.101.702,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,153 KM	885.665.785,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		885.665.785,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,196 KM	202.174.775,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		779.315.204,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,05 KM	1.500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		1.392.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		202.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,112 KM	322.716.744,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sungai dan Pantai Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		322.716.744,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	-			83,57 KM	2.847.394.900,00			Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim	-	2.818.508.313,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,242 KM	660.819.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		687.360.475,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,101 KM	462.195.320,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		427.488.688,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,29 KM	643.240.680,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur ur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		642.348.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Bendung	395.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		395.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi														
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				33 Di	20.699.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		18.530.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				4 Lembaga	164.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kab. Lutim		147.000.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi	-			61,48 %	17.864.413.000,00					-		18.176.415.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	-			38253 RT	17.864.413.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	-	18.176.415.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	550.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		421.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				4 Unit	16.268.313.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		16.508.515.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	546.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		746.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	-			0 %	3.299.750.000,00						-	3.299.750.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana / prasarana persampahan yang disediakan	-			24 Unit	3.299.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Luwu Timur	-	3.299.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	600.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Luwu Timur		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				13 Unit	2.699.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Luwu Timur		2.699.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman	-			4,62 %	5.056.766.000,00						-	5.544.764.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	-			9192 RT	5.056.766.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	-	5.544.764.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	212.914.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		212.914.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	112.002.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				471 Rumah Tangga	4.531.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur		4.531.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	-			93,62 %	12.351.270.000,00						-	12.351.270.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	-			43,11 KM	12.351.270.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Saluran Pembuangan Air Kabupaten Luwu Timur	-	12.351.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				7500 M	11.326.870.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Saluran Pembuangan Air Kabupaten Luwu Timur		11.326.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				500 Meter	524.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Saluran Pembuangan Air Kabupaten Luwu Timur		524.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				500 M	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Saluran Pembuangan Air Kabupaten Luwu Timur		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	-			90,85 %	42.679.805.000,00						-	44.567.805.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Memiliki IMB	-			5128 Unit	42.679.805.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemajuan Pembangunan Daerah	Bangunan di Kabupaten Luwu Timur	-	44.567.805.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				2 Bangunan Gedung	330.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Bangunan di Kabupaten Luwu Timur		218.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	41.933.985.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Bangunan di Kabupaten Luwu Timur		43.933.985.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				274 Orang	26.030.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Bangunan di Kabupaten Luwu Timur		26.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung				20 Dokumen	389.790.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Bangunan di Kabupaten Luwu Timur		389.790.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas RTH publik yang ditata	-			0,29 %	9.053.500.000,00						-	9.165.500.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas RTH publik yang ditata	-			72,83 Ha	9.053.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	RTH di Kabupaten Luwu Timur	-	9.165.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	9.053.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	RTH di Kabupaten Luwu Timur		9.165.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	-			30,65 %	84.098.856.500,00						-	86.098.856.500,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jembatan kondisi baik Panjang jalan kondisi baik	-			397 Unit 683,51 KM	84.098.856.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur	-	86.098.856.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	300.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				38 KM	68.089.771.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		68.089.771.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	400.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				3 KM	4.822.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		4.822.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	650.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				10 Jembatan	6.609.885.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		8.609.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2229,869 KM	705.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemungkinan Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		705.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2.371.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		2.371.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	50.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				1 Jembatan	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	-			73,01 % 100 %	1.496.069.778,00						-	1.496.069.778,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang dilatih	-			957 Orang	959.082.880,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Tenaga Konstruksi di wilayah Luwu Timur	-	959.082.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	363.883.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Tenaga Konstruksi di wilayah Luwu Timur		363.883.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				31 Lembaga	63.779.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Tenaga Konstruksi di wilayah Luwu Timur		63.779.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	531.420.380,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Tenaga Konstruksi di wilayah Luwu Timur		531.420.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Informasi yang dioperasikan	-			7 Layanan	54.902.518,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	54.902.518,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				7 Layanan Informasi	54.902.518,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Jasa Konstruksi		54.902.518,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan produk	-			30 Lembaga	482.084.380,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Lembaga Jasa Konstruksi	-	482.084.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				25 Lembaga	406.016.380,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Lembaga Jasa Konstruksi		406.016.380,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				100 Badan Usaha	76.068.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Lembaga Jasa Konstruksi		76.068.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian penataan ruang	49,24 %			49,24 %	2.061.792.000,00						49,24 %	2.076.202.300,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang	-			100 %	1.718.476.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur	-	1.680.556.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	818.164.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		824.792.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	700.312.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		701.273.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				3 Publikasi	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		154.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	-			100 %	0,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur	-	52.045.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		52.045.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan dan penegakan hukum bidang tata ruang	-			100 %	343.316.000,00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur	-	343.601.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	303.256.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		303.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				4 Kasus	40.060.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur		40.321.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						26.805.609.700,00		21.599.800.000,00						
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.613.199.700,00							21.357.800.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						26.613.199.700,00							21.357.800.000,00	
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	6.108.125.050,00						100 %	5.728.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 dokumen			20 Dokumen	191.179.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	17 dokumen	196.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			5 Dokumen	61.724.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	3 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	2 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	2 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			12 Laporan	119.455.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	10 Laporan	120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen			100 %	3.979.613.950,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	100 persen	3.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan			23 Orang/bulan	3.907.481.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	22 Orang/bulan	3.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	72.132.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	18 Laporan	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100 persen			100 %	19.070.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	100 persen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	19.070.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	5000000 rupiah			742242000 Rp.	7.799.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN Kab. Luwu Timur	5000000 rupiah	7.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	7.799.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	7.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen			100 %	356.120.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP	100 persen	335.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket			23 Paket	98.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP	55 Paket	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	57.344.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP	12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang			23 Orang	200.176.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP	22 Orang	245.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian administrasi umum PD	100 persen			100 %	689.737.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	100 persen	741.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	3 Paket	6.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			4 Paket	84.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	3 Paket	90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			2 Paket	3.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	1 Paket	6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			3 Paket	16.322.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	20 Paket	24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	18.720.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	3 Paket	19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			72 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	72 Dokumen	16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	12 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	521.694.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	12 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	25 unit			3 paket	183.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	25 unit	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit			2 Unit	37.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			2 Unit	116.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	1 Unit	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen			100 %	237.104.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	100 persen	172.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			12 Laporan	12.014.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	4 Laporan	12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			12 Laporan	117.690.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	3 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			12 Laporan	107.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	4 Laporan	115.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	87 unit			84 unit	444.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	87 unit	605.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			13 Unit	52.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	2 Unit	45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit			67 Unit	67.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur	66 Unit	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	325.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	ASN DPKPP Kab. Luwu Timur		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100 % 100 % 100 % 100 % 100 persen 100 %			100 % 100 %	2.245.567.300,00						100 % 100 % 100 % 100 % 100 persen 100 %	1.866.500.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan	2 dokumen			1 dokumen	493.391.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	2 dokumen	46.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen			1 Dokumen	16.489.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	476.901.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang direhabilitasi dan dibangun	100 Persen			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	100 Persen	1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	3 Unit Rumah			10 Unit Rumah	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah			20 Unit Rumah	400.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah			50 Unit Rumah	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Unit Rumah	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	100 Persen			100 %	610.736.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	100 Persen	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8 Dokumen			1 Dokumen	610.736.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	8 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan	3 rekomendasi			1 rekomendasi	41.439.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 rekomendasi	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan			12 Laporan	41.439.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	3 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Rasio rumah layak huni	100 % 19.24 % 19.24 % 19.24 % 100 % 100 %			16,71 % 18,94	8.823.507.350,00						20.47 % 19.24 % 19.24 % 19.24 % 20.47 % 20.47 %	6.863.000.000,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	4 Dokumen			1 dokumen	132.590.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan			12 Laporan	132.590.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Laporan	95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh	17,4 Ha			14,2 Ha	518.964.850,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	17,4 Ha	18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi	4 Dokumen			1 Dokumen	518.964.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh	70,62 Persen			70,62 % 14,20 Ha	8.171.952.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemandirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	70,62 Persen	6.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 Unit Rumah			105 Unit Rumah	2.262.452.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	200 Unit Rumah	2.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha			51,90 Ha	5.909.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	10 Ha	4.450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU (%) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	100 % 100 % 100 %			19,30 % 19,30 % 19,3 %	9.436.000.000,00						19,30 % 19,30 % 19,30 %	6.900.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah seluruh lingkungan perumahan	12 lingkungan			12 Lingkungan	9.436.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	12 lingkungan	6.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 Lokasi			11 Lokasi	9.436.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	12 Lokasi	6.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						192.410.000,00							242.000.000,00	
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						192.410.000,00							242.000.000,00	
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %			100 %	4.730.000,00						100 %	5.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	5 kasus			100 %	4.730.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	5 kasus	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	4.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100 %			100 %	16.696.000,00						100 %	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n	700000 m2			10000 m2	16.696.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	500000 m2	17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen			3 Dokumen	16.696.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	2 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100 %			100 %	88.904.000,00						100 %	130.000.000,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	15 bidang			20 bidang	88.904.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	15 bidang	130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong														
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	4 Laporan			4 Laporan	88.904.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Kab. Luwu Timur	4 Laporan	130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	100 %			100 %	5.080.000,00						100 %	5.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar	3 izin			2 izin	5.080.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat	3 izin	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				3 Dokumen	5.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	100 %			100 %	77.000.000,00						100 %	85.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	100 persen			100 %	77.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Luwu Timur	100 persen	85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	02 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Masyarakat Luwu Timur	4 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						14.845.356.900,00							18.353.274.505,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.845.356.900,00							18.353.274.505,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.845.356.900,00							18.353.274.505,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.765.805.310,00					-		8.261.911.525,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	138.097.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	93.346.108,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	61.711.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	5.469.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	3.327.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	7.591.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	3.327.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			11 Laporan	63.325.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Laporan	49.691.108,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	5.023.717.560,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	5.848.254.113,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan			40 Orang/bulan	4.920.798.960,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBYAKTIAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	59 Orang/bulan	5.765.912.412,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			4 Dokumen	36.960.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	49.193.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	29.593.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	17.948.973,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	36.365.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	15.198.968,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	30.706.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	15.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	30.706.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	15.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	149.834.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	356.565.680,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	275 Paket			247 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	275 Paket	275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	7.506.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	10.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen			4 Dokumen	20.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Dokumen	21.296.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang			40 Orang	3.927.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	47 Orang	7.986.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang			12 Orang	117.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Orang	41.633.680,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	417.319.350,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	403.222.526,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	200 Paket			166 Paket	7.222.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	200 Paket	9.982.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	270 Paket			191 Paket	10.178.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	270 Paket	16.105.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket			10 Paket	6.012.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Paket	7.986.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			10 Paket	11.475.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	16.105.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			72 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	72 Dokumen	10.648.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180 Laporan			4 Laporan	8.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	180 Laporan	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275 Laporan			422 Laporan	366.381.050,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	275 Laporan	330.395.926,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	85 Persen			-	706.364.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	85 Persen	1.120.683.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	656.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit			23 Unit	49.864.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40 Unit	197.653.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	173.030.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	93.657.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	123.094.873,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan			12 Laporan	6.174.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2500 Laporan	6.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			60 Laporan	72.483.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Laporan	96.474.873,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	19.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	206.109.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	300.772.725,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	15.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	20.098.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	36 Unit			36 Unit	120.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Unit	159.187.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit			93 Unit	38.990.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	150 Unit	79.860.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	16.720.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	22.460.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit			7 Unit	14.399.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Unit	19.166.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	8.079.551.590,00					-	-	10.091.362.980,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	93,27 % 94,22 % 77,44 % 100 %			-	7.624.844.550,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	93,27 % 94,22 % 77,44 % 100 %	9.300.395.380,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	48 Dokumen			15 Dokumen	61.689.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	155.103.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen			26 Dokumen	83.381.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	227.241.630,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	216 Orang			155 Orang	401.534.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	216 Orang	550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen			1 Dokumen	20.568.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	32.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Keterbiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Keterbiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Diupdatekikan	20 Dokumen			20 Dokumen	10.294.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Dokumen	15.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Kasus			158 laporan	6.807.119.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	365 Kasus	6.625.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterbiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan dan Ditindakkan	300 Kasus			173 Laporan	100.097.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	300 Kasus	147.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10 Laporan			4 Laporan	15.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterbiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterbiban Umum yang Tersedia	53 Unit			58 Unit	125.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	53 Unit	1.532.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	100 %			-	421.998.490,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	590.967.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46 Laporan			26 Laporan	183.260.640,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	46 Laporan	132.000.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	30 Laporan			5 Laporan	124.841.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Laporan	250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peratutan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	66 Laporan			56 Laporan	113.896.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	66 Laporan	208.967.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	100 %			-	32.708.550,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.02.2.03.0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan			2 Laporan	32.708.550,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								5.272.606.050,00									6.134.321.840,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.272.606.050,00									6.134.321.840,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.272.606.050,00									6.134.321.840,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	3.768.715.750,00						100 %	3.779.321.840,00			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	140.529.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	100 %	119.796.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			3 Dokumen	48.168.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	2 Dokumen	45.696.840,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	6.382.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	4.332.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan			10 Laporan	81.646.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD	10 Laporan	44.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %			100 %	2.461.024.110,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	100 %	2.655.875.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			16 Orang/bulan	2.405.097.010,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	20 Orang/bulan	2.590.875.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	108 Laporan			18 Laporan	55.927.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Laporan Keuangan OPD	18 Laporan	65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %			100 %	27.062.200,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Barang Milik Daerah (BMD)	100 %	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			4 Laporan	27.062.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Barang Milik Daerah (BMD)	4 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %			100 %	104.950.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	100 %	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	106 Paket			121 Paket	52.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	23 Paket	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 Orang			15 Orang	52.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkunan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK & Upah Jasa	15 Orang	65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	528.235.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	100 %	559.650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket			8 Paket	14.213.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	8 Paket	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket			20 Paket	30.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	20 Paket	34.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket			3 Paket	37.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	3 Paket	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen			60 Dokumen	7.440.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	60 Dokumen	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			1 Laporan	19.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	18.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan			1 Laporan	418.392.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, PPPK, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	435.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %			100 %	147.710.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN dan Kantor BPBD	100 %	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit			5 Unit	13.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN dan Kantor BPBD	0 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81 Unit			15 Unit	134.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN dan Kantor BPBD	15 Unit	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	84.104.840,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	100 %	99.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan			1 Laporan	5.126.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	55.818.540,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	23.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN, Upah Jasa dan Kantor BPBD	1 Laporan	24.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	275.100.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	100 %	185.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			14 Unit	127.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	15 Unit	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit			33 Unit	28.210.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	110 Unit	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			3 Unit	119.890.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor	2 Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang	100 % 100 % 100 %			100 % 100 % 100 %	1.503.890.300,00						100 % 100 % 100 %	2.355.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,65 %			0,08 %	68.063.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Warga negara yang berada di daerah rawan bencana	0,15 %	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				250 Orang	68.063.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Warga negara yang berada di daerah rawan bencana		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21,58 % 100 %			5,4 %	369.260.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana	6,74 % 100 %	655.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				500 Orang	58.941.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan masyarakat bencana				4 Kawasan	59.932.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	41.838.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	146.550.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	61.997.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Aparatur dan Warga Negara yang berada di daerah rawan bencana		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %			100 %	942.893.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	100 %	1.340.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen			1 Dokumen	801.132.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	1 Dokumen	900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1857 Orang			250 Orang	40.270.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	250 Orang	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1857 Orang			250 Orang	52.264.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	250 Orang	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	6 Dokumen			1 Dokumen	28.781.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.445.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Korban Bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %			5,45 %	123.673.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencanaan	100 %	195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	6 Kegiatan			1 Kegiatan	51.454.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencanaan	1 Kegiatan	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	72.219.100,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Regulasi dan Dokumen Tata Kelola Kebencanaan		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						12.398.385.828,00							23.400.887.899,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.398.385.828,00							23.400.887.899,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.398.385.828,00							23.400.887.899,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.986.325.870,00						-	5.697.912.249,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	121.849.858,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	139.655.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30.508.794,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		32.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.204.290,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.655.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.608.212,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	22.636.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		32.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	52.891.812,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		65.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.104.101.584,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	4.215.921.817,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	4.060.620.337,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		4.060.620.337,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	24.364.920,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		89.646.480,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2.336.240,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.655.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	8.540.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		33.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	8.239.687,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		26.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	31.879.205,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	52.620.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.219.535,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.655.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	14.292.895,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		19.965.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	15.366.775,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		26.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	338.515.275,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	154.965.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				172 Paket	192.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	13.183.420,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		19.965.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	40.239.925,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		65.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	5.215.930,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	87.176.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.914.828,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	435.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.996.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.005.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.656.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.299.953,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		28.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		23.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	12.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		23.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	226.707.475,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		275.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	681.200.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	681.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	175.495.120,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	152.500.432,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.733.970,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	153.961.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		115.000.432,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	19.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		22.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	259.370.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	547.250.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	182.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	38.370.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		65.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		59.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		37.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	6.412.059.958,00					-	-	17.702.975.650,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.240.033.740,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	16.288.085.650,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	5.019.832.510,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		7.301.064.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	126.653.061,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		262.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	25.091.390,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		123.543.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	3.327.520,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun, Sah, dan Legal)				1 Dokumen	4.110.592,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	138.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		300.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIPI)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIPI) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahun				3 Desa/Kelurahan	23.077.494,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		190.333.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	892.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		8.032.075.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	6.671.173,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		43.230.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	11.413.634,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	5.456.391,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelengkapan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	5.957.243,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	11.546.313,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	34.065.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	11.546.313,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		34.065.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	58.704.511,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	164.665.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				22 Orang	31.851.559,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		45.665.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				11 Desa/Kelurahan	26.852.952,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		119.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	90.361.760,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	1.116.160.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				4 Laporan	25.361.760,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		185.160.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknik				0 Unit	45.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		871.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12.219.499.200,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.281.832.873,00							0,00	
	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						10.281.832.873,00							0,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.734.885.834,00						-	0,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	134.105.450,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	51.870.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	7.563.450,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	4.711.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	69.959.350,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.445.466.584,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.354.986.584,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			16 Laporan	90.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.530.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	11.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	59.530.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	555.682.800,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	3.306.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	82.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.096.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	14.209.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.535.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	7.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				415 Laporan	408.785.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	212.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.310.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	207.791.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	128.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	30.390.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.001.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	3.379.990.809,00					-		0,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	97,50 persen			-	3.379.990.809,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 persen	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Keluarga	3.379.990.809,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	1.146.961.850,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	1.146.961.850,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	867.917.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	53.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				105 Orang	225.394.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	463.265.830,00					-	-	0,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	463.265.830,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				26173 Orang	203.677.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				9000 Keluarga	259.587.980,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	306.728.550,00					-	-	0,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	306.728.550,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	306.728.550,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	250.000.000,00					-	-	0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 Makam	250.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.937.666.327,00							0,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.937.666.327,00							0,00	
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	366.698.371,00						-	0,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	160.627.521,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	160.627.521,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatn Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	206.070.850,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	81.044.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Organisasi	125.026.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkungan yang berkel anutan	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	1.043.880.406,00						-	0,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	359.248.046,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	359.248.046,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	684.632.360,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				50 Orang	684.632.360,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	60.486.100,00						-	0,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	60.486.100,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.486.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	40.774.800,00						-	0,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.774.800,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	40.774.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	425.826.650,00						-	0,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	154.388.400,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	154.388.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	271.438.250,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	-	0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	271.438.250,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		0,00	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11.014.759.065,00							12.556.674.217,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.014.759.065,00							12.556.674.217,00	
	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11.014.759.065,00							12.556.674.217,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.983.364.915,00					-	-	5.880.687.452,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	167.215.630,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	100 %	119.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	90.336.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	3 Dokumen	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	14.333.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	2 Dokumen	6.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	1.841.830,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	2 Dokumen	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	60.703.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	10 Laporan	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	3.968.125.945,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	100 % 100 %	4.997.423.027,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan			29 orang/bulan Orang/bulan	3.833.535.945,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	36 Orang/bulan	4.940.739.519,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	134.590.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	18 Laporan	56.683.508,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	19.304.300,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	100 % 100 %	20.631.028,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	19.304.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	4 Laporan	20.631.028,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	212.415.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	100 % 100 %	152.846.664,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			49 Paket	93.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yan g berkel anjutan	-	0 Paket	57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			1 Dokumen	22.547.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	12 Dokumen	19.346.664,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			6 Orang	48.014.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	2 Orang	26.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			5 Orang	48.654.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	6 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 % 100 %			-	369.527.540,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	100 % 100 %	336.350.646,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	6.325.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	5 Paket	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			1 Paket	4.167.640,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	17 Paket	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	5.899.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	5 Paket	8.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.440 Dokumen			3 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	1.440 Dokumen	5.455.458,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan			12 Laporan	28.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	230 Laporan	10.418.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225 Laporan			220 Laporan	320.135.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	225 Laporan	303.876.563,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 % 100 %			-	0,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	100 % 100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	0 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	0 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			4 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	0 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %			-	152.070.500,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	100 % 100 %	164.436.087,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Laporan			12 Laporan	1.470.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	1.000 Laporan	1.823.259,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	99.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	36 Laporan	110.412.828,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			12 Laporan	51.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	4 Laporan	52.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 %			-	94.706.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	100 % 100 %	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	62.060.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	10 Unit	52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit			32 Unit	13.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	32 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	19.646.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	2 Unit	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	523.786.500,00						-	272.910.094,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	1 dokumen 1 Dokumen			-	523.786.500,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	1 dokumen 1 Dokumen	272.910.094,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	199.565.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	1 Dokumen	133.126.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	324.221.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anutan	-	1 Dokumen	139.783.219,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	858.963.600,00						-	653.197.479,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	4 dokumen 4 Dokumen			-	762.568.650,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	4 dokumen 4 Dokumen	578.874.498,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen			4 Dokumen	146.363.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	4 Dokumen	211.917.498,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	220 Dokumen			1 Dokumen	616.204.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	220 Dokumen	366.957.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	37 Ha 37 Ha			-	96.394.950,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	37 Ha 37 Ha	74.322.981,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi														
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	37 Dokumen			37 Ha	96.394.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	37 Dokumen	74.322.981,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	306.399.800,00					-	-	300.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	15 RTH 15 RTH			-	306.399.800,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	15 RTH 15 RTH	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Ha			15 Ha	306.399.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	15 Ha	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	59.853.950,00					-	-	72.930.375,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	55 Usaha/K egiatan 55 usaha/ke giatan			-	59.853.950,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	55 Usaha/K egiatan 55 usaha/ke giatan	72.930.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55 Dokumen			50 Dokumen	59.853.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	55 Dokumen	72.930.375,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	74.505.000,00					-	-	110.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	30 Usaha/K egiatan 30 usaha/ke giatan			-	74.505.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkkunnan yang berkel anjutan	-	30 Usaha/K egiatan 30 usaha/ke giatan	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	22 Dokumen			15 Dokumen	43.985.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	22 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				30 Badan Usaha	30.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-	-			-	87.289.900,00						-	137.621.173,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	87.289.900,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	-	137.621.173,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	87.289.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-		137.621.173,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	26.659.950,00						-	40.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	15 kelompok 15 Persen			-	26.659.950,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	15 kelompok 15 Persen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen			1 Dokumen	26.659.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	20 Dokumen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	108.512.950,00						-	64.599.004,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 Persen			-	108.512.950,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	100 % 100 Persen	64.599.004,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas			3 Entitas	108.512.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	2 Entitas	64.599.004,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	51.508.000,00						-	65.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	50 Persen 50 persen			-	51.508.000,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	50 Persen 50 persen	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	2 Dokumen			4 Pengaduan	34.838.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkel anjutan	-	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	16.670.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	3.933.914.500,00					-	-	4.959.728.640,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	78 Persen 78 %			-	3.933.914.500,00			-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	-	78 Persen 78 %	4.959.728.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	127 Kelompok			127 Kelompok	76.438.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	-	127 Kelompok	280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	38 Dokumen			1 Dokumen	103.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	-	38 Dokumen	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	26.133 Ton			24.888 Ton	3.753.745.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan an 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	-	26.133 Ton	4.329.728.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.042.932.613,00							7.056.552.295,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.042.932.613,00							7.056.552.295,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.042.932.613,00							7.056.552.295,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen			100 persen	5.556.020.528,00						100 persen	5.582.250.295,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	-			100 Persen	49.945.200,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	-	49.046.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	11.046.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	11.046.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	7.548.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.535.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	28.815.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	-			100 Persen	3.003.029.768,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	-	2.860.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.937.786.868,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	20 Orang/bulan	2.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			13 Laporan	65.242.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pegawai Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	18 Laporan	60.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	-			100 Persen	50.483.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	-	50.696.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			12 Laporan	50.483.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	4 Laporan	50.696.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	161.473.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan sipil	-	119.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			56 Paket	75.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan sipil	0 Paket	37.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	8.176.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan sipil	4 Dokumen	8.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			6 Orang	77.797.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependuduka n dan Pencatatan sipil	6 Orang	73.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	1.091.371.760,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	-	1.353.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			4 Paket	6.960.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	6 Paket	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	532.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	708.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket			1 Paket	7.697.160,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 Paket	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	13.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	13.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			5 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Dokumen	8.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan			2 Laporan	7.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Laporan	7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan			58 Laporan	510.414.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53 Laporan	600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	415.519.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	369.819.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Unit	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			27 Unit	81.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Unit	21.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit			10 Unit	333.819.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Unit	288.819.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	655.148.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	622.268.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	2.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	2.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			3 Laporan	271.268.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan	267.188.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			6 Laporan	381.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	352.380.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	-			100 Persen	129.050.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sarana dan Prasarana kantor Disdukcapil	-	156.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	48.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sarana dan Prasarana kantor Disdukcapil	6 Unit	63.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit			89 Unit	60.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sarana dan Prasarana kantor Disdukcapil	83 Unit	63.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sarana dan Prasarana kantor Disdukcapil		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan KTP Elektronik	99,90 Persen			99,90 Persen	445.648.995,00						99,90 Persen	443.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak Persentase penerbitan Kartu Keluarga	99,00 Persen			70 Persen 98,90 Persen	445.648.995,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	99,00 Persen	443.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen			4 Dokumen	314.896.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	4 Dokumen	320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan			2 Laporan	130.752.095,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	4 Laporan	123.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	98,02 Persen			98,02 Persen	466.243.660,00						98,02 Persen	459.302.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte Kelahiran Persentase penerbitan akta Cerai persentase penerbitan akta kematian Persentase penerbitan akta Perkawinan	97,38 Persen			99 Persen 100 Persen 100 Persen 51,52 Persen	466.243.660,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	97,38 Persen	459.302.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4 Dokumen			4 Dokumen	284.635.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	4 Dokumen	279.302.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan			4 Layanan	181.607.710,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	4 Layanan	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	95 Persen			95 Persen	136.587.000,00						95 Persen	120.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100 Persen			100 persen	60.837.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	OPD dan Lembaga Pengguna data kependudukan	100 Persen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen			5 Dokumen	60.837.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	OPD dan Lembaga Pengguna data kependudukan	5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan kegiatan program pengelolaan administrasi kependudukan	100 Persen			100 Persen	75.750.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	100 Persen	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan			1 Laporan	75.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Luwu Timur	2 Laporan	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan data kependudukan yang disediakan	100 Persen			100 Persen	438.432.430,00						100 Persen	452.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang disusun	100 Persen			100 Persen	438.432.430,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	OPD/ lembaga pengguna data Kependuduka n	100 Persen	452.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	438.432.430,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	OPD/ lembaga pengguna data Kependuduka n	3 Dokumen	452.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.454.985.299,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.454.985.299,00							0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.454.985.299,00							0,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.787.838.609,00						-	0,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 %			-	89.934.550,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	42.299.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.522.450,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraa n masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.653.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	40.458.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	10 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0 %			-	2.666.737.584,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan			18 Orang/bulan	2.607.907.584,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	24 Orang/bulan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	58.830.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	18 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0 %			-	27.697.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	27.697.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	4 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 %			-	142.981.075,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket			37 Paket	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	46 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	14.999.875,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	12 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang			5 Orang	107.981.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	6 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	478.509.400,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket			6 Paket	2.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	18 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.070.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			29 Paket	10.404.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	16 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	7.015.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	4 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			132 Dokumen	14.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Mallili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	60 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	23.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Mallili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andrian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364 Laporan			283 Laporan	418.740.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	364 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0 %			-	59.000.000,00			-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			4 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	6 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			1 Unit	59.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	8 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	1 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 %			-	162.069.000,00			-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1717 Laporan			12 Laporan	4.845.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	1717 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			48 Laporan	94.224.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	36 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	63.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	4 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 %			-	160.910.000,00			-	04.Peningk atkan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit			16 Unit	84.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	13 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit			42 Unit	25.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	37 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			3 Unit	51.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	2 Unit	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	46.544.500,00						-	0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	0 persen			-	46.544.500,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	0 persen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa			1 Desa	46.544.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	1 Desa	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	4.533.295.600,00						-	0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	100 persen			-	4.533.295.600,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 persen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen			2 Dokumen	10.654.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen			5 Dokumen	297.594.550,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	5 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125 Dokumen			125 Dokumen	34.267.450,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	125 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	124 Dokumen			125 Dokumen	68.205.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2 Orang			124 Orang	170.629.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	2 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa															
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	124 Dokumen			125 Dokumen	23.734.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan			67 Laporan	3.620.418.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	0 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Laporan			15 Laporan	44.080.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	16 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa															
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	124 Dokumen			11 Dokumen	124.999.650,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD															
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 Orang			124 Orang	138.709.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Orang	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.087.306.590,00						-		0,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	0 % 100 persen			-	1.087.306.590,00			-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	100 % 100 persen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Luwu Adat	124 Dokumen			254 Dokumen	171.359.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	124 Dokumen			2 Dokumen	113.380.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	124 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	16 Laporan			11 Laporan	115.248.690,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	16 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	139 Dokumen			12 Dokumen	687.317.550,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	139 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.549.661.371,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.549.661.371,00							0,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						14.549.661.371,00							0,00	
1	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.628.591.751,00						-	0,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	58.818.050,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	31.173.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.512.350,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.016.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			6 Laporan	22.116.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.150.817.751,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan			22 Orang/bulan	3.111.483.251,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Orang/bulan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	10 Laporan			14 Laporan	39.334.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 persen			-	25.146.750,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	25.146.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	134.085.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			22 Paket	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen			4 Dokumen	59.664.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			5 Orang	64.421.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Orang	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	724.078.400,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			4 Paket	5.675.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	99.064.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	205 Paket			4 Paket	15.528.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	205 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			4 Paket	8.715.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			12 Dokumen	6.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125 Laporan			4 Laporan	11.955.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	125 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411 Laporan			4 Laporan	577.020.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	411 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	276.600.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	70.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			4 Unit	26.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	180.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	96.035.800,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan			12 Laporan	4.835.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	400 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	50.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			12 Laporan	40.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	163.010.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	115 Unit			96 Unit	90.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	110 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			14 Unit	17.060.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			14 Unit	55.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	511.698.350,00						-		0,00
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Berduduk	-	2 dokumen			-	97.014.950,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	20.600.050,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 Organisasi			24 Organisasi	26.699.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Organisasi	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	4 Kegiatan			1 Kegiatan	24.882.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Kegiatan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	200 Kegiatan			1 Kegiatan	24.833.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	200 Kegiatan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 persen			-	414.683.400,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	3 Dokumen			1 Dokumen	117.604.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	110.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen			1 Dokumen	186.679.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	7.285.080.590,00					-	-	0,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	100 persen			-	1.055.579.500,00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan			1 Laporan	90.910.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan			1 Laporan	436.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	310 Laporan			1 Laporan	225.444.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	310 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	940 Dokumen			1 Dokumen	37.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	940 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	55 Organisasi			24 Organisasi	165.045.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	55 Organisasi	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	100 persen			-	1.550.745.000,00				04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	581 Orang			581 Orang	1.488.945.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	581 Orang	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				24 Organisasi	26.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Pernyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Pernyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	110 Laporan			1 Laporan	35.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	110 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	27,11 perse n			-	823.166.090,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	27,11 perse n	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21 Laporan			1 Laporan	54.112.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	21 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikut Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11700 Orang			11500 Orang	751.903.590,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11700 Orang	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan			1 Laporan	17.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	22 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	23 Stakhold er/mitra			-	3.855.590.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	23 Stakhold er/mitra	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.690.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				128 Unit	2.830.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB, INSENTIF FISKAL	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelblaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Kampung			61 Kampung	1.021.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Kampung	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		-			-	2.124.290.680,00					-	-	0,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	72,62 persen			-	670.206.680,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	72,62 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0008		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	25 Laporan			1 Laporan	29.615.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	48 Laporan			1 Laporan	273.419.380,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	30 Unit			20 Unit	240.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0021		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	75 Laporan			1 Laporan	109.008.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	70 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0028		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk														
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok			7 Kelompok	18.164.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Kelompok	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	83,03 persen			-	1.454.084.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	83,03 persen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0004		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	40 Laporan			1 Laporan	11.384.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	35 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				3 laporan	687.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				3 laporan	755.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						23.436.416.214,00							27.308.024.650,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.436.416.214,00							27.308.024.650,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						23.436.416.214,00							27.308.024.650,00	
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	4.877.201.414,00						100 %	5.264.024.650,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %			100 %	115.448.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Dinas Perhubungan	100 %	92.524.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen			2 Dokumen	41.027.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Dokumen	30.524.650,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	2.780.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	3.139.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan			10 Laporan	68.500.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Dinas Perhubungan	10 Laporan	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 %			-	3.526.083.594,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	3.260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan			27 Orang/bulan	3.448.060.944,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Orang/bulan	3.190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	108.00 Laporan			18 Laporan	78.022.650,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	95 %			-	18.576.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			4 Laporan	18.576.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	95 %			-	10.522.800,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen			4 Dokumen	10.522.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	95 %			-	219.763.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	376,00 Paket			95 Paket	114.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72 Dokumen			12 Dokumen	20.523.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			5 Orang	84.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95 %			-	509.545.912,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	601.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket			5 Paket	5.542.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00 Paket			8 Paket	4.928.262,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Paket	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	46.970.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	19.429.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	432.00 Dokumen			72 Dokumen	8.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	72 Dokumen	8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.00 Laporan			30 Laporan	10.435.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Laporan	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.00 Laporan			150 Laporan	414.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	150 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95 %			-	150.556.750,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	675.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	61.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22.00 Unit			2 Unit	14.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22.00 Unit			5 Unit	75.356.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2.00 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95 %			-	149.935.258,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.00 Laporan			1200 Laporan	23.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1.200.00 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24.00 Laporan			24 Laporan	73.985.258,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24.00 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.00 Laporan			4 Laporan	52.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6.00 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95 %			-	176.770.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit			1 Unit	24.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1.00 Unit	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.00 Unit			11 Unit	115.840.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7.00 Unit	110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38.00 Unit			38 Unit	16.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	38.00 Unit	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit			2 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2.00 Unit	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	17.315.732.250,00					-	-	20.244.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	100 %			-	6.146.316.750,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	100 %	6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8.00 Unit			2 Unit	2.092.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	1,00 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	48,00 Unit			240 Unit	4.054.316.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	48,00 Unit	4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	1.350.844,00 Orang			-	3.918.560.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	236.432,00 Orang	7.299.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	100,00 Unit			1 Unit	3.210.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah Kab. Luwu Timur, Wotu, Tarengge	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	-,00 Unit	6.549.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3,00 Unit			3 Unit	708.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	3,00 Unit	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	35,00 Titik			-	30.814.900,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	35,00 Titik	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.524,00 Laporan			15 Laporan	30.814.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	420,00 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	3.096,00 Unit 3.263,00 Unit			-	200.702.000,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	3.096,00 Unit 3.263,00 Unit	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	18.755,00 Unit			2909 Unit	167.702.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	3.471,00 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11,00 Unit			11 Unit	33.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	11,00 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	132,00 Reko mendasi			-	474.013.300,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	22,00 Reko mendasi	470.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	90,00 Laporan			18 Laporan	457.917.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	18,00 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,00 Laporan			4 Laporan	16.095.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	4,00 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1.717.200,00 Orang			-	6.461.878.550,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	345.600,00 Orang	6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	177,00 Unit			28 Unit	6.461.878.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	32,00 Unit	6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0,01 % 5,12 %			-	83.446.750,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	-	0,01 % 5,12 %	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	24,00 Laporan			24 Laporan	83.446.750,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	1,00 Laporan	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	1.243.482.550,00					-	-	1.800.000.000,00	
	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	450,00 Unit			-	248.853.300,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	450,00 Unit	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan			4 Laporan	248.853.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Pasipasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	4 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	327.072,00 Org/Kg			-	994.629.250,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	57.364,00 Org/Kg	1.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	481.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	18,00 Unit			4 Unit	144.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	3,00 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	120,00 Laporan			24 Laporan	369.129.250,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Matano Kab. Luwu Timur, Towuti, Timampu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	-	24,00 Laporan	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						11.269.895.555,00							11.653.750.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.888.619.990,00							7.330.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6.474.401.840,00							6.900.000.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen			100 persen	45.700.000,00						100 persen	0,00	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani (%)	100 persen			100 persen	45.700.000,00			-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	45.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 % 100 %			100 % 100 %	3.422.595.840,00						100 % 100 %	3.450.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat	100 persen			100 persen	3.422.595.840,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	3.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	130 Layanan				3.182.882.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	26 Layanan	3.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik					10 Permohonan	129.640.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		135.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/teknis				5 Media	82.749.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				4 Orang	27.323.390,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100 persen			100 persen	3.006.106.000,00						100 persen	3.450.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten luwu timur	100 persen			100 persen	2.435.735.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	2.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	195 Dokumen			1 Dokumen	2.435.735.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	39 Dokumen	2.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan pemerintah an berbasis egovermnet yang dikelola	100 persen			100 persen	570.370.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	20 Unit			6 Aplikasi	570.370.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						324.179.150,00							335.000.000,00	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen) (%)	100 %			100 %	324.179.150,00						100 %	335.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase statistik sektoral yang diselenggarakan	100 persen			100 persen	324.179.150,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	335.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	250 Dokumen			85 Persentase	249.908.150,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	50 Dokumen	280.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1050 Dokumen			1 Dokumen	74.271.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	210 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						90.039.000,00							95.000.000,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))	100 %			100 %	90.039.000,00						100 %	95.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan	100 persen			100 persen	90.039.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	140 Perangkat Daerah			41 Perangkat Daerah	90.039.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Perangkat Daerah	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X	NON URUSAN						4.381.275.565,00							4.323.750.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						4.381.275.565,00							4.323.750.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 persen			100 persen	4.381.275.565,00						100 persen	4.323.750.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100 persen			100 persen	116.906.300,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	128.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			3 Dokumen	56.099.450,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	3.214.450,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	3.300.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42 Laporan			10 Laporan	54.291.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Laporan	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100 persen			100 persen	3.257.209.715,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	3.070.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.191.778.715,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Orang/bulan	3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan			12 Laporan	65.431.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar (%)	100 persen			100 persen	26.953.900,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	26.953.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani (%)	100 persen			100 persen	75.937.700,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen			8 Dokumen	33.243.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			6 Orang	42.694.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Orang	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 persen			100 persen	304.727.950,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	330.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket			3 Paket	5.520.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket			2 Paket	9.183.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket			3 Paket	6.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Paket	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen			1 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	1.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan			4 Laporan	31.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40 Laporan	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			4 Laporan	250.364.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Laporan	270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase BMD perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100 persen			100 persen	207.500.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	222.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	27.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit			9 Unit	21.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit			8 Unit	156.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit			1 Unit	3.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Unit	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	100 persen			100 persen	269.850.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	312.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan			4 Laporan	2.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	370 Laporan	2.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan			4 Laporan	105.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Laporan	110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan			4 Laporan	162.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 persen			100 persen	122.190.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 persen	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	83.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			5 Unit	19.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	33 Unit	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit			2 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.388.300.498,00							6.035.194.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.388.300.498,00							6.035.194.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.388.300.498,00							6.035.194.000,00	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar	100 %			100 %	5.032.858.373,00						100 %	4.240.194.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	92.809.650,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	100 %	97.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen			3 Dokumen	44.763.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	2 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	3.437.550,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	3.907.650,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	2 Dokumen	6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan			10 Laporan	40.701.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	10 Laporan	41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %			100 %	3.105.466.603,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	100 %	2.925.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan			19 Orang/bulan	2.987.737.003,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	24 Orang/bulan	2.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Laporan			18 Laporan	117.729.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)		01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	18 Laporan	125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %			100 %	17.925.520,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	DPMTSP	100 %	17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			4 Laporan	17.925.520,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	4 Laporan	17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %			100 %	152.041.000,00			-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	100 %	131.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	224 Paket			44 Paket	60.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	46 Paket	33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 Dokumen			12 Dokumen	17.309.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	12 Dokumen	17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang			15 Orang	73.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	18 Orang	81.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	345.535.400,00			-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	100 %	487.494.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket			12 Paket	5.721.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	12 Paket	6.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			2 Paket	3.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	3 Paket	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			2 Paket	7.951.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	2 Paket	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket			3 Paket	10.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	3 Paket	14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen			5 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian l inkuunan yang berkel anutan	DPMPTSP	60 Dokumen	7.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	900 Laporan			10 Laporan	10.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	150 Laporan	11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.770 Laporan			250 Laporan	298.983.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	300 Laporan	423.394.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi BMD-PD penunjang yang terpenuh Daerah	0 %			100 %	1.049.010.000,00			-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	100 %	72.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			3 Unit	20.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	5 Unit	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			1 Unit	6.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	4 Unit	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			1 Unit	1.010.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	12.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP		52.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	146.240.200,00			-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	100 %	402.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400 Laporan			4 Laporan	21.680.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	900 Laporan	21.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan			24 Laporan	47.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Linkungan yang berkel anutan	DPMPTSP	60 Laporan	58.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	76.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	DPMTSP	4 Laporan	322.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			60 unit	123.830.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Aset DPMTSP	100 %	107.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit			10 Unit	41.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Aset DPMTSP	12 Unit	54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	282 Unit			47 Unit	22.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Aset DPMTSP	47 Unit	23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	59.930.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Aset DPMTSP	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala Nasional	50 Investor			50 Investor	206.998.450,00						50 Investor	470.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %			100 %	91.999.050,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	UKM/Perusahaan	100 %	170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	UKM/Perusahaan	0 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	12 Dokumen			15 Dokumen	91.999.050,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	UKM/Perusahaan	2 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Jenis potensi yang disusun dalam Peta	0 %			100 %	114.999.400,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Potensi Peluang Usaha	100 %	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen			1 Dokumen	114.999.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	Potensi Peluang Usaha	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA dan PMDN	4 Triliun			4 Triliun	294.909.350,00						4 Triliun	435.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan	7 MoU			6 MoU	294.909.350,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inkuungan vago berkel anutan	PMA, PMDN, UKM	7 MoU	435.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	22 Dokumen			3 Dokumen	269.369.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	PMA, PMDN, UKM	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	17 Dokumen			3 Dokumen	25.539.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	PMA, PMDN, UKM	3 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP	78 %			78 %	374.002.925,00						78 %	387.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan	100 %			100 %	374.002.925,00			-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	UKM, Perusahaan, Masyarakat	100 %	387.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25.500 Pelaku Usaha			4400 Pelaku Usaha	350.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	UKM, Perusahaan, Masyarakat	4500 Pelaku Usaha	360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	24.002.725,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	UKM, Perusahaan, Masyarakat	9 Pelaku Usaha	27.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	80 %			80 %	452.531.400,00						80 %	465.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM	90 %			90 %	452.531.400,00			-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	Perusahaan, UKM	90 %	465.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	232 Kegiatan Usaha.			8 Kegiatan Usaha.	61.719.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	Perusahaan, UKM	65 Kegiatan Usaha.	70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	183 Pelaku Usaha			250 Pelaku Usaha	226.304.550,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	Perusahaan, UKM	45 Pelaku Usaha	230.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	263 Kegiatan Usaha			15 Kegiatan Usaha	164.507.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	01.Peningkat at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian L inku nna n yang berkel anjutan	Perusahaan, UKM	60 Kegiatan Usaha	165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database yang valid	1 Dokumen			1 Dokumen	27.000.000,00						1 Dokumen	38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100 %			100 %	27.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	DPMPTSP	100 %	38.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen			1 Dokumen	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	DPMPTSP	2 Dokumen	38.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						7.122.817.525,00							7.520.266.785,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.122.817.525,00							7.520.266.785,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.646.376.725,00							7.032.646.785,00	
1	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.922.435.725,00						-	6.380.846.785,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	209.296.000,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	215.485.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	123.355.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	123.355.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	7.130.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	7.130.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	73.811.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	4.193.208.325,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	4.528.391.785,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan			29 Orang/bulan	4.095.915.825,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	28 Orang/bulan	4.432.391.785,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	97.292.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	96.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %			-	30.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	107.148.200,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	118.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	31.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		33.050.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 Orang			13 Orang	75.198.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Orang	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	438.563.200,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	478.770.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Paket	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Paket	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	10.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Paket	10.350.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			4 Dokumen	8.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	8.420.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			4 Laporan	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			4 Laporan	349.793.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	390.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	99.400.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	149.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	8.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit			3 Unit	49.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Unit	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				46 Unit	41.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		79.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	443.610.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	451.420.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	16.410.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	16.420.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	304.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	312.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	123.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	123.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	401.210.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	404.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	79.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Unit	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit			30 Unit	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40 Unit	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	287.090.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	289.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	723.941.000,00					-		651.800.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 % 100 %			-	411.864.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 100 %	389.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan			10 Perpustakaan	74.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Perpustakaan	74.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				3 Layanan	232.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	25 orang			-	312.077.000,00		-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	26 orang	262.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				3 Orang	34.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		17.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				20 Perpustakaan	109.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		90.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				8 Orang	103.569.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		95.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokasi	65.238.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		59.710.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						476.440.800,00							487.620.000,00	
1	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	429.769.500,00						-	436.530.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	120.239.800,00		-	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	127.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	6500 Berkas			3000 Berkas	55.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7500 Berkas	57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan			48 Laporan	64.999.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	64 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	20.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1500 Arsip	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	100 %			-	289.529.700,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	289.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan			2 Laporan	289.529.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	53 Laporan	289.530.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-			-	40.581.500,00						-	45.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	100 %			-	40.581.500,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1500 Arsip	40.581.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-			-	6.089.800,00						-	6.090.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	25 %			-	6.089.800,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 %	6.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				15 Arsip	6.089.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.090.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						21.715.307.700,00							24.102.000.000,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						21.715.307.700,00							24.102.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						21.715.307.700,00							24.102.000.000,00	
1	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.495.744.700,00						-	5.212.000.000,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	108.232.250,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	111.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	38.668.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.728.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.918.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	58.917.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.516.226.200,00			-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	3.575.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.443.683.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		3.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	72.542.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	53.213.200,00			-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	53.213.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.150.500,00			-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	15.150.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	166.298.850,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	51.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	28.490.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	85.858.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	504.643.200,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	617.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.864.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	36.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	10.641.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	10.070.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		8.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	420.348.200,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	705.000.000,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	140.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	65.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	278.027.500,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	294.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.827.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		4.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	183.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.953.000,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	97.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	23.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	28.603.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	5.182.894.600,00					-		8.345.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	4.149.948.300,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	8.080.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	85.948.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	740.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				50 Unit	3.324.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		5.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	168.946.300,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	185.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	45.822.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				12 Kelompok	123.124.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		140.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-			-	864.000.000,00			-	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				3 Layanan	864.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	6.995.097.200,00						-	6.865.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	326.226.200,00			-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	240.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	58.448.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				30 Kelompok	267.778.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	6.668.871.000,00			-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	6.625.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	77.108.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4.019.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	218.685.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21 Unit	2.098.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				1 Dokumen	255.378.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Baruga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningk atn produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningk atn Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	113.851.500,00						-	80.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	113.851.500,00			-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				4000 Pelaku Usaha	113.851.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	3.927.719.700,00						-	3.600.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	385.984.600,00			-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				4 Dokumen	385.984.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	236.861.100,00			-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	236.861.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Wewang Riu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	3.304.874.000,00			-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	3.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	3.304.874.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03.Peningkatan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		3.200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						35.771.849.125,00							19.582.287.832,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						31.170.104.625,00							13.846.737.832,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						31.170.104.625,00							13.846.737.832,00	
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.530.326.125,00						-	5.896.983.672,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 Persen			-	120.894.350,00			-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	85.232.706,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			2 Dokumen	58.593.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	2 Dokumen	40.430.899,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.829.350,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		13.112.724,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen			2 Dokumen	5.855.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	2 Dokumen	13.112.724,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan			10 Laporan	50.617.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	10 Laporan	18.576.359,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0 Persen			-	3.355.404.975,00			-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	4.296.595.376,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			23 Orang/bulan	3.286.055.975,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	28 Orang/bulan	4.195.435.400,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan			1 Laporan	2.999.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	66.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	18 Laporan	96.159.976,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	20.890.000,00			-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	97.365.900,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan			4 Laporan	20.890.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	40 Laporan	97.365.900,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 Persen			-	182.879.000,00			-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	156.345.740,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			1 Paket	37.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	55 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			12 Dokumen	95.713.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	12 Dokumen	96.345.740,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			7 Orang	49.416.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	7 Orang	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0 Persen			-	410.997.800,00			-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	819.926.600,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			17 Paket	4.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	17 Paket	28.840.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket			15 Paket	33.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	16 Paket	171.011.700,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket			23 Paket	14.265.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	23 Paket	13.440.500,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			3 Paket	19.473.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	3 Paket	32.781.800,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			72 Dokumen	7.490.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	72 Dokumen	7.956.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			4 Laporan	24.430.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk at an Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	2500 Laporan	29.503.600,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			77 Laporan	308.189.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	77 Laporan	536.393.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 Persen			-	367.800.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	364.370.900,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	1175 Laporan	4.370.900,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			72 Laporan	175.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	72 Laporan	65.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			18 Laporan	189.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	18 Laporan	295.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 Persen			-	71.460.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	77.146.450,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit			17 Unit	42.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	17 Unit	54.636.350,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			60 Unit	12.210.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	60 Unit	22.510.100,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			1 Unit	17.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	3.195.114.500,00						-	1.702.278.460,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	2.549.934.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	90 Persen	1.133.296.460,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				35 Orang	188.340.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		62.166.300,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	102.935.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		225.101.760,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				6 Orang	111.989.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		96.028.400,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2.146.670.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	645.180.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	90 Persen	568.982.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				35 Organisasi	645.180.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		568.982.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-			-	22.938.404.000,00					-		5.747.475.700,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	19.393.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	95 Persen	4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				5 Unit	19.393.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		4.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	1.185.606.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	95 Persen	832.875.700,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	745.606.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		472.713.700,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				80 Orang	440.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		360.162.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	0 Persen			-	12.500.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Persen	13.600.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		13.600.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	0 Persen			-	1.871.710.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	95 Persen	653.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	121.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		153.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.750.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	0 Persen			-	475.588.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	95 Persen	248.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	90.588.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		68.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	385.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		180.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	506.260.000,00						-	500.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	95 Persen			-	506.260.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	99 Persen	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Organisasi			1 Organisasi	500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 Organisasi	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan														
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	0 Organisasi			1 Organisasi	6.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	10 Organisasi	0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.601.744.500,00							5.735.550.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						4.601.744.500,00							5.735.550.000,00	
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-			-	3.074.805.000,00						-	4.341.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	647.305.000,00			-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	90 Persen	491.700.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi			4 Lokasi	647.305.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	4 Lokasi	491.700.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	2.417.500.000,00			-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	70 Persen	3.850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit			8 Unit	2.417.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	8 Unit	3.850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	10.000.000,00			-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	80 Persen	0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)														
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				7 Usaha	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-			-	1.311.449.500,00						-	1.127.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Persen			-	1.311.449.500,00			-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	90 Persen	1.127.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen			1 Dokumen	14.990.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	1 Dokumen	27.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen			2 Dokumen	15.476.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	2 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan			5 Kegiatan	319.754.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	5 Kegiatan	305.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi			3 Promosi	961.229.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	3 Promosi	710.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	215.490.000,00					-	-	266.850.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	0 Persen			-	165.790.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	70 Persen	190.850.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang			90 Orang	155.810.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	3 Orang	180.850.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0 Laporan			1 Laporan	9.980.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	0 Persen			-	49.700.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	80 Persen	76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0 Orang			25 Orang	49.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	25 Orang	76.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						82.007.887.214,00							84.836.203.004,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.530.122.484,00							33.721.642.488,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						32.530.122.484,00							33.721.642.488,00	
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	31.385.665.099,00						100 % 100 persen	30.882.372.058,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%) Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	358.137.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 persen 100 %	357.181.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	00 Dokumen			4 Dokumen	99.281.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Dokumen	98.255.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	00 Dokumen			1 Dokumen	31.406.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Dokumen	32.782.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	00 Dokumen			1 Dokumen	29.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik pemerintah yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Dokumen	30.194.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	00 Laporan			4 Laporan	198.281.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	195.950.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	27.671.857.219,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 persen 100 %	25.611.973.107,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	00 Orang/bulan			198 Orang/bulan	27.356.372.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Orang/bulan	25.294.756.007,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	00 Laporan			15 Laporan	315.484.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	317.217.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	752.156.000,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 persen 100 %	406.298.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	442.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	00 Dokumen			12 Dokumen	26.767.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Dokumen	26.878.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	00 Orang			21 Orang	282.589.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Orang	279.420.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	208.245.730,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 0 persen	236.179.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	00 Paket			1 Paket	12.169.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Paket	40.166.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	00 Paket			5 Paket	97.224.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Paket	97.223.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	00 Paket			2 Paket	29.862.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Paket	29.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	00 Paket			3 Paket	34.509.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Paket	34.510.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	00 Dokumen			201 Dokumen	11.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Dokumen	11.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	00 Laporan			4 Laporan	23.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	23.380.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%) Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	1.100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 0 persen	2.154.170.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	00 Unit			14 Unit	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Unit	402.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		1.431.920.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	00 Unit			29 Unit	345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Unit	320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	449.899.150,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 0 persen	461.899.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	00 Laporan			12 Laporan	1.999.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	1.999.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	00 Laporan			12 Laporan	291.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	291.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	00 Laporan			12 Laporan	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	168.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 %			100 %	845.370.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.654.670.001,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	00 Unit			164 Unit	422.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Unit	421.050.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	00 Unit			103 Unit	182.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Unit	182.620.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	00 Unit			6 Unit	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Unit	1.051.000.001,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan Cakupan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan (%)	100 % 100 persen			100 % 100 persen	457.800.000,00						100 % 100 persen	1.515.100.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah Presentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah (%)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	457.800.000,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	1.515.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	00 unit			3 unit	457.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 unit	1.515.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (%)	100 persen 100 %			100 % 100 persen	615.759.085,00						100 persen 100 %	1.256.908.130,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok Presentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah (%)	0 persen 33846 Ton			33800 Ton 100 persen	347.867.185,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 33846 Ton	648.814.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	00 Laporan			32 Laporan	65.157.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	36.919.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	00 Unit			1 Unit	60.861.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit	38.974.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	00 Unit			1 Unit	130.866.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit	446.539.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	44.367.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		80.157.050,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	00 Dokumen			1 Dokumen	46.614.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Dokumen	46.224.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan (Persentase (%))	100 % 0 persen			100 % 100 persen	23.830.500,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	264.317.140,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	00 Ton			15 Ton	23.830.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Ton	244.586.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	00 Ton			16 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Ton	19.730.640,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Persentase (%))	0 persen 100 %			100 % 100 persen	244.061.400,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	343.776.290,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	00 Dokumen			1 Dokumen	49.640.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Dokumen	49.536.850,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	00 Laporan			1 Laporan	194.420.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	294.239.440,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rentan rawan pangan Jumlah Desa Rentan rawan pangan (Desa) Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan	0 persen 1,2 Kelurahan 1,2 Desa			0 Desa 0,00 persen 0 Kelurahan	39.616.900,00						2,10 persen 0 Kelurahan 0 Desa	25.439.900,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten Persentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten (Persentase (%))	0 persen 100 %			100 % 100 persen	39.616.900,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	25.439.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	00 Laporan			1 Laporan	39.616.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbahan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	25.439.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan segar dan makanan yang bermutu Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu (Peserta)	100 orang/peserta 0 persen			100 orang/peserta 100 persen	31.281.400,00						100 orang/peserta 100 persen	41.822.400,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengawasan keamanan pangan pangan segar daerah yang dilaksanakan Presentase pengawasan keamanan pangan pangan segar daerah yang dilaksanakan (%)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	31.281.400,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	41.822.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	00 Dokumen			1 Dokumen	31.281.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Dokumen	41.822.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						49.477.764.730,00							51.114.560.516,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						49.477.764.730,00							51.114.560.516,00	
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	1.737.630.400,00						100 % 100 persen	1.780.954.500,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	867.630.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 0 persen	910.954.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	00 Laporan			1 Laporan	867.630.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	00 Laporan	910.954.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%) Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	870.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 0 persen	870.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	870.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		870.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas lada Jumlah Produktivitas Jagung Jumlah Produktivitas kelapa sawit Jumlah Produktivitas padi Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Persen) Jumlah Populasi ternak Besar Jumlah Populasi ternak Kecil Jumlah Populasi Unggas Jumlah Produktivitas kakao	0 persen 20.60 Ton/Ha 6.65 Ton/Ha 0.86 Ton/Ha 25109 Ekor 100 % 999529 Ekor 10.60 Ton/Ha 30462 Ekor 7.16 Ton/Ha			1.02 Ton/Ha 6.81 Ton/Ha 9.62 Ton/Ha 7.19 Ton/Ha 100 % 100 persen 26109 Ekor 32462 Ekor 1049529 Ekor 0.90 Ton/Ha	22.310.520.545,00						100 persen 1.03 Ton/Ha 6.91 Ton/Ha 0.95 Ton/Ha 27109 Ekor 100 % 1099529 Ekor 9.80 Ton/Ha 34462 Ekor 7.21 Ton/Ha	26.734.970.245,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (Persentase (%)) Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian (Persentase (%))	100 % 0 persen			100 % 100 persen	14.194.543.750,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	14.545.161.950,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	00 Laporan			4 Laporan	11.345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	11.043.042.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	00 Laporan			6 Laporan	2.849.543.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	3.502.119.450,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen) Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	5.463.976.795,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	12.059.808.295,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	00 Dokumen			4 Dokumen	1.042.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Dokumen	3.071.880.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	00 Dokumen			4 Dokumen	3.539.646.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Dokumen	8.972.928.295,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan														
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 laporan	881.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	presentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Persen) presentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Persen)	100 % 0 persen			100 % 100 persen	2.652.000.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	2.652.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atan Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	18.592.400.000,00						100 persen 100 %	14.802.334.526,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian (Persen)	0 persen 100 %			100 % 100 persen	18.592.400.000,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	14.802.334.526,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit			30 Unit	13.986.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	2800 Unit	7.595.322.476,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	00 Unit			0 Unit	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit	6.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit			35 Unit	4.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	15 Unit	7.200.762.050,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (%)	0 persen 128 % 100 %			100 % 120 % 100 persen	1.140.314.835,00						100 persen 1 % 100 %	761.486.945,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persentase (%))	0 persen 100 %			100 % 3,00 persen	657.635.835,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	0 persen 100 %	607.476.945,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemerantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	00 Laporan			4 Laporan	657.635.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Laporan	607.476.945,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Persentase (%))	100 % 0 persen			100 % 100 persen	482.679.000,00			-	04.Peningk at an Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk at an Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	154.010.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				6 Orang	389.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		92.160.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	00 Unit Usaha			1 Unit Usaha	92.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit Usaha	61.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian (%)	100 %			100 %	824.788.350,00						100 %	1.867.293.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	824.788.350,00			-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	-	1.867.293.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	824.788.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-		1.867.293.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani persentase penyuluhan pertanian Presentase Penyuluhan Pertanian (Persen)	0 persen 58.61 % 100 %			58.75 % 100 % 100 persen	4.872.110.600,00						100 persen 58.8 % 100 %	5.167.521.300,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (Persentase (%))	100 % 0 persen			100 % 100 persen	4.872.110.600,00			-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	100 % 0 persen	5.167.521.300,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	00 Unit			11 Unit	1.231.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit	2.608.462.700,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	00 Unit			126 Unit	3.640.137.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	04.Peningk atn Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 2) Peningk atn Pertu mbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Lokal	-	00 Unit	2.559.058.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN							30.208.067.596,00						10.109.765.103,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.510.891.697,00							5.231.648.013,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6.510.891.697,00							5.231.648.013,00	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	98 %			98 %	4.886.744.497,00						98 %	4.429.976.896,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	86.031.800,00			-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	69.099.699,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			3 Dokumen	45.928.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	24.069.700,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	3.112.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.463.806,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	3.110.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	2.925.653,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan			10 Laporan	33.881.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	38.640.540,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %			100 %	3.858.580.077,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	3.428.269.875,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan			28 Orang/bulan	3.743.058.277,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	28 Orang/bulan	3.391.933.975,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Laporan			18 Laporan	115.521.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	36.335.900,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %			100 %	35.525.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	19.460.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			2 Laporan	35.525.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	19.460.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD	100 %			100 %	8.524.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	5.786.600,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dokumen			1 Dokumen	8.524.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	5.786.600,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %			100 %	189.231.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	155.451.425,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket			39 Paket	71.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	27 Paket	26.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72 Dokumen			12 Dokumen	13.495.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	25.621.425,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang			4 Orang	31.025.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Orang	59.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			5 Orang	72.761.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Orang	43.630.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD	100 %			100 %	385.911.120,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	409.084.200,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			11 Paket	2.678.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	2.681.200,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140 Paket			4 Paket	750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Paket	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	168 Paket			20 Paket	4.523.520,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	28 Paket	3.263.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	7.653.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	12.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen			60 Dokumen	7.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	7.320.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan			4 Laporan	8.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1363 Laporan			240 Laporan	328.186.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	250 Laporan	350.020.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	215 Dokumen			50 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	50 Dokumen	14.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %			100 %	68.500.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	98.519.236,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit			4 Unit	12.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	37.499.736,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	38.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	18.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.019.500,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	137.921.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	137.185.861,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	7.721.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		985.861,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	74.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		68.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	55.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		67.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	116.520.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	107.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	58.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Unit	58.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	324 Unit			54 Unit	27.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	54 Unit	28.270.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	14.72 %			14.72 %	27.668.500,00						14.72 %	38.923.680,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	13.41 %			13.41 %	27.668.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	13,41 %	38.923.680,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				59 Unit Usaha	27.668.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		38.923.680,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	36.13 %			36.13 %	374.691.600,00						36.13 %	120.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	90.20 %			90.20 %	374.691.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	90.20 %	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	166 Unit Usaha			166 Unit Usaha	374.691.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	166 Unit Usaha	120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
4	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	35.75 %			35.75 %	79.093.100,00						35.75 %	91.192.884,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	55.81 %			55.81 %	79.093.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	55.81 %	91.192.884,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	90 Unit Usaha			15 Unit Usaha	79.093.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Unit Usaha	91.192.884,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkatkan manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	15.61 %			15.61 %	216.065.500,00						15.61 %	93.445.354,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	40.93 %			40.93 %	216.065.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40.93 %	93.445.354,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang			15 Orang	216.065.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Orang	93.445.354,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
6	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, koperasi	6.75 %			6.75 %	37.323.500,00						6.75 %	41.243.790,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan restrukturisasi usaha Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan	6.75 %			6.75 % 6.75 %	37.323.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6.75 %	41.243.790,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Desentralisasi Usaha	84 Unit Usaha			20 Unit Usaha	37.323.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit Usaha	41.243.790,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	55 %			55 %	580.404.000,00						55 %	284.402.749,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru berskala mikro Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)	168 WUB			145 WUB 145 WUB	580.404.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	168 WUB	284.402.749,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	350 Unit Usaha			70 Unit Usaha	24.577.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Unit Usaha	42.906.925,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	237 Unit Usaha			40 Unit Usaha	39.878.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40 Unit Usaha	34.038.150,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	350 Unit Usaha			95 Unit Usaha	405.502.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	70 Unit Usaha	79.836.440,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	105 Orang			100 Orang	46.225.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	105 Orang	75.348.700,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1566 Unit Usaha			270 Unit Usaha	64.222.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	277 Unit Usaha	52.272.534,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
8	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%)	8.16 % 8.16 %			6.36 % 6.36 %	308.901.000,00						8.16 % 8.16 %	132.462.660,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	8.3 %			-	308.901.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8.3 %	132.462.660,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	90 Unit Usaha			19 Unit Usaha	308.901.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	21 Unit Usaha	132.462.660,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						23.697.175.899,00							4.878.117.090,00	
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						22.651.755.099,00							4.116.809.910,00	
1	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi (%)	10 %			10 %	21.677.134.400,00						10 %	3.069.463.175,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	5 pasar			5 pasar	21.335.420.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 pasar	3.034.453.800,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	30 Unit			5 Unit	21.335.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Tomoni	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	3.034.453.800,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	70 %			70 %	341.714.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	70 %	35.009.375,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen			1 Dokumen	341.714.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	35.009.375,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	7,50 %			7,50 % 7,5 %	512.823.156,00						7,50 %	462.873.635,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44 %			44 %	485.933.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	44 %	435.973.899,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	6 Laporan			12 Laporan	85.485.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	85.485.420,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11 Laporan			11 Laporan	400.448.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Laporan	350.488.479,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100 %			100 %	26.889.556,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	26.899.736,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	504 Laporan			60 Laporan	26.889.556,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	84 Laporan	26.899.736,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %			15 %	304.431.443,00						15 %	395.616.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	60 %			40 %	304.431.443,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 %	395.616.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	170.809.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	20 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	35.930.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Pelaku Usaha	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha			5 Pelaku Usaha	79.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Pelaku Usaha	79.465.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk			5 Produk	18.226.525,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Produk	26.151.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
4	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTPP	5 %			5 %	157.366.100,00						5 %	188.857.100,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	75 %			70 %	157.366.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	75 %	188.857.100,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1005 Unit			975 Unit	157.366.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1005 Unit	188.857.100,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.045.420.800,00							761.307.180,00	
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbup) kawasan industri yang ditetapkan Jumlah peraturan Bupati (Perbup) kawasan industri yang ditetapkan (Dokumen)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			0 Dokumen 0.0 Dokumen	909.325.800,00						0 Dokumen 0.0 Dokumen 0.0 Dokumen	615.288.670,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	1 dokumen			-	909.325.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 dokumen	615.288.670,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen			1 Dokumen	457.714.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	177.328.860,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen			1 Dokumen	61.611.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	47.959.810,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen			1 Dokumen	390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	390.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali (%)	92.30 %			92.30 %	39.640.000,00						92.30 %	45.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	59.09 %			59.09 %	39.640.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	59.09 %	45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	4 Dokumen			1 Dokumen	39.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar (%)	15 %			15 %	96.455.000,00						15 %	101.018.510,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase usaha industri yang dikelola dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)	60 %			56,25 %	96.455.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 %	101.018.510,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6 Dokumen			1 Dokumen	61.455.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	51.018.510,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4 Dokumen			1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA						8.524.427.349,00							8.516.398.372,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.485.621.349,00							7.625.398.372,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7.485.621.349,00							7.625.398.372,00	
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	4.980.920.349,00						100 %	5.375.398.372,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	126.431.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	100 %	142.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	2 Dokumen	35.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	5.746.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			10 Laporan	84.285.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	8 Laporan	95.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %			100 %	3.962.418.949,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	100 %	3.996.398.372,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			26 Orang/bulan	3.893.517.949,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	35 Orang/bulan	3.921.398.372,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	19 Laporan			19 Laporan	68.901.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	19 Laporan	75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	95 %			95 %	15.350.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	95 %	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	15.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	100 %			100 %	140.621.500,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	100 %	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	277 Paket			49 Paket	45.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	50 Paket	45.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	33.923.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	12 Dokumen	45.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang			10 Orang	61.098.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	7 Orang	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95 %			95 %	360.651.900,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	95 %	407.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	2.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	5 Paket	3.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket			2 Paket	6.373.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	15 Paket	7.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			7 Paket	8.117.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	7 Paket	10.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			72 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	72 Dokumen	9.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan			12 Laporan	15.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	100 Laporan	17.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285 Laporan			12 Laporan	321.041.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	50 Laporan	360.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95 %			95 %	107.700.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	95 %	385.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			27 Unit	27.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	5 Unit	45.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit			12 Unit	80.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	7 Unit	90.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %			95 %	162.416.500,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	95 %	165.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8500 Laporan			4 Laporan	19.916.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	1500 Laporan	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			4 Laporan	63.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	36 Laporan	65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	78.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95 %			95 %	105.330.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	95 %	110.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			18 Unit	64.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	22 Unit	65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit			40 Unit	23.610.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	28 Unit	25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	17.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Dinas Transnaker	1 Unit	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,5 %			71,5 %	31.205.500,00						71,5 %	20.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	1			1 Dokumen	31.205.500,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	0	20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	31.205.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja		20.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,75 %			75,75 %	1.457.222.000,00						75,75 %	1.285.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang responsif gender	751 Orang			146 Orang	1.457.222.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	160 Orang	1.260.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	815 Orang			146 Orang	1.457.222.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	160 Orang	1.260.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100			100 %	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Calon Tenaga Kerja	100	25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	3 Lembaga			0 Lembaga	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Calon Tenaga Kerja	3 Lembaga	25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	43,07 %			43,07 %	363.027.500,00						43,07 %	380.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja	6440 Orang			1290 Orang	247.004.000,00			-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	1320 Orang	255.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1650 Orang			80 Orang	61.275.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	330 Orang	65.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	480 Orang			60 Orang	185.728.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	100 Orang	190.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang disebarluaskan	100 %			100 %	47.974.500,00			-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	100 %	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang			950 Orang	47.974.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	100 Orang	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja Indonesia asal kabupaten luwu timur yang bermasalah yang difasilitasi	100 %			100 %	68.049.000,00			-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	100 %	75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	4 Orang			4 Orang	68.049.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	4 Orang	75.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun	14,5 %			14,5 %	653.246.000,00						14,5 %	565.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek	100 %			100 %	168.998.000,00			-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	100 %	140.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	15 Perusahaan			15 Perusahaan	49.722.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	15 Perusahaan	40.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	45 Laporan			45 Laporan	119.275.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	45 Laporan	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi dan dimediasi	100% %			100 %	484.248.000,00			-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	100 %	425.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara			4 Perkara	59.894.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemudian Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	4 Perkara	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara			20 Perkara	129.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	15 Perkara	135.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	32 Asosiasi dan Serikat Pekerja			32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	49.258.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	32 Asosiasi dan Serikat Pekerja	60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga			1 Lembaga	85.668.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	4 Lembaga	90.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1 Orang			14000 Orang	160.166.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningk atan Keseja hteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Kemuda han Investasi dan Peluang Usaha dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan yang berkel anutan	Tenaga Kerja dan Perusahaan	1 Orang	80.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.038.806.000,00							891.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						1.038.806.000,00							891.000.000,00	
1	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penetapan kawasan transmigran	100 %			100 %	282.495.000,00						100 %	85.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan	250 Ha			50 Ha	282.495.000,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Warga Transmigrasi	50 Ha	85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen			1 Dokumen	28.344.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Warga Transmigrasi	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi														
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	50 Hektar			90 Hektar	254.151.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Warga Transmigrasi	50 Hektar	55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
2	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah luas wilayah transmigrasi yang dibangun	50 Ha			50 Ha	332.677.500,00						50 Ha	366.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan	250 KK			50 KK	332.677.500,00			-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Warga Transmigrasi	50 KK	366.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan			4 Laporan	218.709.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningk atan Pemb angunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningk atkan Kem andirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangu nan Daerah	Warga Transmigrasi	3 Laporan	245.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	25 Dokumen			1 Dokumen	46.390.500,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	25 Dokumen	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	80 Kepala Keluarga			15 Kepala Keluarga	36.998.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	80 Kepala Keluarga	40.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	80 Kepala Keluarga			15 Kepala Keluarga	30.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	80 Kepala Keluarga	31.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
3	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase masyarakat transmigran yang dibina	100 %			100 %	423.633.500,00						100 %	440.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	1 Kawasan			1 Kawasan	423.633.500,00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	1 Kawasan	440.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	50 Kepala Keluarga			180 Kepala Keluarga	177.364.500,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	50 Kepala Keluarga	140.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman														
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 Satuan Permukiman			1 Satuan Permukiman	246.269.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Mahalona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) Meningkatkan Kemendirian Desa Dalam Mendukung Kemajuan Pembangunan Daerah	Warga Transmigrasi	4 Satuan Permukiman	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
		SEKRETARIAT DAERAH						75.157.089.959,00							69.811.000.433,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						75.157.089.959,00							69.811.000.433,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						75.157.089.959,00							69.811.000.433,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	36.417.966.962,00						-	32.848.268.779,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	188.020.450,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Belanjaan Publik yang Inovatif	-	100 %	187.760.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			3 Dokumen	73.790.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Belanjaan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	69.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	15.532.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Belanjaan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	14.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	7.099.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	91.598.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	96.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	14.269.146.078,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	13.250.476.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan			96 Orang/bulan	13.947.718.778,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	92 Orang/bulan	12.912.386.492,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			9 Dokumen	262.406.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	261.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan			12 Laporan	59.021.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Laporan	76.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	100.380.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	108.533.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan			4 Laporan	100.380.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	108.533.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	30.991.700,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	29.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 Dokumen			12 Dokumen	30.991.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	29.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	615.143.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	459.808.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145 Paket			93 Paket	264.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	141.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen			12 Dokumen	83.039.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	82.468.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang			29 Orang	105.323.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Orang	116.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	117 Orang			25 Orang	162.080.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Orang	119.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.475.154.840,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	3.901.813.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket			40 Paket	78.995.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Paket	80.855.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket			7 Paket	169.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Paket	223.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket			7 Paket	468.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	345.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket			48 Paket	405.682.040,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Paket	495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45 Paket			11 Paket	53.570.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Paket	78.155.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36650 Dokumen			165 Dokumen	191.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7330 Dokumen	191.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan			12 Laporan	457.023.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	635.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			12 Laporan	1.651.174.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	1.850.993.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	3.614.998.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.048.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	2.978.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit			50 Unit	187.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Unit	248.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit			45 Unit	231.248.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Unit	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			3 Unit	218.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.745.600.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.897.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	1.091.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	1.125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	654.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	3.736.350.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.674.005.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	228 Unit			40 Unit	873.415.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	46 Unit	955.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	47.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	598 Unit			75 Unit	67.820.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	120 Unit	98.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	261.490.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit			10 Unit	2.486.625.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Unit	1.320.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	100 %			-	4.138.912.894,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	3.442.382.112,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	791.956.394,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Orang/Bulan	867.758.112,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	88 Paket			9 Paket	77.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Paket	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			8 Orang	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Orang	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	3.169.956.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Orang/Bulan	2.394.624.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	100 %			-	1.775.100.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.820.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket			2 Paket	860.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket			2 Paket	600.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	21 Paket			7 Paket	315.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	360.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	75,00 Nilai			-	1.317.363.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	75,00 Nilai	1.721.683.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	75 Dokumen			12 Dokumen	393.280.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Dokumen	311.183.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan			2 Laporan	209.548.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen			1 Dokumen	253.247.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	10 Dokumen			1 Dokumen	106.236.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	5 Dokumen			1 Dokumen	355.051.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	310.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	900 Kegiata n			-	1.410.806.500,00			-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	900 Kegiata n	1.306.306.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>	1410 Laporan			12 Laporan	621.025.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	300 Laporan	621.025.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	1410 Laporan			12 Laporan	142.309.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	300 Laporan	142.309.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	1410 Laporan			12 Laporan	647.472.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	300 Laporan	542.972.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	35.904.849.050,00					-		34.073.874.771,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	4 Rekomendasi			-	535.279.000,00			-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Rekomendasi	495.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	5 Dokumen			4 Dokumen	140.642.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	150.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	5 Dokumen			19 Dokumen	175.303.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	175.303.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	15 Dokumen			4 Dokumen	219.334.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	169.334.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	4 Rekomendasi			-	34.371.322.750,00			-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Rekomendasi	32.407.310.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	20 Dokumen			4 Dokumen	16.094.129.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	15.983.650.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	5 Dokumen			2 Dokumen	1.843.538.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	1.813.952.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan, Transmigrasi, Ura	5 Dokumen			1 Dokumen	16.433.654.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	14.609.707.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	90 %			-	896.441.300,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	90 %	970.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400 Dokumen			400 Dokumen	205.755.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	400 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus			4 Kasus	524.577.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Kasus	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2000 Dokumen			400 Dokumen	166.108.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	400 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	100 %			-	101.806.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	201.285.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen			4 Dokumen	78.426.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	119.285.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan			4 Laporan	23.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	2.834.273.947,00						-	2.888.856.883,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	12 Rekomendasi			-	584.585.850,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Rekomendasi	572.845.832,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen			2 Dokumen	439.276.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	335.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20 Laporan			4 Laporan	101.085.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	139.609.602,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20 Dokumen			2 Dokumen	44.224.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	98.236.230,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	8 Rekomend asi			-	116.863.600,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	8 Rekomend asi	160.817.751,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan			12 Laporan	62.222.950,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	89.017.751,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20 Laporan			12 Laporan	54.640.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	71.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	95 %			-	2.034.236.597,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	95 %	2.032.143.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	20 Dokumen			12 Dokumen	822.143.250,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	782.143.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen			12 Dokumen	908.436.547,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	18 Orang			50 Orang	303.656.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	18 Orang	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	8 Rekomend asi			-	98.587.900,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	8 Rekomend asi	123.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 Dokumen			2 Dokumen	50.430.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	51.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen			2 Dokumen	48.157.050,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	71.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						48.541.337.755,00								
														46.690.732.255,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						48.541.337.755,00							46.690.732.255,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						48.541.337.755,00							46.690.732.255,00	
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	29.116.140.705,00						100 %	28.966.503.194,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan Evaluasi	100 %			100 %	62.798.550,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	65.206.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	40.197.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	41.206.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.973.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.068.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	11.558.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	10 Laporan	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.873.502.630,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	3.535.236.369,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			26 Orang/bulan	3.786.478.730,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	30 Orang/bulan	3.448.831.569,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	87.023.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	86.404.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %			100 %	31.386.350,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	26.093.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	31.386.350,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	4 Laporan	26.093.850,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %			100 %	527.772.950,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	523.744.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket			46 Paket	42.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	68 Paket	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	249.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	249.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang			22 Orang	235.942.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	26 Orang	223.964.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 %			100 %	1.428.098.550,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	1.374.687.826,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			15 Paket	35.413.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	9 Paket	35.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	137.200.150,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	5 Paket	65.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	7.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Paket	7.142.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			6 Paket	137.005.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Paket	137.009.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	40.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	2 Paket	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	247.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	247.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	261.924.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	12 Laporan	261.992.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111 Laporan			110 Laporan	561.556.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	111 Laporan	579.719.126,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %			100 %	1.024.537.650,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	1.663.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			3 Unit	57.722.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	0 Unit	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			3 Unit	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	6 Unit	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			3 Unit	872.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	4 Unit	1.127.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			8 Unit	84.814.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	3 Unit	85.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	878.466.200,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	100 %	878.829.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	51.426.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	12 Laporan	51.429.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	500.040.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	36 Laporan	500.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan			12 Laporan	327.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD	22 Laporan	327.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintaha n yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	660.280.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	100 %	667.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit			11 Unit	163.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	11 Unit	163.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit			190 Unit	137.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	190 Unit	139.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	54.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	6 Unit	54.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	180.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	3 Unit	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	125.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD	3 Unit	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %			100 %	19.381.297.825,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	100 %	18.984.225.149,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan			35 Orang/Bulan	18.793.437.925,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	35 Orang/Bulan	18.335.445.149,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35 Paket			35 Paket	377.859.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	35 Paket	438.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang			35 Orang	210.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	35 Orang	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi DPRD	100 %			100 %	1.248.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pimpinan DPRD	100 %	1.248.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	1.248.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Pimpinan DPRD	6 Paket	1.248.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	100 %			100 %	19.425.197.050,00						100 %	17.724.229.061,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Kegiatan Legislasi yang difasilitasi	90 %			100 %	3.103.548.700,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	90 %	2.702.699.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13 Dokumen			10 Dokumen	2.452.764.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	13 Dokumen	2.152.041.586,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	18 Dokumen			10 Dokumen	650.783.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	13 Dokumen	550.657.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 %			100 %	1.452.093.150,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	90 %	1.324.104.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen			2 Dokumen	110.424.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	2 Dokumen	93.142.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen			2 Dokumen	124.944.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	2 Dokumen	112.945.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	402.710.050,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	1 Dokumen	378.710.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			1 Dokumen	406.717.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	1 Dokumen	379.991.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	407.296.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	1 Dokumen	359.313.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	90 %			100 %	6.379.201.700,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	90 %	5.777.079.325,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan			4 Laporan	1.808.007.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	4 Laporan	1.608.204.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan			4 Laporan	2.013.445.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	4 Laporan	1.884.465.425,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan			4 Laporan	1.815.832.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	4 Laporan	1.711.571.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10 Dokumen			1 Dokumen	368.070.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	10 Dokumen	278.782.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	7 Dokumen			1 Dokumen	373.845.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan SKPD	7 Dokumen	294.055.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD	90 %			100 %	2.190.058.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	90 %	2.009.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen			3 Dokumen	1.758.075.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	3 Dokumen	1.577.588.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang			3 Orang	133.672.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	5 Orang	133.221.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang			6 Orang	294.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	7 Orang	294.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	4.310.450,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	1 Dokumen	4.310.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase meningkatnya Peran serta DPRD dalam menindaklanjuti masalah Pembangunan dan terwujudnya Jaringan Aspirasi masyarakat	90 %			100 %	1.955.677.950,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan Masyarakat	90 %	1.368.538.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen			3 Dokumen	40.007.150,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan Masyarakat	1 Dokumen	40.251.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen			105 Dokumen	1.915.670.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD Dan Masyarakat	3 Dokumen	1.328.287.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penegakan Pelanggaran Kode Etik	90 %			100 %	47.879.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	90 %	47.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Laporan			3 Laporan	47.879.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	4 Laporan	47.866.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah	90 %			100 %	1.445.318.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	90 %	1.445.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	5 Dokumen			27 Dokumen	1.445.318.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	5 Dokumen	1.445.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi DPRD	90 %			100 %	2.851.420.350,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	90 %	3.049.521.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100 Dokumen			70 Dokumen	2.803.615.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	100 Dokumen	3.001.852.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	19 Dokumen			12 Dokumen	47.804.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Anggota DPRD	19 Dokumen	47.668.500,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						12.134.904.924,00							10.695.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						12.134.904.924,00							10.695.000.000,00	
	5,01	PERENCANAAN						10.896.724.924,00							9.560.000.000,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.878.725.824,00					-		6.183.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	105.200.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen			3 Dokumen	68.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan			5 Laporan	28.620.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	4.711.697.824,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	5.090.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan			30 Orang/bulan	4.623.527.824,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	31 Orang/bulan	5.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n Semesteran SKPD	0 Laporan			14 Laporan	88.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	13.315.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan			2 Laporan	13.315.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	234.175.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			48 Paket	84.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	50 Paket	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			18 Orang	139.525.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Orang	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	420.678.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	458.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Paket	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket			4 Paket	11.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Paket	13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			2 Paket	17.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	19.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			6 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Dokumen	9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			2 Laporan	25.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	605 Laporan	27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			2 Laporan	351.728.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	295 Laporan	380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	1.113.150.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			4 Unit	640.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			22 Unit	129.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Unit	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			13 Unit	143.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Unit	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	170.760.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	850 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			2 Laporan	87.960.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			2 Laporan	55.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	109.750.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			9 Unit	43.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Unit	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			40 Unit	26.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	45 Unit	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			1 Unit	40.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	2.713.410.200,00						-	2.066.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	100 %			-	2.024.890.250,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.409.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen			1 Dokumen	131.948.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	83.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	101.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			2 Berita Acara	69.413.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Berita Acara	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara			2 Berita Acara	54.860.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Berita Acara	56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			2 Berita Acara	228.582.200,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Berita Acara	230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan			385 Usulan	64.826.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Usulan	67.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP/RPD/RPMD/RKPD)	2 Dokumen			3 Dokumen	1.374.089.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	95 %			-	185.699.100,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	142.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			1 Dokumen	107.805.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang			41 Orang	54.524.250,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Orang	57.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku			1 Buku	23.369.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Buku	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	100 %			-	502.820.850,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	515.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan			2 Laporan	110.511.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama			1 Kerja Sama	12.188.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Kerja Sama	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan			6 Laporan	380.121.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Laporan	385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.304.588.900,00					-		1.311.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	100 % 100 %			-	579.800.000,00			-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 % 100 %	586.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen			4 Dokumen	70.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan			4 Laporan	74.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	76.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen			4 Dokumen	186.350.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			4 Laporan	99.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			4 Laporan	148.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	100 %			-	452.390.400,00			-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	465.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			3 Dokumen	73.895.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan			4 Laporan	26.631.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan			3 Laporan	93.464.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			3 Dokumen	182.330.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan			3 Laporan	76.070.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100 %			-	272.398.500,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	260.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			3 Dokumen	103.796.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan			3 Laporan	106.964.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			3 Dokumen	61.638.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.238.180.000,00							1.135.000.000,00	
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	1.238.180.000,00					-		1.135.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	1 Dokumen			-	370.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomend asi			1 Rekomend asi	370.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Rekomend asi	275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	1 Dokumen			-	120.600.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen			1 Dokumen	120.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	1 Dokumen			-	361.800.000,00			-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	375.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen			1 Dokumen	120.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen			1 Dokumen	120.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0 Dokumen			1 Dokumen	120.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	100 %			-	385.780.000,00			-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan			1 Laporan	335.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	305.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						405.983.632.175,00							385.852.239.656,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						405.983.632.175,00							385.852.239.656,00	
	5.02	KEUANGAN						405.983.632.175,00							385.852.239.656,00	
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	54.474.433.726,00						-	34.341.804.816,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	204.333.500,00			-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	169.470.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	98.007.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	77.903.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	3.705.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	3.699.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	3.062.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atn Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	3.037.150,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	99.558.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	84.830.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	98 Persen			-	51.488.207.276,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	98 Persen	30.012.442.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan			112 Orang/bulan	51.017.842.726,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	71 Orang/bulan	29.565.202.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	108.574.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	105.970.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	89.429.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	84.260.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan			18 Laporan	272.361.550,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	19 Laporan	257.010.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	98 Persen			-	17.090.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	98 Persen	17.090.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	17.090.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	17.090.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	95 Persen			-	754.638.050,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 Persen	634.272.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			30 Paket	86.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			2 Dokumen	60.163.250,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	60.177.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang			700 Orang	52.125.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	450 Orang	52.125.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang			60 Orang	555.649.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	47 Orang	521.970.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95 Persen			-	820.302.400,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 Persen	720.211.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	6.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Paket	6.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	12.827.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	12.935.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			5 Paket	38.625.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	31.575.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen			144 Dokumen	18.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	144 Dokumen	17.640.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2500 Laporan			2 Laporan	42.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2500 Laporan	38.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan			175 Laporan	701.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	300 Laporan	612.611.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	97 Persen			-	576.390.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	97 Persen	1.420.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			5 Unit	65.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			10 Unit	158.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	320.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	53.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Unit	230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	265.212.500,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	237.688.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	92.652.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	90.688.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38 Laporan			12 Laporan	128.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	38 Laporan	106.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			12 Laporan	44.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Laporan	40.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 Persen			-	348.260.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 Persen	1.130.630.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit			10 Unit	83.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	19 Unit	58.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit			64 Unit	44.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	75 Unit	56.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	220.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	1.016.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	350.260.604.149,00					-	-	350.261.838.300,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	10 Minggu			-	1.566.673.399,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Minggu	1.567.904.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	101.249.250,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	101.249.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	92.174.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	92.174.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			59 Dokumen	17.226.449,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	17.226.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			59 Dokumen	19.022.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	19.022.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen			71 Dokumen	19.094.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	19.022.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	641.760.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	641.761.100,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			5 Dokumen	514.756.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	514.756.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen			25 Dokumen	83.808.250,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Dokumen	85.231.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	57.223.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	57.235.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang			236 Orang	20.356.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	70 Orang	20.224.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	97 Persen 280.397.200			-	711.789.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	97 Persen 280.397.200	711.789.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	129.999.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Dokumen	129.999.950,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen			12 Dokumen	506.789.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	506.789.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	708 Dokumen			240 Dokumen	74.999.750,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	708 Dokumen	74.999.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	97 Persen			-	1.216.663.250,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	97 Persen	1.216.666.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan			12 Laporan	75.934.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Laporan	75.936.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	224 Dokumen			236 Dokumen	55.425.650,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	224 Dokumen	55.425.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan			18 Laporan	315.109.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	287.269.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	18 Laporan			18 Laporan	117.116.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	115.076.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	489.154.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	489.154.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	29.879.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	32.164.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	32.164.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	320 Orang			320 Orang	131.759.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	320 Orang	131.759.850,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	97 Persen			-	346.765.478.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	97 Persen	346.765.478.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125 Laporan			0 Laporan	343.265.478.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA DESA	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	125 Laporan	343.265.478.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan			1 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	3.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.248.594.300,00					-	-	1.248.596.540,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	58 Perangka t Daerah			-	1.248.594.300,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	58 Perangka t Daerah	1.248.596.540,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	35.196.900,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	35.196.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	30.682.700,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	30.682.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan			3 Laporan	185.630.950,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	155.771.980,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan			1 Laporan	62.974.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	31.951.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	20 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Laporan	45.456.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan			2 Laporan	75.114.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	75.114.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			6 Dokumen	644.975.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	599.519.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			118 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	31.023.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	29.859.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang			2 Orang	214.019.450,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	118 Orang	214.019.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						19.457.645.050,00							0,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.457.645.050,00							0,00		
	5.02	KEUANGAN						19.457.645.050,00							0,00		
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	-					-		0,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen			-	105.987.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			4 Dokumen	78.829.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.177.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.000.300,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	20.981.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	97.40 Perse n			-	14.796.913.680,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	97.40 Perse n	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan			29 Orang/bulan	14.660.572.680,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	29 Orang/bulan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	21.372.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	19 Laporan			19 Laporan	114.969.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	19 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	98.80 Perse n			-	15.094.000,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	98.80 Perse n	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	15.094.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	95.80 Perse n			-	489.264.000,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayan an Publik yang Inovatif	-	95.80 Perse n	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	109.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	55.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang			450 Orang	54.452.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	450 Orang	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang			29 Orang	270.252.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	47 Orang	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95,00 Persen			-	817.825.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95,00 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			3 Paket	5.290.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	2.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket			24 Paket	7.435.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Paket	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			4 Paket	210.771.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132 Dokumen			36 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	132 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			4 Laporan	11.210.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			160 Laporan	576.079.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	150 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	97,00 Persen			-	75.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	97,00 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			3 Unit	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit			2 Unit	60.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	98,00 Persen			-	273.605.170,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	98,00 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	25.445.170,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	204.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	44.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	95,00 Persen			-	165.040.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95,00 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			12 Unit	55.280.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit			34 Unit	64.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	55 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	45.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	2.718.915.400,00					-	-	0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	92,50 Persen			-	2.718.915.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	92,50 Persen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	123.010.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	333.811.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	194.430.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan	225.039.600,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	117.000 Obyek Pajak			116000 Obyek Pajak	1.037.856.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	117.000 Obyek Pajak	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	155 Dokumen			350 Dokumen	291.184.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	155 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24 Layanan			24 Layanan	52.119.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Layanan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen			12 Dokumen	132.886.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	99 Dokumen			12 Dokumen	328.577.800,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	99 Dokumen	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						13.409.712.298,00						10.984.915.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.384.344.298,00						10.954.915.000,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN						9.845.433.798,00						8.945.818.000,00		
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.492.458.548,00					-	5.095.818.000,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	269.457.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	71.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			10 Dokumen	85.932.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	17.192.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	13.222.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			14 Laporan	153.111.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	95 %			-	3.723.849.198,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	4.052.518.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan			32 Orang/bulan	3.566.358.198,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	39 Orang/bulan	4.007.518.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan			5 Laporan	157.491.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Laporan	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	13.824.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			4 Laporan	13.824.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	314.335.350,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	153.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket			45 Paket	84.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	32.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			4 Dokumen	50.955.350,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			11 Orang	66.740.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Orang	38.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			4 Orang	22.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	37.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			14 Orang	89.840.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Orang	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95 %			-	533.691.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	342.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			13 Paket	10.959.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Paket	13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			30 Paket	31.034.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Paket	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			5 Paket	41.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			4 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	650 Laporan			12 Laporan	66.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	650 Laporan	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan			12 Laporan	368.827.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	140 Laporan	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			4 Dokumen	10.371.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.214.680.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			55 Unit	30.590.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			8 Unit	61.060.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1.123.030.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	243.117.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	213.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan			12 Laporan	30.117.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2000 Laporan	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			4 Laporan	87.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Laporan	52.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan			4 Laporan	126.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Laporan	126.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	179.504.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			4 Unit	62.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			4 Unit	29.086.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit			76 Unit	53.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	55 Unit	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	34.818.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	3.352.975.250,00					-		3.850.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	95 %			-	820.260.250,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	1.085.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.620 Dokumen			1 Dokumen	82.420.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1.620 Dokumen	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	500 Dokumen			2 Dokumen	526.337.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	550 Dokumen	550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100 Dokumen			12 Dokumen	81.036.850,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen			1 Dokumen	130.465.800,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	95 %			-	934.305.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	84,89 Dokumen			4 Dokumen	186.947.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	84,89 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 Dokumen			6 Dokumen	309.964.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen			4 Dokumen	437.394.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	95 %			-	1.224.199.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	1.670.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	95 Dokumen			2 Dokumen	739.194.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang			5 Orang	403.162.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Orang	1.320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	90 Orang			100 Orang	81.843.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	90 Orang	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	95 %			-	374.211.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	345.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Dokumen			4 Dokumen	112.241.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang			84 Orang	110.774.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Orang	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang			7 Orang	81.631.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Orang	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	75 Dokumen			2 Dokumen	16.248.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	75 Dokumen	45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	100 Laporan			1 Laporan	53.317.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Laporan	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						3.538.910.500,00							2.009.097.000,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	3.538.910.500,00						-	2.009.097.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	100 %			-	2.058.758.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.190.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	775 Orang			260 Orang	1.522.291.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	130 Orang	1.080.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	17 Dokumen			6 Dokumen	536.467.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	110.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	95 %			-	1.480.152.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	818.297.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	4 Dokumen			9 Dokumen	20.010.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100 Laporan			3 Laporan	1.460.142.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Laporan	788.297.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	NON URUSAN						25.368.000,00							30.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						25.368.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	25.368.000,00					-	-	30.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	95 %			-	25.368.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	95 %	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			15 Paket	25.368.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Paket	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						13.801.255.300,00							12.821.113.976,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						13.801.255.300,00							12.821.113.976,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						13.801.255.300,00							12.821.113.976,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %			100 %	9.423.856.325,00						100 %	8.581.480.172,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	-			100 Persen	265.253.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	97.017.406,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	204.493.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		29.554.070,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	13.977.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.707.245,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		5.373.620,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	40.782.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		46.382.471,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	-			100 Persen	6.965.557.497,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	6.964.383.064,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	6.927.299.497,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.960.803.296,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	38.258.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		3.579.768,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	1.010.132.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	716.146.957,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	106.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	4.805.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.821.694,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	756.585.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		560.743.693,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	31.156.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		32.819.070,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	111.386.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		115.762.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	839.794.320,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	579.348.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				48 Paket	1.662.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		1.348.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	48.150.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		21.806.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	3.998.320,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		3.908.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11000 Paket	11.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.180.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		14.875.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				73 Laporan	744.444.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		521.229.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	100.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	159.954.108,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	134.084.445,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1300 Laporan	9.799.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		8.379.645,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	75.154.608,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		50.704.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	-			100 Persen	83.165.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	90.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	41.705.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		48.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	31.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		32.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %			95 %	3.194.699.975,00						95 %	3.081.934.008,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase pelaksanaan pengawasan internal	-			95 Persen	2.689.194.975,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	2.615.734.008,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				212 Laporan	184.059.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		266.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				441 Laporan	783.882.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		1.114.569.803,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	63.835.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		42.214.662,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				7 Laporan	78.735.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		90.410.271,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				125 Laporan	415.772.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		378.832.032,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	762.433.975,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		577.707.240,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	400.478.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		145.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	-			95 Persen	505.505.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	466.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				12 Laporan	103.360.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				27 Laporan	402.145.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		266.200.000,00	INSPEKTORAT
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PENURUNAN HASIL TEMUAN Presentase Obrik Pemeriksaan yang dibina	95,00 %			25 % 95,00 %	1.182.699.000,00						95,00 %	1.157.699.796,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Presentase obrik binaan yang didampingi	-			95,00 Persen	1.182.699.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	1.157.699.796,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				102 perangkat daerah	779.927.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		904.304.016,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				41 perangkat daerah	278.742.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.506.150,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	124.030.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		237.889.630,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BURAU						3.380.965.850,00							3.245.965.850,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.380.965.850,00							3.245.965.850,00	
	7.01	KECAMATAN						3.380.965.850,00							3.245.965.850,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-		-	3.213.464.850,00					-		3.096.533.850,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	100 %		-	39.631.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	36.110.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	25.841.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	23.565.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.375.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.270.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.785.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	6.495.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	5.490.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	100 %		-	2.444.308.850,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.409.407.850,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.420.103.850,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Orang/bulan	2.386.048.850,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan			16 Laporan	24.205.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	23.359.000,00	KECAMATAN BURAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	12.560.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	12.658.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	12.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	12.658.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	77.619.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	22.031.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34 Paket			0 Paket	40.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	34 Paket	0,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	5.406.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	6.231.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			3 Orang	31.813.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	15.800.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	305.415.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	300.484.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			7 Paket	9.305.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	9.435.300,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			11 Paket	8.224.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	9.179.200,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			4 Paket	17.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	17.000.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			60 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	120.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	144.786.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	138.870.000,00	KECAMATAN BURAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	91.900.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	79.600.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			9 Unit	91.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	79.600.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	197.061.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	191.032.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	7.978.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	7.949.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	37.233.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	37.233.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	7.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	7.850.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			12 Laporan	144.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	138.000.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	44.970.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	45.210.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			6 Unit	21.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	21.100.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit			24 Unit	14.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	31 Unit	14.990.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	9.120.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	9.120.000,00	KECAMATAN BURAU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	15.625.000,00					-		21.885.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	15.625.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	21.885.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen			12 Dokumen	15.625.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	100 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Laporan	6.885.000,00	KECAMATAN BURAU
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	102.063.000,00					-	-	82.445.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	102.063.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	82.445.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan			5 Lembaga Kemasyarakatan	17.787.500,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	17.802.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	84.275.500,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	64.642.500,00	KECAMATAN BURAU
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	14.275.000,00					-	-	12.562.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 %			-	9.910.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	8.217.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			4 Laporan	4.435.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	4.087.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan			4 Laporan	5.475.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	4.130.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	4.365.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	4.345.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	4.365.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	4.345.000,00	KECAMATAN BURAU
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	27.493.000,00					-	-	25.162.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	27.493.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	25.162.000,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	27.493.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	25.162.000,00	KECAMATAN BURAU
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.045.000,00					-		7.377.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	8.045.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	7.377.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen			18 Dokumen	3.580.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Dokumen	2.862.500,00	KECAMATAN BURAU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18 Laporan			18 Laporan	4.465.000,00	Kab. Luwu Timur, Burau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	4.515.000,00	KECAMATAN BURAU
		KECAMATAN WOTU						3.211.372.275,00							3.373.707.585,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						3.211.372.275,00							3.373.707.585,00	
	7.01	KECAMATAN						3.211.372.275,00							3.373.707.585,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.043.485.025,00					-		3.189.305.201,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	67.150.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	70.250.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	25.941.800,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	27.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	6.239.950,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	6.924.850,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	28.043.700,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	28.750.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.309.939.693,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.193.190.084,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan			18 Orang/bulan	2.281.379.893,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	29 Orang/bulan	2.150.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			12 Laporan	28.559.800,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	43.190.084,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	12.779.500,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	14.500.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			4 Laporan	12.779.500,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.015.000,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	3.015.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	14.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	47.986.850,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	50.636.030,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket			42 Paket	9.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	37 Paket	0,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	4.376.850,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	14.636.030,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			4 Orang	33.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	36.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	245.714.800,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	340.832.150,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			9 Paket	2.125.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Paket	7.610.950,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket			6 Paket	6.525.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Paket	16.753.200,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	11.349.800,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	22.468.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			60 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2800 Laporan			12 Laporan	120.635.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2800 Laporan	165.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1700 Laporan			12 Laporan	99.080.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1700 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	59.000.000,00			-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	53.500.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			4 Unit	59.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	53.500.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	240.873.882,00			-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	332.826.937,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan			12 Laporan	15.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1500 Laporan	16.316.937,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			36 Laporan	37.748.882,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Laporan	73.560.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	5.025.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	16.950.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan			4 Laporan	183.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	17 Laporan	226.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	57.025.000,00			-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	119.570.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			5 Unit	21.395.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	46.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			8 Unit	10.630.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkat atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	16.570.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	25.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	57.000.000,00	KECAMATAN WOTU
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	17.557.250,00					-	-	8.250.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	17.557.250,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	8.250.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	400 Laporan			12 Laporan	17.557.250,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	400 Laporan	8.250.000,00	KECAMATAN WOTU
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	82.432.250,00					-	-	84.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	82.432.250,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	84.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakat an			5 Lembaga K emasyarakat an	18.025.450,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Lembaga K emasyarakat an	19.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135 Laporan			12 Laporan	64.406.800,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	135 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN WOTU
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	16.584.850,00					-	-	36.600.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum	-	100 %			-	10.189.900,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	24.600.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan			12 Laporan	6.144.950,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Laporan	12.600.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan			12 Laporan	4.044.950,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	6.394.950,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	12.000.000,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan			4 Laporan	6.394.950,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN WOTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	35.428.250,00					-	-	35.855.634,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	35.428.250,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	35.855.634,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	35.428.250,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	35.855.634,00	KECAMATAN WOTU
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	15.884.650,00					-	-	19.696.750,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	15.884.650,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	19.696.750,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen			34 Dokumen	7.354.850,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	34 Dokumen	10.446.750,00	KECAMATAN WOTU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			17 Laporan	8.529.800,00	Kab. Luwu Timur, Wotu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	9.250.000,00	KECAMATAN WOTU
		KECAMATAN TOMONI						4.991.963.425,00							4.844.808.315,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						4.991.963.425,00							4.844.808.315,00	
	7.01	KECAMATAN						4.991.963.425,00							4.844.808.315,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.563.790.425,00					-	-	4.422.997.030,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	21.781.150,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	23.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	12.028.200,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	12.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.785.400,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.026.150,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			5 Laporan	3.941.400,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.937.736.813,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.919.474.818,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	28 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2.904.746.813,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	28 Orang/bulan	2.884.804.818,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	12 Laporan			15 Laporan	32.990.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	34.670.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	15.801.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	16.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	15.801.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	0,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	7.080.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	7.080.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	105.202.500,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	69.320.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	28 Paket			23 Paket	36.694.500,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	28 Paket	0,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen			10 Dokumen	4.916.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	5 Orang			8 Orang	63.592.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Orang	64.320.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	551.622.650,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	533.360.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket			4 Paket	5.917.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket			1 Paket	5.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			2 Paket	4.765.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			3 Paket	11.024.650,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	11.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			4 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	8.040.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8500 Laporan			12 Laporan	175.540.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8500 Laporan	175.540.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan			866 Laporan	341.336.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	800 Laporan	323.280.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	84.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	70.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		35.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			4 Unit	49.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Unit	35.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	637.856.312,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	571.255.812,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan			12 Laporan	24.938.500,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	150 Laporan	24.938.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan			36 Laporan	50.017.812,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	132 Laporan	50.017.812,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			4 Laporan	8.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	8.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			48 Laporan	554.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	487.800.000,00	KECAMATAN TOMONI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	209.790.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	213.006.400,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			12 Unit	131.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Unit	127.556.400,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit			10 Unit	1.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	1.950.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit			39 Unit	13.550.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	44 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			5 Unit	63.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	63.500.000,00	KECAMATAN TOMONI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	14.970.000,00					-	-	12.050.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	14.970.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	12.050.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen			24 Dokumen	0,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	0,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				24 Laporan	14.970.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		12.050.000,00	KECAMATAN TOMONI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	355.520.450,00					-	-	355.520.430,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	115.070.450,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	115.080.430,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan			7 Lembaga Kemasyarakatan	16.615.500,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.625.500,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	98.454.950,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	98.454.930,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %			-	240.450.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	240.440.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit			2 Unit	115.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	115.595.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	124.790.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Pokmas / Ormas	124.845.000,00	KECAMATAN TOMONI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	12.196.450,00						-	11.854.755,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	-	100 %			-	9.034.350,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	8.854.755,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	3.130.100,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	3.000.100,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	5.904.250,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	5.854.655,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	3.162.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	3.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			12 Laporan	3.162.100,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN TOMONI
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	20.861.000,00						-	18.171.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	20.861.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	18.171.000,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	20.861.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	18.171.000,00	KECAMATAN TOMONI
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	24.625.100,00						-	24.215.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	24.625.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	24.215.100,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen			48 Dokumen	7.365.200,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	7.325.200,00	KECAMATAN TOMONI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	13 Laporan			13 Laporan	17.259.900,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	13 Laporan	16.889.900,00	KECAMATAN TOMONI
		KECAMATAN MANGKUTANA						3.138.872.800,00							3.280.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.138.872.800,00							3.280.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.138.872.800,00							3.280.400.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	2.960.357.000,00						100 %	3.088.400.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %			100 %	41.582.700,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	55.600.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen			2 Dokumen	19.047.700,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	2 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	4.734.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	2 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	2.479.500,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	2 Dokumen	2.600.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan			9 Laporan	15.321.500,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	10 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik (%)	100 %			100 %	2.155.291.220,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	2.190.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan			18 Orang/bulan	2.116.735.920,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	24 Orang/bulan	2.150.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan			18 Laporan	38.555.300,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan dan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	18 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100 %			100 %	14.211.800,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %		0,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan			4 Laporan	14.211.800,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	4 Laporan		0,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100 %			100 %	45.776.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	47.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket			22 Paket	11.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	27 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen			14 Dokumen	9.516.200,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	12 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang			5 Orang	25.260.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	6 Orang	22.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100 %			100 %	310.245.580,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	423.800.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	69 Paket			9 Paket	3.191.500,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	16 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket			15 Paket	5.986.080,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	16 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket			7 Paket	6.825.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	7 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen			36 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	48 Dokumen	4.800.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21446 Laporan			60 Laporan	145.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	4571 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4251 Laporan			567 Laporan	145.643.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	870 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100 %			100 %	20.408.400,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	120.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	1 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	320 Unit			2 Unit	6.641.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	44 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit			1 Unit	4.692.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit			3 Unit	9.075.400,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	5 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %			100 %	141.131.100,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	146.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7500 Laporan			12 Laporan	16.370.700,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	1500 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	600 Laporan			12 Laporan	59.600.400,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	120 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan			2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan			12 Laporan	50.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	3 Laporan	69.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100 %			100 %	231.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	100 %	106.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			3 Unit	24.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Mali, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	3 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit			12 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	4 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 Unit			21 Unit	13.490.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	20 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			3 Unit	184.880.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	4 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit			12 Unit	8.630.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kantor Camat Mangkutana	7 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %			100 %	16.160.000,00						100 %	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan (%)	100 %			100 %	16.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	627 Dokumen			12 Dokumen	16.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	140 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %			100 %	94.410.300,00						100 %	95.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100 %			100 %	94.410.300,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	95.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1100 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	13.041.800,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	260 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	330 Laporan			12 Laporan	81.368.500,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	66 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100 %			100 %	12.680.600,00						100 %	15.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100 %			100 %	8.444.600,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30 Laporan			8 Laporan	4.533.600,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	55 Laporan			4 Laporan	3.911.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	11 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (""%)	100 %			100 %	4.236.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	5.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30 Laporan			4 Laporan	4.236.000,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	6 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100 %			100 %	31.748.100,00						100 %	32.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (""%)	100 %			100 %	31.748.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	32.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dokumen			12 Dokumen	31.748.100,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	12 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100 %			100 %	23.516.800,00						100 %	40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (""%)	100 %			100 %	23.516.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	100 %	40.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	110 Dokumen			22 Dokumen	4.460.900,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	22 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	55 Laporan			6 Laporan	19.055.900,00	Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Mangkutana	11 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN MANGKUTANA
		KECAMATAN TOMONI TIMUR						2.820.877.206,00							2.791.708.606,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.750.082.206,00							2.706.608.606,00	
	7.01	KECAMATAN						2.750.082.206,00							2.706.608.606,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.581.175.346,00						-	2.560.498.606,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	69.940.700,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	71.490.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	34.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	34.640.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.963.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	6.319.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		6.350.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	25.022.700,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	25.500.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	1.914.800.076,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	1.765.498.606,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan			16 Orang/bulan	1.890.900.076,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Orang/bulan	1.740.898.606,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	18 Laporan			19 Laporan	23.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	24.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	7.170.000,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	12.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	7.170.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	12.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	77.494.000,00			-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	79.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket			0 Paket	24.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	23 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	8.134.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			3 Orang	44.610.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	45.500.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	130.873.750,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	129.160.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	6.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	6.200.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6.950.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		7.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			6 Paket	9.485.750,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	5.560.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			2700 Paket	7.325.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	7.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			48 Dokumen	6.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	6.300.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan			270 Laporan	94.773.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	240 Laporan	96.500.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	97.997.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	104.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	39.997.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		45.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			2 Unit	58.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	59.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	157.939.820,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	172.750.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan			900 Laporan	14.139.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1200 Laporan	14.250.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	20.800.820,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Laporan	35.500.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			9 Laporan	123.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Laporan	123.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	124.960.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	226.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			5 Unit	21.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit			9 Unit	3.760.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		200.000.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	33.393.500,00					-		10.260.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100 %			-	6.750.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	6.660.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan			4 Laporan	6.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	6.660.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	26.643.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	3.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen			12 Dokumen	26.643.500,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Dokumen	3.600.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	69.025.760,00					-		69.250.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	69.025.760,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	69.250.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat			5 Lembaga Masyarakat	15.890.200,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Lembaga Masyarakat	16.100.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85 Laporan			85 Laporan	53.135.560,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	85 Laporan	53.150.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	20.104.000,00					-	-	20.110.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritiban Umum	-	100 %			-	20.104.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	20.110.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan			12 Laporan	12.736.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Laporan	12.740.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan			4 Laporan	7.368.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	7.370.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	23.264.100,00					-	-	23.270.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	23.264.100,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	23.270.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			4 Dokumen	23.264.100,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	23.270.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	23.119.500,00					-	-	23.220.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	23.119.500,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	23.220.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen			22 Dokumen	13.018.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	36 Dokumen	13.100.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10.101.500,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		10.120.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	X	NON URUSAN						70.795.000,00							85.100.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						70.795.000,00							85.100.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	70.795.000,00					-	-	85.100.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	70.795.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	85.100.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2400 Laporan			2100 Laporan	70.795.000,00	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2400 Laporan	85.100.000,00	KECAMATAN TOMONI TIMUR
		KECAMATAN KALAENA						2.908.235.300,00							3.970.450.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.908.235.300,00							3.970.450.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.908.235.300,00							3.970.450.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.695.534.300,00					-	-	3.725.450.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	41.712.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	31.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	15.445.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	6.766.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	6.989.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	12.511.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	1.815.554.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.540.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan			13 Orang/bulan	1.790.570.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Orang/bulan	2.526.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan			12 Laporan	24.984.300,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Laporan	14.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	15.015.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	14.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			12 Laporan	15.015.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	14.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	0,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	60.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	75.932.500,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	78.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket			28 Paket	37.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	45 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	7.019.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			3 Orang	31.813.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	40.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	327.294.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	337.950.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			11 Paket	3.217.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			15 Paket	6.371.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Paket	4.750.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			4 Paket	12.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Paket	13.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			48 Dokumen	5.880.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	7.200.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	127.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	171.586.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	220.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	94.700.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	295.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	40.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	8.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			2 Unit	41.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	5.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	180.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	271.458.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	204.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	17.344.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	50.814.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	8.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	195.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	114.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	53.868.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	165.500.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			7 Unit	25.538.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Unit	37.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit			2 Unit	860.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			21 Unit	12.270.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	17.500.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	5.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	85.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	9.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	12.218.000,00						-	40.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	12.218.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	40.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60 Dokumen			12 Dokumen	12.218.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan			0 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	120.995.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	120.995.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	100.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga K emasyarakat an			5 Lembaga K emasyarakat an	16.474.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Lembaga K emasyarakat an	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	104.521.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	30.886.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	-	100 %			-	22.479.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	40.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			4 Laporan	14.758.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan			4 Laporan	7.721.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	8.407.000,00			-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	10.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			4 Laporan	8.407.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	24.145.500,00						-	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	24.145.500,00			-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	24.145.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	24.456.500,00						-	35.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	24.456.500,00			-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	35.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen			14 Dokumen	13.989.500,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan			7 Laporan	10.467.000,00	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN KALAENA
		KECAMATAN ANGKONA						3.082.183.900,00							3.045.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.082.183.900,00							3.045.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.082.183.900,00							3.045.500.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	100 %			100 %	2.926.675.125,00						100 %	2.808.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah perangkat daerah	100 %			13 dokumen	43.134.900,00			-	01 Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	100 %	44.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			2 Dokumen	16.337.650,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	3 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	7.709.200,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	2 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	2.311.300,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan			7 Laporan	16.776.750,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	7 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang dibuat	100 %			33 laporan	2.286.343.575,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	100 %	2.066.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan			19 Orang/bulan	2.251.387.675,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	23 Orang/bulan	2.030.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 Laporan			19 Laporan	34.955.900,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Kantor Camat Angkona	18 Laporan	36.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100 %			100 %	13.907.650,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	100 %	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan			12 Laporan	13.907.650,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %			100 %	44.784.300,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	100 %	61.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	126 Paket			30 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	33 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen			4 Dokumen	13.725.300,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	4 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang			3 Orang	31.059.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	6 Orang	40.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum/perangkat daerah yang terpenuhi	100 %			100 %	273.775.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	100 %	287.500.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket			4 Paket	5.891.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	9 Paket	6.500.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	140 Paket			4 Paket	11.375.400,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	28 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			12 Paket	12.595.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	5 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen			72 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	60 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9800 Laporan			6 Laporan	97.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	2000 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2940 Laporan			600 Laporan	137.014.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	600 Laporan	145.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	45 Unit			9 Unit	107.672.800,00			-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	12 Unit	121.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			2 Unit	8.532.800,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Unit	13.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit			4 Unit	42.740.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	4 Unit	33.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			3 Unit	21.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	4 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100 %			16 Jenis 100 %	112.616.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	100 %	127.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5450 Laporan			4 Laporan	14.904.800,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	1250 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	480 Laporan			12 Laporan	36.703.200,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	96 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan			3 Laporan	6.825.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan			12 Laporan	54.183.500,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	7 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara Persentase BMD Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %			23 unit 100 %	44.440.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	100 %	87.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	19.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona		23.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	9 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	133 Unit			21 Unit	12.140.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	32 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			0 Unit	13.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	3 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			0 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparatur Kantor Camat Angkona	3 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 %			100 %	25.730.000,00						100 %	81.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan (%)	100 %			100 %	25.730.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	aparat Kantor Camat Angkona dan Masyarakat Penerima Layanan	100 %	81.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	290 Dokumen			1200 Dokumen	25.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	aparat Kantor Camat Angkona dan Masyarakat Penerima Layanan	60 Dokumen	34.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	84000 Laporan			12 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	aparat Kantor Camat Angkona dan Masyarakat Penerima Layanan	2200 Laporan	47.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	100 %			100 %	78.006.775,00						100 %	95.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 %			100 %	78.006.775,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona	100 %	95.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31,4 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	13.021.500,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona	33 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70 Laporan			4 Laporan	64.985.275,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona	70 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	100 %			100 %	13.704.800,00						100 %	16.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan	100 %			100 %	9.283.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan Pihak yang berkepentingan	100 %	11.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan			4 Laporan	6.085.900,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan Pihak yang berkepentingan	100 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20 Laporan			4 Laporan	3.197.500,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan Pihak yang berkepentingan	4 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan perda dan perkara	-			100 %	4.421.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan pihak yang berkepentingan	-	5.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan			4 Laporan	4.421.400,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan pihak yang berkepentingan	4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100,00 %			100,00 %	19.811.600,00						100,00 %	23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100 %			100 %	19.811.600,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan Instansi lingkup Kecamatan Angkona	100 %	23.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 Dokumen			12 Dokumen	19.811.600,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Masyarakat Kecamatan Angkona dan Instansi lingkup Kecamatan Angkona	100 Dokumen	23.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA	
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %			100 %	18.255.600,00						100 %	22.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %			100 %	18.255.600,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Desa di Kecamatan Angkona	100 %	22.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan															
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen			20 Dokumen	12.260.400,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Desa di Kecamatan Angkona	20 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 Laporan			0 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Angkona, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Desa di Kecamatan Angkona	100 Laporan	0,00	KECAMATAN ANGKONA	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan															
			0	10 Laporan			0 0	5.995.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Aparat Desa di Kecamatan Angkona	10 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN ANGKONA	
		KECAMATAN MALILI						4.411.996.550,00								5.228.147.123,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						4.411.996.550,00								5.228.147.123,00	
	7.01	KECAMATAN						4.411.996.550,00								5.228.147.123,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.973.637.750,00						-	4.492.086.423,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	38.983.750,00			-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	41.139.800,00	KECAMATAN MALILI	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			2 Dokumen	26.570.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	27.050.100,00	KECAMATAN MALILI	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	4.460.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.005.700,00	KECAMATAN MALILI	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	4.585.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01 Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	5.005.600,00	KECAMATAN MALILI	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan			7 Laporan	3.368.250,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	4.078.400,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.474.138.295,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	2.772.249.823,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan			21 Orang/bulan	2.441.737.995,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Orang/bulan	2.738.982.823,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan			12 Laporan	32.400.300,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	33.267.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	20.004.050,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	23.956.800,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan			4 Laporan	20.004.050,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	23.956.800,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.000.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	4.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen			12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	89.367.055,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	71.170.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket			28 Paket	27.400.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	4.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen			12 Dokumen	10.747.055,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	11.270.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			5 Orang	51.220.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Orang	55.400.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	572.532.950,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	635.570.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket			4 Paket	9.480.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Paket	10.870.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		25.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	63.542.700,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Paket	65.700.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	75 Paket			200 Paket	11.396.750,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	75 Paket	12.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen			8 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7417 Laporan			12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7417 Laporan	145.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438 Laporan			12 Laporan	348.213.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	438 Laporan	350.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	111.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	151.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit			2 Unit	96.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	101.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	547.011.650,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	645.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8400 Laporan			4 Laporan	19.511.650,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1200 Laporan	20.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	136 Laporan			12 Laporan	98.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Laporan	105.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan			2 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	188 Laporan			12 Laporan	429.050.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	32 Laporan	455.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	117.600.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	147.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit			8 Unit	33.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	33.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			17 Unit	17.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit			3 Unit	66.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	95.500.000,00	KECAMATAN MALILI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	14.260.900,00					-	-	19.560.700,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	14.260.900,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	19.560.700,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600 Dokumen			4 Dokumen	14.260.900,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 Dokumen	4.560.700,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		15.000.000,00	KECAMATAN MALILI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	328.621.600,00					-	-	605.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	86.430.100,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	100.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Masyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	175 Lembaga Kemasyarakatan			5 Lembaga Masyarakatan	38.985.100,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Lembaga Masyarakatan	45.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	508 Laporan			12 Laporan	47.445.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %			-	242.191.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	505.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit			2 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	255.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	402 Pokmas / Ormas			2 Pokmas / Ormas	242.191.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Pokmas / Ormas	250.000.000,00	KECAMATAN MALILI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	18.771.500,00						-	21.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	-	100 %			-	14.042.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	16.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	400 Laporan			4 Laporan	11.454.700,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	400 Laporan			4 Laporan	2.587.800,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	4.729.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	5.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14 Laporan			4 Laporan	4.729.000,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MALILI
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	56.038.300,00						-	65.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	56.038.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	65.000.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	500 Dokumen			12 Dokumen	56.038.300,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Dokumen	65.000.000,00	KECAMATAN MALILI
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	20.666.500,00					-	-	25.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	20.666.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 %	25.500.000,00	KECAMATAN MALILI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan			4 Laporan	20.666.500,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Laporan	25.500.000,00	KECAMATAN MALILI
		KECAMATAN WASUPONDA						2.924.336.400,00							3.071.513.650,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.924.336.400,00							3.071.513.650,00	
	7.01	KECAMATAN						2.924.336.400,00							3.071.513.650,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.709.847.600,00					-	-	2.898.451.350,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	48.880.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	53.932.950,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	24.452.950,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	6.600.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			13 Laporan	18.380.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	18.380.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.026.419.600,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.103.619.400,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan			26 Orang/bulan	2.002.119.600,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	17 Orang/bulan	2.078.319.400,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			19 Laporan	24.300.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	25.300.000,00	KECAMATAN WASUPONDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	17.458.000,00			-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	13.800.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			7 Laporan	17.458.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	13.800.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	39.160.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	49.180.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			17 Dokumen	7.169.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			4 Orang	31.991.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Orang	40.680.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	227.986.900,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	296.473.900,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			20 Paket	8.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	14 Paket	9.500.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			20 Paket	12.073.900,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Paket	12.073.900,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			6 Paket	9.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			24 Dokumen	2.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Dokumen	2.900.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3100 Laporan			2500 Laporan	93.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3100 Laporan	113.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan			950 Laporan	102.113.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	650 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	45.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	56.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit			6 Unit	45.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	56.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	215.653.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	238.505.100,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan			1000 Laporan	12.095.100,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	800 Laporan	12.095.100,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	57.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Laporan	69.310.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			12 Laporan	8.700.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	8.700.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			12 Laporan	137.258.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Laporan	148.400.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	89.290.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	86.940.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit			8 Unit	46.640.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Unit	46.640.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit			26 Unit	22.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	29 Unit	15.300.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	11.240.000,00						-	6.700.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	11.240.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	6.700.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen			6 Dokumen	11.240.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	40 Dokumen	6.700.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	123.204.000,00						-	84.124.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	123.204.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	84.124.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	160 Lembaga Masyarakat			8 Lembaga Masyarakat	20.884.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	160 Lembaga Masyarakat	15.964.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42 Laporan			12 Laporan	102.320.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	42 Laporan	68.160.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	29.785.300,00					-	-	30.773.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 %			-	18.501.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	19.490.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan			12 Laporan	5.531.500,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	6.520.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan			12 Laporan	12.970.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	12.970.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	11.283.800,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	11.283.800,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan			12 Laporan	11.283.800,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	11.283.800,00	KECAMATAN WASUPONDA
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	35.020.500,00					-	-	35.020.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	35.020.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	35.020.500,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	35.020.500,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	35.020.500,00	KECAMATAN WASUPONDA
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	15.239.000,00					-	-	16.444.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	15.239.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	16.444.000,00	KECAMATAN WASUPONDA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
											NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen			12 Dokumen	5.315.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	6.520.000,00	KECAMATAN WASUPONDA							
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6 Laporan			12 Laporan	9.924.000,00	Kab. Luwu Timur, Wasuponda, Wasuponda	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	6 Laporan	9.924.000,00	KECAMATAN WASUPONDA							
		KECAMATAN TOWUTI																					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
								4.012.968.600,00															
	7	KECAMATAN																					
	7.01	KECAMATAN																					
								1.416.191.540,00															
	7.01	KECAMATAN																					
								1.416.191.540,00															
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100 %			100 %	1.136.720.950,00						100 %	1.124.518.927,00								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %			100 %	67.662.900,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	69.459.827,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	28.973.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	2 Dokumen	29.115.000,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	11.466.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	2 Dokumen	12.767.500,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																					
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	4.789.900,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	2 Dokumen	4.910.000,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan			10 Laporan	22.434.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	10 Laporan	22.667.327,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	43.646.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	44.646.500,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan			16 Laporan	43.646.500,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	16 Laporan	44.646.500,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	22.978.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	21.273.500,00	KECAMATAN TOWUTI							
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	22.978.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	21.273.500,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	112.091.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	74.973.800,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket			1 Paket	56.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	38 Paket	14.500.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen			12 Dokumen	20.106.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	23.513.800,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			5 Orang	35.385.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	36.960.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	351.221.250,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	373.528.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			1 Paket	14.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Paket	14.500.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	14.432.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Langkae Araya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Paket	14.735.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	16.041.250,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	19.458.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14950 Laporan			4 Laporan	110.730.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3,000 Laporan	127.235.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1660 Laporan			4 Laporan	195.518.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	320 Laporan	197.600.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	126.500.000,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	139.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit			3 Unit	19.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	19.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	107.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	300.011.300,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	294.857.300,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan			4 Laporan	29.139.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	29.144.800,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan			4 Laporan	71.999.300,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	72.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan			4 Laporan	8.312.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	8.312.500,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan			4 Laporan	190.560.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	185.400.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	112.610.000,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	106.780.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	75.830.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		70.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit			29 Unit	16.780.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	29 Unit	16.780.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		20.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100 %			100 %	44.261.100,00						100 %	43.884.700,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %			100 %	44.261.100,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	43.884.700,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	20 Dokumen			12 Dokumen	44.261.100,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	4 Dokumen	43.884.700,00	KECAMATAN TOWUTI
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100 %			100 %	137.469.400,00						100 %	138.951.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 %			100 %	137.469.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	138.951.400,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kecamatan			5 Lembaga Kecamatan	23.078.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	5 Lembaga Kecamatan	24.560.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55 Laporan			4 Laporan	114.391.400,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	11 Laporan	114.391.400,00	KECAMATAN TOWUTI
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100 %			100 %	37.441.990,00						100 %	37.442.090,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %			100 %	27.047.550,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	27.047.650,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan			4 Laporan	12.546.850,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	4 Laporan	12.546.850,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20 Laporan			4 Laporan	14.500.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	4 Laporan	14.500.800,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100 %			100 %	10.394.440,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	10.394.440,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan			4 Laporan	10.394.440,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	4 Laporan	10.394.440,00	KECAMATAN TOWUTI
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100 %			100 %	40.449.200,00						100 %	42.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %			100 %	40.449.200,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	42.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	55 Dokumen			11 Dokumen	40.449.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	11 Dokumen	42.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100 %			100 %	19.848.900,00						100 %	19.849.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %			100 %	19.848.900,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	100 %	19.849.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	180 Dokumen			36 Dokumen	8.998.900,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	36 Dokumen	8.999.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20 Laporan			4 Laporan	10.850.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	ASN Kecamatan Towuti	4 Laporan	10.850.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	X	NON URUSAN						2.596.777.060,00							2.520.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.596.777.060,00							2.520.000.000,00	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.596.777.060,00					-		2.520.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.596.777.060,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.520.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2.596.777.060,00	Kab. Luwu Timur, Towuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	25 Orang/bulan	2.520.000.000,00	KECAMATAN TOWUTI
		KECAMATAN NUHA						4.247.190.250,00							4.065.471.955,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.247.190.250,00							4.065.471.955,00	
	7.01	KECAMATAN						4.247.190.250,00							4.065.471.955,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.843.727.558,00					-		3.732.966.563,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	44.385.300,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	56.529.900,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	21.859.900,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	24.529.900,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.828.100,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		7.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	2.684.900,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	16.012.400,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.791.509.458,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.651.473.263,00	KECAMATAN NUHA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan			23 Orang/bulan	2.766.549.458,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	23 Orang/bulan	2.626.513.263,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	24.960.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Laporan	24.960.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	21.174.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	22.314.500,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	21.174.500,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	22.314.500,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	69.562.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	87.900.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	6.750.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		11.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			12 Dokumen	24.478.400,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	28.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang			7 Orang	38.334.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Orang	48.900.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	459.122.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	472.866.600,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	7.576.800,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Paket	7.577.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	6.597.500,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Paket	6.597.500,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket			15 Paket	9.279.550,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	15 Paket	9.181.650,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	21.349.650,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Paket	21.406.450,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			4 Dokumen	10.920.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8596 Laporan			12 Laporan	180.130.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8596 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806 Laporan			12 Laporan	223.269.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	806 Laporan	170.604.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.600.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	-	40.600.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		4.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		36.600.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	355.203.400,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	345.072.300,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan			12 Laporan	27.953.400,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1500 Laporan	17.822.300,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	60.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	48 Laporan	60.250.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan			12 Laporan	267.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	32 Laporan	267.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	78.170.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	56.210.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit			9 Unit	42.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	9 Unit	22.600.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			15 Unit	9.360.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Unit	6.900.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			2 Unit	20.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			11 Unit	6.710.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Unit	6.710.000,00	KECAMATAN NUHA
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	15.133.000,00						-	8.812.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100 %			-	15.133.000,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	8.812.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen			12 Dokumen	15.133.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	8.812.000,00	KECAMATAN NUHA
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	319.383.942,00						-	240.814.492,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100 %			-	119.383.942,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	106.814.492,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan	21.417.850,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	20 Lembaga Kemasyarakatan	21.525.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan			4 Laporan	97.966.092,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	35 Laporan	85.289.492,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 %			-	200.000.000,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	134.000.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Pokmas / Ormas	134.000.000,00	KECAMATAN NUHA
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	20.929.500,00						-	24.550.700,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	100 %			-	14.769.700,00			-	01. Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	16.620.500,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			4 Laporan	8.554.150,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Laporan	9.504.300,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan			4 Laporan	6.215.550,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Laporan	7.116.200,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	100 %			-	6.159.800,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	7.930.200,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan			4 Laporan	6.159.800,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Laporan	7.930.200,00	KECAMATAN NUHA
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	35.263.050,00					-	-	43.650.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100 %			-	35.263.050,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	43.650.000,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	35.263.050,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Dokumen	43.650.000,00	KECAMATAN NUHA
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	12.753.200,00					-	-	14.678.200,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100 %			-	12.753.200,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	14.678.200,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen			4 Dokumen	3.044.500,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	8 Dokumen	4.969.500,00	KECAMATAN NUHA
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			12 Laporan	9.708.700,00	Kab. Luwu Timur, Nuha, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	9.708.700,00	KECAMATAN NUHA
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8.408.877.877,00							9.915.100.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						8.408.877.877,00							9.915.100.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8.408.877.877,00							9.915.100.000,00	
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.540.784.046,00					-	-	3.910.100.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	96.646.303,00			-	01.Peningk atatan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	147.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			3 Dokumen	43.211.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	3 Dokumen	78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.843.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	4.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.843.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	4.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan			10 Laporan	41.748.803,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	10 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	2.229.628.440,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	2.210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			17 Orang/bulan	2.158.348.940,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Orang/bulan	2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan			18 Laporan	71.279.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	18 Laporan	110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	12.488.500,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	12.488.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	146.495.803,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			29 Paket	57.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Paket	22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			4 Dokumen	46.484.803,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang			6 Orang	42.811.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	19 Orang	51.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	581.650.000,00			-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	726.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	20.270.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			14 Paket	137.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Paket	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	8.608.600,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	13.900.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Paket	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			4 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	60 Dokumen	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan			4 Laporan	13.200.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	380.131.400,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	283.670.000,00			-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	445.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	67.320.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	125.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit			41 Unit	100.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Pening atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	11 Unit	120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit			3 Unit	32.100.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	7 Unit	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	83.450.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	0 Unit	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	104.455.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	127.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	1.795.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			4 Laporan	43.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	24 Laporan	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	59.160.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Laporan	76.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	85.750.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	100 %	111.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			4 Unit	24.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	5 Unit	28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			47 Unit	36.250.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	50 Unit	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	12.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	13.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	1 Unit	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.806.052.500,00					-	-	2.700.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	95 %			-	1.806.052.500,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	95 %	2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Selaras Kebangsaan	200 Orang			125 Orang	66.928.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	200 Orang	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				74 Orang	1.739.124.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-		2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	1.101.105.231,00						-	1.230.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Relevan	-	95 persen			-	1.101.105.231,00			-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	95 persen	1.230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Relevan	2 Dokumen			1 Dokumen	84.524.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	2 Dokumen	170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Relevan	30 Orang			86 Orang	957.553.231,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	30 Orang	990.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Relevan	4 Laporan			4 Laporan	59.028.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggara n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6) Memper kuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mew ujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	4 Laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	102.096.000,00						-	190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	110 unit			-	102.096.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	110 unit	190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan			4 Laporan	102.096.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	4 Laporan	190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	608.511.000,00						-	730.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	95 %			-	608.511.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	95 %	730.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang			400 Orang	608.511.000,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	200 Orang	730.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.250.329.100,00						-	1.155.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	95 %			-	1.250.329.100,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	95 %	1.155.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang			464 Orang	209.680.100,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	200 Orang	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan			4 Laporan	36.980.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6) Memperkuat Toleransi Umat Beragama dan Nilai Budaya untuk Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif	-	4 Laporan	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1.003.668.500,00	Kab. Luwu Timur, Malli, Puncuk Indah	PENDAPATAN ASLI-DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-		930.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H							2.038.991.884.650,00								1.809.025.699.198,00	

Sumber Data: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/laporan>